



**PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 9 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA SOLOK TAHUN 2016-2021**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2017**



**WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 3 TAHUN
2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2016-2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya kelembagaan perangkat daerah Pemerintah Kota Solok melalui Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Solok maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok Tahun 2016-2021 sebagai salah satu dokumen perencanaan daerah, perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2010 Nomor 01);
22. Peraturan Daerah Kota Solok Tahun Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2012 Nomor 13);
23. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK
dan
WALIKOTA SOLOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 3), diubah sebagai berikut :

1. Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Gambaran Umum Kondisi Daerah
BAB III	Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan
BAB IV	Analisis Isu-Isu Strategis
BAB V	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
BAB VI	Strategi dan Arah Kebijakan
BAB VII	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
BAB VIII	Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
BAB IX	Penetapan Indikator Kinerja Daerah
BAB X	Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

- (2) Beberapa ketentuan dalam dokumen RPJMD Tahun 2016-2021, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
Pada Tanggal 15 Desember 2017

WALIKOTA SOLOK,



ZUL ELPAN

Diundangkan di Solok
Pada Tanggal 15 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,



RUSDianto

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2017 NOMOR 9

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK, PROVINSI SUMATERA BARAT:
(9 /2017)

**PENJELASAN
ATAS
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA SOLOK TAHUN 2016 – 2021**

I. UMUM

Perubahan regulasi perencanaan pembangunan pemerintah pusat diawali dengan terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menjadi dasar untuk dilakukannya perubahan terhadap Perda Nomor 3 Tahun 2016 Kota Solok Tahun 2016-2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok Tahun 2016-2021.

Rancangan Perda Perubahan RPJMD Kota Solok Tahun 2016-2021 pada prinsipnya menyesuaikan dan mensinkronkan materi di masing-masing Bab meliputi :

1. Bab I Pendahuluan (menyesuaikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan);
2. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah (menyesuaikan data);
3. Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan (penyesuaian kapasitas riil pendanaan dan revisi target pendapatan);
4. Bab IV Analisis Isu-Isu Strategis (menyesuaikan analisis isu-isu strategis dan penambahan sub bab keterkaitan dengan dokumen lainnya);
5. Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (menyesuaikan indikator dan target indikator sasaran);
6. Bab VI Strategi dan Arah Kebijakan (menyesuaikan arah kebijakan dengan sasaran yang akan dicapai dan perubahan nomenklatur Perangkat Daerah berdasarkan pembagian urusan pemerintahan);
7. Bab VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah (menyesuaikan kebijakan Umum dan program Pembangunan daerah dengan Perangkat Daerah baru);
8. Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan (menyesuaikan program indikator dan target prioritas pembangunan tahun 2017-2021);
9. Bab IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah (menyesuaikan dan menajamkan indikator dengan penyesuaian target prioritas pembangunan Tahun 2017-2021);
10. Bab X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.

Khusus untuk tahun 2016 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 masih berlaku. Perubahan tersebut difokuskan untuk melakukan penajaman tujuan, sasaran dan target yang akan dicapai dalam tahun 2017 sampai tahun 2021.

Perubahan RPJMD Kota Solok Tahun 2016-2021 sebagai dokumen perencanaan kebijakan pembangunan tahun 2017-2021 pada prinsipnya menjadi dasar dalam merumuskan visi dan misi kedalam tujuan dan target sasaran yang akan dicapai pada periode tahun 2017-

2021. RPJMD ini juga menjadi pedoman dan sekaligus menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK
TAHUN 2017 NOMOR 9

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA SOLOK
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH (RPJMD) KOTA SOLOK TAHUN
2016 – 2021**

DAFTAR ISI

	Hal
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I 2
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I 4
1.4. Sistematika Penyusunan	1 5
1.5. Maksud dan Tujuan	1 6
 BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	II
A. Geografis	II
B. Demografis	II 5
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II 8
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II 8
A. Indeks Pembangunan Manusia.....	II 8
B. Pertumbuhan Ekonomi	II 9
C. Pertumbuhan PDRB	II 10
D. Inflasi	II 14
E. PDRB per Kapita	II 15
F. Ketimpangan Pendapatan	II 15
G. Tingkat Kemiskinan	II 16
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial	II 18
A. Pendidikan	II 18
B. Kesehatan	II 20
C. Kesempatan Kerja (Rasio Penduduk yang Bekerja)	II 22
2.2.3. Fokus Seni, Budaya, dan Olahraga	II 22
2.3. Aspek Pelayanan Umum	II 23
2.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	II 23
1. Pendidikan	II 23
2. Kesehatan	II 27
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II 40
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	II 45
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	II 49
6. Sosial	II 51
2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	II 54
1. Tenaga Kerja	II 54
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II 56
3. Pangan	II 57
4. Pertanahan	II 59
5. Lingkungan Hidup	II 60
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II 62
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II 63
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II 66
9. Perhubungan	II 66
10. Komunikasi dan Informatika	II 68
11. Koperasi dan UKM	II 70
12. Penanaman Modal	II 72
13. Kepemudaan dan Olahraga	II 73



14. Statistik	II 74
15. Persandian	II 75
16. Kebudayaan	II 75
17. Perpustakaan	II 76
18. Kearsipan	II 77
2.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan	II 78
1. Kelautan dan Perikanan	II 78
2. Pariwisata	II 79
3. Pertanian	II 79
4. Energi dan Sumber Daya Mineral	II 81
5. Perdagangan	II 81
6. Perindustrian	II 82
2.3.4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah	II 84
1. Administrasi Pemerintahan	II 84
2. Pengawasan	II 88
3. Perencanaan	II 89
4. Keuangan.....	II 90
5. Kepegawaian.....	II 92
6. Pendidikan dan Pelatihan.....	II 93
7. Penelitian dan Pengembangan	II 94
2.4. Aspek daya Saing Daerah	II 94
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II 94
2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II 95
a. Aksesibilitas Daerah	II 96
b. Penataan Wilayah	II 96
c. Ketersediaan Air Bersih	II 98
d. Fasilitas Listrik dan Telepon	II 99
e. Ketersediaan Fasilitas Perdagangan dan Jasa	II 99
2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi	II 99
a. Promosi Investasi	II 100
b. Stabilitas politik dan Keamanan	II 100
c. Birokrasi Perizinan	II 101
d. Pajak serta Retribusi Daerah	II 102
2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia	II 103
2.4.4.1. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)	II 103
2.4.4.2. Tingkat ketergantungan (Rasio Ketergantungan)	II 103

BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu	III
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD	III
A. Kinerja Pendapatan Daerah	III
B. Belanja Daerah	III 11
C. Kinerja Pembiayaan	III 14
3.1.2. Neraca Daerah	III 14
3.2. Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III 20
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran	III 20
3.2.2. Analisis Pembiayaan	III 21
3.3. Kerangka Pendanaan	III 23
3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama	III 23
3.3.2. Capaian Kinerja Urusan	III 26



3.3.3. Proyeksi Pendapatan , Belanja Tahun 2016-2021.....	III 27
BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS	IV
4.1. Permasalahan Pembangunan	IV
4.2. Isu Strategis	IV 3
4.3. Keterkaitan dengan dokumen lainnya	IV 6
4.3.1. Rencana Tata Ruang Kota Solok Tahun 2012-2031	IV 6
4.3.2. Pembangunan Daerah Tahap III (2016-2021) dalam RPJPD Kota Solok Tahun 2005-2025	IV 17
4.3.3. RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021	IV 19
4.3.4. Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019	IV 20
BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V
5.1. Visi	V
5.2. Misi	V 2
5.3. Tujuan dan Sasaran.....	V 3
BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	VI
BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VII
BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN	VIII
BAB IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH	IX
BAB X. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN	X
10.1. Pedoman Transisi	X
10.2. Kaidah Pelaksanaan	X
10.3. Pengendalian dan Evaluasi.....	X 2





DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1. Luas Wilayah Kota Solok Menurut Kecamatan dan Kelurahan	II 1
Tabel 2.2. Luas Kota Solok menurut Kelerengan.....	II 2
Tabel 2.3. Luas Kota Solok Menurut Ketinggian	II 2
Tabel 2.4. Luas Tingkat Kerentanan Gempa Bumi Kota Solok	II 5
Tabel 2.5. Jumlah Penduduk Kota Solok tahun 2010 – 2015	II 6
Tabel 2.6. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Solok Tahun 2010 dan 2015	II 7
Tabel 2.7. Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Solok Tahun 2010-2015	II 8
Tabel 2.8. Indeks Pembangunan Manusia Kota Solok Tahun 2010-2015.....	II 8
Tabel 2.9. Nilai PDRB Kota Solok Tahun 2010-2015 (juta rupiah)	II 11
Tabel 2.10. Pertumbuhan PDRB Kota Solok Menurut Lapangan Usaha (ADHK 2010) Tahun 2010-2015.....	II 12
Tabel 2.11. Persentase Peranan Ekonomi Sektoral PDRB Tahun 2010-2015	II 12
Tabel 2.12. Jumlah Penduduk Miskin & Garis Kemiskinan Tahun 2010-2015 di Kota Solok	II 16
Tabel 2.13. Perkembangan Indikator Pendidikan Kota Solok Tahun 2010 – 2015.....	II 19
Tabel 2.14. Perkembangan AKB dan AKHB Kota Solok Tahun 2010-2015	II 20
Tabel 2.15. Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup Penduduk Kota Solok Tahun 2010-2015	II 21
Tabel 2.16. Prevalensi Gizi Buruk Menurut BB/U dan BB/TB di Kota Solok Tahun 2010-2015	II 21
Tabel 2.17. Kesempatan Kerja Kota Solok Tahun 2010-2015	II 22
Tabel 2.18. Perkembangan Seni Budaya dan Olahraga Kota Solok Tahun 2010-2015.....	II 23
Tabel 2.19. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Solok Tahun 2010-2015	II 24
Tabel 2.20. Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kota Solok Tahun 2010-2015	II 24
Tabel 2.21. Jumlah Guru Terhadap Murid di Kota Solok Tahun 2010-2015	II 25
Tabel 2.22. Angka Putus Sekolah (APTS) di Kota Solok Tahun 2010-2015	II 26
Tabel 2.23. Angka Kelulusan (AL) Kota Solok Tahun 2010 – 2015	II 26
Tabel 2.24. Angka Melanjutkan (AM) Kota Solok Tahun 2010 – 2015	II 27
Tabel 2.25. Kualifikasi Guru Setara S1/DIV Kota Solok Tahun 2010 – 2015	II 27
Tabel 2.26. Capaian Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kota Solok Tahun 2010-2015	II 28
Tabel 2.27. Capaian Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA + di Kota Solok Tahun 2010-2015	II 29
Tabel 2.28. Capaian Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kota Solok Tahun 2010-2015	II 29
Tabel 2.29. Capaian Indikator Penanganan Penyakit Pneumonia, Diare, TB dan HIV/AIDS di Kota Solok Tahun 2010 – 2015	II 30
Tabel 2.30. Capaian Indikator Penyehatan Lingkungan di Kota Solok Tahun 2010-2015..	II 31
Tabel 2.31. Target Dan Capaian Deteksi Dini Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim Kota Solok Kumulatif 2010 s/d 2015	II 32
Tabel 2.32. 10 penyakit Tidak Menular Terbanyak Di Kota Solok tahun 2015	II 32
Tabel 2.33. Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kota Solok Tahun 2010-2015	II 33
Tabel 2.34. Capaian Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kota Solok Tahun 2010-2015	II 33
Tabel 2.35. Capaian Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di Kota Solok Tahun 2010-2015	II 34



Tabel	2.36.	Capaian Cakupan Kunjungan Bayi di Kota Solok Tahun 2010-2015.....	II 34
Tabel	2.37.	Capaian Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Kota Solok Tahun 2010-2015.....	II 35
Tabel	2.38.	Capaian Indikator Pelayanan Kesehatan Anak Balita, Remaja, Dan Lansia di Kota Solok Tahun 2010 – 2015	II 35
Tabel	2.39.	Capaian Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan Di Kota Solok Tahun 2010 – 2015	II 36
Tabel	2.40.	Cakupan Puskesmas Kota Solok Tahun 2010-2015	II 37
Tabel	2.41.	Cakupan Puskesmas Pembantu Kota Solok Tahun 2010-2015.....	II 37
Tabel	2.42.	Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Per Satuan Penduduk di Kota Solok Tahun 2010-2015	II 37
Tabel	2.43.	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk di Kota Solok Tahun 2010-2015	II 38
Tabel	2.44.	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk di Kota Solok Tahun 2010-2015	II 38
Tabel	2.45.	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk di Kota Solok Tahun 2010-2015.....	II 39
Tabel	2.46.	Capaian Cakupan Pelayanan Rujukan Masyarakat Miskin di Kota Solok Tahun 2010-2015.....	II 40
Tabel	2.47.	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Status di Kota Solok Tahun 2015.....	II 40
Tabel	2.48.	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi di Kota Solok Tahun 2010 – 2015.....	II 41
Tabel	2.49.	Jumlah Jembatan Berdasarkan Jenis Konstruksinya di Kota Solok Tahun 2010-2015	II 41
Tabel	2.50.	Penanganan Tebing Sungai di Kota Solok s/d Tahun 2015	II 41
Tabel	2.51.	Luas Daerah Irigasi dan Panjang Saluran Irigasi Kewenangan Kota Solok Tahun 2015	II 42
Tabel	2.52.	Jumlah Advice Planning dan IMB yang Diterbitkan Menurut Kecamatan Tahun 2010-2015.....	II 43
Tabel	2.53.	Jumlah Bangunan yang Memiliki IMB di Kota Solok Tahun 2010-2015	II 44
Tabel	2.54.	Kondisi Bangunan Jaringan Drainase Kota Solok Tahun 2015	II 45
Tabel	2.55.	Jenis Konstruksi Jaringan Drainase Kota Solok Tahun 2015.....	II 45
Tabel	2.56.	Jaringan Drainase Kota Solok Berdasarkan Fungsi Tahun 2015	II 45
Tabel	2.57.	Perkembangan Jumlah Rumah Kota Solok Tahun 2011-2015.....	II 46
Tabel	2.58.	Lokasi Perumahan Dan Pemukiman Kumuh Di Kota Solok Tahun 2014.....	II 47
Tabel	2.59.	Perkembangan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Kota Solok Tahun 2011-2015..	II 48
Tabel	2.60.	Panjang dan Kondisi Jalan Lingkungan dan Saluran Lingkungan Kota Solok Tahun 2015.....	II 48
Tabel	2.61.	Jumlah Kasus Pekat yang Terjadi Tahun 2010-2015.....	II 49
Tabel	2.62.	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun 2010-2015	II 49
Tabel	2.63.	Rasio Petugas Linmas per-RT Tahun 2010-2015	II 50
Tabel	2.64.	Capaian Indikator Kinerja Pelayanan Bencana Kebakaran Tahun 2010-2015.....	II 51
Tabel	2.65.	Penyandang Masalah Kesejahteraan Kota Solok Tahun 2010 – 2015.....	II 51
Tabel	2.66.	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Memperoleh Bantuan Sosial dan Yang Tertangani di Kota Solok Tahun 2010 – 2015.....	II 53
Tabel	2.67.	Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Pemerintah Daerah Kota Solok Tahun 2010-2015	II 54
Tabel	2.68.	Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha di Kota Solok Tahun 2010-2015	II 55
Tabel	2.69.	Persentase Pekerja Perempuan, Rasio KDRT dan Penyelesaian Kasus Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Solok Tahun 2010 – 2015	II 56
Tabel	2.70.	Ketersediaan Pangan Tahun 2010 s/d 2015.....	II 57



Tabel	2.71.	Ketersediaan Energi dan Protein Tahun 2010 s/d 2015	II 58
Tabel	2.72.	Skor Pola Pangan Harapan Kota Solok tahun 2010 s/d 2015	II 58
Tabel	2.73.	Luas Tanah Fasum dan Tanah Fasos dari Hasil Advice Planning yang Diajukan Masyarakat Tahun 2010-2015	II 59
Tabel	2.74.	Hasil Pemantauan Kualitas Air Sungai Bt. Lembang Tahun 2010-2015	II 60
Tabel	2.75.	Pengukuran Kualitas Udara Ambien Tahun 2010 – 2015	II 60
Tabel	2.76.	Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Solok Tahun 2010 – 2015	II 61
Tabel	2.77.	Jumlah Timbulan dan Sampah Terangkat Tahun 2010-2015	II 61
Tabel	2.78.	Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	II 62
Tabel	2.79.	Perkembangan Capaian Indikator Penyelenggaraan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Solok Tahun 2010-2015	II 62
Tabel	2.80.	Rata – Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Solok Tahun 2010 – 2015.....	II 64
Tabel	2.81.	Rata – rata jumlah kelompok binaan PKK Kelurahan Tahun 2010 – 2015 Kota Solok.....	II 64
Tabel	2.82.	PKK Aktif Kota Solok Tahun 2010 – 2015.....	II 65
Tabel	2.83.	Posyandu Aktif Kota Solok Tahun 2010 – 2015.....	II 65
Tabel	2.84.	Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2010 – 2015 Kota Solok	II 65
Tabel	2.85.	Capaian Keberhasilan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Di Kota Solok Tahun 2010 – 2015.....	II 66
Tabel	2.86.	Jumlah Prasarana Perhubungan di Kota Solok Tahun 2016	II 66
Tabel	2.87.	Jumlah Sarana Perhubungan di Kota Solok Tahun 2016	II 67
Tabel	2.88.	Jumlah dan Jenis Angkutan di Kota Solok Tahun 2010-2015	II 67
Tabel	2.89.	Jumlah Izin Trayek Tahun 2010-2015.....	II 67
Tabel	2.90.	Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2010-2015.....	II 68
Tabel	2.91.	Jumlah Sarana Komunikasi dan Informatika Kota Solok Periode 2010-2015.....	II 68
Tabel	2.92.	Perkembangan Koperasi Kota Solok Tahun 2010-2015.....	II 70
Tabel	2.93.	Perkembangan BPR Kota Solok Tahun 2010-2015.....	II 71
Tabel	2.94.	Perkembangan UKM di Kota Solok 2010-2015	II 72
Tabel	2.95.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil Kota Solok Tahun 2010-2015	II 72
Tabel	2.96.	Rekapitulasi Pertumbuhan Nilai Investasi di Kota Solok Tahun 2010-2015.....	II 72
Tabel	2.97.	Indikator Fokus Layanan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kota Solok Tahun 2010 – 2015.....	II 73
Tabel	2.98.	Hasil Kinerja Urusan Statistik Pemerintah Kota Solok Periode 2011-2015.....	II 74
Tabel	2.99.	Indikator Fokus Layanan Urusan Kebudayaan Kota Solok Tahun 2010-2015.....	II 76
Tabel	2.100.	Hasil Kinerja Urusan Perpustakaan Pemerintah Kota Solok Periode 2010 -2015	II 77
Tabel	2.101.	Jumlah SKPD yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku Tahun 2010-2015	II 78
Tabel	2.102.	Jumlah Tenaga Fungsional Arsiparis dari Tahun 2010-2015.....	II 78
Tabel	2.103.	Jumlah Rak Penyimpanan Arsip dari Tahun 2010-2015	II 78
Tabel	2.104.	Capaian Kinerja Urusan Perikanan tahun 2010-2015	II 78
Tabel	2.105.	Angka Kunjungan Wisata di Kota Solok Tahun 2010-2015	II 79
Tabel	2.106.	Perkembangan Indikator Capaian Pembangunan Pertanian di Kota Solok Tahun 2010-2015.....	II 80



Tabel	2.107.	Jumlah Pangkalan, Agen dan SPBU di Kota Solok Tahun 2010 -2015.....	II 81
Tabel	2.108.	Perkembangan Sektor Perdagangan di Kota Solok Tahun 2010-2015	II 81
Tabel	2.109.	Sarana Perdagangan/Niaga Kota Solok Tahun 2015.....	II 82
Tabel	2.110.	Perkembangan Industri Kota Solok Tahun 2010-2015	II 83
Tabel	2.111.	Perkembangan IKM di Kota Solok 2010-2015.....	II 83
Tabel	2.112.	Hasil Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kota Solok Periode 2010-2015	II 85
Tabel	2.113.	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Kota Solok Tahun 2011-2015	II 85
Tabel	2.114.	Produk Hukum yang Dihasilkan Selama 2010-2015	II 86
Tabel	2.115.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pemerintahan Kota Solok Tahun 2011-2016	II 86
Tabel	2.116.	Capaian Indikator kinerja urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2010-2015	II 87
Tabel	2.117.	Kualifikasi Pengawas Interen Kota Solok Tahun 2010-2015	II 88
Tabel	2.118.	Kinerja Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kota Solok Periode 2010-2015	II 90
Tabel	2.119.	Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Defisit pada APBD tahun 2010-2015.....	II 91
Tabel	2.120.	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah (EKPD) Tahun 2011-2015.....	II 92
Tabel	2.121.	Komposisi Pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Solok berdasarkan Pendidikan Tahun 2010-2015.....	II 93
Tabel	2.122.	Komposisi Pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Solok berdasarkan Jabatan Struktural (Eselon) 2010-2015	II 93
Tabel	2.123.	Komposisi Pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Solok yang telah Mengikuti diklat kepemimpinan tahun 2010-2015	II 94
Tabel	2.124.	Rata-rata Pengeluaran per-Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas di Kota Solok Tahun 2010 -2015.....	II 95
Tabel	2.125.	Rata-rata Produktivitas Total Daerah Tahun 2010 -2015.....	II 95
Tabel	2.126.	Jumlah Angkutan Umum kota Solok Tahun 2010 – 2015.....	II 96
Tabel	2.127.	Perkembangan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Kota Solok Tahun 2010 – 2015	II 98
Tabel	2.128.	Perkembangan Rumah Tangga Pengguna Listrik Kota Solok Tahun 2010 – 2015.....	II 99
Tabel	2.129.	Angka Kriminalitas di Kota Solok Tahun 2010-2015.....	II 101
Tabel	2.130	Lama Proses Dan Biaya Perizinan Di Kota Solok pada Tahun 2014	II 101
Tabel	2.131.	Jumlah Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Di Kota Solok Tahun 2010 – 2015 (Juta Rupiah)	II 102
Tabel	2.132.	Perkembangan Rasio lulusan S1/S2/S3 Kota Solok Tahun 2010 – 2015.....	II 103
Tabel	2.133.	Rasio Ketergantungan Kota Solok Tahun 2010- 2015	II 104
Tabel	3.1.	Perkembangan Jumlah Pendapatan Kota Solok Tahun 2010 – 2015.....	III 3
Tabel	3.2.	Kontribusi Masing-Masing Jenis Pajak Daerah Kota Solok Tahun 2011-2015.....	III 6
Tabel	3.3.	Perkembangan Kontribusi Sumber Pendapatan Daerah Kota Solok Tahun 2010 – 2015 (%)	III 8
Tabel	3.4.	Perbandingan Realisasi dan Anggaran Pendapatan Daerah Kota Solok Tahun 2010 – 2015 (%)	III 10
Tabel	3.5.	Perkembangan Jumlah Belanja Daerah Kota Solok Tahun 2010 – 2015.....	III 12
Tabel	3.6.	Perkembangan Proporsi Belanja Daerah Kota Solok Tahun 2010 – 2015 (%).....	III 13
Tabel	3.7.	Perkembangan Jumlah Pembiayaan Daerah Kota Solok Tahun 2010– 2015.....	III 14



Tabel	3.8.	Perkembangan Neraca Kota Solok Tahun 2010 – 2015	III 16
Tabel	3.9.	Rasio Keuangan Kota Solok Tahun 2010 – 2015	III 20
Tabel	3.10.	Perkembangan Proporsi Belanja Aparatur Kota Solok Tahun 2010 – Tahun 2015...	III 21
Tabel	3.11.	Perkembangan Difisit Riil Kota Solok Tahun 2010 – Tahun 2015	III 22
Tabel	3.12.	Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Kota Solok Tahun 2010 – Tahun 2015	III 22
Tabel	3.13.	Perkembangan Realisasi SILPA Kota Solok Tahun 2010 – Tahun 2015	II 23
Tabel	3.14.	Perkembangan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Solok Tahun 2013 – Tahun 2015	II 25
Tabel	3.15.	Perkembangan Jumlah Belanja Per Urusan Kota Solok Tahun 2010-Tahun 2015	II 26
Tabel	3.16.	Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Solok Tahun 2016– 2021	II 29
Tabel	3.17.	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Kota Solok Tahun 2017 – Tahun 2021	III 33
Tabel	3.18.	Proyeksi Belanja Daerah Kota Solok Tahun 2016– 2021.....	III 35
Tabel	5.1.	Keterkaitan Visi dan Misi Daerah	V 2
Tabel	5.2.	Proyeksi Perkembangan Ekonomi Kota Solok Tahun 2016-2021.....	V 3
Tabel	5.3.	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Solok	V 4
Tabel	5.4.	Target dan Indikator Kinerja RPJMD Kota Solok Tahun 2016-2021 (Misi I)	V 6
Tabel	5.5.	Target dan Indikator Kinerja RPJMD Kota Solok Tahun 2016-2021 (Misi II)	V 8
Tabel	5.6.	Target dan Indikator Kinerja RPJMD Kota Solok Tahun 2016-2021 (Misi III)	V 10
Tabel	5.7.	Target dan Indikator Kinerja RPJMD Kota Solok Tahun 2016-2021 (Misi IV)	V 12
Tabel	5.8.	Target dan Indikator Kinerja RPJMD Kota Solok Tahun 2016-2021 (Misi V)...	V 16
Tabel	5.9.	Target dan Indikator Kinerja RPJMD Kota Solok Tahun 2016-2021 (Misi VI)	V 18
Tabel	6.1.	Strategi dan Arah Kebijakan Kota Solok	VI 2
Tabel	7.1.	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Solok	VII 2
Tabel	8.1.	Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Solok	VIII
Tabel	9.1.	Indikator Kinerja Utama	IX 1
Tabel	9.2.	Indikator Kinerja Daerah Kota Solok	IX 3



DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar	1.1. Pola Hubungan Dokumen RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I 4
Gambar	2.1. Penggunaan Lahan Perumahan, Sawah dan Hutan Tahun 2012 – 2015	II 4
Gambar	2.2. Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Solok Tahun 2010-2015	II 6
Gambar	2.3. Perbandingan IPM Kota Solok dengan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2014.....	II 9
Gambar	2.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Kota Solok Tahun 2010-2015	II 10
Gambar	2.5. PDRB Kota Solok Tahun 2010-2015	II 11
Gambar	2.6. Perkembangan dan Kecenderungan Inflasi di Kota Solok	II 14
Gambar	2.7. Perkembangan PDRB Perkapita Kota Solok Tahun 2010-2015	II 15
Gambar	2.8. Index Gini Kota Solok Tahun 2010-2015	II 16
Gambar	2.9. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Solok Tahun 2010-2015.....	II 17
Gambar	2.10. Grafik Persentase Jumlah Advice Planning dan IMB per Kecamatan Tahun 2010-2015.....	II 43
Gambar	2.11. Persentase Bangunan yang Memiliki IMB Tahun Per Kecamatan	II 44
Gambar	2.12. Persentase Bangunan yang Memiliki IMB Tahun 2010-2015	II 44
Gambar	2.13. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kota Solok	II 52
Gambar	2.14. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Solok dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015.....	II 55
Gambar	2.15. Luas Tanah Fasum dan Fasos Tahun 2010 – 2015.....	II 59
Gambar	2.16. Perkembangan Industri di Kota Solok Tahun 2010 – 2015 (Dalam unit)	II 84
Gambar	2.17. Rata-rata Distribusi Persentase Pendapatan Daerah Tahun 2011-2015.....	II 91
Gambar	3.1. Kontribusi Masing-Masing Jenis Pajak Daerah Kota Solok Tahun 2011-2015.....	III 6
Gambar	6.1. Relasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan	VI



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 mengamankan kepada daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Selanjutnya berdasarkan pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dinyatakan bahwa Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Untuk itu, Walikota dan Wakil Walikota setelah dilantik telah menyusun, menyampaikan, melakukan pembahasan dan menyepakati bersama DPRD dalam bentuk Peraturan Daerah No.3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok Tahun 2016-2021. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat pagu indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD disusun mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang merupakan kelanjutan dan kesinambungan dari periode Tahun 2010-2015.

Dasar hukum penyusunan RPJMD tersebut di atas antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dan sambil menunggu ditetapkannya berbagai peraturan perundang-undangan sebagai petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dimaksud, maka Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran Nomor 050/795/SJ Tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun 2017, yang menyatakan bahwa daerah yang telah melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015, diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perodesasi 2016-2021 dengan mempedomani Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam proses pembahasan dan penetapan dokumen RPJMD Kota Solok Tahun 2016-2021 belum sepenuhnya mempertimbangkan pelimpahan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi, terjadinya perubahan alokasi pendanaan dan belanja, perubahan OPD dan tugas dan fungsi OPD, sebagai akibat terlambatnya penetapan dan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Pembagian Urusan Pemerintahan antar Tingkat Pemerintahan dan Organisasi Perangkat Daerah. Sedangkan penetapan struktur organisasi perangkat daerah Kota Solok dengan Peraturan Daerah No. 5 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah baru ditetapkan pada bulan Oktober Tahun 2016.

Oleh karena terjadinya perubahan kebijakan nasional tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 282 dan 283 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka daerah dapat melakukan perubahan RPJMD dan Perubahan dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Penyusunan dokumen Perubahan RPJMD Kota Solok Tahun 2016-2021 mengacu kepada RPJPD Kota Solok Tahun 2005-2025 dan memperhatikan Draft Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, kondisi lingkungan strategis daerah, dan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Solok Tahun 2016-2021 melalui berbagai tahapan analisis sektoral, penjangkauan aspirasi masyarakat, dialog yang melibatkan stakeholders dan pemangku kepentingan, analisis gambaran umum daerah, analisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan indikatif, perumusan permasalahan pembangunan daerah, hasil analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan, perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah, perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, penetapan indikator kinerja daerah yang dirumuskan secara transparan, responsif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dokumen ini merupakan komitmen dan kehendak bersama dari seluruh pemangku kepentingan di Kota Solok untuk mewujudkan arah dan tindakan untuk mencapai tujuan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Solok Tahun 2016-2021 berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2010 Nomor 01);
21. Peraturan Daerah Kota Solok Tahun Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2012 Nomor 13);



22. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5).

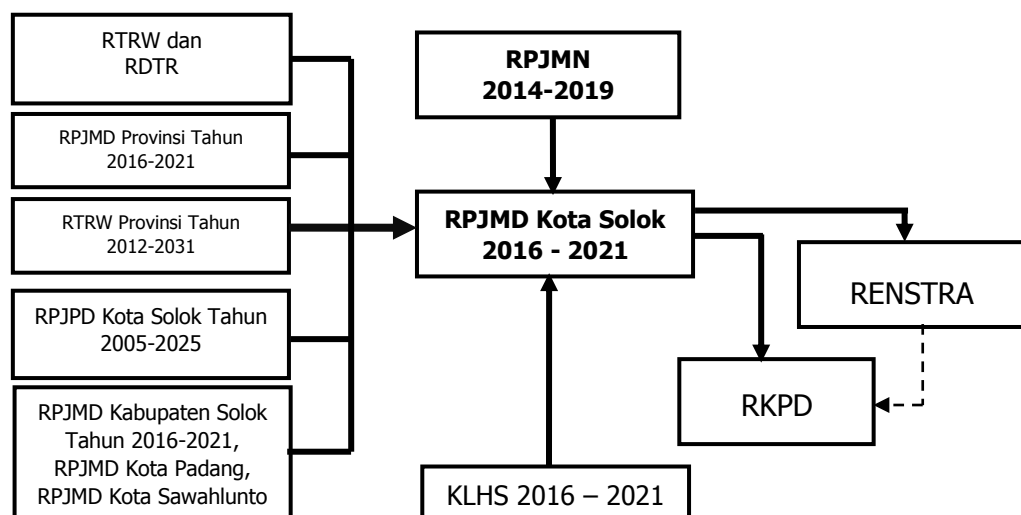
1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2004, maka keberadaan RPJMD Kota Solok Tahun 2016-2021 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Solok khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJPD Kota Solok Tahun 2005-2025 dengan tetap memperhatikan arahan RPJM Nasional Tahun 2014–2019 dan RPJM Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang selanjutnya menjadi kebijakan dan program pembangunan daerah selama satu periode masa jabatan. Penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan dalam dokumen perencanaan disusun berdasarkan pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, perencanaan dan penganggaran terpadu, kerangka pendanaan dan pagu indikatif, urusan wajib dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan urusan pilihan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat daerah. Selanjutnya, untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan, RPJM Daerah sebagai dokumen strategik perlu dijabarkan ke dalam kebijakan taktikal berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Solok, yang akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. RKPD Kota Solok akan menjadi pedoman bagi penyusunan RAPBD Kota Solok.

Hubungan antar dokumen perencanaan dan penganggaran dapat dilihat pada gambar 1.1:

Gambar 1.1 Pola Hubungan Dokumen RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Hubungan antara RPJMD Kota Solok Tahun 2016–2021 dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai berikut :

1. RPJMD Kota Solok Tahun 2016 – 2021 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
2. RPJMD Kota Solok Tahun 2016-2021 berpedoman pada RPJPD Kota Solok Tahun 2005–2025, RTRW Kota Solok Tahun 2012-2031, RDTR Kota Solok Tahun 2016-2021 (dalam proses), RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021, RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032, RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021, RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018, RPJMD Kota Padang Tahun 2014-2019 dan RPJMN Tahun 2015–2019
3. RPJMD Kota Solok Tahun 2016 – 2021 telah diintegrasikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok dan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Solok Tahun 2016 – 2021
4. RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran teknis operasional dari RPJMD ke dalam arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan, bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Pelaksanaan RPJMD Kota Solok Tahun 2016-2021, pada setiap tahunnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

1.4. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Perubahan RPJMD Kota Solok tahun 2016-2021 sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum penyusunan RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Memuat gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah dilakukan pada tahap perumusan ke dalam sub-bab.

BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Memuat berbagai isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.



BAB V. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Solok untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja setiap misi pembangunan.

BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat dan menjelaskan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.

BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam bagian ini diuraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja. Dalam kaitan ini, dijelaskan tentang hubungan antara program pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang dipilih.

BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Memuat hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah. Selain itu, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

BAB IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Memuat indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan wakil Walikota pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah tersebut dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.

BAB X. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN**1.5. Maksud Dan Tujuan**

Perubahan ini dilakukan untuk melaksanakan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap RPJMD tahun 2016-2021 guna memayungi serta memberikan arahan rencana pembangunan jangka menengah bagi pelaku pembangunan yaitu Pemerintah, Swasta dan Masyarakat.

Tujuan Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 sebagai pedoman dalam :

- a. Menetapkan sasaran pembangunan, strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah serta merumuskan program prioritas pembangunan tahun 2017-2021 agar mekanisme perencanaan dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah Kota Solok.
- b. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

A. Geografis

Kota Solok secara geografis terletak pada 0°44'28" – 0°49'12" LS dan 100°32'42" – 100°41'12" BT dengan luas 57,64 km² (5.764 ha) atau hanya 0,14% dari luas Provinsi Sumatera Barat. Bila dibandingkan dengan 7 (tujuh) kota lainnya yang ada di Provinsi Sumatera Barat, luas Kota Solok berada di urutan kelikma setelah Kota Padang, Kota Sawahlunto, Kota Payakumbuh dan Kota Pariaman. Kota Solok terletak pada jalur strategis lintas Sumatera Barat Bagian Timur yang menghubungkan Provinsi Jambi dan Sumatera Utara dengan Kota Padang.

1. Administrasi

Secara Administratif Kota Solok terdiri dari 2 (dua) kecamatan dan 13 (tiga belas) Kelurahan yaitu Kecamatan Lubuk Sikarah yang meliputi wilayah seluas 3.500 ha dengan 7 (tujuh) kelurahan dan Kecamatan Tanjung Harapan seluas 2.264 ha dengan 6 (enam) kelurahan. Untuk lebih jelasnya pembagian wilayah Kota Solok dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Luas Wilayah Kota Solok Menurut Kecamatan dan Kelurahan

No.	Kecamatan / Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)	%
I	Kecamatan Lubuk Sikarah	3.500	60,72
1.	Kelurahan Tanah Garam	2.436	42,26
2.	Kelurahan VI Suku	360	6,25
3.	Kelurahan Sinapa Piliang	64	1,11
4.	Kelurahan IX Korong	150	2,60
5.	Kelurahan KTK	135	2,34
6.	Kelurahan Aro IV Korong	125	2,17
7.	Kelurahan Simpang Rumbio	230	3,99
II	Kecamatan Tanjung Harapan	2.264	39,28
1.	Kelurahan Koto Panjang	21	0,36
2.	Kelurahan PPA	69	1,20
3.	Kelurahan Tanjung Paku	235	4,08
4.	Kelurahan Nan Balimo	759	13,17
5.	Kelurahan Kampung Jawa	365	6,33
6.	Kelurahan Laing	815	14,14
	Total	5.764	100

Sumber : BPS Kota Solok Tahun 2016

Wilayah Kota Solok berbatasan langsung dan dikelilingi oleh nagari-nagari yang berada di wilayah Kabupaten Solok dan sebagian kecil Kota Padang. Batas-batas Kota Solok tersebut adalah sebagai berikut :



- Sebelah Utara : Nagari Tanjung Bingkung dan Nagari Kuncir Kabupaten Solok
 Sebelah : Nagari Gaung, Penyakalan, Koto Baru dan Nagari Selayo Kabupaten Solok
 Selatan : Solok
 Sebelah Barat : Nagari Selayo dan Koto Sani Kabupaten Solok, Nagari Pauh, Koto Tengah Kota Padang
 Sebelah Timur : Nagari Saok Laweh, Guguk Sarai dan Nagari Gaung Kabupaten Solok

2. Topografi

Kota Solok memiliki topografi yang bervariasi dan bergelombang antara dataran dan perbukitan yaitu daerah datar dengan kelerengan 0 – 8% memiliki luas 2.659 ha (46,15%). Daerah – daerah yang memiliki topografi seperti ini terdapat di Kelurahan Koto Panjang, PPA, IX Korong, Aro IV Korong, Sinapa Piliang dan Sebagian kelurahan VI Suku. Daerah bergelombang dengan kelerengan 8 – 15% seluas 1062,13 ha (18,43%) terutama terdapat di Kelurahan KTK, Simpang Rumbio dan Kelurahan Tanjung Paku. Daerah curam dengan kelerengan 15 – 25% seluas 980,5 ha (17,01%) terdapat di Kelurahan Kampung Jawa, sebagian Kelurahan Nan balimo, sebagian Kelurahan Tanah Garam, sebagian Kelurahan VI Suku dan sebagian Tanjung Paku. Sedangkan daerah sangat curam dengan kelerengan 25-40% seluas 955,02 Ha (16,57%) terdapat di sebagian Kelurahan Tanah Garam (Puncak Payo), sebagian Tanjung Paku dan sebagian Kelurahan Laing. Demikian juga daerah yang terjal dengan kelerengan lebih dari 40% juga terdapat di sebagian Kelurahan Tanah Garam (Puncak Payo) dan sebagian Kelurahan Laing. Selengkapnya kondisi kelerengan ini digambarkan pada Tabel 2.2:

Tabel 2.2.
Luas Kota Solok menurut Kelerengan

No	Klasifikasi Lereng	Kelerengan (%)	Lubuk Sikarah		Tjg Harapan		Jumlah	
			(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)
1	Datar	0 – 8	1452	41.49	1207.89	53.35	2659.89	46.15
2	Bergelombang	8 – 15	440.16	12.58	621.97	27.47	1062.13	18.43
3	Curam	15-25	730.77	20.88	249.73	11.03	980.5	17.01
4	Sangat Curam	25-40	776.79	22.19	178.23	7.87	955.02	16.57
5	Terjal	>40	100.28	2.87	6.18	0.27	106.46	1.85
Total				100		100	5764	100

Sumber : RTRW Kota Solok tahun 2012 – 2031

Berdasarkan ketinggian, wilayah Kota Solok berada pada ketinggian antara 400 – 1600 meter di atas permukaan laut yaitu ketinggian antara 100–500 meter di atas permukaan laut seluas 3.366 Ha (58,40%); ketinggian 500–1.000 meter di atas permukaan laut dengan luas wilayah 1.380 Ha (23,94%); ketinggian 1.000–1.500 meter di atas permukaan laut seluas 678 Ha (11,76%) dan daerah pada ketinggian di atas 1.500 meter dari permukaan laut seluas 340 Ha (5,90%).

Tabel 2.3.
Luas Kota Solok Menurut Ketinggian

Nama Kecamatan	Ketinggian (mdpl)							Total
	400	600	800	1000	1200	1400	1600	
Lubuk Sikarah	1.177,68	500,62	322,62	413,86	497,14	392,68	195,53	3.500,13
Tanjung Harapan	439,72	1.781,24	42,90	-	-	-	-	2.263,87
Total Luas (Ha)	1.617,40	2.281,87	365,52	413,86	497,14	392,68	195,53	5.764,00
Persentase	28,06	39,59	6,34	7,18	8,62	6,81	3,39	100,00

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2011



3. Kondisi Klimatologi

Kota Solok merupakan daerah yang beriklim tropis dengan rata-rata curah hujan 190,42 mm/tahun dan jumlah hari hujan mencapai 141 hari per tahun. Tingkat curah hujan tertinggi pada umumnya terjadi pada bulan Desember, dan tingkat hujan terendah terjadi pada bulan Juli. Temperatur udara rata - rata terendah mencapai 26,1°C dan temperatur udara tertinggi mencapai 28,9°C.

4. Kondisi Geologi

Bila ditinjau dari jenis tanah, sebagian besar tanah di Kota Solok didominasi oleh tanah jenis kompleks podsolik merah kuning, podsolik cokelat dan latosol seluas 2.006 ha (34,80%), aluvial seluas 1.248 ha (21,65%), brown forest soil seluas 1.190 ha (20,65%), podsolik merah kuning seluas 935 ha (16,22%), dan latosol seluas 385 ha (6,68%).

5. Kondisi Hidrologi

Kota Solok dilewati oleh 3 (tiga) sungai, yaitu Sungai Batang Lembang dengan panjang 9.155 m, Sungai Batang Gawan dengan panjang 3.125 m dan Sungai Batang Binguang dengan panjang 2.650 m. Sungai-sungai tersebut memiliki batas hidrologi yang mencakup wilayah Kota Solok dan Kabupaten Solok.

Kondisi sungai Batang Lembang pada beberapa titik sangat rawan longsor dan sering meluap pada waktu musim penghujan yang menimbulkan genangan pada beberapa kawasan sehingga membahayakan dan menimbulkan kerugian baik moril maupun materil terhadap masyarakat terutama yang bermukim di sekitar bantaran sungai. Kawasan yang sering dilanda banjir adalah Kelurahan Koto Panjang, Kelurahan KTK, Kelurahan IX Korong, Kelurahan Tanah Garam, Kelurahan Aro IV Korong dan Kelurahan Sinapa Piliang, dengan tinggi genangan mencapai 0,3 meter s/d 1,5 meter dan luas genangan lebih kurang 180 ha.

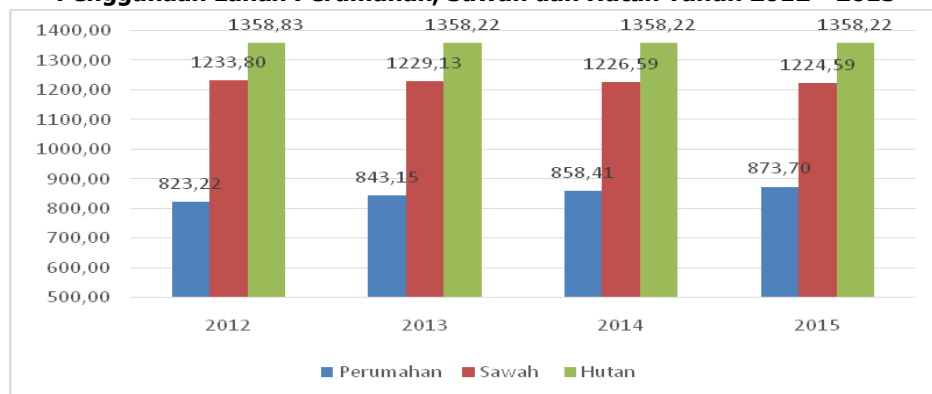
Diwilayah Kota Solok terdapat 1 (satu) sumber mata air, yaitu mata air Pincuran Gadang yang berjarak $\pm$ 2 km dari pusat kota dengan kapasitas 7,3 ltr/dtk telah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kota Solok sejak Tahun 1930.

6. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan Kota Solok selama tahun 2012 – 2015 tetap didominasi oleh hutan, sawah dan perumahan. Luas hutan Kota Solok tahun 2015 adalah 1.358,22 Ha, sedikit mengalami pengurangan dibandingkan dengan tahun 2012 seluas 1358,83 Ha atau berkurang sebesar 0,045%. Demikian juga dengan luas sawah yang mengalami pengurangan dari 1233,80 Ha pada tahun 2012 menjadi 1224,59 Ha pada tahun 2015 atau berkurang sebesar 0,752%.

Berbanding terbalik dengan penggunaan lahan hutan dan sawah, penggunaan untuk perumahan justru mengalami peningkatan dari 823,22 Ha pada tahun 2012 menjadi 873,70 Ha pada tahun 2015 atau meningkat sebesar 6,132%. Hal ini mengindikasikan terjadinya alih fungsi lahan dari pertanian dan hutan menjadi perumahan. Penggunaan lahan tersebut digambarkan pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1.
Penggunaan Lahan Perumahan, Sawah dan Hutan Tahun 2012 - 2015



7. Kawasan rawan bencana

Kondisi geologi Kota Solok yang dipengaruhi oleh sesar aktif Sumatera (Patahan Semangko) mengakibatkan daerah ini rentan akan bencana gempa bumi. Di samping itu, kondisi morfologi kota yang berbukit-bukit dan dilalui oleh sungai yang berkelok-kelok mengakibatkan Kota Solok juga rentan terhadap bencana longsor dan banjir.

a. Gempa Bumi

Kota Solok dipengaruhi oleh aktivitas lajur sumber gempa bumi sesar aktif Sumatera, dimana gempa bumi merusak sering terjadi (gempa bumi Padang Panjang tahun 1926, gempa bumi Singkarak tahun 1943, 2004 dan 2007). Selain dipengaruhi oleh lajur sumber gempa bumi tersebut, Kota Solok juga dipengaruhi oleh gempa bumi yang berasal dari jalur sumber gempa bumi Tunjaman Sumatera yang terletak pada kedalaman 100 km di bawah Kota Solok.

Kerentanan bencana gempa bumi Kota Solok berdasarkan respon dinamika batuan/tanah setempat terhadap guncangan. Berdasarkan penelitian dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Mineral dan Batubara, Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral pada tahun 2008, mikrozonasi kerentanan bencana gempa bumi Kota Solok dapat dibagi menjadi empat wilayah yakni wilayah berkerentanan sangat tinggi dengan indek kerentanan >12, kerentanan tinggi dengan indek 6-12, kerentanan sedang dengan indek 3-6 dan kerentanan rendah dengan indek <3.

Dari penelitian tersebut di atas diketahui bahwa wilayah dengan kerentanan sangat tinggi di Kota Solok adalah seluas 406,6 Ha atau 7,05% dari luas kota, terutama terletak di Kelurahan Koto Panjang, Sinapa Piliang dan IX Korong. Daerah dengan kerentanan tinggi seluas 1.096,98 Ha atau 19,03% dari luas kota yang terletak di Kelurahan Nan Balimo, Tanjung Paku dan Kampung Jawa, dan sisanya seluas 4.260 Ha atau 73,91% merupakan wilayah dengan kerentanan sedang dan rendah yang tersebar diseluruh kelurahan. Selengkapanya luas tingkat kerentanan gempa bumi ini digambarkan pada Tabel 2.4:

Tabel 2.4.
Luas Tingkat Kerentanan Gempa Bumi Kota Solok

No	Tingkat Kerentanan Gempa Bumi	Luas (Ha)	%
1	Sangat Tinggi	406,56	7,05
2	Tinggi	1.096,99	19,03
3	Sedang	1.994,45	34,60
4	Rendah	2.265,87	39,31

Sumber : Puslitbang Teknologi Mineral & Batu Bara, Departemen ESDM, 2008

b. Longsor dan Erosi Tanah

Wilayah Kota Solok yang termasuk rawan bencana longsor dan erosi tanah sebagian besar terletak di Kelurahan Tanah Garam dan Laing karena daerah ini terletak pada kelerengan lebih dari 40%. Tingkat kerawanan terhadap longsor ini juga semakin tinggi apabila daerah tersebut tidak tertutup vegetasi serta bekas lahan penambangan galian C. Oleh sebab itu, untuk daerah-daerah perbukitan dengan kelerengan tinggi harus terus diupayakan penanaman pohon dan mempertahankan hutan yang ada.

c. Banjir

Sebagian kawasan di wilayah Kota Solok merupakan daerah dataran yang memiliki ketinggian 100 – 500 mdpl. Beberapa bagian diantaranya termasuk kawasan rawan banjir pada musim hujan. Hal ini disebabkan karena besarnya perbedaan tinggi permukaan air sungai pada musim hujan dengan musim kemarau yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan siklus hidrologi. Tinggi permukaan air pada waktu banjir mencapai 1 meter dan bahkan melebihi 2 meter. Kawasan-kawasan tersebut adalah Kelurahan Koto Panjang, KTK, IX Korong, Aro IV Korong dan sebagian Kelurahan Tanah Garam. Terjadinya genangan ini dikarenakan adanya selisih kecepatan infiltrasi air kedalam tanah dan aliran permukaan dengan tingginya curah hujan yang jatuh di kawasan Kota Solok serta dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- Belum tersedianya sistem drainase yang memadai
- Perilaku masyarakat yang masih membuang sampah ke sungai dan saluran drainase yang mengakibatkan terjadinya genangan pada musim hujan.
- Luapan Batang Lembang yang berhulu di Kabupaten Solok dan memiliki fluktuasi debit air yang cukup besar antara musim hujan dengan musim kemarau.

Di samping rawan bencana alam tersebut di atas, Kota Solok juga mempunyai kawasan yang berpotensi untuk terjadinya kebakaran. Kawasan rawan kebakaran ini terutama terletak di kawasan dengan kepadatan bangunan tinggi dan permukiman padat. Dilihat dari perkembangan daerah terbangunnya, maka kawasan dengan kepadatan bangunan yang tinggi terkonsentrasi di bagian pusat kota yaitu di Kelurahan Koto Panjang dan Kelurahan Pasar Pandan Air Mati.

B. Demografis

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Namun sampai dengan tahun 2013, data kependudukan yang digunakan adalah data BPS.



Tabel 2.5.
Jumlah Penduduk Kota Solok tahun 2010 - 2015

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)			Sex Ratio	Pertumbuhan (%)
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
2010	29.359	30.037	59.396	98	-1,87
2011	30.012	30.709	60.721	98	2,23
2012	34.063	33.359	67.422	102	11,04
2013	34.248	33.688	67.936	102	0,76
2014	32.646	31.927	64.573	103	-4,95
2015	32.763	32.394	65.157	101	0,97

Sumber : Dirjen Administrasi Kependudukan

Dari Tabel 2.5 terlihat bahwa jumlah penduduk Kota Solok pada tahun 2010 berjumlah 59.396 jiwa meningkat menjadi 65.157 jiwa pada tahun 2015 atau mengalami pertumbuhan sebesar 8,18%. Pertumbuhan penduduk ini terjadi karena adanya penambahan penduduk secara alami dan migrasi.

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pada tahun 2013 jumlah penduduk Kota Solok adalah 67.936 jiwa, berkurang menjadi 64.573 jiwa pada tahun 2014. Berkurangnya jumlah penduduk Kota Solok tahun 2014 ini disebabkan karena berdasarkan hasil konsolidasi data kependudukan oleh Kementerian Dalam Negeri keadaan 31 Desember 2014, terdapat adanya duplikasi data antar daerah. Hal ini terjadi karena penduduk Kota Solok yang pindah ke luar kota tidak melaporkan kepindahannya, sementara di daerah yang baru juga telah dilakukan perekaman data KTP elektronik. Demikian juga dengan penduduk yang meninggal dunia tidak dilaporkan oleh keluarganya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga pendataan penduduk yang meninggal ini kemudian diverifikasi oleh Ketua RT se-Kota Solok.

Gambar 2.2
Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Solok Tahun 2010-2015



Apabila dilihat dari perbandingan jumlah penduduk antar kecamatan, dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 jumlah penduduk Kecamatan Lubuk Sikarah lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk Kecamatan Tanjung Harapan. Akan tetapi bila dilihat dari tingkat kepadatan penduduk, kondisi ini justru sebaliknya dimana penduduk di Kecamatan Tanjung Harapan lebih padat dibandingkan dengan penduduk Kecamatan Lubuk Sikarah.

Kelurahan dengan kepadatan paling tinggi adalah kelurahan Koto Panjang dengan kepadatan yang sama dari tahun 2010 sampai tahun 2015 yaitu 97 jiwa/Ha. Hal ini disebabkan karena Koto Panjang merupakan wilayah pusat kota dimana perumahan kepadatan tinggi juga



terkonsentrasi di sini. Di samping itu, Kelurahan Koto Panjang merupakan kelurahan dengan luas paling kecil di Kota Solok sehingga mengakibatkan kepadatan penduduk per-hektar semakin tinggi. Sedangkan kelurahan dengan kepadatan penduduk paling kecil adalah Kelurahan Laing dengan kepadatan yang sama dari tahun 2010 sampai tahun 2015 yaitu 1 jiwa/Ha. Hal ini disebabkan karena sebagian besar wilayah kelurahan Laing berupa hutan dan perumahan kepadatan rendah. Untuk lebih jelasnya jumlah dan kepadatan penduduk di Kota Solok tahun 2010 dan 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6.
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Solok Tahun 2010 dan 2015

Kecamatan/ Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Kepadatan (Jiwa/Ha)	
		2010	2015	2010	2015
I. Kecamatan Lubuk Sikarah	3.500	32.645	35.721	9	10
1. Kel. Tanah Garam	2.436	11.853	13.558	5	6
2. Kel. VI Suku	360	5.854	5.984	16	17
3. Kel. Sinapa Piliang	64	1.312	1.437	21	22
4. Kel. IX Korong	150	1.615	1.791	11	12
5. Kel. KTK	135	2.235	2.433	17	18
6. Kel. Aro IV Korong	125	2.700	2.860	22	23
7. Kel. Simpang Rumbio	230	7.076	7.658	31	33
II. Kecamatan Tanjung Harapan	2.264	26.751	29.436	12	13
1. Kel. Koto Panjang	21	2.040	2.033	97	97
2. Kel. PPA	69	5.275	5.856	76	85
3. Kel. Tanjung Paku	235	5.493	5.610	23	24
4. Kel. Nan Balimo	759	6.911	7.708	9	10
5. Kel. Kampung Jawa	365	5.948	7.076	16	19
6. Kel. Laing	815	1.084	1.153	1	1
Jumlah	5.764	59.396	65.157	10	11

Sumber : BPS dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jika dilihat dari rasio ketergantungan (*dependency ratio*), maka rasio ketergantungan penduduk usia muda berusia di bawah 15 tahun dan penduduk tua berusia di atas 64 tahun pada tahun 2015 adalah sebesar 46,99%. Rasio ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar 54,89%. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi penduduk usia tidak produktif semakin sedikit dibandingkan dengan penduduk usia produktif

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Dari tabel diatas, terlihat bahwa pada tahun 2015 dengan rasio ketergantungan sebesar 46,99% berarti bahwa setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 47 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.



Tabel 2.7.
Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Solok Tahun 2010-2015

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Satuan
1.	Jumlah usia < 15 tahun	18.771	19.027	18.927	19.449	18.470	18.115	Orang
2.	Jumlah usia > 64	2.278	2.334	3.341	2.775	2.511	2.716	Orang
3.	Jumlah usia tidak produktif (1) + (2)	21.049	21.361	22.268	22.224	20.981	20.831	Orang
4.	Jumlah usia 15 - 64 tahun	38.347	39.360	38.884	45.712	43.592	44.326	Orang
5.	Rasio ketergantungan	54,89	54,27	57,27	48,62	48,13	46,99	%

Sumber : BPS dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, data diolah

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh pembangunan yang dilaksanakan setiap daerah. Namun manfaat tersebut harus juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, aspek pemerataan juga menjadi pertimbangan yang penting dalam keberhasilan pembangunan. Dalam bagian ini akan diuraikan beberapa indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kota Solok.

A. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Berikut Tabel perkembangan IPM Kota Solok tahun 2010-2015 :

Tabel 2.8.
Indeks Pembangunan Manusia Kota Solok Tahun 2010-2015

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Satuan
1	Angka Harapan Hidup	72.29	72.30	72.32	72.33	72.34	72.74	tahun
2	Harapan Lama Sekolah	13.37	13.56	13.75	13.75	14.26	14.27	tahun
3	Rata-rata Lama Sekolah	10.28	10.30	10.35	10.72	10.75	10.76	Tahun
4	Pengeluaran per kapita	10.503	10.506	10.689	10.784	10.972	11.350	Rp./hari
Indeks Pembangunan Manusia		74,38	74,68	75,02	75,54	76,2	76,83	

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

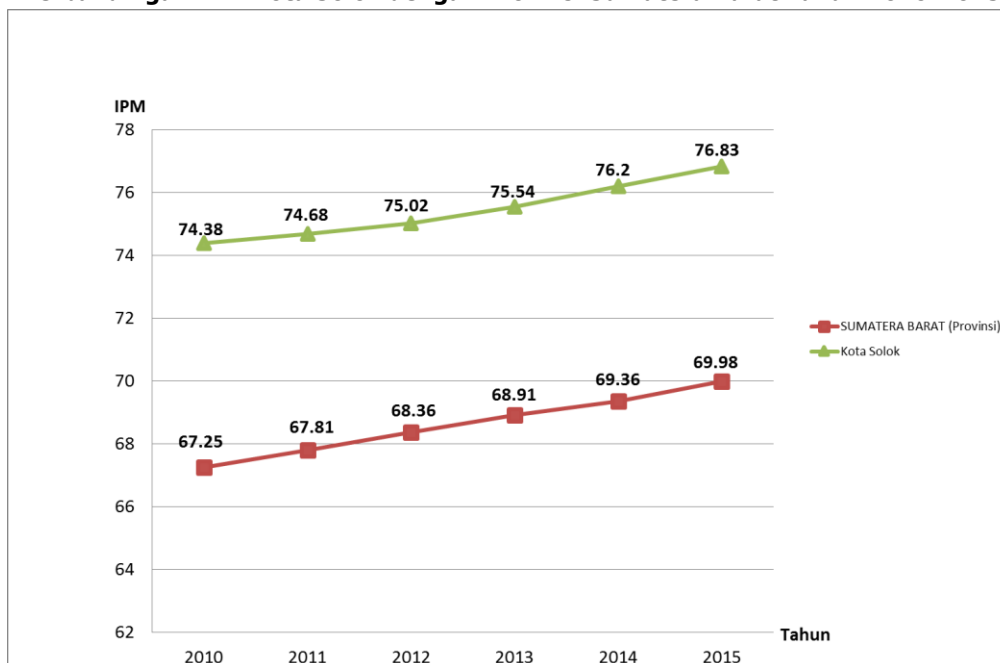
Secara umum pembangunan manusia di Kota Solok selama kurun waktu 2010-2015 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2010, IPM Kota Solok adalah sebesar 74,38 dan secara perlahan naik mencapai 76,83 di tahun 2015. Dengan nilai IPM sebesar



76,83, maka Kota Solok termasuk dalam klasifikasi menengah ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang telah dilaksanakan cukup berhasil dalam meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik, diukur dari indikator kesejahteraan rakyat yang meliputi (i) indikator kesehatan, (ii) indikator pendidikan, serta (iii) daya beli masyarakat yang meningkat.

Jika dibandingkan dengan perkembangan IPM Provinsi Sumatera Barat, posisi IPM Kota Solok berada diatas posisi IPM Provinsi Sumatera Barat, dan jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Lainnya posisi IPM Kota Solok sejak tahun 2010 sampai tahun 2015 berada pada posisi 4. Berikut perbandingan IPM Kota Solok dan Provinsi Sumatera Barat :

Gambar 2.3.
Perbandingan IPM Kota Solok dengan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015



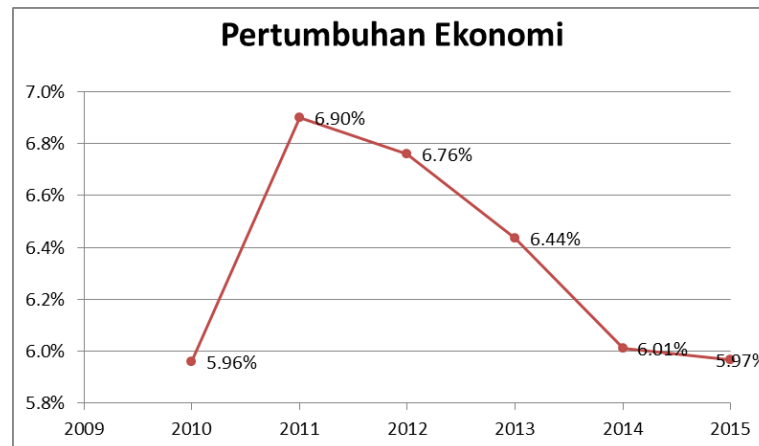
Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan gambar 2.3 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2010 IPM Sumatera Barat 67,25 sedangkan Kota Solok 74,38. Kemudian pada tahun 2015 IPM Sumatera Barat 69,98 dan IPM Kota Solok 76,83. Dengan demikian IPM Kota Solok dalam kurun waktu 5 tahun tetap berada pada level diatas Provinsi Sumatera Barat.

B. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisa terhadap pembangunan dan penguatan ekonomi pada suatu daerah. Hal ini karena, pertumbuhan ekonomi dapat menunjukkan kekuatan aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan, bila seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar, daripada tahun sebelumnya. Dengan kata lain, perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan, bila pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar daripada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya. Pada gambar berikut ini dapat dilihat laju pertumbuhan ekonomi sektoral Kota Solok.

Gambar 2.4.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kota Solok,
Tahun 2010 – 2015



Sumber : BPS Kota Solok (Data diolah)

Sebagaimana terlihat pada gambar 2.4 terlihat bahwa kecenderungan laju pertumbuhan ekonomi Kota Solok dalam kurun waktu 2010 – 2015 mengalami fluktuasi penurunan, meskipun masih dalam tren positif tiap tahunnya. Hal ini tak lepas dari pengaruh kecenderungan perkembangan ekonomi regional maupun global yang sedang mengalami perlambatan, yaitu dengan rata-rata laju pertumbuhan, sebesar 6,52 %, seiring dengan adanya penurunan tingkat konsumsi swasta, akibat masih lemahnya daya beli, terbatasnya realisasi investasi akibat perilaku *wait and see* pelaku usaha, serta minimnya realisasi belanja pemerintah.

Namun demikian, keberhasilan untuk mempertahankan pertumbuhan positif perekonomian Kota Solok kurun waktu 2010 - 2015, tak bisa dipisahkan dari dukungan laju pertumbuhan sektoral, sebagaimana berikut :

- a. **Sektor Primer**, dengan pertumbuhan riil mencapai 2,44 % pada Tahun 2011 dan mampu mencapai 4,68 % pada Tahun 2015, meskipun kondisi ini tetap belum mampu mencegah penurunan kontribusi sektor primer dalam pembentukan PDRB Kota Solok.
- b. **Sektor Non Primer**, dengan pertumbuhan riil mencapai 6,62 % pada Tahun 2011 dan hanya mencapai 5,76 % pada Tahun 2015. Hal ini sekaligus menjelaskan, bahwa sektor non primer yang mempunyai kontribusi signifikan dalam perekonomian Kota Solok, tak mengalami pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan antara Tahun 2011 dengan Tahun 2015.

Berdasarkan kondisi diatas, penjelasan logis tertahannya laju pertumbuhan ekonomi Kota Solok dalam kurun waktu 2011 - 2015, relatif konsisten dalam rentang dibawah 7 %, kondisi ini dipengaruhi oleh kemampuan sektor non primer Kota Solok yang juga hanya tumbuh dibawah angka 7 % per tahun, dalam kurun waktu yang sama.

C. **Pertumbuhan PDRB**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Penghitungan PDRB dilakukan atas dasar harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan atas dasar harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan) untuk dapat



melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun dari sisi penggunaan.

Nilai PDRB Kota Solok berdasarkan harga konstan (PDRB ADHK) menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. PDRB ADHK Kota Solok tahun 2015 tercatat sebesar 2,3 triliun rupiah, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 2,1 triliun. Secara kumulatif peningkatan PDRB ADHK Kota Solok dari tahun 2010 ke tahun 2015 mencapai 615 milyar rupiah. Angka PDRB dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dengan berbagai variasi. Hal ini dapat dimaklumi karena ada kebijakan-kebijakan yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi perekonomian yang ada.

Adapun gambaran perkembangan PDRB Kota Solok tahun 2010-2015 seperti terdapat pada tabel 2.9 dan gambar 2.5 :

Tabel 2.9.
Nilai PDRB Kota Solok Tahun 2010-2015 (juta rupiah)

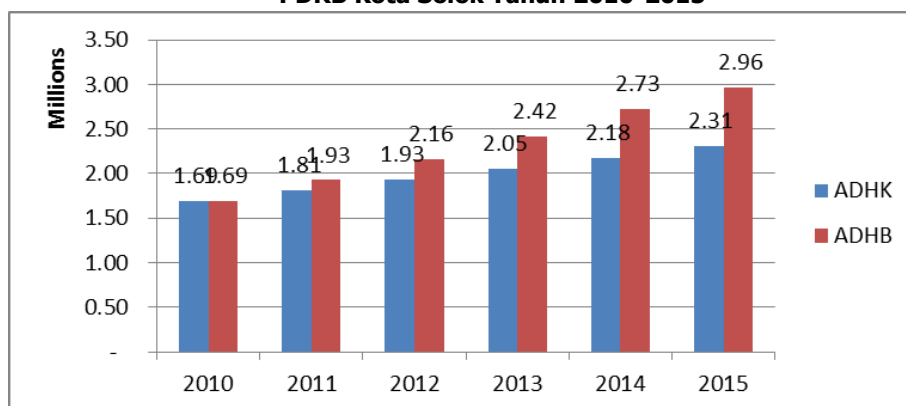
No	Tahun	ADHK	ADHB
1	2010	1,690,850.40	1,690,850.40
2	2011	1.807.538,09	1.926.042,60
3	2012	1.929.710,50	2.157.621,27
4	2013	2.053.900,03	2.419.799,52
5	2014	2.177.368,53	2.729.052,35
6	2015	2.307.302,87	2.964.009,38

Sumber : BPS Kota Solok

Tabel diatas menampilkan data perkembangan nilai PDRB Kota Solok Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) selama kurun waktu 2010 sampai 2015. Dalam 6 (enam) tahun terakhir Nilai PDRB baik AHDK maupn ADHB selalu memperlihatkan perkembangan yang positif.

Gambar berikut ini menampilkan trend pertumbuhan nilai PDRB Kota Solok Atas Dasar Harga Konstan (tahun 2010) dan trend pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku. Dari gambar terlihat bahwa setiap tahunnya terjadi peningkatan nilai PDRB Kota Solok.

Gambar 2.5.
PDRB Kota Solok Tahun 2010-2015



Sumber : BPS Kota Solok (data diolah)

Jika dilihat pertumbuhan dari masing-masing sektor dapat dilihat bahwa sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa pendidikan, jasa kesehatan, konstruksi, perdagangan dan jasa

keuangan tumbuh dengan baik. Berikut pertumbuhan PDRB Kota Solok menurut lapangan usaha :

Tabel 2.10.
Pertumbuhan PDRB Kota Solok Menurut Lapangan Usaha (ADHK 2010)
Tahun 2010-2015 (%)

No	Sektor	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata Pertumbuhan
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-	3.40	3.55	1.84	2.69	2.76	2.37
2	Pertambangan & penggalian	-	2.63	4.26	7.61	6.36	6.14	4.50
3	Industri pengolahan	-	6.12	7.32	5.33	3.88	3.44	4.35
4	Pengadaan Listrik dan Gas	-	7.46	5.48	3.69	14.60	4.16	5.90
5	Pengadaan air, Pengolahan sampah, limbah & daur ulang	-	7.45	4.53	7.83	2.61	3.79	4.37
6	Konstruksi	-	7.06	7.95	9.48	5.87	5.26	5,94
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil & sepeda motor	-	6.92	7.12	6.93	6.65	5.74	5.56
8	Transportasi & Penggudangan	-	7.44	6.66	8.18	8.50	8.50	6.55
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-	2.59	4.34	6.24	6.70	6.94	4.47
10	Informasi dan Komunikasi	-	8.04	12.78	7.05	9.14	9.92	7.82
11	Jasa Keuangan & Asuransi	-	7.16	8.26	5.40	5.75	6.18	5.46
12	Real Estat	-	3.17	5.18	5.74	5.37	3.60	3.84
13	Jasa Perusahaan	-	3.30	3.63	4.03	3.52	6.49	3.50
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	-	9.63	1.37	1.92	1.97	3.32	3.04
15	Jasa Pendidikan	-	7.71	10.06	7.99	5.59	7.18	6.42
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	8.06	9.57	7.79	7.52	7.47	6.74
17	Jasa Lainnya	-	7.19	6.18	5.86	5.85	6.60	5.28
	Produk Domestik Regional Bruto	-	6.90	6.76	6.44	6.01	5.97	6.42

Sumber : BPS Kota Solok (data diolah)

Berdasarkan tabel 2.10. diatas, bahwa secara rata-rata pertumbuhan PDRB Kota Solok Atas Dasar Harga Konstan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 adalah sebesar 6,40%. Selama periode tersebut pertumbuhan PDRB ADHK Kota Solok mengalami perlambatan. Hal ini di pengaruhi kondisi perekonomian yang juga mengalami perlambatan.

Perkembangan kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB baik atas dasar harga konstan maupun atas harga berlaku dapat dilihat pada Tabel 2.11 :

Tabel 2.11.
Persentase Peranan Ekonomi Sektoral PDRB Tahun 2010-2015

No	Sektor		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pertanian	ADHB	7.06	6.81	6.59	6.42	6.35	6.27
		ADHK	7.06	6.83	6.63	6.34	6.15	5,93
2	Pertambangan &Penggalian	ADHB	0.72	0.69	0.66	0.69	0.76	0,82
		ADHK	0.72	0.69	0.67	0.68	0.68	0,68
3	Industri Pengolahan	ADHB	6.19	6.29	6.09	5.75	5.37	5,29
		ADHK	6.19	6.15	6.18	6.09	5.99	5,78
4	Pengadaan listrik dan gas	ADHB	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0,05
		ADHK	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0,05
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah &daur ulang	ADHB	0.22	0.20	0.20	0.19	0.18	0,18
		ADHK	0.22	0.22	0.21	0.22	0.21	0,20
6	Konstruksi	ADHB	11.95	12.12	12.42	13.01	13.38	13,83



No	Sektor		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		ADHK	11.95	11.97	12.10	12.45	12.44	12,45
7	Perdagangan besar&eceran: Reparasi mobil&sepeda motor	ADHB	24.81	25.35	25.34	24.89	24.89	25,39
		ADHK	24.81	24.82	24.90	25.02	25.18	25,10
8	Transportasi & Pergudangan	ADHB	14.82	14.67	14.55	15.13	15.49	15,50
		ADHK	14.82	14.90	14.88	15.13	15.49	15,85
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	ADHB	2.03	1.95	1.90	1.90	1.91	2,14
		ADHK	2.03	1.95	1.90	1.90	1.91	1,93
10	Informasi dan komunikasi	ADHB	6.42	6.49	6.86	6.90	7.12	5,67
		ADHK	6.42	6.49	6.86	6.90	7.12	7,38
11	Jasa keuangan dan asuransi	ADHB	4.34	4.35	4.42	4.37	4.35	4,36
		ADHK	4.34	4.35	4.42	4.37	4.35	4,27
12	Real Estat	ADHB	2.85	2.75	2.71	2.69	2.67	2,80
		ADHK	2.85	2.75	2.73	2.72	2.71	2,65
13	Jasa Perusahaan	ADHB	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0,02
		ADHK	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0,02
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	ADHB	9.91	10.16	9.65	9.24	8.88	8,33
		ADHK	9.91	10.16	9.65	9.24	8.88	8,69
15	Jasa Pendidikan	ADHB	4.49	4.52	4.66	4.73	4.70	5,14
		ADHK	4.49	4.52	4.66	4.73	4.70	4,79
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	ADHB	1.37	1.39	1.43	1.44	1.46	1,46
		ADHK	1.37	1.39	1.43	1.44	1.46	1,48
17	Jasa Lainnya	ADHB	2.74	2.75	2.73	2.72	2.71	2,76
		ADHK	2.74	2.75	2.73	2.72	2.71	2,75
PDRB		ADHB	100	100	100	100	100	100
		ADHK	100	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kota Solok (data diolah)

Dari 17 kategori atau sektor-sektor penyusun PDRB dapat dilihat bahwa sektor yang dominan adalah sektor perdagangan dan reparasi dengan kontribusi lebih kurang 25%. Selanjutnya adalah sektor transportasi dengan kontribusi lebih kurang 15% dan sektor konstruksi dengan kontribusi sebesar $\pm$ 12%. Sedangkan sektor yang memiliki kontribusi relatif kecil, dibawah 1% adalah sektor pertambangan, sektor pengadaan listrik, sektor pengadaan air dan sektor jasa perusahaan.

Sebagaimana terlihat pada tabel diatas, terjadi perubahan struktur produksi, dalam kurun waktu 2010 – 2015, dimana terjadi penurunan pangsa nilai tambah sektor primer dalam PDRB Kota Solok. Sebaliknya, sektor-sektor diluar sektor primer menunjukkan peningkatan.

Adapun penurunan pangsa sektor primer yang terdiri dari sektor pertanian dan pertambangan dalam pembentukan PDRB Kota Solok, sebenarnya disebabkan oleh pergeseran keunggulan komparatif sebagai hasil dari proses akumulasi yang mengubah komposisi faktor produksi yang menyertai pertumbuhan pendapatan per kapita. Disamping, secara nyata dilapangan, dengan mudah ditemui peralihan lahan pertanian untuk berbagai kepentingan mendukung infrastruktur Kota Solok, terutamanya untuk penambahan prasarana kantor dan bangunan - bangunan pendukung sektor perdagangan.

Sementara itu, perkembangan diluar sektor primer, dalam kurun waktu yang sama, diakibatkan oleh terjadinya pergeseran kegiatan yang dimotori oleh :

- Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dari 24.31 % pada Tahun 2010 hingga mencapai 25,10 % pada 2015;
- Sektor Transportasi, dari 14,82 % pada Tahun 2011 hingga mencapai 15,85 % pada Tahun 2015;
- Sektor Konstruksi dari 11,93 % pada 2010 hingga mencapai 12,45 % pada 2015

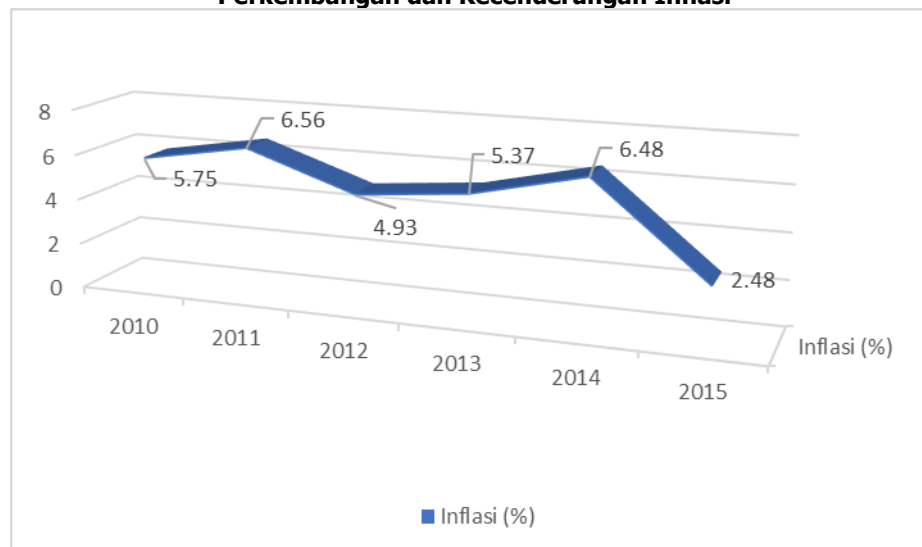


D. Inflasi

Laju inflasi adalah faktor ekonomi lainnya yang dianalisis untuk melihat capaian kinerja fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Peranan pemerintah daerah untuk menekan laju inflasi adalah untuk menjaga kestabilan harga dengan menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok, sehingga tidak terjadi gejolak harga dipasaran. Sementara inflasi akibat banyaknya jumlah uang beredar, kebijakan suku bunga, dan kejadian spekulasi pada sektor industri keuangan, termasuk dalam kebijakan moneter yang merupakan kewenangan Bank Indonesia untuk penanggulangannya.

Pada tingkat mikro, rumah tangga atau masyarakat misalnya dapat memanfaatkan angka inflasi untuk dasar penyesuaian nilai pengeluaran kebutuhan sehari-hari dengan pendapatan mereka yang relatif tetap. Oleh karena itu, dari sisi peningkatan kesejahteraan, peningkatan pertumbuhan ekonomi harus diikuti oleh pengendalian inflasi, agar peningkatan ekonomi menumbuhkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Pada gambar 2.6. ini dapat dilihat perkembangan dan kecenderungan inflasi di Kota Solok.

Gambar. 2.6.
Perkembangan dan Kecenderungan Inflasi



Sumber : BPS Kota Solok

Untuk Kota Solok, karena keterbatasan data Indeks Harga Konsumen, Indeks Harga Perdagangan Besar, BPS menggunakan proksi perubahan deflator PDRB dalam perhitungan inflasi, sebagaimana hasilnya dapat dilihat pada gambar diatas, dimana laju inflasi dalam kurun waktu 2010 – 2015, rata-rata berkisar 5 %. Meskipun dalam kurun waktu tersebut, terdapat variasi kecenderungan laju inflasi dari 4,93 % pada Tahun 2012 menjadi 6,48 % pada Tahun 2014, dan terjadi penurunan yang cukup tajam sebagai bentuk upaya pengendalian inflasi di daerah sehingga dapat menurun menjadi 2,48 % pada Tahun 2015 dan sekaligus cipta situasi yang kondusif seiring pelaksanaan Pilkada serentak.

Laju inflasi tersebut memperlihatkan, bahwa secara umum kenaikan harga barang-barang yang diproduksi di Kota Solok, masih relatif terkendali. Oleh karena itu, kita dapat berasumsi, bahwa kebijakan yang dipilih Pemerintah Kota Solok masih relevan mengurangi dampak inflasioner, terutama dalam mengurangi :

- Kekakuan struktural, melalui pengembangan jaringan infrastruktur yang mengurangi persoalan - persoalan distribusi, meningkatnya pilihan barang substitusi dan disertai penurunan margin transportasi dan distribusi;

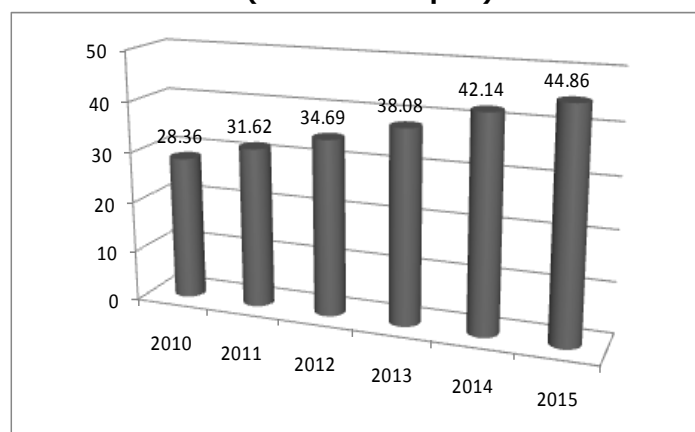


- Keterbatasan kelembagaan yang menyebabkan lonjakan harga yang terjadi, melalui pengembangan jaringan informasi harga sehingga mampu memberikan insentif bagi produsen maupun importir untuk meningkatkan pasokan di Kota Solok;
- Dampak defisit anggaran pemerintah yang menyebabkan ekspansi permintaan, dimana pilihan defisit APBD ternyata masih dalam batas kemampuan perekonomian untuk menyerapnya.

E. PDRB per Kapita

Pendapatan per kapita atau PDRB per kapita atas dasar harga berlaku merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro di Kota Solok, yang pada kurun waktu 2010 – 2015 memperlihatkan kecenderungan peningkatan, berkisar Rp 28,36 juta pada Tahun 2010 menjadi Rp 44,86 juta pada Tahun 2015, yang secara lengkap terlihat pada grafik 2.7 :

Gambar 2.7
Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Solok, 2010 – 2015
(dalam Juta Rupiah)



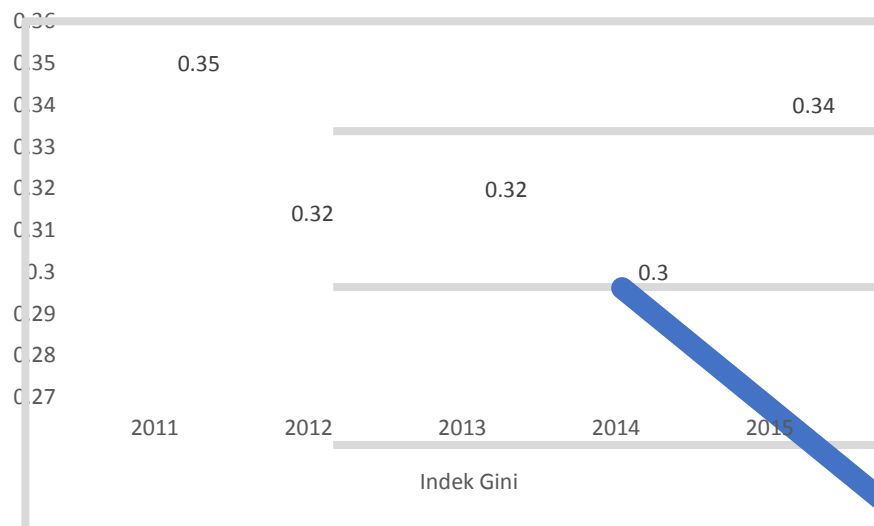
Sumber : BPS Kota Solok

Peningkatan pendapatan per kapita tersebut, biasanya akan diikuti perubahan dalam perekonomian. Oleh karena itu, agar pengamatan proses transformasi yang terjadi dalam perekonomian Kota Solok tersebut dapat dilakukan secara berkelanjutan dan mencakup aspek utama yang diperlukan dalam tahapan perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah

F. Ketimpangan Pendapatan

Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan suatu ukuran untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Gambar 2.8 memperlihatkan perkembangan index gini Kota Solok dari tahun 2011-2015.

Gambar 2.8
Index Gini Kota Solok Tahun 2011-2015



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan gambar diatas, bahwa selama kurun waktu 2011-2015, indeks gini Kota Solok memiliki kecenderungan menurun walaupun distribusinya berfluktuasi. Dalam kurun waktu tersebut, terjadi peningkatan ketimpangan pada tahun 2015 dimana meningkat dari 0,3 pada tahun 2014 menjadi 0,34 pada tahun 2015. Secara umum indek gini Kota Solok berada dibawah 0,4 ($GR < 0,4$), hal ini menyiratkan bahwa distribusi pendapatan penduduk di Kota Solok dikategorikan sebagai ketimpangan rendah.

G. Tingkat kemiskinan

Penduduk miskin di Indoensia diukur oleh Badan Pusat Statistik dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sehingga penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kota Solok dapat dilihat pada tabel 2.12 :

Tabel 2.12
Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kota Solok
Tahun 2010-2015

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp)	Penduduk Miskin	
		Jumlah (ribu jiwa)	Persentase
2010	278.351,-	4,20	6,99
2011	299.798,-	4,00	6,72
2012	319.814,-	3,70	5,87
2013	342.001,-	2,90	4,60
2014	356.078,-	2,71	4,16
2015	370.229,-	2,72	4,12

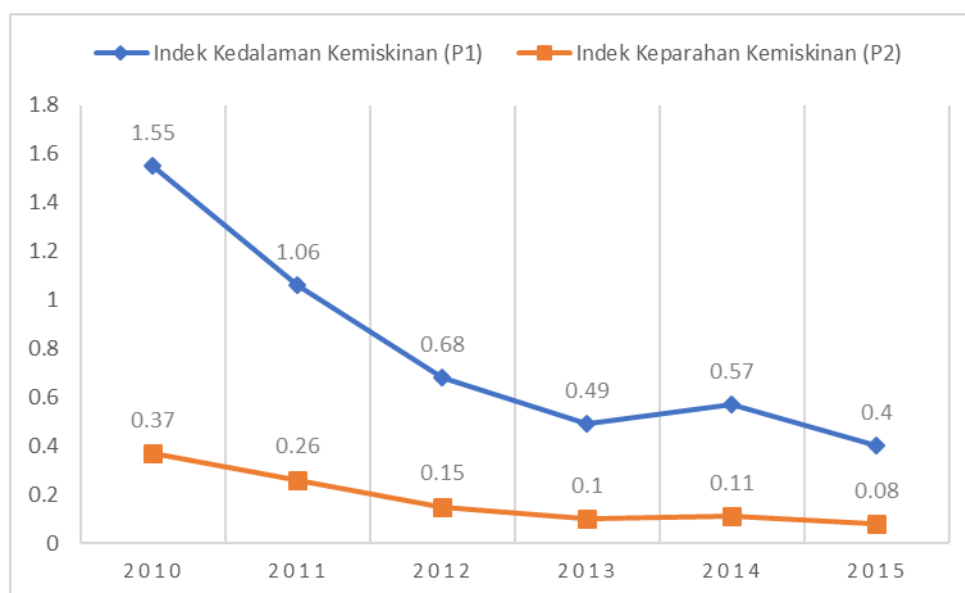
Sumber : BPS Kota Solok



Berdasarkan tabel tersebut diatas, jumlah penduduk miskin di Kota Solok cenderung mengalami penurunan dari tahun 2010 ke tahun 2014. Jika pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin ada 4,20 ribu jiwa, di tahun 2014 terdapat 2,71 ribu jiwa penduduk miskin. Hal ini menunjukkan trend yang baik terlebih lagi jika dibandingkan dengan garis kemiskinan di Kota Solok yang mengalami peningkatan cukup besar. Pada tahun 2010 garis kemiskinan Kota Solok berada pada Rp 278.351/kapita/bulan, setiap tahun mengalami peningkatan dimana tahun 2015 naik menjadi Rp 370.229 /kapita/bulan. Kondisi ini menunjukkan semakin tingginya pengeluaran yang harus dikeluarkan penduduk baik untuk kebutuhan makanan maupun non makanan. Dengan naiknya pengeluaran namun jumlah penduduk miskin semakin rendah, tingkat kemampuan daya beli penduduk di Kota Solok menunjukkan adanya peningkatan.

Namun demikian perlu diwaspadai naiknya jumlah penduduk miskin dipengaruhi oleh adanya kenaikan jumlah penduduk miskin secara nominal dari tahun 2014 ke tahun 2015 meskipun secara persentase mengalami penurunan. Pada gambar berikut ini dapat dilihat perkembangan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan di Kota Solok.

Gambar 2.9
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahannya Kemiskinan di Kota Solok Tahun 2010-2015



Sumber : BPS Kota Solok (data diolah)

Berdasarkan gambar 2.9 dapat dijelaskan bahwa indeks kedalaman kemiskinan (P1) memberikan gambaran seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin relatif terhadap garis kemiskinan. Atau dengan kata lain P1 adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

Indeks keparahan kemiskinan (P2) mengilustrasikan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin atau Indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks ini memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan. Sebagai contoh, mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan yang tinggi tetapi jurang kemiskinannya (poverty

gap) rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin.

Nilai agregat dari indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan biaya mengentaskan kemiskinan dengan membuat target transfer yang sempurna terhadap penduduk miskin dalam hal tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat. Semakin kecil nilai poverty gap index, semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program.

Dari gambar diatas terlihat adanya penurunan nilai indeks kedalaman kemiskinan yang mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Sedangkan jika nilai indeks semakin tinggi, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Di Kota Solok dapat dijelaskan bahwa nilai indeks P1 tahun 2010 sebesar 1,55 dan pada tahun 2015 sebesar 0,4. Berdasarkan nilai indeks ini dapat disimpulkan bahwa Kota Solok masih harus berupaya maksimal untuk dapat menurunkan persentase masyarakat miskin.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap beberapa indikator yang terdapat pada sektor pendidikan, kesehatan dan kesempatan kerja. Indikator pada sektor pendidikan diantaranya adalah : Angka Melek Huruf (AMH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Partisipasi Murni APM, dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Indikator pada sektor kesehatan diantaranya adalah : Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB), Angka Usia Harapan Hidup (AUHH), dan Angka Prevalensi Gizi Buruk pada balita. Sedangkan indikator untuk kesempatan kerja dapat dilihat pada tingkat pengangguran atau persentase angkatan kerja yang masih mencari kerja.

A. Pendidikan

Pembangunan di bidang pendidikan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sasarannya adalah terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan mutu pendidikan, perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan sampai jenjang SLTA bagi semua masyarakat daerah, tercapainya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, serta tercukupinya sarana dan prasarana pendidikan.

Beberapa keberhasilan pembangunan bidang pendidikan dapat dilihat dari Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Angka melek huruf didapat dengan membagi jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas kemudian hasilnya dikalikan dengan seratus. Data pada tabel berikut memperlihatkan bahwa pada tahun 2014 hanya 0,8% lagi masyarakat Kota Solok yang tidak bisa membaca.



Tabel 2.13.
Perkembangan Indikator Pendidikan Kota Solok Tahun 2010 - 2015

No.	Uraian	Tahun						Satuan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1.	Angka melek huruf	98,51	98,52	99,21	99,32	99,2	99,2	%
2.	Angka Harapan Lama Sekolah	13,37	13,56	13,75	13,75	14,26	14,27	tahun
3.	Rata-rata Lama Sekolah	10,3	10,3	10,35	10,72	10,75	10,77	tahun
4.	Angka Partisipasi Murni							
	- SD/MI/Paket A	95,64	84,93	90,12	92,53	100,84	102,79	%
	- SMP/MTs/ Paket B	66,15	71,08	87,37	90,90	66,23	85,78	%
	- SMA/SMK/MA/ Paket C	68,18	114,76	116,40	118,93	104,44	148,84	%
5.	Angka Partisipasi Kasar							
	- SD/MI/Paket A	112,54	98,70	106,33	105,45	119,20	121,60	%
	- SMP/MTs/ Paket B	106,58	105,56	127,62	127,87	121,78	141,98	%
	- SMA/SMK/MA/ Paket C	131	167,27	180,58	185,67	183,39	216,85	%

Sumber : Dinas Pendidikan dan BPS Kota Solok

Harapan lama sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa yang akan datang, dan rata-rata lama sekolah (RLS) yaitu rata-rata jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator RLS ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan, sedangkan indikator HLS diasumsikan dari peluang penduduk yang bersekolah dibagi dengan jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Untuk Kota Solok sebagaimana yang ditampilkan pada tabel diatas bahwa

Rata-rata Lama Sekolah masyarakat Kota untuk tahun 2015 sudah mencapai 10,76 tahun. Angka ini bermakna bahwa rata-rata pendidikan masyarakat Kota Solok adalah masih di jenjang SLTP.

APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah ditingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Sedangkan APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Perkembangan APM Kota Solok lima tahun terakhir cukup baik sebagaimana disajikan pada tabel diatas. Namun, pada tahun 2014 tingkat partisipasi sekolah penduduk pada jenjang pendidikan SLTP mengalami penurunan yang cukup signifikan yakni sebesar 24,67 persen. Hal ini disebabkan pada jenjang SLTP di tahun 2014 mengalami penurunan jumlah siswa yang duduk dibangku SLTP dalam kelompok usia 13-15 tahun, dengan kata lain cukup besarnya jumlah siswa yang umurnya berada dibawah 13 tahun atau diatas 15

tahun. Disamping itu juga, adanya penurunan jumlah penduduk dalam kelompok usia 13-15 tahun yang cukup signifikan dari 2013 sehingga mempengaruhi nilai capaian APM.

Pada jenjang pendidikan SLTA pada tahun 2011 yang mengalami peningkatan nilai APM yang cukup signifikan yakni sebesar 46,58 persen. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2011 terjadi peningkatan murid dari luar Kota Solok yang dikarenakan telah dimulainya operasional SMK 3, disamping juga adanya penambahan ruang kelas baru sehingga meningkatkan nilai APM pada tingkat SLTA pada tahun 2011.

B. Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik. Untuk ukuran keberhasilan pembangunan bidang kesehatan dapat dilihat dari 3 (tiga) indikator Angka kematian bayi, Angka Usia harapan Hidup dan Persentase balita Gizi Buruk.

Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka kematian Ibu (AKI)

Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Penilaian terhadap angka kelangsungan hidup bayi adalah berdasarkan rumus $AKHB = 1 - AKB$ (AKB=Angka Kematian Bayi) dimana 1 = per 1000 kelahiran. Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat/tingkat kesehatan dan kesejahteraan dimana angka kematian itu dihitung.

Tabel 2.14.
Perkembangan AKB dan AKHB Kota Solok Tahun 2010 – 2015

Indikator	Tahun						Satuan
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Jumlah Kematian bayi (umur kurang 1 th) pd 1th tertentu	17	9	11	12	19	9	Jiwa
Jumlah kematian Ibu	0	1	2	0	1	1	jiwa
Jumlah kelahiran hidup pd 1 th tertentu	1.292	1.243	1.198	1.202	1.237	1.333	jiwa
AKB	13	7	9	10	15	7	Per 1000 KH
AKI	0	80	167	-	81	75	Per 100.000 KH
Realisasi AKHB	987	993	991	990	985	993	Jiwa

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Solok

Berdasarkan tabel 2.14 terlihat bahwa AKB dan AKI di Kota Solok selama periode RPJMD 2010 – 2015 berfluktuasi. Pada akhir tahun RPJMD yaitu pada tahun 2015, AKB dan AKI lebih baik namun karena jumlah penduduk Kota Solok yang sedikit, penambahan jumlah kematian ibu dan bayi sedikit saja akan berdampak sangat signifikan dalam peningkatan AKI dan AKB. Kedepan, pelaksanaan program pembangunan dibidang kesehatan perlu lebih ditingkatkan untuk menekan kematian bayi dan ibu yang lebih rendah.

Angka Usia Harapan Hidup (Angka UHH)

Angka Usia Harapan Hidup (Angka UHH) adalah angka perkiraan lama hidup rata – rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.



Tabel 2.15.
Perkembangan Angka Usia harapan Hidup Penduduk
Kota Solok Tahun 2010 - 2015

Tahun	Target Angka UHH (Tahun)	Realisasi Angka UHH (Tahun)
2010	69,34	-
2011	69,49	72,30
2012	69,64	72,33
2013	69,79	72,33
2014	69,94	72,34
2015	70,09	72,74

Sumber : Badan Pusat Statistik

Angka harapan Hidup di Kota Solok mengalami peningkatan dari tahun 2010, namun peningkatannya masih sedikit meskipun sudah mampu melampaui target nasional. Hal ini menggambarkan bahwa derajat kesehatan masyarakat di Kota Solok terus mengalami perbaikan, untuk itu diperlukan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya yang berkelanjutan termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori serta program pemberantasan kemiskinan yang makin lebih baik dan berkesinambungan dimasa yang akan datang, sehingga angka ini dapat terus dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan dimasa yang akan datang.

Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur (BB/U) maupun menurut panjang badannya (BB/TB) dengan rujukan(standar) yang telah ditetapkan.

Menurut Almtsier (2009), masalah gizi umumnya disebabkan oleh kemiskinan, kurangnya ketersediaan pangan, kurang baiknya sanitasi, kurangnya pengetahuan tentang gizi, menu seimbang dan kesehatan. Banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa faktor sosio-budaya sangat berperan dalam proses konsumsi pangan dan terjadinya masalah gizi. Kebiasaan makan keluarga dan susunan hidangannya merupakan salah satu manifestasi kebudayaan keluarga yang disebut gaya hidup. Unsur-unsur budaya mampu menciptakan suatu kebiasaan makan yang kadang bertentangan dengan prinsip-prinsip ilmu gizi.

Berdasarkan data laporan dari Dinas Kesehatan Kota Solok dari Tahun 2010 – 2015 didapatkan bahwa:

Tabel 2.16.
Prevalensi Gizi Buruk Menurut BB/U dan BB/TB
Di Kota Solok Tahun 2010 - 2015

Uraian		Tahun						Satuan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Jumlah Balita Gizi Buruk (Jiwa)	BB/U	61	51	44	31	24	54	Jiwa
	BB/TB	28	17	4	0	2	6	Jiwa
Jumlah Balita (jiwa)		4886	5414	5535	5822	5801	5687	
Prev Balita Gizi Buruk	BB/U	1,2	0,94	0,79	0,53	0,41	0,95	%
	BB/TB	0,6	0,31	0,07	0,00	0,03	0,11	%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Solok

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada akhir tahun RPJMD terjadi peningkatan kembali jumlah balita gizi buruk dari segi indikator BB/U, namun angka ini masih dibawah 5 % dan dari segi BB/TB masih di bawah 1% sehingga Kota Solok masih berada pada kelompok Kota dengan masalah gizi resiko rendah. Tetapi, meskipun demikian, Kota Solok yang berada di persimpangan kab/kota menjadikan Kota Solok berpotensi untuk mengalami



masalah - masalah kesehatan dengan mudah maka tetap perlu dilakukan berbagai upaya kesehatan untuk mengendalikan berbagai masalah kesehatan yang ada melalui program-program imunisasi, pencegahan penyakit menular dan pengendalian penyakit tidak menular, program perbaikan gizi, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang berkualitas serta penjaminan finansial untuk pembiayaan kesehatan.

C. Kesempatan Kerja (Rasio penduduk yang bekerja)

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja.

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Untuk Kota Solok dalam kurun waktu 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel 2.17 :

Tabel 2.17.
Kesempatan Kerja Kota Solok Tahun 2010-2015

Uraian	Tahun						Satuan
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Jumlah penduduk yang bekerja	25.510	24.640	24.357	24.990	26.440	27.890	orang
Jumlah Angkatan Kerja	40.622	26.759	25.724	26.473	28.274	30.075	orang
Kesempatan Kerja (Rasio penduduk yang bekerja)	62,79	92,08	94,69	94,40	93,51	92,73	%

Sumber : data Sakernas 2010 – 2015 (diolah)

Dari Tabel 2.17, dapat disimpulkan bahwa sampai tahun 2015 92.73% dari angkatan kerja yang ada di Kota Solok pada tahun 2014 telah memperoleh kesempatan kerja sedangkan 6,49% nya masih mencari kerja atau pengangguran ($1 - 0,9351 = 0,0649$) atau lebih kurang masih 1.834 jiwa. Namun dari perolehan data sementara pengangguran mengalami peningkatan menjadi 2.185 jiwa atau sebesar 0,726% dari angkatan kerja. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian dalam menciptakan peluang-peluang lapangan kerja atau kesempatan kerja baru sehingga dapat berkontribusi dalam menekan angka pengangguran di Kota Solok.

2.2.3. Fokus Seni, Budaya, dan Olahraga

Pembangunan di bidang seni budaya bertujuan untuk menjaga dan melestarikan peninggalan seni dan budaya serta benda-benda cagar budaya yang terdapat di kota Solok. Sedangkan pembangunan di bidang olahraga bertujuan untuk meningkatkan prestasi olahraga disamping untuk menjaga kesehatan masyarakat. Disamping itu pembangunan di bidang seni budaya dan olahraga dapat bertujuan untuk menyalurkan minat dan bakat generasi muda dalam bidang seni budaya dan olah raga. Analisis kinerja fokus ini dapat dilihat dari indikator: Jumlah grup kesenian adalah jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk, Jumlah gedung kesenian adalah jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk, Jumlah klub olahraga adalah jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk dan Jumlah gedung olahraga adalah jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk.

Adapun capaian indikator tersebut jika dilihat dalam kurun waktu 2010-2015 dapat dilihat pada tabel 2.18:



Tabel 2.18
Perkembangan Seni Budaya dan Olahraga
Kota Solok Tahun 2010-2015

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Satuan
1	Grup Kesenian	25	25	25	20	20	20	unit
2	Gedung Kesenian	1	1	1	1	1	1	unit
3	Klub Olahraga	61	61	65	66	68	71	Klub
4	Gedung Olahraga	6	6	7	8	8	8	unit
5	Jumlah Penduduk	59.369	72.372	67.422	67.936	64.573	65.157	orang
6	Jml Grup Kesenian	4,2	3,45	3,71	2,94	3,10	2,61	10.000 pddk
7	Jml Gedung Kesenian	0,17	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15	10.000 pddk
8	Jml Klub Olahraga	10,27	8,43	9,64	9,72	10,53	10,90	10.000 pddk
9	Jml Gedung Olahraga	1,01	0,83	1,04	1,18	1,24	1,23	10.000 pddk

Sumber: Dinas Pariwisata dan Dinas Pemuda Olahraga Kota Solok

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Penyelenggaraan urusan pendidikan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Berhasilnya pembangunan yang dilaksanakan sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang dapat dicapai oleh masyarakat. Bahkan lebih jauh, keberhasilan pembangunan terutama di sektor pendidikan akan memberikan kontribusi besar pada pencapaian tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan.

Pembangunan pendidikan mendapat prioritas tertinggi dalam pembangunan di Kota Solok. Hal ini ditunjukkan oleh penyediaan anggaran pembangunan bidang pendidikan selama kurun waktu (2010-2015) yang mencapai lebih dari 20% dari keseluruhan belanja daerah. Ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam alokasi anggaran pendidikan dari APBN/APBD. Melalui komitmen ini juga diwujudkan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah gratis tanpa memungut biaya.

Untuk menggambarkan sejauh mana capaian program dalam bidang pendidikan di Kota Solok digunakan berbagai indikator di bidang pendidikan sebagai berikut:

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan salah satu ukuran untuk melihat partisipasi sekolah terhadap jumlah penduduk yang masih sekolah pada masing-masing kelompok usia sekolah dibagi dengan jumlah penduduk di masing-masing kelompok usia sekolah yang bersangkutan.

Pada tabel dibawah ini dapat digambarkan perkembangan angka partisipasi sekolah mulai dari tahun 2010 sampai tahun 2015 baik pada kelompok usia anak usia dini yaitu 4-6 tahun, kelompok 7-12 tahun untuk SD/MI, kelompok usia 13-15 tahun untuk SMP/MTs dan kelompok usia 16-18 tahun untuk SMA/MA/SMK.



Tabel 2.19.
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Kota Solok Tahun 2010-2015

No	Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Satuan
1	PAUD	45,88	51,29	63,36	74,92	78,68	79,8	%
	Jumlah anak yang bersekolah di jenjang pendidikan TK/RA/TPA	1.966	2.179	2.461	2.883	2.927	3.033	orang
	Jumlah penduduk kelompok usia 4-6 tahun	4.285	4.248	3.884	3.848	3.720	3.803	orang
2	SD/MI	95,64	84,93	90,12	92,53	100,84	102,79	%
	Jumlah Murid Usia 7-12 th	6.772	7.568	7.512	7.626	7.778	7.981	orang
	Jumlah Penduduk Kelompok usia 7-12 th	7.081	8.911	8.336	8.242	7.713	7.764	orang
3	SMP/MTs	66,15	71,08	87,37	90,90	66,23	85,78	%
	Jumlah Murid usia 13-15 th	2.314	2.891	3.334	3.574	2.518	3.349	orang
	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15th	3.499	4.067	3.816	3.932	3.802	3.904	orang
4	SMA/MA/SMK	68,11	114,76	116,40	118,93	104,44	148,84	%
	Jumlah Murid usia 16-18 th	2.748	4.502	4.358	4.499	3.836	5.406	orang
	Jumlah Penduduk Kelompok usia 16-18 th	4.031	3.923	3.744	3.783	3.673	3.632	orang

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Solok

Dari tabel 2.19 dapat terlihat bahwa angka partisipasi sekolah pada semua jenjang pendidikan relatif sudah baik dalam kurun lima tahun terakhir, walaupun pada tahun 2014 menunjukkan penurunan pada jenjang pendidikan SMP dan SMA. Hal ini tentu ditunjang dengan ketersediaan sarana sekolah yang cukup memadai di Kota Solok. Pada tahun 2015 tercatat jumlah sarana PAUD formal dan non formal bagi anak usia dini berjumlah 74 buah dengan jumlah pendidik 345 orang. Sedangkan pada tingkat SD/MI berjumlah 49 sekolah, SMP/MTs berjumlah 9 dan tingkat SMA/SMK/MA berjumlah 12 sekolah.

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah perbandingan jumlah sekolah yang tersedia terhadap jumlah penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan sekolah untuk menampung semua penduduk usia sekolah. Perkembangan rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah di Kota Solok dapat dilihat pada tabel 2.20:

Tabel 2.20.
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kota Solok
Tahun 2010 – 2015

No	Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Satuan
1	SD/MI	1:157	1:186	1:174	1:168	1:157	1:158	unit/murid
	Jumlah sekolah	45	48	48	49	49	49	unit
	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 th	7.081	8.911	8.336	8.242	7.713	7.764	murid



No	Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Satuan
2	SMP/MTs	1:437	1:452	1:424	1:437	1:422	1:434	unit/murid
	Jumlah sekolah	8	9	9	9	9	9	unit
	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15th	3.499	4.067	3.816	3.932	3.802	3.904	murid
3	SMA/MA/SMK	1:366	1:327	1:312	1:291	1:283	1:303	unit/murid
	Jumlah sekolah	11	12	12	13	13	12	unit
	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 16-18 th	4.031	3.923	3.744	3.783	3.673	3.632	murid

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Solok

Dilihat dari rasio ketersediaan sekolah pada semua kelompok usia, baik pada kelompok usia penduduk 7-12 tahun, kelompok usia 13-15 tahun dan usia 16-18 tahun selama kurun lima tahun terakhir memperlihatkan kecenderungan yang menurun. Hal ini disebabkan karena jumlah sekolah yang tersedia relatif tetap sedangkan jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah baik pada usia pendidikan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun maupun pendidikan menengah jumlahnya terus meningkat.

Rasio guru/murid

Disamping ketersediaan sarana sekolah, ketersediaan guru sebagai tenaga pengajar merupakan faktor pendukung dalam peningkatan kualitas pendidikan. Rasio guru terhadap murid merupakan rasio yang mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar, disamping untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Pada tahun 2011 rasio guru per murid adalah sebesar 1:14, ini menunjukkan bahwa satu orang guru melayani 14 orang murid dan pada tahun 2015 rasio meningkat menjadi 1:15. Sedangkan pada tingkat SMP/MTs, rasio guru per murid tahun 2011 adalah sebesar 1:11 dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 1:15. Adapun untuk tingkat SMA/MA/SMK, rasio guru per murid dari tahun 2010 sampai 2015 tetap sebesar 1:10. Hal ini menunjukkan bahwa pada tingkat pendidikan wajib pendidikan dasar sembilan tahun perkembangan pertambahan jumlah siswa relatif lebih besaar daripada pertambahan jumlah guru. Sedangkan untuk tingkat pendidikan menengah, perkembangan pertambahan siswa relatif seimbang dengan pertambahan guru. Lebih jelasnya perkembangan nilai rasio guru terhadap murid dapat dilihat pada tabel 2.21 :

Tabel 2.21.
Jumlah Guru Terhadap Murid di Kota Solok Tahun 2010 - 2015

No	Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Satuan
1	SD/MI	1:15	1:14	1:14	1:14	1:15	1:16	guru/murid
	Jumlah Guru	536	639	644	632	605	586	guru
	Jumlah murid	7.969	8.757	8.824	8.671	9.179	9.421	murid
2	SMP/MTs	1:12	1:11	1:12	1:13	1:12	1:15	guru/murid
	Jumlah Guru	333	393	393	395	386	379	guru
	Jumlah murid	3.729	4.242	4.810	4.988	4.600	5.513	murid
3	SMA/MA/SMK	1:10	1:10	1:10	1:10	1:10	1:11	guru/murid
	Jumlah Guru	606	684	701	675	679	708	guru
	Jumlah murid	5.280	6.504	6.711	7.004	6.692	7.846	murid

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Solok



Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Hal ini sering digunakan sebagai salah satu indikator berhasil atau tidaknya pembangunan dibidang pendidikan. Angka Putus Sekolah menunjukkan persentase siswa untuk setiap tingkatan pendidikan (SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK) yang tidak menyelesaikan pendidikannya.

Perkembangan Angka Putus Sekolah di Kota Solok kurun Waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.22 :

Tabel 2.22.
Angka Putus Sekolah (APTS) Di Kota Solok Tahun 2010 – 2015

No	Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Satuan
1	SD/MI	0,03	0,15	0	0	0,01	0,05	%
2	SMP/MTs	0,38	0,60	0,57	0,45	0,08	0,07	%
3	SMA/MA/SMK	0,69	2,12	2,13	0,89	1,50	1,24	%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Solok

Dari tabel diatas terlihat bahwa perkembangan angka putus sekolah selama kurun waktu lima tahun terakhir relatif untuk tingkat pendidikan SD/MI dan SMP/Mts relatif cukup rendah. Adapun untuk tingkat SMA/MA/SMK walaupun menunjukkan angka yang semakin menurun, namun menunjukkan bahwa pada tingkat SMA/MA/SMK ini masih terdapat kasus anak-anak putus sekolah.

Angka Kelulusan (AL)

Angka kelulusan adalah persentase jumlah siswa yang lulus pada jenjang tingkat pendidikan tertentu dibandingkan dengan jumlah seluruh siswa tingkat tertinggi pada jenjang pendidikan tersebut pada tahun sebelumnya. Angka kelulusan untuk tingkat SD/MI dan SMP/MTs menunjukkan perkembangan selama kurun lima tahun terakhir sudah sangat baik dan mencapai 100% pada tahun 2015, sedangkan untuk tingkat SMA/MA/SMK pada tahun 2015 baru mencapai 99,95%.

Perkembangan Angka Kelulusan di Kota Solok kurun Waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.23 :

Tabel 2.23.
Angka Kelulusan (AL) Kota Solok Tahun 2010 – 2015

No	Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Satuan
1	SD/MI	90	94,32	100	100	100	100	%
2	SMP/MTs	116	91,96	92,51	99,77	99,6	100	%
3	SMA/MA/SMK	81	98,93	85,85	99,51	99,76	99,95	%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Solok

Angka Melanjutkan (AM)

Angka Melanjutkan (AM) menunjukkan persentase jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA dibandingkan dengan jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTS pada tahun ajaran sebelumnya. Perkembangan Angka Putus Sekolah di Kota Solok kurun Waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.24:

Tabel 2.24
Angka Melanjutkan (AM) Kota Solok Tahun 2010 – 2015

No	Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Satuan
1	SD/MI ke SMP/MTs	139,72	146,85	138,28	194,36	152,40	116,78	%
2	SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	206,33	127,12	133,40	163,40	328,35	270,81	%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Solok

Dilihat dari tabel diatas terlihat bahwa angka melanjutkan baik yang melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK menunjukkan nilai lebih dari 100%. Ini menunjukkan bahwa selain menampung lulusan SD dan SMP dari Kota Solok, sekolah SMP/MTs dan SMA /MA/SMK yang ada di Kota Solok juga menampung siswa yang berasal dari luar Kota Solok.

Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Kemampuan seorang tenaga pendidik/guru sangat dipengaruhi pendidikan yang ditamatkan, semakin tinggi pendidikan seorang guru maka dia akan mempunyai kemampuan relatif lebih baik dibandingkan dengan yang pendidikannya rendah. Tingginya pendidikan seorang tenaga pendidik pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan.

Pada tahun 2011 guru dengan kualifikasi setara S1/D4 pada tingkat SD/MI baru sebesar 59,08% dan pada tahun 2015 langsung mencapai 90,04. Hal ini ditunjang dengan adanya bantuan beasiswa dari Pemerintah Daerah bagi guru-guru untuk meningkatkan kualifikasinya. Sedangkan untuk tingkat SMP/MTs pada tahun 2011 sudah mencapai 83,48% dan pada tahun 2015 mencapai 91,29%. Adapun untuk tingkat SMA/MA/SMK kualifikasi guru sudah relataif cukup baik yaitu 97,58% pada tahun 2011 dan 98,35% pada tahun 2015.

Perkembangan kualifikasi guru setara S1/DIV pada masing-masing tingkatan pendidikan kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.25:

Tabel 2.25.
Kualifikasi Guru Setara S1/DIV Kota Solok Tahun 2010 – 2015

No	Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Satuan
1	SD/MI	43,33	59,08	67,79	76,52	86,93	90,04	%
2	SMP/MTs	80,69	83,48	88,25	88,05	90,22	91,29	%
3	SMA/MA/SMK	91,73	97,58	97,70	98,06	98,29	98,35	%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Solok

2. Kesehatan

Pelayanan kesehatan merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh kabupaten/kota. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat. Sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh kabupaten/kota secara nasional ditetapkanlah Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang terdapat dalam Permenkes 741/MENKES/PER/VII/2008 yang kemudian diadopsi oleh kabupaten/kota menjadi bagian dari RPJMD Kabupaten/Kota. Untuk Kota Solok, keberhasilan pembangunan bidang kesehatan yang dilaksanakan tahun 2010 – 2015 adalah sebagaimana diuraikan selanjutnya.



A. Pengendalian Penyakit Menular

Sebagai Kota yang berada di persimpangan, Kota Solok sangat rentan terhadap penyebaran penyakit menular baik penyakit menular langsung dan tidak langsung. Kondisi capaian upaya penanganan penyakit menular di Kota Solok dari tahun 2011 – 2015 sebagai berikut:

Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD adalah jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) di satu wilayah kerja pada kurun waktu 1 tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan pada kurun waktu yang sama dikali 100%. Capaian indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel 2.26:

Tabel 2.26.
Capaian Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kota Solok Tahun 2010 - 2015

Uraian	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD						Satuan
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Jumlah Kasus DBD yang Ditemukan	7	27	60	26	50	96	Kasus
Jumlah Kasus DBD yang Ditangani	7	27	60	26	50	96	Kasus
Capaian	100	100	100	100	100	100	%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Solok

Kota Solok merupakan Kota dengan mobilisasi yang tinggi, menjadi tempat persinggahan bagi masyarakat di sekitar Kota Solok karena letaknya yang strategis. Karena hal tersebut di atas, Kota Solok tidak luput dari ancaman penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). Meskipun demikian, semua kasus DBD yang ada mendapat penanganan 100 % di sarana perawatan puskesmas Tanah Garam, Rumah Sakit Swasta dan Rumah Sakit Pemerintah yang ada di Kota Solok dan tidak terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB).

Meski demikian, terhadap pemberdayaan masyarakat dalam upaya penanggulangan DBD melalui 3M Plus masih kurang terlaksana. Hal ini karena kurangnya perhatian masyarakat terhadap lingkungan disebabkan kesibukan sehari – hari sehingga kasus DBD di Kota Solok meningkat dari tahun 2013 sebanyak 24 kasus, tahun 2014 sebanyak 50 kasus dan tahun 2015 sebanyak 96 kasus. Untuk itu diperlukan kerjasama semua sektor baik pemerintah, swasta dan masyarakat dan kampanye 3M plus yang lebih baik di tahun 2016 nanti.

Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Positif

Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Positif (TB BTA +) adalah jumlah penderita baru TBC BTA + yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja pada kurun waktu 1 tahun dibandingkan dengan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA + pada kurun waktu yang sama dikali 100%. Capaian indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel 2.27:



Tabel 2.27.
Capaian Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA +
di Kota Solok Tahun 2010 - 2015

Uraian	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA +						Satuan
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Jumlah Perkiraan Penderita TB Paru BTA+	95	92	97	98	103	105	Jiwa
Jumlah Kasus baru BTA + yang ditemukan dan diobati	66	30	30	42	46	37	Jiwa
Capaian	70	33	31	43	45	35	%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Solok

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa target penemuan masyarakat dengan penyakit TBC BTA + tidak tercapai (target 70%) sejak tahun 2010–2015. Hal ini karena kasus baru TB BTA positif yang ditemukan di masyarakat hanya sedikit dari perkiraan estimasi kasus yang akan ada dan juga karena masih adanya rasa malu dari masyarakat untuk memeriksakan diri ke pelayanan kesehatan dengan kemungkinan penyakit ini meskipun sudah dilakukan survey lapangan, tetapi dari semua kasus yang ditemukan tersebut dapat tertangani 100%.

Secara umum, hal tersebut diatas juga dikarenakan masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam memelihara kesehatannya serta belum optimalnya kualitas SDM dan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan pemerintah dan swasta yang ada di Kota Solok. Untuk itu akan selalu diupayakan pembangunan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat melalui berbagai kegiatan serta diupayakan peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pelayanan di Kota Solok.

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) adalah jumlah desa/kelurahan UCI per jumlah seluruh desa/kelurahan dikali 100%. Capaian indikator dapat dilihat pada tabel 2.28:

Tabel 2.28.
Capaian Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
di Kota Solok Tahun 2010 – 2015

Uraian	Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)						Satuan
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Jumlah kelurahan	13	13	13	13	13	13	Kelurahan
Jumlah kelurahan UCI	13	13	13	13	13	11	Kelurahan
Capaian (%)	100	100	100	100	100	84,62	%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Solok

Terhadap upaya penanggulangan penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) terlihat bahwa terjadi penurunan persentase kelurahan UCI di tahun 2015 menjadi 85 % dimana ada 2 kel dari 13 kel yang tidak mencapai target UCI, hal ini



karena makin maraknya isu haram tentang imunisasi dimasyarakat dan masih kurangnya perhatian masyarakat tentang pentingnya mendapatkan imunisasi anak sesuai jadwal yang ditentukan.

Cakupan Penemuan Penyakit Pneumonia, Diare dan HIV/AIDS

Selain masalah penyakit menular tersebut, dilakukan pula penanganan terhadap penyakit Diare, Pneumonia, HIV/AIDS. Berikut capaian indikator penanganan penyakit Pneumonia, Diare, TB dan HIV/AIDS :

Tabel 2.29.

Capaian Indikator Penanganan Penyakit Pneumonia, Diare, TB dan HIV/AIDS di Kota Solok Tahun 2010 - 2015

Indikator	Tahun						Satuan
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Penemuan penderita pneumonia Balita	43	79,77	42	40,68	71,79	41	%
Penanganan penderita diare	93,5	103,93	80	95	93,54	113	%
Penemuan Kasus HIV/AIDS	3	5	3	4	2	4	kasus

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Solok

Terhadap penemuan kasus diare, semua kasus diare yang diperkirakan ada di Kota Solok ditemukan. Terhadap penemuan penderita pneumonia Balita (41% dari target 100%) hal ini bernilai positif karena jumlah balita yang ditemukan menderita pneumonia tidak sesuai dengan target perkiraan estimasi jumlah balita yang diperkirakan akan menderita pneumonia yaitu 20% dari jumlah balita. Rendahnya capaian ini menandakan bahwa sudah cukup baiknya pelayanan kesehatan untuk balita di Kota Solok karena jumlah sarana pelayanan kesehatan yang tersedia dan pengetahuan petugas serta masyarakat yang sudah cukup sehingga tidak banyak balita yang mendapatkan penyakit pneumonia. Sementara terhadap kasus HIV/AIDS, penemuan kasus ini diperkirakan akan mengalami peningkatan dalam 10 tahun ini karena adanya fenomena gunung es, dimana dengan kasus AIDS yang ada ini, maka akan lebih banyak lagi kasus HIV yang belum menjadi AIDS sedang dalam proses perjalanan penyakitnya. Di akhir tahun 2015 tercatat total kasus HIV/AIDS dari tahun 2006 sebanyak 31 orang, dimana yang masih hidup 17 orang. Pada tahun 2015 ini kasus yang ditemukan sebanyak 4 kasus dan semuanya sudah pada stadium AIDS dan diantara ke 4 kasus tersebut ditemukan pada kelompok usia remaja (15 – 19 tahun) yaitu 2 orang. Hal ini mengisyaratkan kepada Kota Solok agar lebih ditingkatkan upaya pembinaan karakter/perilaku, iman dan takwa anak remaja melalui perbaikan pengasuhan, pendidikan anak di keluarga dan masyarakat serta meningkatkan fungsi adat.

B. Penyehatan Lingkungan

Upaya penyehatan lingkungan terus menunjukkan peningkatan dengan terus berkembangnya akses sanitasi yang sudah mencapai 94,7% pada tahun 2015. Peningkatan akses air minum layak juga mengalami kenaikan, yaitu mencapai angka 94,7 %. Hal ini terjadi karena adanya kerjasama yang baik dari semua sektor , tidak hanya dari kesehatan saja tapi juga oleh sektor PU, PDAM dll. Adapun gambaran perkembangan tersebut seperti terlihat pada tabel 2.30:



Tabel 2.30.
Capaian Indikator Penyehatan Lingkungan di Kota Solok
Tahun 2010 - 2015

Indikator	Tahun						Satuan
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Cakupan air minum yang memenuhi syarat kesehatan	86,98	91,40	89,4	87,7	84,09	91,58	%
Akses jamban sehat	85,40	87,39	86,3	86,4	81,27	82,5	%

Sumber : LKPJ AMJ dan Dinas Kesehatan Kota Solok

C. Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PPTM)

Dengan meningkatnya status sosial ekonomi masyarakat, terjadi pula perubahan gaya hidup, pola hidup dan mobilisasi. Kondisi ini menyebabkan timbulnya kecenderungan peningkatan kejadian penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes dan lain – lain. Upaya Pengendalian Penyakit Tidak Menular berdasarkan amanat dari :

- UU 36/2009 ttg Kesehatan bahwa Pembangunan kesehatan bertujuan untuk mewujudkan derajat kes masy yang menjadi investasi bagi pembangunan
- RPJMN 2015-2019 yang dikenal sasaran pembangunan berupa NAWA CITA NO.5 yaitu Peningkatan Kualitas Hidup Manusia Indonesia
- RENSTRA KEMENKES 2015-2019 yaitu Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)

Kota Solok dalam hasil Riset Kesehatan dasar (Riskesdas) Tahun 2013 tingkat Provinsi Sumatera Barat termasuk pada rangking ke :

- 3 tertinggi prevalensi hipertensi 10,4 % (Dibawah 50 Kota (14,5%) dan Kota Sawah Lunto (11,5%).
- 1 tertinggi prevalensi Asma 5,1%
- 6 tertinggi PPOK 3,7%.
- 4 tertinggi DM 1,6%
- 1 tertinggi Kanker 0,34%
- 7 tertinggi untuk PJK 0,6%
- 2 tertinggi prevalensi strock 1.27%
- 1 tertinggi prevalensi penyakit ginjal 0,4%

Secara bertahap, Kementerian kesehatan telah melakukan upaya peningkatan pelayanan kesehatan untuk penyakit tidak menular di kab/kota, begitu juga untuk Kota Solok. Upaya ini dilakukan dengan melakukan pendeteksian faktor resiko penyakit tidak menular di Posbinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM), Pemenuhan sarana prasarana pelayanan dan pendirian Klinik Berhenti merokok akhir tahun 2015. Setiap tahun terjadi peningkatan jumlah Posbindu PTM di Kota Solok dari 16 Posbindu tahun 2014 menjadi 24 Posbindu di akhir tahun 2015.

Kegiatan PPTM yang dilakukan adalah untuk pengendalian terhadap penyakit Hipertensi, Diabetes Melitus, Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK), Asma, Penyakit jantung Koroner (PJK), Stroke, Kanker Leher rahim dan kanker Serviks. Hasil Pelayanan Penyakit Tidak Menular Di Kota Solok antara lain terlihat pada tabel 2.31 dan tabel 2.32:



Tabel 2.31.
Target Dan Capaian Deteksi Dini Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim
Kota Solok Kumulatif 2010 s/d 2015

No	Puskesmas	Target 5 tahun	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total	Curiga kanker Serviks	Curiga kanker PD
1	Tn Garam	3063	50	148	115	129	79	191	712	9	0
2	Tj Paku	3457	14	54	55	49	106	131	409	4	1
3	KTk	2173	4	140	76	108	176	203	707	0	0
4	Nan Balimo	1185	16	77	29	12	63	80	277	0	0
5	RSU	-	-	27	11	12	-	50		4	0
	DKK	9878	84	477	219	203	216	655	2105	17	1
	%		4,2	15,1	11,1	10,2	9,8	6,6	21		

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Solok

Tabel 2.32.
10 penyakit Tidak Menular Terbanyak Di Kota Solok tahun 2015

No	Penyakit	No	Penyakit
1	Hipertensi	6	Jantung Koroner
2	Rheumatoid arthritis	7	PPOK
3	Kecelakaan lalu Lintas	8	Osteoporosis
4	Asma	9	Stroke
5	Diabetes melitus	10	Kanker

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Solok

D. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja dan Lansia dan Perbaikan Gizi Masyarakat

Upaya peningkatan derajat kesehatan ibu, anak, remaja lansia dan perbaikan gizi masyarakat selama tahun 2011 – 2015 menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hampir semua ibu, anak, remaja dan lansia tersentuh oleh pelayanan kesehatan. Semua kasus gizi buruk yang ditemukan juga tertangani. Hal ini terlaksana melalui karena berbagai upaya kesehatan dan semakin baiknya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan.

Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita

Keberadaan dan penyelenggaraan posyandu ditujukan untuk menurunkan angka kematian bayi, angka kematian ibu serta meningkatkan peranserta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan keluarga berencana.

Capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 2.33:



Tabel 2.33.
Rasio Posyandu Per Satuan Balita
Kota Solok Tahun 2010 - 2015

Uraian	Ratio posyandu per satuan balita						Satuan
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Jumlah Posyandu	79	79	81	82	83	83	Unit
Jumlah balita	4886	5414	5535	5822	5801	5687	Jiwa
Rasio Posyandu Per satuan balita	1: 62	1: 69	1: 68	1: 71	1: 70	1: 69	Unit/jiwa

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Solok

Untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal, maka 1 posyandu selayaknya melayani 50 – 100 sasaran balita. Berdasarkan tabel di atas, meskipun rasio posyandu di Kota Solok mengalami penurunan dari tahun 2013, namun dari segi target sasaran, jumlah posyandu yang ada masih cukup.

Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Cakupan Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah jumlah ibu hamil yang mendapatkan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dari semua sasaran ibu bersalin pada kurun waktu tertentu dikali 100%. Capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 2.34:

Tabel 2.34.
Capaian Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kota Solok
Tahun 2010 - 2015

URAIAN	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan						Satuan
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Jumlah Sasaran Ibu Bersalin	1350	1350	1248	1.296	1.336	1.534	Jiwa
Persalinan oleh Nakes	1304	1303	1244	1.197	1.202	1.333	jiwa
Capaian	96,59	96,52	99,68	92,36	89,97	86,90	%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Solok

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa persentase persalinan oleh tenaga kesehatan di Kota Solok mengalami penurunan, hal ini karena jumlah persalinan itu jauh dari target estimasi yang ditetapkan. Semua persalinan di Kota Solok dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih yang memiliki kompetensi kebidanan yang diselenggarakan oleh tenaga kesehatan milik pemerintah dan swasta.

Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah jumlah komplikasi kebidanan (pada masa hamil, persalinan dan nifas) yang mendapatkan penanganan definitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah ibu yang mengalami komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dikali 100% . Perhitungan jumlah Ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama : dihitung berdasarkan angka estimasi 20% dari total ibu hamil disatu wilayah pada



kurun waktu yang sama akan mengalami komplikasi kebidanan. Capaian indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel 2.35:

Tabel 2.35.
Capaian Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani
di Kota Solok Tahun 2010 - 2015

Uraian	Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani						Satuan
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Jumlah ibu hamil	1410	1361	1360	1399	1399	1605	Jiwa
Jumlah komplikasi kebidanan yang ditangani	332	196	199	274	82	281	Jiwa
Perkiraan ibu hamil yg komplikasi (20 % dari jlh ibu hamil)	282	272	272	280	280	321	Jiwa
Capaian	117,73	72,06	73,16	97,86	29	87,54	%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Solok

Berdasarkan tabel di atas, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani pada tahun 2015 mencapai target 80%. Hal ini berarti semua ibu hamil yang diperkirakan akan mengalami komplikasi kebidanan dapat ditemukan di masyarakat sehingga dapat dilakukan upaya – upaya pencegahan dan penanggulangan untuk mencegah kesakitan dan kematian. Hal ini tetap harus dipertahankan dimasa yang akan datang.

Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan Kunjungan Bayi adalah jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun tertentu dibandingkan seluruh bayi lahir hidup disatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama dikali 100%. Capaian indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel 2.36:

Tabel 2.36.
Capaian Cakupan Kunjungan Bayi di Kota Solok
Tahun 2010 - 2015

Uraian	Cakupan Cakupan Kunjungan Bayi						Satuan
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Jumlah bayi Lahir hidup	1292	1243	1198	1202	1237	1333	Jiwa
Jumlah kunjungan bayi Lengkap	1145	1032	1103	1157	1181	1252	Jiwa
Capaian	91,45	83,0	92,1	96,3	95,5	93,92	%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Solok

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa, setiap tahun Kota Solok dapat mencapai target cakupan kunjungan bayi yang mendapat pelayanan sesuai standar. Pelayanan yang didapatkan bayi sesuai standar adalah pelayanan pemberian vit A 1 x satu tahun pada usia 6 bulan ke atas, pelayanan deteksi dan stimulasi dini tumbuh kembang 4 x selama usia bayi dan imunisasi dasar lengkap.

Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan adalah : Jumlah balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama di kali 100 %. Capaian indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel 2.37



:

Tabel 2.37.
Capaian Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
di Kota Solok Tahun 2010 - 2015

Uraian	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan (%)						Satuan
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Jumlah Kasus Balita Gizi buruk yang Ditemukan	28	28	17	5	7	6	Jiwa
Jumlah Kasus Balita Gizi buruk yang Mendapat perawatan	28	28	17	5	7	6	Jiwa
Capaian	100	100	100	100	100	100	%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Solok

Dengan perkembangan Kota Solok, tentu saja ada balita yang ditemukan dengan status gizi buruk yang memerlukan perawatan disana perawatan, dan untuk menyikapi semua ini, Kota Solok telah memiliki Pusat Pelayanan Tumbuh Kembang atau Rawat Inap Anak yang juga merawat anak dengan gizi buruk dengan metode Therapy Feeding Center (TFC) yang dikembangkan dari WHO. Semua anak di Kota Solok dan sebagian dari luar Kota Solok yang mengalami gizi buruk dirawat 100 % di sarana kesehatan ini.

Cakupan Pelayanan Anak Balita, Remaja dan Lansia

Selain pelayanan kesehatan diatas, untuk memenuhi pelayanan kesehatan bagi anak balita, maka diperoleh gambaran capaian pelayanan sebagaimana terdapat pada tabel dibawah. Sedangkan untuk memenuhi pelayanan kesehatan terhadap remaja dan lansia, maka Kota Solok menetapkan SPM tambahan bidang kesehatan dalam hal ini, yang capaiannya terdapat pada tabel 2.38 :

Tabel 2.38.
Capaian Indikator Pelayanan Kesehatan Anak Balita, Remaja dan Lansia
di Kota Solok Tahun 2010 - 2015

Indikator	Capaian Tahun						Satuan
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Cakupan pelayanan anak balita	89,9	113,75	78,1	87,5	91	91	%
Cakupan pelayanan kesehatan Remaja	82,56	107,45	87,7	87,8	88,11	85,13	%
Cakupan pelayanan kesehatan Lansia	73,2	102,51	74,3	74,6	74,83	81,9	%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Solok

Dari data tersebut di atas terlihat bahwa, Pelayanan Kesehatan untuk Anak Balita, remaja dan lansia dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Ini berarti seluruh tingkatan umur di Kota Solok mendapatkan pelayanan yang memadai/sesuai standar.

E. Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Indra

Pelayanan kesehatan jiwa dilakukan untuk menjawab tantangan banyaknya masyarakat yang mengalami stress/masalah kejiwaan dalam menghadapi perkembangan zaman pada masa sekarang ini. Stress menjadi salah satu pemicu timbulnya penyakit tidak menular seperti stroke, hipertensi, gastritis dan lain sebagainya. Pada tahun 2015 dari 65.157 penduduk Kota Solok, maka yang terdiagnosa mengalami gangguan jiwa sebanyak 4.338 jiwa (6,7 %). Dalam pelayanan ini, dilibatkan dokter spesialis jiwa



yang rererel 2 kali sebulan di puskesmas Tanah Garam dan Tanjung Paku untuk mengatasi masalah gangguan jiwa dewasa dan anak. Disamping itu juga berintegrasi dengan Dinas Sosial untuk mengantarkan pasien jiwa yang memerlukan perawatan di RS Jiwa.

Terhadap pelayanan kesehatan indra, pelayanan ini berintegrasi dengan semua program, baik program untuk kesehatan indra bayi, anak, balita, dewasa dan lansia. Pada tahun 2015 dari 65.157 jiwa penduduk Kota Solok yang mengalami masalah kesehatan indra mata 1621 (2,5%) dan yang memerlukan rujukan 513 orang (31,6%) dan yang mengalami masalah THT 1119 jiwa (1,7%) diantaranya yang memerlukan rujukan hanya 46 orang (4,1%).

F. Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan

Untuk mencapai target peningkatan derajat kesehatan masyarakat tidak terlepas dari peran serta aktif masyarakat itu sendiri. Capaian indikator peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan dapat dilihat pada tabel 2.39 :

Tabel 2.39.
Capaian Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan
Di Kota Solok Tahun 2010 – 2015

Indikator	Capaian Tahun						
	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
Cakupan Desa siaga aktif (%)	61,15	81,81	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Solok

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa semua kelurahan di kota Solok sudah menjadi kelurahan siaga aktif dimana kelurahan tersebut telah dibina untuk kesiapsiagaan bencana penanggulangan krisis kesehatan (100%). Namun dalam perjalanannya, setelah di lakukan advokasi untuk menjadi kelurahan siaga aktif, masih sulit di pertahankan keaktifan kelurahan ini sesuai indikator kelurahan siaga aktif dalam 1 tahun berjalan. Hal ini perlu ditindaklanjuti pada tahun – tahun selanjutnya, sehingga tujuan kelurahan siaga aktif ini dapat tercapai dengan maksimal.

G. Penyediaan Sumberdaya Manusia, Sarana Dan Prasarana Kesehatan

Sejak tahun 2011 sampai tahun 2015 terus dilakukan pembenahan terhadap puskesmas dan jaringannya. perluasan Puskesmas Tanah Garam dan Pelayanan Tumbuh Kembang Dan Laktasi, Perluasan Instalasi Farmasi (Tahun 2011), pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Pos Kesehatan Kelurahan (Poskeskel), penyediaan kendaraan roda 2 untuk operasional Poskeskel sebanyak 12 Unit (Tahun 2010), *Sanitarian Kit*, Peralatan Puskesmas PONED Puskesmas Tanah Garam sehingga pada tahun 2013 Puskesmas Kota Solok memperoleh sertifikat ISO MM 9001: 2008 untuk 2 puskesmas yaitu Puskesmas KTK dan Tanah Garam (LKPJ AMJ Tahun 2014).

Cakupan Puskesmas

Cakupan Puskesmas adalah jumlah puskesmas dibandingkan dengan jumlah seluruh kecamatan dikali 100%. Capaian indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel 2.40:



Tabel 2.40
Cakupan Puskesmas Kota Solok Tahun 2010 - 2015

Uraian	Cakupan Puskesmas (%)						Satuan
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Jumlah Puskesmas	4	4	4	4	4	4	Unit
Jumlah kecamatan	2	2	2	2	2	2	unit
Capaian	200	200	200	200	200	200	%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Solok

Cakupan Pembantu Puskesmas

Cakupan Pembantu Puskesmas adalah jumlah Pembantu Puskesmas dibandingkan dengan jumlah seluruh desa dikali 100%. Capaian indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel 2.41:

Tabel 2.41.
Cakupan Puskesmas Pembantu Kota Solok Tahun 2010 - 2015

Uraian	Cakupan Puskesmas Pembantu						Satuan
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Jumlah Pustu	17	17	17	17	17	17	Unit
Jumlah Kelurahan	13	13	13	13	13	13	unit
Capaian	130,769	130,769	130,769	130,769	130,769	130,769	%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Solok

Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu)

Puskesmas dan pustu merupakan pusat pelayanan tingkat pertama di wilayah kerjanya yang dilengkapi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih mengutamakan pelayanan promotif dan preventif, melalui upaya rawat jalan dan rujukan. Peran Puskesmas sangat penting dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang terjangkau dan merata yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan (*private goods*) dan pelayanan kesehatan masyarakat umum (*public goods*). Puskesmas juga merupakan organisasi kesehatan yang secara fungsional merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat untuk membina peran serta masyarakat dan memberikan pelayanan secara menyeluruh kepada masyarakat.

Rasio pelayanan Puskesmas di Kota Solok sudah mencukupi standar pelayanan Puskesmas dengan rasio 1:30.000. Capaian indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel 2.42:

Tabel 2.42.
Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu per satuan Penduduk
Kota Solok Tahun 2010 - 2015

Uraian	Rasio Puskesmas						Satuan
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Jumlah Puskesmas	4	4	4	4	4	4	unit
Jumlah Poliklinik	5	5	5	5	4	4	unit
Jumlah Pustu	17	17	17	17	17	17	unit
Jumlah Penduduk	59.396	72.372	67.422	67.936	64.573	65.157	Jiwa
Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Per Satuan Penduduk	1:14.849	1:18.115	1:16.878	1:17.006	1:16.164	1:16.312	Unit/jiwa

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Solok



Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Rumah sakit merupakan tempat pelayanan kesehatan rujukan. Capaian indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel 2.43:

Tabel 2.43.
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk
Kota Solok Tahun 2010 - 2015

Uraian	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk						Satuan
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Jumlah Rumah Sakit (RS Umum Pemerintah dan RS Khusus)	4	4	5	6	6	6	Unit
Jumlah Penduduk	59.396	72.372	67.422	67.936	64.573	65.157	jiwa
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	1: 14.849	1: 18.093	1:13.484	1:11.323	1:10.762	1:10.860	Unit/jiwa

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Solok

Masyarakat Kota Solok untuk mendapatkan pelayanan rujukan umum, dilayani oleh satu RS umum milik pemerintah tipe D atau C yaitu Tentara. Dan untuk sementara waktu, untuk menjamin pelayanan rujukan yang memadai untuk masyarakat Kota Solok, telah ditetapkan alur rujukan pelayanan kesehatan masyarakat Kota Solok bisa langsung ke RS tipe B yaitu RSUD Solok. Sementara itu RSUD Solok yang tipe B merupakan RS untuk target rujukan bagi beberapa Kab/kota di propinsi Sumatera Barat .

Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Sumber daya manusia kesehatan yang digambarkan dari rasio tenaga kesehatan per 100.000 ribu penduduk. Target indikator Indonesia sehat dengan rasio dokter 40 per 100.000 penduduk. Capaian indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel 2.44:

Tabel 2.44.
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk
Kota Solok Tahun 2010 - 2015

Uraian	Rasio Dokter per satuan penduduk						Satuan
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Jumlah Dokter	18	20	17	31	15	16	Dokter
Jumlah Penduduk	59.396	72.372	67.422	67.936	64.573	65.157	jiwa
Rasio Dokter per satuan penduduk	1: 3300	1: 3.619	1: 3.966	1: 3.088	1: 4.305	1: 4.072	Dokter/jiwa

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Solok

Ketersediaan dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada di Kota Solok, apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya berdasarkan Indikator Indonesia Sehat 2010 satu orang dokter melayani 2.500 penduduk atau dalam 100.000 penduduk dilayani oleh 40 dokter dan ini berarti berdasarkan data di atas, terlihat bahwa, dengan jumlah dokter saat ini 16 orang di Kota Solok, 1 orang dokter itu melayani 4.072 penduduk. Ini jauh dari ideal, sehingga masih perlu dilakukan penambahan jumlah tenaga dokter untuk meningkatkan pelayanan yang sesuai standar/terakreditasi sebagaimana menjadi target Kementerian Kesehatan tahun 2019.



Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Sumberdaya manusia bidang kesehatan yang lain, selain dokter adalah tenaga medis seperti perawat dan bidan. Rasio bidan dan perawat berimplikasi terhadap ketersediaan dan kualitas layanan kesehatan, sehingga hal ini juga dapat berpengaruh terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan terutama kesehatan ibu dan anak. Berdasarkan Indikator Indonesia bahwa rasio perawat adalah 117 per 100.000 penduduk dan rasio bidan adalah 100 per 100.000 penduduk. Capaian indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel 2.45:

Tabel 2.45.
Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Kota Solok Tahun 2010 - 2015

Uraian	Rasio tenaga paramedis persatuan penduduk						Satuan
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Jumlah tenaga medis (Bidan + Perawat)	108	112	114	122	116	121	Tenaga medis
Jumlah Penduduk	59.396	72.372	67.422	67.936	64.573	65.157	Jiwa
Rasio tenaga medis per satuan penduduk	1: 550	1: 646	1: 591	1: 557	1: 557	1: 538	Tenaga medis/jiwa

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Solok

Berdasarkan data di atas, di Kota Solok ketersediaan bidan dan perawat sudah mencapai target, sehingga tidak diperlukan penambahannya di tahun berikutnya. Tetapi Dalam pembangunan kesehatan, keberadaan sumberdaya manusia perlu mendapat perhatian tidak hanya terkait dengan jumlah saja tetapi lebih jauh dari segi jenis dan distribusi, selain itu juga terkait dengan pembagian kewenangan dalam pengaturan sumberdaya manusia kesehatan. Oleh karena itu diperlukan penanganan lebih seksama yang didukung dengan regulasi yang memadai dan pengaturan insentif, reward-punishment, dan sistem pengembangan karier. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan mutu sumberdaya kesehatan dilakukan melalui pelatihan-pelatihan, pendidikan dan peningkatan uji kompetensi untuk menjawab tantangan tersedianya sarana pelayanan yang terakreditasi di Kota Solok.

H. Penyediaan Obat – Obatan, Vaksin Dan Perbekalan Kesehatan

Untuk indikator tersedianya obat pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, vaksin dan perbekalan kesehatan lainnya di Kota Solok, secara umum tahun setiap tahun sudah mencapai 100%. Dengan demikian semua pasien yang berobat pada puskesmas dan jaringannya dapat dilayani dengan baik. Hal ini karena adanya dukungan dana yang cukup dari APBD Kota Solok dan APBN melalui dana DAK. Yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana ketersediaan obat harus diikuti dengan pengawasan dalam pemakaiannya sehingga pemberian obat secara rasional dapat terus dipertahankan.

I. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Cakupan Pelayanan Rujukan Masyarakat Miskin adalah jumlah kunjungan masyarakat miskin di sarana kesehatan strata 1 dibandingkan dengan jumlah seluruh miskin di kab/kota dikali 100%. Capaian indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel 2.46:



Tabel 2.46
Capaian Cakupan Pelayanan Rujukan Masyarakat Miskin di Kota Solok
Tahun 2010 - 2015

Uraian	Cakupan Pelayanan Rujukan Masyarakat Miskin						Satuan
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
jumlah Penduduk miskin yang Memiliki Jaminan Kesehatan	9771	45.925	45.925	29.925	29.925	26.163	Jiwa
Jumlah Kunjungan Masyarakat Miskin yang Memerlukan Rujukan	11076	1.563	5.112	6.084	3.368	3.924	Jiwa
Capaian	11,01	3,40	11,13	20,33	11,25	15,00	%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Solok

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa persentase masyarakat miskin yang berkunjung ke sarana kesehatan puskesmas Kota Solok belum mencapai target 100%. Hal ini diperkirakan karena masyarakat miskin yang memerlukan pelayanan kesehatan di puskesmas tidak banyak, sementara akses untuk ke sarana kesehatan di Kota Solok tidak bermasalah karena semuanya dapat ditempuh dengan jarak < 10 menit untuk ke Puskesmas Pembantu, Pos kesehatan Kelurahan dan ke Puskesmas Induk. Semua masyarakat miskin Kota Solok sudah dijamin dengan peraturan pelayanan gratis untuk pelayanan dasar sejak tahun 2008 lalu, dilanjutkan dengan Jamkesda dan BPJS Kesehatan sejak tahun 2015.

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa persentase masyarakat miskin yang memerlukan rujukan tidak banyak, hal ini berarti pengetahuan dan penerapan masyarakat miskin terhadap perilaku menjaga kesehatan (Preventif dan Promotif) semakin baik.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur menjadi skala prioritas Pemerintah Daerah setiap tahunnya agar dapat mendukung kegiatan perekonomian masyarakat.

Jalan merupakan faktor penunjang utama pembangunan, baik pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya, maupun infrastruktur lain, sampai dengan tahun 2015 panjang jalan di Kota Solok adalah sepanjang 200,54 km yang terdiri dari jalan negara 12,08 km, jalan provinsi 2,60 km dan jalan kota 185,86 km sesuai dengan Tabel 2.47 berikut.

Tabel 2.47.
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Status
Di Kota Solok Tahun 2015

No	Status Jalan	Panjang Jalan (Km)
1	Jalan Nasional	12,08
2	Jalan Propinsi	2,60
3	Jalan Kota	185,86
	Panjang Jalan Keseluruhan	200,54

Sumber : Dinas PUPR Kota Solok

Proporsi Panjang jaringan jalan dalam sesuai dengan kondisi tahun 2010 s/d 2015 dapat terlihat dari tabel 2.48 berikut.



Tabel 2.48.
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Di kota Solok Tahun 2010-2015

No	Keadaan	Panjang Jalan (Km)					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kondisi Baik	96,56	97,90	111,63	116,98	115,44	166,04
2	Kondisi Sedang	42,05	43,33	33,95	32,90	37,04	10,42
3	Kondisi Rusak Ringan	17,47	20,47	18,97	15,67	12,72	7,97
4	Kondisi Rusak Berat	44,46	38,84	35,99	34,99	35,34	16,11
5	Jalan secara keseluruhan	200,54	200,54	200,54	200,54	200,54	200,54
6	Jalan Kondisi Mantap (1+2)	138,61	141,23	145,58	149,88	152,48	176,46
7	Kondisi Jalan Mantap (%)	69,12	70,42	72,59	74,74	76,03	87,99

Sumber : Kota Solok Dalam Angka tahun 2010-2015 dan Dinas PUPR Kota Solok

Dari tabel 2.48 dapat dilihat bahwa kecendrungan perkembangan jalan kondisi mantap (kondisi baik dan sedang) cukup signifikan selalu terjadi peningkatan tiap tahunnya dimana mulai 69,12 % pada tahun 2010 dan 87,99 % pada tahun 2015.

Sebagai Kota yang dilalui banyak sungai, diperlukan jembatan untuk memudahkan akses masyarakat ke berbagai tujuan. Adapun perkembangan jumlah Jembatan berdasarkan jenis konstruksinya di Kota Solok tahun 2010 s/d 2015 dapat dilihat pada tabel 2.49 :

Tabel 2.49.
Jumlah Jembatan Berdasarkan Jenis Konstruksinya di Kota Solok Tahun 2010-2015

No	Jenis Konstruksi	Jumlah Jembatan (bh)					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jembatan Beton	34	35	35	39	39	39
2	Jembatan Rangka	7	7	7	7	7	7
3	Jembatan Kayu	0	0	0	0	1	1
4	Jembatan Gantung	4	5	5	5	5	5
5	Jumlah secara keseluruhan	45	47	47	51	52	52

Sumber : Kota Solok Dalam Angka tahun 2010-2015 dan Dinas PUPR Kota Solok

Dari tabel diatas terlihat bahwa jenis konstruksi jembatan yang ada di Kota Solok dinominasi oleh jembatan beton, sedangkan untuk jenis kontruksi jembatan rangka di gunakan pada sungai Batang Lembang karena bentangannya cukup besar.

Guna mengantisipasi banjir yang disebabkan oleh luapan sungai, Pemerintah Kota Solok setiap tahun selalu mengalokasikan anggaran untuk penanganan tebing sungai. Disamping untuk mengatasi banjir, penanganan tebing sungai juga dilakukan untuk mengatasi longsor pada tebing sungai yang rawan, terutama yang dapat membahayakan masyarakat. Adapun perkembangan penanganan tebing sungai sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 2.50 :

Tabel 2.50.
Penanganan Tebing Sungai di Kota Solok s/d Tahun 2015

No.	Nama Sungai	Panjang Sungai (m)	Yang Telah Ditangani		Yang Belum Ditangani	
			(m)	%	(m)	%
1	Batang Lembang	10.280	4.246,99	41,31	6.033,01	58,69
2	Batang Gawan	4.660	1.141,80	24,50	3.518,20	75,50
3	Batang Binguang	9.030	1.838,65	20,34	7.191,35	79,66



No.	Nama Sungai	Panjang Sungai (m)	Yang Telah Ditangani		Yang Belum Ditangani	
			(m)	%	(m)	%
4	Batang Simo	1.620	407,20	25,14	1.212,80	74,86
5	Sei. Buluh	2.830	590,78	20,86	2.239,22	79,14
6	Sei. Talang	2.400	924,38	38,52	1.475,62	61,48
7	Sei. Balantai	5.120	-	-	5.120,00	100,00
8	Sei Taratak	2.750	802,03	29,16	1.947,97	70,84
Jumlah		38.690	9.951,83	25,72	28.738,17	74,28

Sumber : Dinas PUPR Kota Solok

Berdasarkan data diatas terlihat baru sepanjang 9.951,83 m (25,72%) tebing sungai yang telah tertangani dari 38.690 m total panjang keseluruhan. Normalisasi dan penguatan tebing sungai perlu dilakukan untuk mengantisipasi luapan air sungai yang mengakibatkan banjir terutama pada sungai Batang Lembang, Batang Gawan dan Batang Binguang.

Kota Solok memiliki 23 Daerah Irigasi dengan luas keseluruhan sebesar 1.396,92 Ha, dimana 6 DI kewenangan Provinsi yakni DI Bandar Pompa VII, Bandar Pamujan, Bandar Panjang Salayo, Bandar Batang Lembang, Bandar Laweh dan Bandar Halim dengan total luasan sebesar 735,90 Ha dan 17 DI kewenangan Kota sebagaimana terlihat pada tabel 2.51 :

Tabel 2.51.
Luas Daerah Irigasi dan Panjang Saluran Irigasi Kewenangan Kota Solok Tahun 2015

No	Saluran dan Daerah Irigasi (DI)	Luas DI (ha)	Panjang Saluran (m)	Kondisi Saluran (%)	
				Baik	Rusak
1	Bdr. Ulu Aie	48,35	1.950	60	40
2	Bdr. Pincuran Gadang	50,25	3.232	80	20
3	Bdr. Taratak	23,00	1.350	70	30
4	Bdr. Barantai	16,00	1.200	80	20
5	Bdr. Imang Payo	108,00	5.440	60	40
6	Bdr. Gurun Bagan	78,00	1.221	75	25
7	Bdr. Ampang Rajo	42,00	1.708	60	40
8	Bdr. Rawang	22,00	1.030	65	35
9	Bdr. Rwg. Sawah Gadang	37,00	1.030	70	30
10	Bdr. Rawang Bantu Ampa	46,56	1.360	55	45
11	Bdr. Ampang Batu	45,00	1.334	75	25
12	Bdr. Tabek Patah	45,00	1.040	60	40
13	Bdr. Balantai	26,00	2.027	65	35
14	Bdr. Sarang Alang	17,74	1.375	60	40
15	Bdr. Sawah Ladang	34,00	750	75	25
16	Bdr. Air Batumbuak	19,00	1.412	70	30
17	Bdr. Sawah Taruko	3,12	750	70	30
Jumlah		661,02	28.209	64	36

Sumber : Perda Kota Solok Nomor 13 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Solok Tahun 2012 – 2031 dan Dinas PUPR Kota Solok

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari 28.209 m saluran irigasi kewenangan Kota pada tahun 2015 terdapat 64 % (18.054 m) dalam kondisi baik dan 36% (10.155 m) dalam kondisi rusak.

RDTR dan peraturan zonasi merupakan regulasi yang menjadi dasar/acuan untuk penerbitan izin pemanfaatan ruang yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Namun



karena RDTR dan Peraturan Zonasi belum selesai disusun maka perizinan pemanfaatan ruang yang berupa advice planning dan IMB masih mengacu kepada Perda No 13 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Solok

Selain RTRW, regulasi terkait tata ruang yang menjadi pedoman dalam pemanfaatan ruang yang masih berlaku saat ini adalah :

1. Perda No 12 tahun 2003 tentang Izin Bangunan
2. Perwako Nomor 14 Tahun 2017 tentang Izin Pemanfaatan Ruang

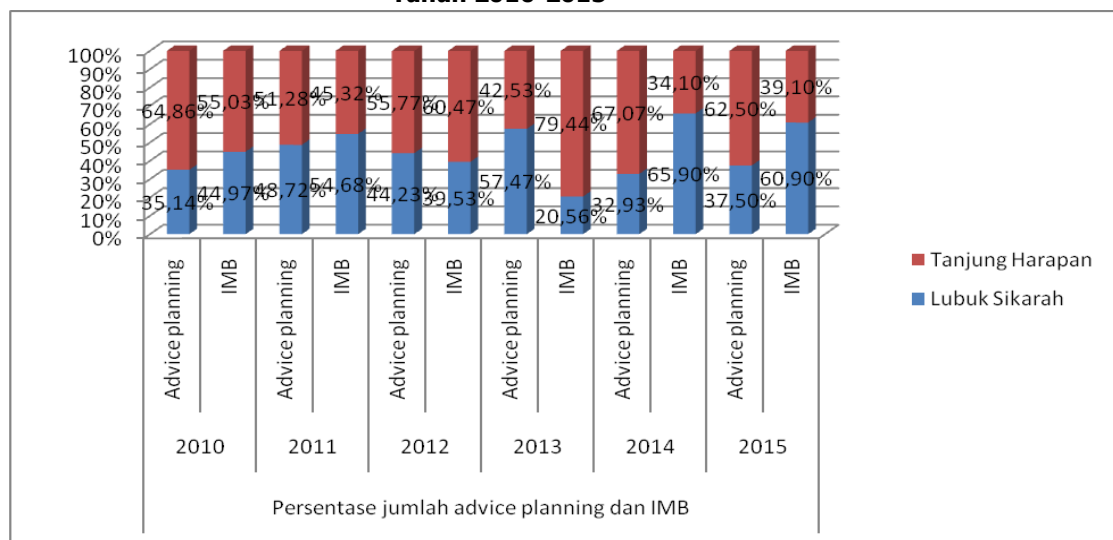
Jumlah dan persentase advice planning dan IMB yang diterbitkan berdasarkan kecamatan dalam waktu 6 (enam) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.52 dan Gambar 2.10

Tabel 2.52.
Jumlah Advice Planning dan IMB yang Diterbitkan
Menurut Kecamatan Tahun 2010-2015

Kecamatan	Jumlah Advice Planning						Jumlah IMB					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lubuk Sikarah	13	19	23	50	27	30	134	181	134	102	143	95
Tanjung Harapan	24	20	29	37	55	50	164	150	205	394	74	61
Jumlah	37	39	52	87	82	80	298	331	339	496	217	156

Sumber : Dinas PUPR Kota Solok

Gambar 2.10.
Grafik Persentase Jumlah Advice Planning dan IMB per Kecamatan
Tahun 2010-2015



Sumber : Dinas PUPR Kota Solok

Dari grafik diatas terlihat bahwa dalam kurun waktu 2010-2015, advice planning lebih banyak diterbitkan di Kecamatan Tanjung Harapan dibandingkan Kecamatan Lubuk Sikarah. Hal ini menandakan bahwa dalam 5 (lima) tahun terakhir kawasan perumahan lebih banyak berkembang di Kecamatan Tanjung Harapan dibandingkan dengan Kecamatan Lubuk Sikarah. Sedangkan untuk penerbitan IMB, terlihat persentasenya berimbang antara Kecamatan Tanjung Harapan dengan Kecamatan Lubuk Sikarah. Namun demikian jika dilihat dari persentase bangunan yang ber-IMB, persentasenya lebih banyak terdapat di Kecamatan Lubuk Sikarah dibandingkan dengan Kecamatan Tanjung Harapan. Secara keseluruhan jumlah bangunan yang memiliki IMB pada tahun 2015 sebanyak 7.723 unit dari total bangunan 13.870 unit atau sebesar 55,68%. Angka ini sudah melampaui target RPJMD 2010-2015 sebesar 51%.



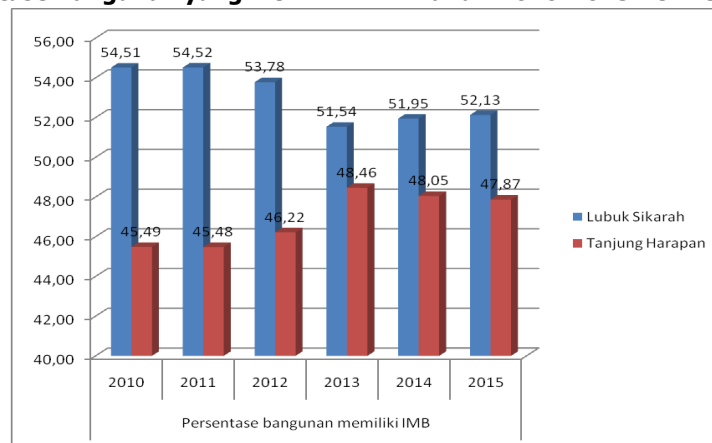
Rincian jumlah bangunan ber-IMB dalam waktu 2010-2015 dapat dilihat pada Tabel 2.53 sedangkan persentase bangunan yang memiliki IMB ditampilkan pada Gambar 2.53, Gambar 2.11 dan Gambar 2.12 :

Tabel 2.53.
Jumlah Bangunan yang Memiliki IMB di Kota Solok Tahun 2010-2015

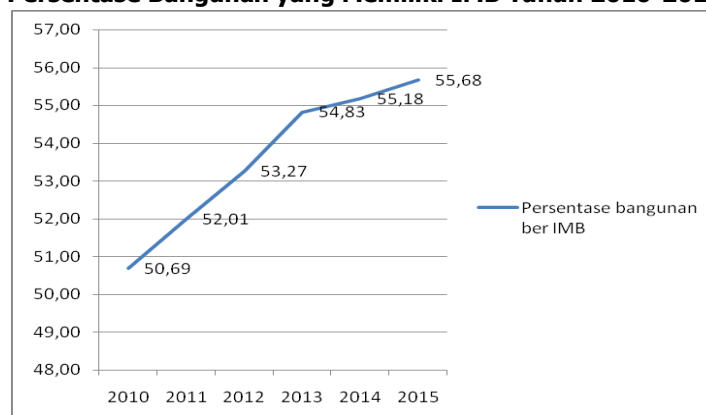
Kecamatan	Jumlah bangunan ber IMB						Jumlah bangunan seluruhnya					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lubuk Sikarah	3.369	3.552	3.686	3.788	3.931	4.026	5.955	6.138	6.272	6.403	6.614	6.709
Tanjung Harapan	2.811	2.963	3.168	3.562	3.636	3.697	6.237	6.389	6.594	7.002	7.100	7.161
Jumlah	6.180	6.515	6.854	7.350	7.567	7.723	12.192	12.527	12.866	13.405	13.714	13.870

Sumber : Dinas PUPR Kota Solok

Gambar 2.11.
Persentase Bangunan yang Memiliki IMB Tahun 2010-2015 Per Kecamatan



Gambar 2.12.
Persentase Bangunan yang Memiliki IMB Tahun 2010-2015



Jaringan drainase merupakan fasilitas lingkungan yang sangat penting selain infrastruktur kota lainnya. Saluran drainase pada prinsipnya berfungsi untuk mengurangi dana tau membuang kelebihan air dari suatu kawasan sehingga lahan tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Tabel. 2.54
Kondisi Bangunan Jaringan Drainase Kota Solok tahun 2015

Kondisi Bangunan Drainase	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Total
Panjang (m)	162.701,60	23.527,30	10.161,60	2.780,50	199.171,00
Persentase (%)	81,69	11,81	5,10	1,40	100,00

Sumber: Dinas PU, 2016

Tabel 2.54 menjelaskan tentang pengelompokan jaringan drainase berdasarkan kondisi drainase dibagi atas 4 (empat) kriteria yaitu drainase dengan kondisi baik, sedang, rusak ringan dan rusak berat. Berdasarkan inventarisasi data lingkup drainase perkotaan tahun 2016, panjang drainase total di kota Solok adalah 199.171 meter dengan kondisi baik sepanjang 162.701,60 meter (81,69%), kondisi sedang 23.527,3 meter (11,81 %), kondisi rusak ringan sepanjang 10.161,6 meter (5,1%), sedangkan 1,4 % dari jaringan drainase tersebut merupakan drainase dengan kondisi rusak berat.

Tabel 2.55
Jenis Konstruksi Jaringan Drainase Kota Solok tahun 2015

Jenis Konstruksi	Beton	Tanah	Total
Panjang (m)	195.938,80	3.232,20	199.171,00
Persentase (%)	98,38	1,62	100,00

Sumber: Dinas PU, 2016

Jenis konstruksi jaringan drainase kota Solok tahun 2015 terbagi atas 2 (dua) yaitu drainase beton dan drainase tanah seperti yang dijelaskan pada tabel 2.55. Pada umumnya konstruksi drainase di kota Solok terbuat dari beton (98,38%) yaitu sepanjang 195.938,8 meter sedangkan sisanya (1,62 %) merupakan drainase tanah.

Tabel 2.56
Jaringan Drainase Kota Solok Berdasarkan Fungsi Tahun 2015

Jenis Jaringan	Primer	Sekunder	Tersier
Panjang (m)	18.450,9	96.623,70	84.096,40
Persentase (%)	9,26	48,51	42,22

Sumber: Dinas PU, 2016

Berdasarkan fungsinya sebagai saluran pembawa air hujan, jaringan drainase kota Solok dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kriteria yaitu drainase primer, sekunder dan tersier. Panjang total jaringan drainase primer di Kota Solok adalah 18.450,9 meter (9,26%). Drainase primer ini berfungsi untuk membawa air hujan serta limpasan hasil kegiatan penduduk yang dialirkan ke sungai. Selanjutnya, drainase sekunder merupakan saluran yang bermuara ke saluran primer atau drainase sekunder sepanjang 96.623 meter (48,51%) dan drainase tersier sepanjang 84.096,4 (42,22%). Terakhir, drainase tersier merupakan saluran dengan fungsi tersier yang tersebar di seluruh kota Solok. Saluran tersier ini pada akhirnya akan bermuara ke saluran sekunder ataupun drainase alam yang berfungsi sebagai penampung limpahan air hujan dan air yang dihasilkan dari aktivitas penduduk.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan terkait dengan pelayanan dasar yang dilaksanakan di Kota Solok. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar



manusia yang pemenuhannya terus diupayakan agar semakin banyak lapisan masyarakat dapat menempati rumah dengan lingkungan permukiman yang layak, sehat, aman dan serasi. Pembangunan perumahan rakyat dan kawasan permukiman pada dasarnya merupakan tugas dan tanggung jawab masyarakat sendiri. Walaupun demikian dalam hubungan ini, pemerintah tetap berkewajiban memberikan kemudahan dan menciptakan iklim yang dapat mendorong bagi tumbuh dan berkembangnya prakarsa dan swadaya masyarakat, serta membina agar pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung dengan tertib.

Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas juga merupakan bagian dari pelaksanaan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Prasarana, sarana dan utilitas yang dimaksud disini berupa jalan lingkungan, saluran lingkungan, prasarana dan sarana pemerintah daerah, parasarana dan sarana publik serta pembangunan sarana sanitasi dan sarana air bersih. Adapun perkembangan pelaksanaan urusan perumahan dan kawasan permukiman dapat diuraikan sebagai berikut:

Perkembangan Jumlah Rumah

Pelaksanaan pembangunan perumahan di Kota Solok dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat dan oleh pengembang perumahan (*developer*). Pemerintah Kota Solok dalam hal ini hanya memberikan dukungan dan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat memiliki rumah, sehingga kekurangan rumah (*backlog*) dapat diatasi. Adapun perkembangan jumlah rumah dapat dijelaskan pada tabel 2.57 :

Tabel 2.57.
Perkembangan Jumlah Rumah Kota Solok Tahun 2011-2015

NO.	Tahun	Jumlah Rumah (unit)	Rumah layak huni (rumah ber IMB + 20% rumah liar layak huni)		Rumah tidak layak huni (80% rumah tidak ber IMB=80% rumah liar)	
			Jumlah	Persentase (%)	Jumlah	Persentase (%)
1.	2010	11.879	8.539	71,88	3.340	28,12
2.	2011	12.176	8.845	72,64	3.331	27,36
3.	2012	12.480	9.148	73,30	3.332	26,70
4.	2013	12.792	9.644	75,39	3.148	24,61
5.	2014	13.112	9.929	75,72	3.184	24,28
6.	2015	13.440	10.182	75,76	3.258	24,24

Sumber: Dinas Perkim Kota Solok

Dari tabel 2.57 diatas dapat dilihat bahwa jumlah rumah di Kota Solok pada tahun 2010 sebanyak 11.879 unit dengan rincian rumah layak huni sebanyak 8.539 unit dengan persentase 71,88% dan rumah tidak layak huni sebanyak 3.340 unit dengan persentase 28,12% sementara di tahun 2015 terjadi peningkatan jumlah rumah menjadi sebanyak 13.440 unit dengan rincian rumah layak huni sebanyak 10.182 unit dengan persentase 75,76% dan rumah tidak layak huni sebanyak 3.258 unit dengan persentase 24,24%. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat pertumbuhan rata-rata jumlah rumah di Kota Solok tahun 2010 sampai tahun 2015 sebanyak 313 unit pertahun dengan persentase rata-rata 2,63% pertahun

Penanganan Kawasan Kumuh

Penanganan kawasan permukiman dilaksanakan guna meniadakan kawasan kumuh di Kota Solok. Sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Solok Nomor: 188.45-653 Tahun 2014



kawasan kumuh yang ada di Kota Solok adalah seluas 168,03 Ha dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.58:

Tabel 2.58.
Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh
di Kota Solok Tahun 2014

No	Nama Lokasi	Kelurahan	Kecamatan	Luas (Ha)	Tingkat Kekumuhan
1.	Padang Galundi, Pincuran Makmur, dan Sawah Piai	Tanah Garam	Lubuk Sikarah	35,02	Kumuh Berat
2.	Kandang Aur	Simpang Rumbio	Lubuk Sikarah	8,44	Kumuh Sedang
3.	Permukiman Rawan Banjir	Aro IV Korong, Sinapa Piliang, KTK, IX Korong, IV Suku	Lubuk Sikarah	49,18	Kumuh Sedang
4.	Permukiman Pusat Kota	PPA, Koto Panjang	Tanjung Harapan	18,34	Kumuh Berat
5.	Permukiman Sepanjang Rel Kereta Api	Tanjung Paku, Nan Balimo	Tanjung Harapan	57,05	Kumuh Berat
Jumlah				168,03	

Sumber : SK Walikota Nomor 188.45-653 Tahun 2014

Dari tabel 2.58 di atas, dapat dilihat bahwa Kota Solok masih memiliki kawasan kumuh seluas 168,03 ha yang tersebar di 11 Kelurahan. Hal ini berarti bahwa dari 5.764 hektar luas wilayah Kota Solok, maka sebesar 2,92% nya merupakan kawasan kumuh. Kondisi ini tentu menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang ada sehingga menjadi bebas dari kumuh. Hal ini juga sesuai dengan RPJMN, dimana pada tahun 2019 ditargetkan tidak ada lagi kawasan kumuh di Indonesia, termasuk Kota Solok.

Peningkatan akses sanitasi penduduk

Untuk meningkatkan akses sanitasi penduduk, dilakukan melalui beberapa kegiatan yakni pembangunan sarana Mandi, Cuci, Kakus (MCK) komunal dikawasan yang rawan sanitasi, pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal dengan sistem perpipaan, serta pembangunan *Septic Tank onsite* bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dari hasil pelaksanaan kegiatan di atas, maka pada tahun 2015 persentase penduduk yang berakses sanitasi sudah mencapai 79,85%, dibanding tahun 2010 yang hanya sebesar 75,45%.

Peningkatan akses air minum

Perkembangan jumlah Rumah Tangga Pengguna air bersih dari tahun 2010 - 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.59 dibawah ini :



Tabel 2.59.
Perkembangan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Kota Solok
Tahun 2010-2015

No.	Tahun	Jumlah Rumah Tangga	Rumah tangga pengguna air bersih	
			Jumlah	Persentase
1	2010	n.a	n.a	n.a
2	2011	12.144	8.929	73,53
3	2012	13.484	8.956	66,42
4	2013	13.587	9.150	67,34
5	2014	12.914	9.827	76,10
6	2015	13.031	10.719	82,26

Sumber: PDAM Kota Solok

Berdasarkan Tabel 2.59 di atas terlihat bahwa rumah tangga pengguna air bersih baru Tahun 2015 mencapai 82,26% meningkat dibanding tahun 2011 yang hanya sebesar 73,53%. Walaupun cakupan pelayanan air bersih oleh PDAM masih sebesar 82,26%, namun dalam memenuhi kebutuhan air bersih, masyarakat mendapatkan dari sumber-sumber lainnya, seperti sumur gali, air hujan, sumur bor dan sebagainya.

Pembangunan jalan lingkungan dan saluran lingkungan

Pembangunan jalan lingkungan dan saluran lingkungan yang termasuk dalam prasarana, sarana dan utilitas kawasan permukiman, setiap tahun terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Solok. Hal ini dilakukan dalam rangka menata lingkungan menjadi lebih baik dan menjadi lebih layak huni sehingga menjadi kawasan yang bebas dari kumuh. Adapun panjang jalan lingkungan dan saluran lingkungan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) tahun 2015, sebagaimana terlihat pada tabel 2.60:

Tabel 2.60.
Panjang dan Kondisi Jalan Lingkungan dan Saluran Lingkungan Kota Solok
Tahun 2015

No.	Uraian	Panjang (Meter)	Kondisi Yang Memadai	
			Panjang (Meter)	Persentase (%)
1	Jalan Lingkungan	195.429	132.892	68
2	Saluran Lingkungan	176.350	96.993	55

Sumber: *Baseline Survey* Program Kotaku Kota Solok

Berdasarkan Tabel 2.60 di atas terlihat bahwa masih ada sebesar 32% jalan lingkungan yang ada di Kota Solok dengan kondisi yang belum memadai. Demikian juga dengan saluran lingkungan, dimana masih ada 45% dengan kondisi yang belum memadai. Hal ini dapat dipahami karena dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan masih banyak masyarakat yang mengusulkan pembangunan jalan lingkungan dan saluran lingkungan di kawasan masing-masing.

Penyediaan Prasarana dan Sarana Pemerintah Daerah

Ketersediaan prasarana dan sarana Pemerintah Daerah Kota Solok saat ini masih belum mencukupi kebutuhan. Masih ada perangkat daerah yang belum memiliki kantor yang representatif. Adapun kebutuhan akan kantor yang layak adalah sebanyak 43 unit, sedangkan yang ada saat ini baru sebanyak 17. Untuk itu, ke depan Pemerintah Daerah akan terus mengupayakan penyediaan prasarana dan sarana pemerintah daerah dapat mencukupi kebutuhan, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik.



5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat merupakan kondisi yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan Kota Solok yang aman, nyaman dan berdaya saing. Untuk menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat ini dapat dilakukan melalui penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Penegakan Perda dan Perkada di Kota Solok selama ini sudah cukup optimal dilakukan. Namun demikian kemungkinan masih terdapat pelanggaran Perda dan Perkada yang belum terpantau dan ditindak sesuai aturan yang berlaku karena keterbatasan personil.

Salah satu penyebab gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah meningkatnya angka kriminalitas berupa penyakit masyarakat (pekat) yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, baik secara kualitas maupun kuantitas. Jumlah Kasus Pekat yang terjadi selama tahun 2010-2015 dapat dilihat pada tabel 2.61 :

Tabel 2.61.
Jumlah Kasus Pekat yang Terjadi Tahun 2010-2015

No	Tahun	Jumlah kasus Pekat	Satuan
1.	2010	18	Kali
2.	2011	16	Kali
3.	2012	14	Kali
4.	2013	19	Kali
5.	2014	52	Kali
6.	2015	40	Kali

Sumber : Dinas Satpol PP Damkar Kota Solok

Pada Tabel 2.61, terlihat jumlah kasus pekat yang terjadi di Kota Solok pada periode 2010-2015, mengalami fluktuasi naik dan turun. Hal ini karena kasus pekat yang terjadi tidak dapat diprediksi.

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Solok diselenggarakan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Tugas pokok Satpol PP adalah menangani keamanan dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, salah satunya dengan meningkatkan pelayanan masyarakat terhadap gangguan keamanan seperti demonstrasi, perselisihan kegiatan usaha, peredaran minuman keras, PSK, pedagang kaki lima dan sebagainya.

Salah satu faktor pendukung keberhasilan SatPol PP dalam menjalankan kewenangannya yaitu rasio jumlah polisi pamong praja. Rasio jumlah polisi pamong praja (jumlah polisi pamong praja per jumlah penduduk dikalikan 1.000) di Kota Solok dari tahun 2010 sampai tahun 2015 dapat dilihat pada table 2.62 :

Tabel 2.62.
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun 2010 -2015

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Pol PP	Rasio (per 10.000 penduduk)
1.	2010	59.396	58	10
2.	2011	60.721	58	10
3.	2012	62.000	54	9
4.	2013	67.936	58	9
5.	2014	64.573	58	9
6.	2015	65.157	57	9

Sumber: Dinas Satpol PP Damkar Kota Solok



Berdasarkan Tabel 2.62, di Kota Solok dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, pertumbuhan jumlah penduduk mengalami peningkatan setiap tahunnya dan pada 2014 menurun, sedangkan personil Pol PP Kota Solok pada tahun 2012 mengalami pengurangan. Oleh karena itu rasio jumlah pol pp juga mengalami penurunan dan kembali meningkat pada tahun 2013 dan 2014 sedangkan tahun 2015 mengalami sedikit penurunan. Seharusnya kondisi ideal rasio Pol PP sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Hal ini dimaksudkan agar Polisi Pamong Praja yang ada dapat menjalankan tugasnya dengan sebagaimana mestinya.

Untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat disamping Satpol PP juga ada petugas Linmas (Perlindungan Masyarakat). Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, Satuan perlindungan masyarakat adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota, rasio petugas linmas di Kabupaten/Kota adalah jumlah satuan perlindungan masyarakat pada tingkat RT. Cakupan rasio petugas Linmas di Kota Solok Tahun 2010-2015 disajikan pada tabel 2.63 :

Tabel 2.63
Rasio Petugas Linmas per- RT Tahun 2010-2015

No	Tahun	Rasio Petugas Linmas
1.	2010	-
2.	2011	-
3.	2012	-
4.	2013	-
5.	2014	0,97
6.	2015	0,97

Sumber: Dinas Satpol PP Damkar Kota Solok

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa petugas Linmas secara resmi baru dibentuk pada tahun 2014 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 dan ditetapkan dengan keputusan Walikota. Pada tahun 2014 tersebut, dari 140 RT yang ada di Kota Solok, 136 RT telah memiliki petugas Linmas sehingga rasio petugas Linmas menjadi 0,97. Kondisi ini sama dengan tahun 2015. Namun demikian pada tahun 2014 terdapat tambahan petugas Linmas sebanyak 194 orang khusus untuk pengamanan Pemilihan Legislatif dan pada tahun 2015 terdapat tambahan sebanyak 106 petugas Linmas untuk pengamanan Pemilihan Kepala Daerah.

Kota Solok merupakan salah satu wilayah yang rentan terhadap bahaya kebakaran. Pelayanan penanggulangan bencana kebakaran mencakup pelayanan kepada masyarakat pada pra kebakaran, saat kejadian kebakaran dan pasca kebakaran. Untuk mengurangi resiko kebakaran dibentuk Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Pembentukan 1 WMK ditentukan berdasarkan cakupan luas layanan kebakaran, dimana untuk kawasan perkotaan 1 WMK mencakup luas maksimal 100 km². Kota Solok hanya terdiri dari 1 WMK karena luas Kota Solok kurang dari 100 km².

Dalam upaya mengatasi bencana kebakaran, Pemerintah Kota Solok melakukan beberapa cara, baik upaya preventif ataupun penanganan segera apabila terjadi kebakaran.



Capaian indikator kinerja pelayanan bencana kebakaran selama tahun 2010-2015 disajikan pada tabel 2.64 :

Tabel 2.64.
Capaian indikator kinerja pelayanan bencana kebakaran Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Cakupan pelayanan bahaya kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase kasus kebakaran yang tertangani dalam waktu tanggap	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit

Sumber : Kantor BPBD Kota Solok

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa selama tahun 2010-2015 cakupan pelayanan bahaya kebakaran di Kota Solok telah mencapai 100%. Hal ini dapat dicapai karena Kota Solok dengan 1 WMK memiliki 4 unit mobil pemadam kebakaran di atas 3000-5000 liter sehingga telah mencakup seluruh wilayah kota bahkan unit pemadam kebakaran Kota Solok turut serta membantu penanganan kebakaran di kabupaten/kota lainnya.

Persentase kasus kebakaran yang tertangani dalam waktu tanggap selama tahun 2010-2015 juga telah mencapai 100%. Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan WMK adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada permukiman dan tidak lebih dari 60 menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasan hutan dan lahan dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.

6. Sosial

Permasalahan sosial dan kemiskinan merupakan hal yang menjadi perhatian penting Pemerintah Daerah Kota Solok, sesuai dengan misi ke 5 (lima) Pembangunan Jangka Menengah yaitu "Menekan angka kemiskinan dan mengurangi permasalahan sosial lainnya".

Permasalahan sosial di masyarakat diistilahkan dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yaitu seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, atau gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/ketertinggalan, dan bencana alam maupun bencana sosial. Di Kota Solok terdapat 18 golongan PMKS seperti pada tabel 2.65 :

Tabel 2.65.
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kota Solok

No.	Golongan PMKS	Tahun		
		2013	2014	2015
1.	Balita Terlantar	1	4	5
2.	Anak Korban KDRT	0	0	0
3.	Anak Terlantar	538	672	594
4.	Anak Berhadapan dg Hukum	6	6	11
5.	Anak Jalanan	16	4	7
6.	Keluarga Bermasalah Psikologi	79	96	103
7.	Lansia Terlantar	468	532	500

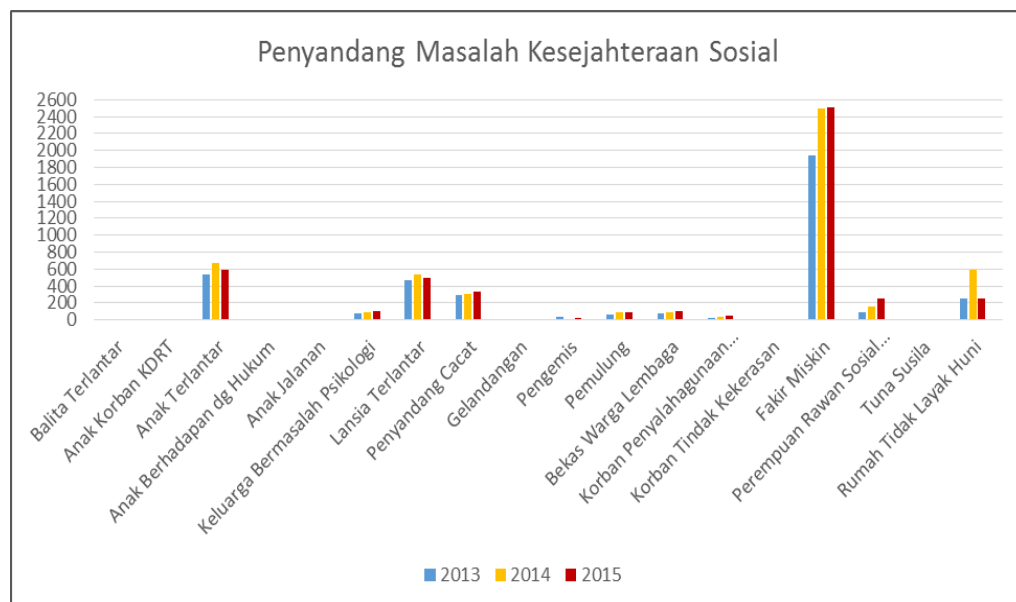


No.	Golongan PMKS	Tahun		
		2013	2014	2015
8.	Penyandang Cacat	297	304	327
9.	Gelandangan	3	3	6
10.	Pengemis	33	15	26
11.	Pemulung	65	85	95
12.	Bekas Warga Lembaga	72	93	98
13.	Korban Penyalahgunaan Napza	23	35	55
14.	Korban Tindak Kekerasan	7	8	8
15.	Fakir Miskin	1.945	2.496	2.507
16.	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	87	158	259
17.	Tuna Susila	10	8	9
18.	Rumah Tidak Layak Huni	250	596	253

Sumber Data: Dinas Sosial Kota Solok

PMKS di Kota Solok merupakan sasaran program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Target program ini adalah membantu PMKS untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak serta mengurangi jumlah PMKS di Kota Solok. Namun masalah sosial sangat kompleks dan dipengaruhi banyak faktor, karenanya bantuan pemerintah tidak serta merta akan mengurangi jumlah keluarga miskin dan PMKS secara signifikan. Kelahiran dalam suatu keluarga rentan miskin akan mengubah status keluarga tersebut menjadi miskin, sedang perubahan keadaan perekonomian seperti kenaikan harga BBM, bisa berdampak pada PMKS golongan perempuan rawan sosial ekonomi, lansia terlantar atau fakir miskin. Sedang untuk penyandang cacat, keluarga yang bermasalah psikologi, anak yang berhadapan dengan hukum atau bekas warga lembaga tidak bisa diprediksi kuantitasnya, hingga secara keseluruhan jumlah PMKS akan berfluktuasi setiap tahunnya.

Gambar 2.13.
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kota Solok



Grafik PMKS diatas berdasar data dari Dinas Sosial tahun 2013-2015 yang mendeskripsikan fluktuasi jumlah PMKS Kota Solok pada tiap golongan. Untuk tahun 2010 sampai dengan 2012 belum terdapat data yang terpilah berdasarkan golongan PMKS. Grafik yang menggambarkan tren negatif dari tahun 2013 ke 2015 ada pada golongan pengemis, tunas susila dan lansia terlantar. Sedang tren sebaliknya dapat terlihat pada balita terlantar, anak terlantar dan fakir miskin. Yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa PMKS tidak hanya mencakup keluarga miskin karena untuk golongan penyandang cacat atau anak yang



berhadapan dengan hukum bisa berasal dari keluarga mampu. Inilah yang membuat kondisi PMKS lebih kompleks dibanding kemiskinan di Kota Solok.

Pelayanan pemerintah yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Solok memprioritaskan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial. Terdapat program-program dan kegiatan tepat sasaran yang diadakan setiap tahun dengan tujuan meningkatkan taraf hidup semua golongan PMKS. Pada tabel berikut disajikan data PMKS yang telah dibantu dan ditangani melalui program pada Dinas Sosial.

Tabel 2.66.
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Memperoleh Bantuan Sosial dan Yang Tertangani di Kota Solok Tahun 2010 – 2015

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Satuan
Jumlah PMKS	2.616	2.617	2.733	3.900	5.115	4.863	orang
PMKS yang memperoleh bantuan sosial	1.969	2.079	2.210	2.350	3.221	3.255	orang
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	75,26	79,44	80,86	60,26	62,97	66,93	%
PMKS yang ditangani	2.034	2.144	2.278	2.418	3.336	3.376	orang
Persentase PMKS yang ditangani	77,75	81,92	83,35	62	65,22	69,42	%

Sumber : Dinas Sosial Kota Solok

Data diatas menginformasikan jumlah PMKS di Kota Solok pada tahun 2010 dan 2011 tidak mengalami peningkatan berarti (hanya bertambah 1 orang). Pada tahun 2012, terjadi peningkatan menjadi 2.733 yang bisa diakibatkan karena kelahiran atau bertambahnya jumlah anggota keluarga PMKS. Untuk contoh kasus ini, anak yang dilahirkan dalam keluarga miskin akan langsung terdata sebagai masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial. Jumlah PMKS Kota Solok bertambah di tahun 2013 menjadi 3.900 orang, dan kembali meningkat secara signifikan di tahun 2014 (5.115 orang). Penambahan ini bisa disebabkan karena pendataan telah dilakukan secara lebih baik serta perubahan pada kriteria untuk golongan PMKS tertentu. Namun pada tahun 2015, jumlah PMKS berkurang menjadi 4.863 orang.

Sementara pemberian bantuan sosial untuk PMKS terus meningkat setiap tahunnya. Dari 1.969 orang menerima bantuan pada tahun 2010, menjadi 3.255 orang pada tahun 2015. Secara persentase, PMKS yang dibantu menunjukkan tren positif/meningkat dari tahun 2010 sampai dengan 2012. Sedang untuk tahun 2013 menunjukkan penurunan persentase sebagai akibat penambahan jumlah yang cukup signifikan melebihi jumlah PMKS yang dibantu. Dimulai tahun 2013, persentase PMKS yang dibantu dimulai dengan persentase yang menurun dari tahun sebelumnya, yaitu 60,26%, namun terus meningkat di tahun 2014 dan 2015 pada angka 62,97% dan 66,93%.

PMKS yang ditangani merupakan jumlah keseluruhan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang ditemukan di Kota Solok, baik warga Kota Solok maupun bukan. Dengan demikian angkanya lebih banyak dibanding PMKS warga Kota Solok yang mendapat bantuan. Persentase PMKS yang ditangani mengalami tren yang sama dengan PMKS yang mendapat bantuan sosial, yaitu dimulai dengan 77,75% pada tahun 2010 dan terus meningkat di tahun 2011 dan 2012 menjadi 81,92% dan 83,35%. Untuk tahun 2013, karena jumlah PMKS yang meningkat drastis, maka persentase penanganan hanya mencapai 62%, namun memperlihatkan tren positif di tahun 2014 dan 2015 yaitu 65,22% dan 69,42%. Melihat kondisi PMKS Kota Solok, walaupun persentase yang dibantu dan



ditangani terus meningkat, namun perlu dilakukan penanganan yang komprehensif untuk dapat mengeluarkan masyarakat Kota Solok dari permasalahan kesejahteraan sosial.

2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Urusan ketenagakerjaan memiliki aspek multidimensi dan lintas sektoral sehingga peranannya menjadi salah satu aspek yang strategis dalam pembangunan daerah. Pada tabel 2.67 dapat dilihat perkembangan kinerja urusan Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Solok.

Tabel 2.67.

Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Pemerintah Daerah Kota Solok Tahun 2010-2015

No	Aspek Fokus /Bidang Urusan/Indikator/Kinerja Pembangunan	Capaian Kinerja					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	43,42	67,11	63,86	61,96	62,62	63,89
2	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	1,95	14,89	7,12	15,99	20,83	15,62
3	Tingkat pengangguran terbuka (%)	9,60	7,92	5,31	5,60	6,49	4,72
4	Tingkat keselamatan dan perlindungan tenaga kerja (%)	96,68	96,54	96,31	96,12	93,52	92,46
5	Jumlah lembaga bipartit ketenagakerjaan	2	2	3	5	6	6
6	Persentase penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial	100	100	100	100	100	100
7	Rasio tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kerja dan mandiri	74,00	76,53	72,82	78,10	82,84	87,61

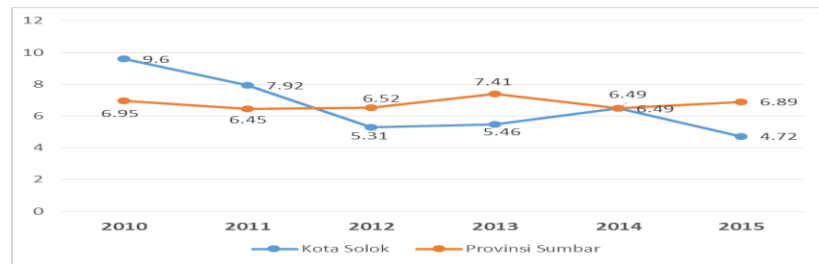
Sumber : Dinas PMPTSP Kota Solok

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Solok selama periode 2010-2015 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Jika pada tahun 2010 tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 43,42%, maka pada tahun 2015 naik menjadi 63,89%. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kota Solok yang bergerak di usaha produktif semakin meningkat, tetapi kalau dilihat perkembangannya setiap tahun tidak menunjukkan pertumbuhan yang konstan. Tingkat pencari kerja yang ditempatkan di Kota Solok selama lima tahun terakhir juga mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Jika pada tahun 2010 hanya 1,95% pencari kerja terdaftar mendapatkan pekerjaan, pada tahun 2015 meningkat menjadi 15,62%. Hal ini menunjukkan fasilitasi dan system penyusunan informasi data penempatan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mengalami perbaikan dan memiliki kontribusi positif pada penurunan angka pengangguran yang ada di Kota Solok. Untuk pembentukan lembaga bipartit yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Solok dapat dilihat pada perkembangan jumlah lembaga bipartit yang berkembang dari 2 lembaga pada tahun 2010 menjadi 6 lembaga pada tahun 2016. Pembentukan Lembaga bipartit bertujuan sebagai jembatan komunikasi antara manajemen perusahaan dengan pekerja agar terjalin hubungan industrial yang harmonis antar pengusaha. Pada penyelesaian kasus hubungan industrial, dalam kurun 2010-2015 semua kasus (100%) dapat diselesaikan melalui mediasi oleh Pemerintah Kota Solok. Pada rasio tenaga kerja yang dilatih dan mandiri meningkat dari 74,00 pada tahun 2010 menjadi 87% pada tahun 2015.

Selanjutnya perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka yang ada di Kota Solok bila dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat, dapat dilihat pada gambar 2.14 berikut :



Gambar 2.14.
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Solok dan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2010-2015



Tingkat pengangguran terbuka Kota Solok dari tahun 2010 berfluktuasi. Jika pada tahun 2010 tingkat pengangguran terbuka sebesar 9,6%, pada tahun 2011-2013 cenderung turun sampai 5,46% pada tahun 2013 dan kemudian pada tahun 2014 naik lagi menjadi 6,49% dan turun lagi menjadi 4,72% pada tahun 2015.

Walaupun demikian, pada tahun 2010 dan 2011 tingkat pengangguran Kota Solok masih cukup tinggi bila dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat. Kondisi ini perlu penanganan yang lebih intensif lagi di masa yang akan datang. Upaya pelatihan-pelatihan kewirausahaan dan kreatifitas bagi para pencari kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja secara kontinyu dan konsisten harus dilakukan dalam upaya peningkatan daya saing tenaga kerja sesuai kompetensinya. Pada tahun 2015 tingkat pengangguran Kota Solok berada pada 4,72%, lebih rendah dari tingkat pengangguran Provinsi Sumatera Barat sebesar 6,89%

Terkait dengan penyerapan tenaga kerja, dapat didefinisikan dengan banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya pertumbuhan penduduk bekerja. Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor perekonomian. Terserapnya penduduk bekerja disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja. Oleh karena itu, penyerapan tenaga kerja dapat dikatakan sebagai permintaan tenaga kerja

Tabel 2.68.
PENYERAPAN TENAGA KERJA MENURUT LAPANGAN USAHA DI KOTA SOLOK
TAHUN 2010 -2015

No	LAPANGAN USAHA	TAHUN					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan	13.47%	5.97%	7.57%	2.98%	3.90%	8.95%
2	Pertambangan dan penggalian	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
3	Industri Pengolahan	5.55%	4.02%	7.34%	8.37%	4.05%	4.02%
4	Listrik, gas dan air	1.49%	0.00%	0.52%	1.26%	0.46%	1.26%
5	Bangunan	8.08%	10.45%	7.06%	7.89%	8.28%	5.69%
6	Perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel	10.14%	11.27%	13.71%	15.17%	20.44%	15.51%
7	Angkutan, pergudangan dan komunikasi	6.18%	5.77%	7.82%	4.26%	5.81%	4.43%
8	Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan	2.49%	4.10%	2.47%	6.90%	5.00%	6.35%
9	Jasa kemasyarakatan	50.90%	57.89%	52.83%	52.27%	51.34%	53.69%



Berdasarkan 2.68 dalam kurun waktu tahun 2010 – 2015 penyerapan tenaga kerja di Kota Solok terbesar disumbangkan oleh jasa kemasyarakatan, dan terkecil pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Sepanjang tahun 2010 sampai 2015 jasa kemasyarakatan menyumbang kontribusi diatas 50% terhadap penyerapan tenaga kerja. Sedangkan sektor pertambangan dan penggalian menyerap tenaga kerja sangat kecil tidak mencapai 0,00%.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Arah pembangunan yang dirumuskan dalam Inpres No 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dengan jelas menempatkan pengarusutamaan gender dalam setiap kebijakan pembangunan yang terimplementasikan dalam program dan strategi pembangunan ditingkat Kabupaten dan Kota, dimana dikuatkan dan dipertegas kembali dalam UU No. 5 tahun 2004 tentang sistim perencanaan pembangunan nasional. Pembangunan dengan pendekatan Gender merupakan pendekatan pembangunan yang saat ini digunakan oleh Indonesia dan terumuskan dalam kebijakan-kebijakan yang menjadi landasan hukum dan teknis. Pendekatan Pembangunan ini dalam implementasinya menekankan kepada proses penyusunan perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi pembangunan yang mengintegrasikan aspirasi, kepentingan dan peranan laki-laki dan perempuan didalamnya, serta memperhatikan akses, manfaat dan dampak pembangunan terhadap laki-laki dan perempuan. Selanjutnya pendekatan pembangunan Gender and Development tidak hanya dilihat dalam arti peningkatan akses pada sumber daya dan perbaikan tingkat kesejahteraan, tetapi juga menyangkut proses bagaimana manfaat pembangunan tersebut diperoleh. Artinya bagaimana akses, manfaat, kontrol dan dampak pembangunan dapat dirasakan oleh laki-laki dan perempuan sesuai kebutuhan, aspirasi dan kepentingannya.

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta, besarnya angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, seperti terlihat pada tabel 2.69 :

Tabel 2.69.
Persentase Pekerja Perempuan, Rasio KDRT dan Penyelesaian Kasus Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Solok Tahun 2010 – 2015

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Satuan
1	Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah	18,70	19,23	24,00	23,80	26,97	28,77	%
2	Persentase pekerja perempuan di lembaga swasta	81,30	80,77	76,00	76,20	73,03	71,23	%
3	Partisipasi angkatan kerja perempuan	90,00	92,76	92,76	94,00	94,00	95,66	%
4	Rasio KDRT	0,07	0,10	0,07	0,21	0,07	0,03	%
5	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100	100	100	100	100	100	%

Sumber : Dinas PPPA Kota Solok dan Polres Solok

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa perempuan di Kota Solok sudah cukup banyak berpartisipasi dalam pembangunan yang terlihat dari semakin meningkatnya partisipasi angkatan kerja perempuan terutama di sektor pemerintahan, sedangkan di sektor swasta



pekerja perempuan menunjukkan perkembangan yang semakin menurun. Hal ini menunjukkan bahwa instansi pemerintah menjadi lapangan usaha yang menarik bagi kaum perempuan. Ratio KDRT menunjukkan perkembangan yang semakin menurun artinya keberadaan P2TP2A dan kelompok-kelompok PKDRT di kelurahan sudah berperan untuk membantu masyarakat untuk kasus KDRT. Untuk meningkatkan peran Pemerintah Kota Solok terhadap pencegahan kasus KDRT tidak terlepas dari peran masyarakat dalam melaporkan kasus KDRT yang mereka alami ke Pusat P2TP2A Kota Solok sehingga dapat ditangani dan diselesaikan.

3. Pangan

Pembangunan Ketahanan pangan memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional. Peran Strategis ketahanan pangan digambarkan melalui kontribusi nyata dalam penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, distribusi dan konsumsi pangan. Penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan pada kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat berdasarkan perspektif kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan harus mengutamakan produksi wilayah serta dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal. Untuk mewujudkan hal tersebut, tiga hal pokok yang harus diperhatikan adalah :

1. Ketersediaan pangan
2. Distribusi Pangan serta
3. Pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan untuk hidup sehat, aktif dan produktif

Pada tabel 2.70 dapat dilihat perkembangan Tingkat Ketersediaan Pangan di Kota Solok dari tahun 2010 s/d 2015.

Tabel 2.70.
Ketersediaan Pangan Tahun 2010 s/d 2015

No	Tahun	Ketersediaan Pangan (Ton/tahun)
1	2010	10,681
2	2011	9,311
3	2012	9,257
4	2013	8,346
5	2014	10,741
6	2015	10,184

Sumber: Dinas Pangan Kota Solok

Dari tabel diatas, terlihat bahwa perkembangan ketersediaan Pangan diKota Solok tiap tahunnya sangat bervariasi. Penurunan terjadi dari tahun 2010 s/d 2013, hal inipun disebabkan bahan pangan (beras) yang masuk ke Kota Solok sedikit, sedangkan jumlah produksi beras di kota Solok juga mengalami penurunan. Pada tahun 2014 mengalami kenaikan ,karena pada saat yang bersamaan, beras yang masuk ke kota Solok banyak dan pada waktu yang bersamaan produksi beras di Kota Solok juga meningkat.

Selanjutnya perkembangan ketersediaan Energi dan Protein dapat dilihat pada tabel 2.71 :



Tabel 2.71.
Ketersediaan Energi dan Protein Tahun 2010 s/d 2015

No	Tahun	Energi		Protein	
		Ketersediaan Energi (Kkal/kap/hr)	Tingkat Ketersediaan (%)	Ketersediaan Protein (gr/kap/hr)	Tingkat Ketersediaan (%)
1	2010	3.076	138,81	82,00	143,89
2	2011	3.398	154,44	107,05	187,81
3	2012	3.453	157,00	97,52	171,09
4	2013	3.349	152,23	93,21	163,53
5	2014	3.644	165,64	98,01	171,95
6	2015	3.486	151,80	82,93	155,70

Sumber: Dinas Pangan Kota Solok

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat dilihat bahwa ketersediaan energi tiap tahunnya sangat bervariasi, hal ini disebabkan diantaranya untuk produksi padi-padian, karena berkurangnya lahan pertanian yang banyak beralih fungsi menjadi lahan infrastruktur. Sedangkan untuk ketersediaan protein tiap tahun juga bervariasi, hal ini disebabkan penurunan beberapa kelompok pangan dan juga penurunan produksi beberapa komoditas pangan yang ada di Kota Solok.

Secara umum, tingkat ketersediaan pangan untuk dikonsumsi masyarakat Kota Solok telah melebihi dari kebutuhan yang diperlukan. Namun yang menjadi kendala adalah masalah harga atau keterjangkauan daya beli masyarakat untuk pemenuhan konsumsinya.

Sedangkan untuk ketersediaan protein tiap tahun juga bervariasi, hal ini disebabkan penurunan beberapa kelompok pangan dan juga penurunan produksi beberapa komoditas pangan yang ada di Kota Solok dan jumlah bahan pangan keluar/masuk daerah Kota Solok belum seluruhnya teridentifikasi sehingga data ekspor dan impor dari/ke Kota Solok belum tersedia.

Distribusi pangan berfungsi mewujudkan sistem penyaluran pangan yang efektif dan efisien agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Dalam rangka menstabilkan harga gabah yang layak di tingkat petani, maka Kota Solok telah mengembangkan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) melalui pendekatan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang sampai tahun 2015 ini telah terbentuk 1 (satu) LDPM. Sedangkan Lumbung Pangan dan Tunda Jual sampai dengan tahun 2015 berjumlah 18 Kelompok

Pola Pangan Harapan Masyarakat adalah susunan beragam pangan yang didasarkan kepada sumbangan energi dari kelompok pangan utama(baik absolut maupun relatif). Pada tabel 2.72 dapat dilihat Skor Pola Pangan Harapan Kota Solok.

Tabel 2.72.
Skor Pola Pangan Harapan Kota Solok tahun 2010 s/d 2015

No	Kelompok Pangan	Skor PPH Ideal	Skor Pola Pangan Harapan					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Padi-padian	25,00	25,00	25,00	13,30	13,27	17,00	25,00
2	Umbi-umbian	2,50	0,50	1,30	0,90	1,17	1,00	1,10
3	Pangan Hewani	24,00	19,40	24,00	19,50	24,00	24,00	21,40
4	Minyak dan Lemak	5,00	5,00	5,00	4,90	4,17	4,10	5,00
5	Buah biji berminyak	1,00	0,90	0,50	0,20	0,17	0,70	0,70
6	Kacang-kacangan	10,00	6,80	6,30	7,20	8,42	5,30	5,40



No	Kelompok Pangan	Skor PPH Ideal	Skor Pola Pangan Harapan					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
7	Gula	2,50	0,80	1,40	0,90	0,95	0,90	0,70
8	Sayur dan buah	30,00	16,50	17,80	25,90	26,06	26,10	20,30
9	Lain-lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		100,00	74,90	76,80	77,30	78,80	79,00	79,50

Sumber: Dinas Pangan Kota Solok

Dari Tabel diatas terlihat bahwa pola konsumsi ragam pangan masyarakat tiap tahunnya mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan semakin baiknya tingkat perekonomian masyarakat dan bertambahnya kesadaran masyarakat tentang keragaman pola konsumsi, walaupun belum memenuhi skor PPH ideal. Skor Pola Pangan Harapan yang ideal seharusnya 100, sedangkan di Kota Solok masih 79,50, artinya masih dibutuhkan usaha untuk dapat mencapai target yang seharusnya dikonsumsi masyarakat

4. Pertanahan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 7 Tahun 1984 berikut perubahannya Perda No 5 Tahun 1987 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (Advice Planning), masyarakat (perorangan atau badan usaha) yang mengajukan izin advice planning untuk pembangunan perumahan harus menyerahkan luasan tanah berdasarkan prosentase tertentu yang diperuntukkan untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial yang selanjutnya menjadi milik pemerintah daerah. Tanah fasilitas umum/fasum terdiri dari rencana jalan, rencana pelebaran jalan dan taman sedangkan tanah fasilitas sosial/fasos tanah yang diperuntukkan untuk kegiatan/aktivitas sosial.

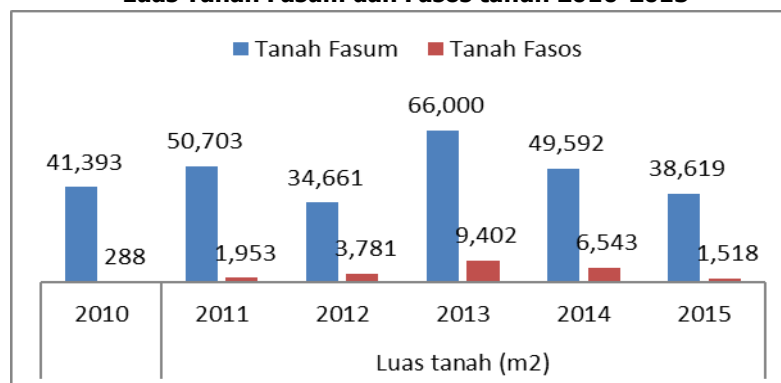
Data luas tanah fasum/fasos dari hasil advice planning yang diajukan masyarakat dari tahun 2010-2015 dapat dilihat pada Tabel 2.73 dan Gambar 2.15 :

Tabel 2.73
Luas Tanah Fasum dan Tanah Fasos dari Hasil Advice Planning yang Diajukan Masyarakat Tahun 2010-2015

No	Uraian	Luas tanah (m2)					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Tanah Fasum	41.393	50.703	34.661	66.000	49.592	38.619
2	Tanah Fasos	288	1.953	3.781	9.402	6.543	1.518
Jumlah		41.681	52.656	38.442	75.402	56.135	40.137

Sumber : Dinas PUPR Kota Solok

Gambar 2.15.
Luas Tanah Fasum dan Fasos tahun 2010-2015



5. Lingkungan Hidup

Kota Solok dilewati oleh 3 sungai yaitu Sungai Batang Lembang, Batang Gawan dan Batang Bingung. Batang Lembang merupakan sungai utama yang berhulu di Kabupaten Solok. Dari hasil pemantauan kualitas air sungai Batang Lembang dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 terjadi kecenderungan penurunan kualitas air. Hal ini disebabkan oleh adanya air buangan akibat aktifitas rumah tangga dan aktivitas usaha/kegiatan pertanian, peternakan, industri, tanpa proses pengolahan dibuang ke badan sungai.

Hasil pemantauan kualitas air Batang Lembang tahun 2010-2015 disajikan pada tabel 2.74.

Tabel 2.74.
Hasil Pemantauan Kualitas Air Sungai Bt. Lembang Tahun 2010-2015

NO	PARAMETER	BAKU MUTU	SATUAN	TAHUN					
				2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	pH	6-9		7.1	7.41	6.9	7.49	6.1	6.87
2	BOD5	maks 3	mg/L	1.08	0.42	2.33	1.60	0.98	2.46
3	COD	maks 25	mg/L	19.0	14	7.04	5	7	8
4	TSS	maks 50	mg/L	32.0	22	32	23	30	16
5	TDS	maks 1000	mg/L	142.0	154	152	121	104	156
6	PO4	maks 0,2	mg/L	0.2	0.11	0.13	0.379	0.03	0.09
7	SULFIDA	maks 0,002	mg/L	0.252	0.004	0.34	0.005	0.003	NA
8	AMONIAK	-	mg/L	8.64	7.38	2	3.33	7.90	-
9	Nitrat	10	mg/L	NA	0.541	0.57	0.788	0.788	0.73
10	Nitrit	0.06	mg/L	NA	0.065	0.1	0.017	0.017	0.44

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok

Kualitas air sungai merupakan salah satu indikator kualitas lingkungan. Perhitungan indeks untuk indikator kualitas air sungai dan air permukaan (IKA) dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air, dengan parameter dan baku mutu berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air untuk kelas II. Sampai tahun 2015 belum ada data tentang Indeks Kualitas Air (IKA) karena pengukuran kualitas air belum berdasarkan pada parameter yang dipersyaratkan untuk perhitungan IKA.

Pemantauan kualitas udara ambien Kota Solok selama 3 tahun terakhir dilakukan di Terminal Barih Solok. Lokasi ini merupakan jalur padat transportasi karena merupakan jalur lintas Sumatera. Baku Mutu Udara Ambien ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Data pengukuran kualitas udara ambien dari tahun 2010-2015 disajikan dalam Tabel 2.71, khusus untuk data tahun 2010-2012, belum dilakukan pengukuran kualitas udara sehingga data tidak tersedia.

Tabel 2.75.
Pengukuran Kualitas Udara Ambien Tahun 2010 – 2015

No	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Tahun					
				2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	SO2	µg/Nm3	365	NA	NA	NA	108,4	17,44	41,26
2.	CO	µg/Nm3	10.000	NA	NA	NA	6758	9600	2920
3.	NO2	µg/Nm3	150	NA	NA	NA	68,47	5	12,78
4.	O3	µg/Nm3	235	NA	NA	NA	66,99	37,96	37,58
5.	TSP	µg/Nm3	230	NA	NA	NA	185,8	192,2	169,9

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok



Berdasarkan Tabel 2.75 dapat dilihat bahwa kualitas udara ambien Kota Solok masih berada dibawah baku mutu. Berdasarkan paramater yang ditetapkan dalam keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45/MENLH/1997 Tentang Indeks Standar pencemar Udara, Indeks Kualitas udara Kota Solok Tahun 2010- 2015 dapat dilihat pada tabel 2.72 :

Tabel 2.76.
Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Solok Tahun 2010-2015

No	Tahun	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Keterangan
1	2010	NA	-
2	2011	NA	-
3	2012	NA	-
4	2013	80,75	Baik
5	2014	93,48	Sangat baik
6	2015	81,92	Baik

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok

Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) ditambah dengan indeks tutupan hutan/lahan merupakan indikator yang digunakan dalam menentukan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH). IKLH memberikan Informasi kepada para pengambil keputusan tentang kondisi lingkungan sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan peningkatan aktivitas baik di rumah tangga/domestic maupun non domestik, timbulan sampah terus meningkat setiap tahunnya. Jumlah timbulan sampah dan sampah terangkut selama 6 (enam) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.77:

Tabel 2.77
Jumlah Timbulan dan Sampah Terangkut Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Timbulan sampah (m3/hari)	147	165,16	168,51	170,65	186,16	174,95
2	Sampah terangkut (m3/hari)	79,56	89,70	112,28	113,79	130,27	122,08
3	Persentase pelayanan	54,12	54,31	66,63	66,68	69,98	69,78

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok

Sesuai dengan ketentuan, pengelolaan sampah dari rumah tangga ke TPS menjadi tanggungjawab masyarakat sedangkan pengelolaan sampah dari TPS ke TPA menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Dalam rangka mengurangi jumlah timbulan sampah dan sampah yang diangkut ke TPA perlu ditingkatkan upaya pengelolaan sampah melalui pola 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

Sarana pengangkutan persampahan yang dimiliki pemerintah daerah terdiri dari 10 (sepuluh) unit dumptruk, 5 (lima) unit armroll truk, 8 (delapan) unit becak motor sampah dan 11 (sebelas) unit gerobak sampah.

Pemrosesan akhir sampah dilakukan di TPA regional Ampang Kualo yang pada awalnya dikelola oleh pemerintah daerah, sejak tahun 2015 dikelola oleh UPTD Pemerintah Provinsi Sumbar. TPA Ampang Kualo dirancang untuk pengelolaan secara sanitary landfill dimana sampah ditutup dengan lapisan tanah setiap harinya namun dalam prakteknya pengelolaan masih berupa *control landfill* karena penutupan dengan lapisan tanah belum dilakukan setiap hari.



Terkait dengan Tempat Pemakam Umum (TPU), sampai tahun 2015, Kota Solok belum memiliki TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. TPU termasuk salah satu kategori Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota. Pada tahun 2015 luas RTH kota mencapai 989,08 Ha atau 17,16% dari luas kota. Rinciannya dapat dilihat pada tabel 2.78 :

Tabel 2.78.
Luas Ruang Terbuka Hijau Publik

No	Jenis RTH	Luas (Ha)	Persentase dari luas kota
I	RTH Taman Kota	11,72	0,20
II	Hutan Kota	875,97	15,20
III	RTH jalur hijau jalan	10	0,17
IV	RTH Fungsi tertentu	91,39	1,59
	Total	989.08	17,16

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai nilai strategis di bidang perencanaan, pengembangan dan penanganan permasalahan pembangunan. Kebijakan kependudukan seharusnya digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan. Hal ini lebih kita kenal sebagai konsep pembangunan berwawasan kependudukan. Langkah awal dalam mewujudkan konsep pembangunan berwawasan kependudukan adalah melaksanakan pembangunan di bidang administrasi kependudukan.

Terjadinya kecenderungan pertambahan penduduk perlu diantisipasi dengan adanya pembenahan administrasi kependudukan menuju ke arah yang lebih baik sehingga jumlah yang terus bertambah ini dapat dimanfaatkan menjadi potensi dalam melaksanakan pembangunan. Keseriusan Pemerintah Kota Solok dalam melakukan pembenahan administrasi ini dapat dilihat dari perkembangan beberapa indikator seperti terlihat pada table 2.79:

Tabel 2.79.
Perkembangan Capaian Indikator Penyelenggaraan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Solok Tahun 2010-2015

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A.	Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk						
1	Jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas yang ber-KTP	-	31.388	33.954	35.429	39.783	40.484
2	Jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah menikah (wajib KTP)	47.068	49.592	45.740	45.972	43.709	44.503
3	Rasio penduduk ber-KTP	-	63,29	74,23	77,07	91,02	90,97
B.	Rasio bayi ber-akte kelahiran						
1	Jumlah Bayi lahir berakte kelahiran tahun t	-	355	769	725	724	476
2	Jumlah seluruh bayi lahir tahun t	-	841	890	917	786	512
3	Rasio	-	42,21	86,40	79,06	92,11	92,97
C.	Rasio pasangan ber-akte nikah						
1	Jumlah seluruh pasangan nikah berakte nikah	5.409	17.833	17.491	18.595	19.104	20.124
2	Jumlah seluruh pasangan nikah	28.200	30.181	28.183	28.914	27.877	28.559



No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
3	Rasio	19,19	59,09	62,06	64,31	68,53	70,46
D.	Rasio kepala keluarga memiliki kartu keluarga						
1	Jumlah kartu keluarga	15.959	17.257	16.415	16.885	16.068	16.874
2	Jumlah kepala keluarga	17.053	18.337	17.305	17.836	16.935	17.756
3	Rasio	94	94	95	95	95	95
E.	Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk						
1	Jumlah Penduduk yang memiliki akte kelahiran	-	16.758	20.095	22.494	24.650	27.411
2	Jumlah Penduduk	68.465	72.372	67.422	67.936	64.573	65.157
3	Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	-	23,16	29,80	33,11	38,17	37
F.	Ketersediaan database kependudukan skala propinsi	Tidak ada	Ada	Ada	ada	Ada	Ada
G.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	sudah	sudah	Sudah	Sudah

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Solok

Untuk data indikator kinerja pada tahun 2010 tidak semua data indikator dapat diketahui, karena pada tahun 2010 Disdukcapil masih tergabung dengan Sosial Tenaga Kerja (KPST), sementara Disdukcapil tersebut baru terbentuk pada bulan Juni 2011. Disamping itu data-data pada indikator tahun 2010 masih menggunakan aplikasi Siak Online, dimana untuk kepengurusan administrasi penduduk dapat langsung melalui kecamatan sehingga output penduduk dikeluarkan oleh kecamatan.

Jika terjadi kesalahan data, petugas kecamatan tidak dapat melakukan validasi karena kewenangan pusat, dan proses validasi tersebut memakan waktu sehingga terjadi data ganda dan kesalahan data lainnya.

Data mulai bersih dan baik ketika telah diberlakukannya SIAK Offline dari kementerian. Kewenangan pemda untuk mengelola data diberikan ke Disdukcapil pada tahun 2011 dan validasi data selalu dilakukan kementerian per dua semester.

Rasio penduduk ber KTP dibandingkan dengan penduduk wajib KTP pada Tahun 2011 sebesar 63,29% meningkat menjadi 90,97% pada tahun 2015. Peningkatan ini tidak terlepas dari adanya konsolidasi dan pembersihan ulang data penduduk Kota Solok yang diterbitkan oleh Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri. Untuk pelayanan kependudukan pada tahun 2011-2015 mengalami peningkatan karena angka kelahiran juga meningkat, yang berakibat pada peningkatan permohonan akte kelahiran. Hal ini bisa dilihat pada kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk yang meningkat tiap tahunnya. Dan untuk indikator Rasio pasangan berakte nikah meningkat dari tahun 2011 sebanyak 59,09% menjadi 70,46% ini karena adanya pembenahan administrasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang akan menikah. Peningkatan untuk layanan penduduk yang memiliki KK dalam indikator Rasio kepala keluarga memiliki kartu keluarga juga terjadi peningkatan dari 940% pada tahun 2011 menjadi 95% di tahun 2015. Begitu pula halnya dengan indikator kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk juga mengalami peningkatan dari 23,16% pada tahun 2011 menjadi 37% pada tahun 2015.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pergerakan masyarakat dalam pembangunan sosial, budaya dan ekonomi untuk menciptakan masyarakat yang berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial agar mampu memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Lembaga yang memiliki peran didalam pemberdayaan masyarakat diantaranya



melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). LPM dan PKK merupakan mitra kelurahan dan garda terdepan pemberdayaan masyarakat layak dan memiliki intesitas yang tinggi dalam berinteraksi dengan masyarakat di wilayahnya. Kedua lembaga tertinggi masyarakat di tingkat kelurahan ini masing-masing memiliki kelompok binaan yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Kelurahan dan perkembangan LPM Kelurahan berprestasi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 2.80:

Tabel 2.80.
Rata – Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Kota Solok Tahun 2010 – 2015

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah kelompok binaan LPM Kelurahan	5	5	5	5	5	5
2	Jumlah LPM Kelurahan	13	13	13	13	13	13
3	Rata – rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
4.	Jumlah LPM Berprestasi	0	0	0	0	1	1

Sumber :Kecamatan Lubuk Sikarah dan Tanjung Harapan

Dari tabel 2.76 menunjukkan bahwa lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) membina 5 kelompok yang ada di kelurahan, yaitu organisasi pemuda kelurahan, karang taruna, pnpm, pkk kelurahan dan RT/RW. Berkat kerjasama baik antara pihak kelurahan, LPM dan kelompok binaan telah dapat mencapai prestasi pada tahun 2014, yaitu juara tiga LPM berprestasi tingkat propinsi yang diraih oleh Kelurahan Tanah Garam.

Adapun untuk lembaga PKK Kelurahan, pembinaan yang dilakukan adalah pembinaan yang dilakukan kelompok-kelompok kerja (Pokja) terhadap kelompok PKK RT/RW yang ada di 13 kelurahan mulai dari Tim Penggerak PKK dari tingkat kota, kecamatan sampai ke tingkat kelurahan, yang perkembangannya dari tahun 2010 sampai 2015 dapat dilihat pada tabel 2.81 :

Tabel 2.81.
Rata – Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kelurahan Tahun 2010 – 2015 Kota Solok

NO	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah kelompok binaan PKK	71	75	77	78	78	108
2	Jumlah PKK Kelurahan	179	183	185	186	186	191
3	Rata – rata jumlah kelompok binaan PKK	39,83	41,18	41,33	41,67	41,80	56,52

Sumber : DPPP Kota Solok

Pembinaan yang dilakukan terhadap PKK RT/RW ini telah meningkatkan persentase jumlah PKK Aktif di Kota dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 seperti dapat dilihat pada tabel 2.82 :



Tabel 2.82.
PKK Aktif Kota Solok Tahun 2010 – 2015

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah PKK aktif	110	115	119	120	125	147
2	Jumlah PKK	195	199	201	202	202	207
3	Ratio PKK Aktif	56,24	57,87	59,55	59,55	62,11	71,01

Sumber : DPPPA Kota Solok

Perkembangan pemberdayaan masyarakat dapat terlihat dari peranan kader-kader dalam menggerakkan kegiatan posyandu yang perkembangannya dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 pada tabel 2.83:

Tabel 2.83.
Posyandu Aktif Kota Solok Tahun 2010 – 2015

NO	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Posyandu aktif	79	79	80	81	82	83
2	Total posyandu	79	79	80	81	82	83
3	Rata – rata Posyandu Aktif	100	100	100	100	100	100

Sumber : Kecamatan Lubuk Sikarah dan Tanjung Harapan

Untuk meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, Pemerintah Kota Solok melaksanakan kegiatan Gotong Royong Badunsanak (Goro Bandunsanak) di setiap kelurahan sebagai wujud pelaksanaan program nasional Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM). Perkembangan persentase swadaya masyarakat dalam kegiatan Goro Badunsanak dapat dilihat pada tabel 2.84:

Tabel 2.84.
Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2010 – 2015 Kota Solok

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rata – rata swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan (%)	79,4	94,39	44,80	10,33	37,8	33,79
2	Rata-rata pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat (%)	54,35	55,16	57,85	57,25	64,88	60,93

Sumber : Kecamatan Lubuk Sikarah dan Tanjung Harapan

Dari tabel 2.84 terlihat bahwa pada tahun 2011 mencapai rasio swadaya yang paling tinggi dimana pada tahun tersebut terdapat masyarakat yang menyerahkan tanahnya untuk kepentingan umum. Pada tahun 2012 rasio swadaya menurun dan pada tahun 2013 semakin menurun. Hal ini disebabkan kenaikan besaran dana stimulan pemerintah untuk pelaksanaan Goro Bandunsanak ini naik dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per kelurahan pada tahun 2012 menjadi Rp. 15. 000.000,- (lima belas juta rupiah) per RT sehingga menyebabkan nilai rasio menjadi semakin kecil. Pada tahun 2014 nilai rasio ini kembali mencapai kenaikan dengan adanya kebijakan dalam pelaksanaan Goro Badunsanak dengan memasukkan unsur partisipasi masyarakat sebagai persyaratan dalam pelaksanaan kegiatan. Peran masyarakat dalam pemeliharaan pasca program pemberdayaan, perkembangan juga mulai menunjukkan perkembangan yang cukup baik, ini artinya tanggung jawab masyarakat dalam memelihara proyek fisik yang dilaksanakan melalui program goro sudah cukup baik.



8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Capaian upaya pembangunan melalui keluarga Berencana dapat dilihat dari beberapa indikator pada tabel 2.85:

Tabel 2.85.
Capaian Keberhasilan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Di Kota Solok Tahun 2010 – 2015

NO	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Satuan
1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,73	2,40	2,22	2,21	2,03	1,90	Anak
2	Cakupan peserta KB aktif	70	76,74	73,63	72,40	71,91	72,5	%
3	Cakupan Keluarga Pra sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	29,03	25,88	29,85	29,74	23,24	22,09	%

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Solok

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa upaya pembangunan Kota Solok melalui keluarga berencana berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata jumlah anak per keluarga di Kota Solok yang menurun dari 2,73 anak pada tahun 2010 menjadi 1,9 anak per keluarga pada tahun 2015 serta persentase keluarga Pra sejahtera dan Keluarga Sejahtera I mencapai angka terendah pada tahun 2015.

9. Perhubungan

Transportasi merupakan salah satu roda pendorong pertumbuhan ekonomi dan tulang punggung dari proses distribusi baik orang maupun barang, serta juga berperan sebagai pendorong perkembangan wilayah. Ketersediaan infrastruktur transportasi merupakan salah satu aspek dalam meningkatkan daya saing produk daerah sehingga harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan perkembangan teknologi dan kondisi sosial masyarakat.

Urusan perhubungan merupakan salah satu urusan wajib yang dilaksanakan di Kota Solok dengan penekanan pelayanan hanya pada layanan transportasi darat dalam hal ini layanan angkutan jalan raya. Penyelenggaraan urusan perhubungan ini juga didorong oleh letak Kota Solok yang strategis dimana berada dipersimpangan jalan sebagai salah satu titik simpul lalu lintas angkutan barang dan angkutan orang di Propinsi Sumatera Barat khususnya Sumatera Barat bagian timur. Adapun prasarana dan sarana transportasi yang ada di Kota Solok dapat dilihat pada tabel 2.86 dan 2.87:

Tabel 2.86.
Jumlah Prasarana Perhubungan Di Kota Solok Tahun 2015

No	Jenis Prasarana	Satuan	Jumlah
1.	Jalan Nasional	Km	12,08
2.	Jalan Propinsi	Km	2,6
3.	Jalan Kabupaten/Kota	Km	185,66
4.	Jembatan	Buah	52
5.	Rel	Km	15
6.	Terminal Penumpang	Unit	2
7.	Stasiun Kereta Api	Unit	1
8.	Halte di Jalan Nasional	Unit	4
9.	Halte di Jalan Propinsi	Unit	1
10.	Halte di Jalan Kabupaten/Kota	Unit	-

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Solok



Tabel 2.87.
Jumlah Sarana Perhubungan Di Kota Solok Tahun 2010 - 2015

No.	Uraian	Satuan	Tahun					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Rambu-rambu	Unit	86	101	113	219	230	281
2.	RPPJ	Unit	4	8	8	10	18	24
3.	Rambu Ukuran Besar	Unit	0	0	0	26	23	23
4.	Pagar Pengaman Jalan	Meter	0	0	0	0	300	300
5.	Unit Pengujian Kendaraan Bermotor	Unit	1	1	1	1	1	1
6.	Traffic Light	Unit	6	6	6	6	6	6
7.	Warning Light	Unit	0	1	1	2	2	2
8.	Papan Penunjuk Arah	Unit	4	4	4	4	6	7

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Solok

Mengingat posisi Kota Solok dipersimpangan tersebut, maka perkembangan angkutan akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan penduduk dan peningkatan perekonomian daerah sekitar. Fungsi angkutan yang keluar masuk di Kota Solok terdiri dari angkutan perkotaan, angkutan pedesaan, angkutan kota dalam propinsi, angkutan kota antar propinsi maupun angkutan barang. Adapun perkembangan kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang melayani angkutan barang dan orang serta ijin trayek di Kota Solok dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.88 dan tabel 2.89 :

Tabel. 2.88.
Jumlah dan Jenis Angkutan di Kota Solok Tahun 2010-2015

No.	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Mobil Penumpang	4.376	4.390	4.428	4.480	4.488	4.497
2.	Mobil Bus	77	81	84	84	85	85
3.	Mobil Barang (Truk)	2.447	2.473	2.484	2.491	2.504	2.520
4.	Bendi	80	72	58	50	45	38
5.	Becak Bermotor	52	49	44	44	42	46
6.	Angkot	80	74	60	54	48	41

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Solok

Tabel. 2.89.
Jumlah Izin Trayek Tahun 2010-2015

No.	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Izin Trayek AKAP	3	3	3	2	2	2
2.	Izin Trayek AKDP	8	8	7	6	6	6
3.	Izin Trayek Angkutan Kota	2	2	2	2	2	2
4.	Izin Trayek Angkutan Pedesaan	17	17	15	15	15	15
5.	Jumlah	30	30	27	25	25	25

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Solok

Berdasarkan tabel 2.89 terlihat bahwa izin trayek yang dikeluarkan pada tahun 2015 terjadi penurunan dibanding tahun 2010 yang lalu. Penurunan jumlah izin trayek ini terjadi pada trayek antar kota antar propinsi dan antar kota dalam propinsi. Hal ini dapat dipahami karena dalam 5 tahun terakhir masyarakat yang membutuhkan layanan angkutan lebih



memilih moda transportasi travel dan angkutan udara, sehingga berpengaruh terhadap permintaan akan moda transportasi bus baik dalam propinsi maupun antar propinsi.

Guna mendukung kelancaran angkutan tersebut di Kota Solok saat ini terdapat dua unit terminal penumpang yang terdiri dari terminal angkutan perkotaan dan angkutan pedesaan serta terminal regional tipe A untuk AKDP dan AKAP dan satu unit Pos Tempat Pemungutan Retribusi (TPR). Adapun perkembangan jumlah penumpang Kota Solok dari tahun 2010-2015 dapat dilihat pada tabel 2.90 :

Tabel. 2.90.
Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2010-2015

No.	Uraian	Satuan	Tahun					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Penumpang AKAP	Orang	8.882	7.785	7.882	6.954	6.450	7.095
2.	Jumlah Penumpang AKDP	Orang	393.290	390.180	259.450	380.120	289.350	220.800
3.	Jumlah Penumpang Angkutan Kota	Orang	8.448	9.542	8.320	7.251	6.892	6.548
4.	Jumlah Penumpang Angkutan Pedesaan	Orang	96.312	94.120	94.110	90.121	89.430	116.259
	Jumlah Penumpang	Orang	506.932	501.627	369.762	484.446	392.122	350.702

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Solok

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah orang yang terangkut angkutan umum cenderung mengalami penurunan. Hal ini dapat disebabkan karena saat ini masyarakat mempunyai beragam pilihan moda transportasi seperti angkutan sewa eksekutif (travel) untuk AKDP maupun AKAP, disamping meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi baik kendaraan roda 2 maupun roda 4.

10. Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi meliputi informasi dan komunikasi publik (IKP), penyelenggaraan *e-government*, dan peran dari GPR (*Government Public Relationship*) dalam membentuk citra positif Pemerintah Kota Solok. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan transparansi penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Solok dibutuhkan keterbukaan terhadap informasi yang menyangkut pelayanan publik.

Kemajuan komunikasi dan informatika telah mendorong munculnya globalisasi dengan berbagai perspektifnya. Perkembangan tersebut diikuti dengan berkembangnya sarana dan prasarana komunikasi seperti website pemerintah kota solok, jumlah penyiaran radio maupun informasi dalam bentuk pameran selama 5 tahun terakhir.

Tabel 2.91.
Jumlah Sarana Komunikasi dan Informatika Kota Solok
Periode 2010-2015

No	Jenis Sarana Kominfo	Capaian Kinerja					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Web site milik Pemerintah Daerah	ada	ada	ada	ada	ada	ada
2.	Pameran/Expo	1	1	1	1	1	1
3.	Jumlah Surat Kabar Nasional/lokal	31	31	34	26	26	29



No	Jenis Sarana Kominfo	Capaian Kinerja					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
4.	Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal	4	4	4	4	3	4

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Solok

Penerapan teknologi informasi dengan menggunakan media internet atau media online khususnya website telah menjadi kebutuhan yang wajib dimiliki oleh sebuah Pemerintah Daerah. Website merupakan salah satu bentuk pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah bagi masyarakat luas dalam rangka memberikan informasi tentang bentuk-bentuk Peraturan Daerah (Perda)/ Dokumen Daerah serta pembangunan fisik/non fisik yang telah dilaksanakan.

Kehadiran website yang meningkat tiap tahun ini adalah sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparansi dan menjadi tuntutan yang tidak dapat ditawar lagi. Terbukanya akses informasi pelayanan kepada masyarakat baik mengenai anggaran, pengadaan barang dan jasa, bantuan sosial, layanan perizinan, RTRW dan RTRK, layanan KTP, Kartu Keluarga (KK), informasi kepegawaian, informasi tentang pendidikan dan informasi tentang hukum serta keterangan lainnya menjadi sebuah keharusan. Adanya kemudahan akses yang diimbangi dengan integritas jajaran pengelola Pemerintah Kota diharapkan akan menghasilkan percepatan pembangunan Kota Solok dan meningkatkan kepercayaan publik kepada birokrasi.

Selain itu penyebaran informasi kepada masyarakat umum dapat dilakukan dengan menggunakan media cetak. Surat kabar merupakan penerbitan yang berupa lembaran yang berisi berita-berita karangan, iklan yang dicetak dan diterbitkan secara tetap atau periodik dan didistribusikan kepada masyarakat umum. Lingkup berita dapat menyangkut berita internasional, nasional, maupun berita daerah (lokal). Fungsi dari surat kabar itu sendiri adalah untuk memberikan informasi yang beragam bagi masyarakat luas serta sebagai perpanjangan tangan pemerintah kepada masyarakat terkait program-program pembangunan yang telah dilaksanakan. Jumlah surat kabar nasional/lokal adalah banyaknya jenis surat kabar terbitan nasional atau terbitan lokal yang masuk ke daerah. Semakin banyak surat kabar di daerah menunjukkan bahwa semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi massa berupa media cetak sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Sedangkan kegiatan promosi melalui pameran/expo merupakan media yang cukup ampuh dalam memperkenalkan produk/jasa tertentu. Perkembangan pelaksanaan pameran/expo yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Perdagangan Kota Solok selama periode 2011-2015 dilakukan minimal 1 kali dalam setiap tahunnya yang dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT Kota Solok.

Penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Untuk mendorong percepatan peningkatan pelayanan publik pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan Publik sebagai kebijakan dan acuan bagi seluruh instansi pelayanan publik dalam menyelenggarakan pelayanan publiknya secara berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, terukur dan sesuai dengan standar pelayanan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah adalah dalam rangka memenuhi hak dan kebutuhan dasar dari masyarakat.



Sistem Informasi Pelayanan Publik dalam bentuk *e-government* merupakan salah satu metode yang dilakukan untuk kemudahan pelayanan publik. Adapun aspek dari e-government meliputi aspek kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan, selama 5 tahun terakhir Pemerintah Kota Solok secara garis besar sudah menjalankan 5 aspek pemeringkatan e- government yaitu sebagian kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan. Pada aspek kebijakan Pemerintah Kota Solok sudah merancang peraturan daerah ataupun peraturan Walikota tentang pelaksanaan administrasi kependudukan dan keuangan dengan memanfaatkan sistem informas. Dari segi kelembagaan telah dilaksanakan program pelatihan dan keterampilan SDM TIK, berupa bimbingan teknis penggunaan aplikasi e-government. Setelah itu Pemerintah Kota Solok telah memiliki jaringan antar SKPD berupa Intranet Wi-Fi dan akses internet Solok Kota, ketersediaan aplikasi sampai saat ini mencakup SIMAYA, SIPKD, SIAK-Online, SIPD, Solok Cerdas dan telah *melaunching* Solok menuju *smart city*. Terakhir dari aspek perencanaannya kota solok telah memiliki masterplan pengembangan *e-government* Tahun 2010-2015. Mulai Tahun 2017 ini setiap aspek pemeringkatan *e-government* perlu disempurnakan lagi dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Meningkatnya kualitas pelayanan publik merupakan salah satu sasaran untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang profesional dan akuntabel. Pelayanan informasi publik di Kota Solok melalui pelayanan satu pintu yakni layanan PPID (Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi). Masyarakat yang merasa tidak puas dengan pelaksanaan pelayanan publik di Kota Solok dapat mengajukan aduannya melalui aplikasi "LAPOR SP4N". Berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, Pemerintah berkomitmen untuk menampung dan menindaklanjuti setiap pengaduan pelayanan publik dengan menerbitkan aplikasi "LAPOR SP4N". Setiap Pemerintah Daerah harus melaksanakan tindak lanjut pengaduan pelayanan publik melalui aplikasi "LAPOR SP4N" ini. Selama periode 2011 -2015 telah terbentuk PPID Kota Solok dengan leading sektornya bagian humas setda Kota Solok, sedangkan untuk layanan pengaduan masyarakat secara online baru mulai akan dilaksanakan pada Tahun 2017.

11. Koperasi dan UKM

A. Persentase Koperasi Aktif

Perkembangan koperasi dari tahun 2010 hingga tahun 2015 mengalami peningkatan jika dilihat dari persentase koperasi aktif. Walaupun secara persentase, terjadi peningkatan koperasi aktif, tetapi jika dilihat dari jumlah koperasi aktif sejak tahun 2013 tidak mengalami peningkatan.

Pada tahun 2015 ada 7 buah koperasi yang dibubarkan, karena tidak ada kegiatan dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai lembaga koperasi, sehingga jumlah koperasi aktif menjadi riil kembali dari 64 koperasi menjadi 57 koperasi yang aktif. Jika dilihat dari volume usaha dan SHU dari koperasi yang ada sekarang terjadi peningkatan, dimana untuk volume usaha terjadi peningkatan sebesar 7,24% dan SHU sebesar 4,81%. Berikut perkembangan koperasi tahun 2010-2015 :

Tabel 2.92.
Perkembangan Koperasi Kota Solok Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun						Satuan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	Jml. Koperasi	63	63	64	64	64	57	Buah
2	Jml. Koperasi Aktif	47	47	48	49	49	49	Buah



No	Uraian	Tahun						Satuan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
3	Jml. Koperasi tidak Aktif	16	16	16	15	15	8	Buah
4	Persentase Koperasi Aktif	74,6	74,6	75	76,6	76,6	85,96	%
5	Jumlah Anggota	10.314	6.352	10.493	10.750	10.236	10.198	Orang
6	Modal Sendiri	26.205.574	29.870.360	37.264.277	40.272.572	43.688.901	43.262.252	Rp. 000
7	Hutang	40.116.451	31.735.437	30.844.761	47.052.059	51.318.665	48.107.210	Rp. 000
8	Total Asset	66.322.025	61.605.718	83.948.633	87.325.167	95.007.566	91.369.463	Rp. 000
9	Volume Usaha	41.661.090	55.221.118	61.453.417	70.724.219	61.278.352	65.715.019	Rp. 000
10	SHU	3.130.370	3.747.252	3.903.254	4.562.571	4.729.376	4.956.980	Rp. 000
11	Klasifikasi Koperasi							
	- A	10	10	10	17	16	17	Buah
	- B	19	19	19	7	21	24	Buah
	- C	20	20	19	25	9	8	Buah
	- D	12	16	16	15	15	8	Buah
12	Tkt. Kesehatan KSP/USP Koperasi							
	- Sehat	12	5	12	10	19	15	Buah
	- Cukup Sehat	25	17	24	24	21	20	Buah
	- Kurang Sehat	24	41	-	-	-	1	Buah
13	Pelaksanaan RAT	33	37	36	34	38	37	Buah

Sumber : Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kota Solok

B. Jumlah BPR

Disamping koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat, BPR juga menjadi lembaga keuangan yang bersentuhan langsung sebagai pendukung berkembangnya perekonomian rakyat. Pada tabel 2.93 dapat dilihat jumlah BPR konvensional dan syariah di Kota Solok.

Tabel 2.93.

Perkembangan BPR Kota Solok Tahun 2010-2015

No.	Jenis Usaha	Tahun						Satuan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	BPR Konvensional	5	5	5	5	5	5	
2	BPR Syariah	-	-	1	1	1	1	

Sumber : Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kota Solok

Jika dilihat dari jumlah BPR yang ada di Kota Solok mulai tahun 2010 sampai tahun 2015 hanya terdapat penambahan satu buah BPR yaitu BPR Syariah pada tahun 2012.

C. Usaha Mikro dan Kecil

Jumlah UMKM pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 141 UKM atau sebesar 10 % dibanding dengan tahun 2014. begitu juga dengan pertumbuhan modal, total omzet dan tenaga kerja secara rata-rata terjadi peningkatan sebesar 10%.

Jika dilihat lima tahun terakhir, perkembangan UKM di Kota Solok rata-rata setiap tahunnya terdapat 197 UKM baru dengan rata-rata omzet sebesar Rp.289.073.651,-. Berikut dapat dilihat perkembangan UKM Kota Solok pada tabel 2.94 :



Tabel 2.94.
Perkembangan UKM di Kota Solok 2010-2015

No.	Jenis Usaha	Tahun						Satuan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	Jumlah UKM	763	839	1.006	1.297	1.410	1.551	Unit
2	Modal Sendiri	64.625.700	71.088.270	78.197.100	86.016.810	93.758.322	103.134.154	Rp. 000
3	Modal Luar	42.852.850	47.138.135	51.851.950	57.170.520	62.315.866	68.547.452	Rp. 000
4	Total Assets	95.019.175	104.521.092	114.973.200	56.435.437	59.257.200	65.182.920	Rp. 000
5	Omzet	204.718.320	225.190.152	247.709.200	296.223.372	331.770.176	364.947.190	Rp. 000
6	Tenaga Kerja	1.875	2.062	2.269	4.028	4.148	4.562	Orang

Sumber: Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kota Solok

UKM di Kota Solok didominasi oleh Usaha Mikro dan kecil, dimana dari tahun 2010 penambahan jumlah UKM hanya terjadi pada usaha mikro, sedangkan pada usaha kecil dan menengah tidak terjadi penambahan jumlah usaha. Relatif belum berkembangnya usaha kecil dan menengah mengisyaratkan bahwa masih perlu dilakukan pembinaan dan pendampingan dari seluruh aspek yang berkaitan dengan penguatan usaha yang berorientasi pasar. Berikut dapat dilihat persentase usaha mikro dan kecil Kota Solok Tahun 2010-2015 :

Tabel 2.95.
Persentase Usaha Mikro dan Kecil Kota Solok Tahun 2010-2015

NO	Usaha	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Satuan
1	Mikro	650	728	895	1.184	1.297	1.438	unit
2	Kecil	111	111	111	111	111	111	unit
3	Menengah	2	2	2	2	2	2	unit
	Jumlah	763	839	1.008	1.297	1.410	1.551	unit
	% Usaha Mikro	99,74	99,76	99,80	99,84	99,86	99,87	%

Sumber: Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kota Solok

12. Penanaman Modal

Perkembangan nilai investasi menunjukkan kinerja Penanaman modal di daerah. Meningkatnya jumlah investasi pada salah satu sektor ekonomi di daerah akan membawa pengaruh yang positif terhadap perkembangan sektor ekonomi di Kota Solok secara keseluruhan. Perkembangan nilai investasi di Kota Solok dapat dilihat pada Tabel 2.96:

Tabel 2.96.
Rekapitulasi Pertumbuhan Nilai Investasi di Kota Solok
Tahun 2010-2015

No	Tahun	Nilai Investasi (Rp)	Pertumbuhan (%)
1	2010	228.581.197.089	
2	2011	239.265.785.411	4,67
3	2012	250.449.804.259	4,68
4	2013	262.972.292.240	4,99
5	2014	270.166.498.804	2,74
6	2015	284.435.248.524	5,28
	Pertumbuhan Rata-rata (%)		4,47

Sumber : Dinas PMPTSP Kota Solok

Dari tabel terlihat bahwa secara umum realisasi nilai investasi di Kota Solok cenderung naik dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 4,47%. Pada tahun



2015 nilai investasi lebih tinggi dari rata-rata yaitu sebesar 5,28%. Tetapi jika dilihat secara nominalnya, nilai investasi di Kota Solok cenderung rendah. Untuk itu, peningkatan nilai investasi untuk mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi di Kota Solok sangat diperlukan sekali di masa yang akan datang. Untuk peningkatan investasi, Pemerintah Kota Solok berusaha untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif diantaranya membuat regulasi tentang penanaman modal dan memberikan insentif kepada investor.

Dalam kurun waktu 2010 -2015 tidak terdapat Penanaman Modal Asing (PMA), seluruh penanaman modal di Kota Solok bersumber dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

13. Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan di bidang pemuda dapat dimaknai sebagai strategi yang dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan peran serta pemuda dalam seluruh aspek kehidupan manusia dan memperhatikan serta melibatkan pemuda ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Sedang pembangunan Olahraga dimaknai sebagai strategi yang sistematis untuk meningkatkan komitmen semua pihak untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia sebagai manusia bugar, sehat, dan berprestasi dengan memasukkan unsur kebutuhan olahraga ke dalam kebijakan dan program dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. (Kajian Staf Ahli Menpora, 2014)

Arah kebijakan bidang Pemuda dan Olahraga di Kota Solok sedapatnya mampu mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan harapan dapat diraihnya tujuan pembangunan kepemudaan yaitu pembentukan karakter, pembentukan kapasitas, dan daya saing pemuda serta mewujudkan masyarakat yang bugar, sehat, dan berprestasi di bidang olahraga.

Jumlah pemuda (18-35 tahun) di Kota Solok pada tahun 2015 adalah 20.156 jiwa, yang merupakan potensi besar untuk pembangunan dan kemajuan daerah. Kinerja urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kota Solok tahun 2010-2015 dapat dilihat pada tabel 2.97:

Tabel 2.97.
Indikator Fokus Layanan Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Kota Solok Tahun 2010 - 2015

No	Indikator Capaian Kinerja	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Satuan
1.	Jml Organisasi Pemuda	17	19	15	23	23	23	Organisasi
2.	Jml Organisasi Olahraga	23	20	22	22	24	26	Organisasi
3.	Jml Kegiatan Kepemudaan	5	2	2	2	2	3	Kali
4.	Jml Kegiatan Keolahragaan	4	8	9	10	10	11	kali
5	Jml Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	-	-	-	-	-	-	buah
6	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	-	-	-	-	-	-	Per 1000 pddk
7	Jml Lapangan Olahraga	30	30	32	38	42	45	unit
8	Lapangan Olahraga	0,41	0,41	0,47	0,56	0,65	0,69	Per 1000 pddk

Sumber : Dinas Pemuda Olahraga Kota Solok



Organisasi pemuda di Kota Solok dari tahun 2010 hingga 2013 meningkat secara kuantitas dari 17 menjadi 23 organisasi, sampai tahun 2015. Demikian juga dengan jumlah organisasi olah raga yang menunjukkan tren positif hingga tahun 2015 berjumlah 26 organisasi. Namun secara kualitas, kegiatan dan keaktifan organisasi kepemudaan dan olahraga perlu ditingkatkan karena jumlah kegiatan kepemudaan yang terlaksana hanya 2 sampai 5 kali dalam 1 (satu) tahun, yang mendeskripsikan hanya ada 1 atau 2 organisasi kepemudaan yang aktif melakukan kegiatan setiap tahunnya. Hal ini perlu mendapat perhatian dalam mewujudkan tujuan pembangunan di bidang kepemudaan.

Untuk kegiatan keolahragaan, terjadi peningkatan setiap tahun dari 4 kali di tahun 2010 sampai 11 kali di tahun 2015. Kegiatan olahraga di tingkat masyarakat cukup berkembang dilihat dari jumlah lapangan olahraga yang terus meningkat dari tahun 2010 sampai tahun 2015 mencapai 45 buah atau 0,69 per 1000 penduduk. Angka ini merupakan jumlah seluruh lapangan olahraga yang umumnya merupakan swadaya masyarakat pada tingkat RT atau RW. Hal ini menunjukkan animo masyarakat yang tinggi untuk melakukan kegiatan olahraga namun belum didukung dengan sarana yang memadai dan terjangkau, seperti gelanggang olahraga/balai remaja di Kota Solok. Keadaan ini merupakan potensi bagi pemerintah untuk lebih menggiatkan olahraga dan menyediakan sarana olahraga yang lebih baik di Kota Solok.

14. Statistik

Urusan statistik mempunyai tujuan untuk meningkatkan pelayanan informasi berbasis teknologi informasi dengan sasaran meningkatkan pemanfaatan data statistik sektoral. Statistik sektoral merupakan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Jenis data yang ditampilkan meliputi sektor pemerintahan, Pertanian, Industri, Sosial dan Kesejahteraan, Kependudukan dan Ketenagakerjaan, ekonomi dan Keuangan, dan Lainnya. Pada penyelenggaraan urusan statistik di pemerintah daerah mengacu pada peraturan kepala BPS nomor 9 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan statistik sektoral oleh pemerintah daerah. Dengan diterbitkannya peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah terdapat pemisahan pengelolaan data statistik meliputi data perencanaan dikelola oleh Bappeda, sementara pengelolaan data sektoral oleh Dinas Kominfo.

Data perencanaan selama periode 2011-2015 dikelola oleh Bappeda dengan indikator kinerja pembangunan daerah diantaranya Buku Kota Solok Dalam Angka, PDRB Kota Solok dan forum data SKPD. Buku ini merupakan sumber data dan informasi terkait Kota Solok yang dapat digunakan baik oleh Pemerintah, swasta dan masyarakat sebagai bahan informasi yang akurat dan acuan dalam perencanaan. Sedangkan buku PDRB Kota Solok selama periode 2011-2015 merupakan buku yang memuat perhitungan PDRB Kota Solok menurut lapangan usaha dan menurut penggunaannya.

Tabel 2.98.
Hasil Kinerja Urusan Statistik
Pemerintah Kota Solok Periode 2011-2015

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Buku "Kota Solok Dalam Angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Buku "PDRB Kota Solok"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Forum Data SKPD	-	-	-	Ada	Ada

Sumber : Bappeda Kota Solok



Pada Tabel 2.98 terlihat bahwa buku "Kota Solok Dalam Angka" dan Buku "PDRB Kota Solok" dalam periode 2011-2014 selalu diterbitkan setiap tahunnya dan buku-buku ini merupakan hasil kerjasama Pemerintah Kota Solok (Bappeda) dengan Badan Pusat Statistik Kota Solok dengan sumber data dari semua lintas SKPD se-Kota Solok. Namun mulai tahun 2014 Buku Kota Solok Dalam Angka dan PDRB Kota Solok merupakan hasil terbitan dari BPS tanpa ada kerjasama lagi dengan Bappeda Kota Solok dikarenakan pembuatan buku ini sudah menjadi wewenang BPS karena menggunakan anggaran Pemerintah Pusat.

Untuk mendukung ketersediaan data yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan yang digunakan sebagai sumber data dalam pembuatan Buku Kota Solok Dalam Angka dan Buku PDRB Kota Solok maka pada tahun 2014 dibentuklah Forum Data SKPD Kota Solok sebagai wadah bagi pengelola data pada SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Solok dalam rangka ajang berkumpul dan bersilahturahmi, berbagi informasi serta konfirmasi kebenaran data yang dibuat oleh antar pengelola data SKPD tadi.

Sementara itu data statistik sektoral baru dikelola oleh Dinas Kominfo pada Tahun 2017, sehingga untuk periode RPJMD sebelumnya hanya tersedia data perencanaan. Untuk data sektoral Kota Solok belum tersedia.

15. Persandian

Pelaksanaan urusan Persandian pada periode 2011-2015 tidak diselenggarakan tersendiri dalam penyelenggaraan urusan dalam lingkungan pemerintah Kota Solok. Akan tetapi terdapat dalam rumpun urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi, Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dalam bentuk diseminasi data/informasi/berita yang masuk dan keluar yang bersifat rahasia atau terbatas. Disamping itu, belum terdapat program/ kegiatan khusus terkait urusan persandian dilingkungan SKPD Pemerintah Kota Solok sehingga belum berjalan secara optimal, baik terkait kebijakan penyelenggaraan persandian, penyelenggaraan peralatan persandian dalam bentuk karya mandiri maupun mitra secara memadai, pemeliharaan ataupun penghapusan peralatan persandian, penerapan prosedur tetap sistem persandian dan pengaturan pemberlakuan/ penggantian sistem jaringan komunikasi persandian serta pembinaan SDM persandian Kota Solok. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang efektif berlakunya 2 tahun sejak diundangkan, bahwa urusan persandian menjadi urusan wajib pemerintahan non pelayanan dasar.

Penyelenggaraan urusan persandian baru dimulai pada Tahun 2017 ini berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang bertujuan untuk mengamankan informasi Pemerintah Daerah, yang dikelompokkan menjadi 6 jenis meliputi apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat proses penegakan hukum, apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat, kekayaan alam daerah, apabila dibuka dan diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi, memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan serta informasi lainnya yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan peraturan perundangan – undangan yang berlaku.

16. Kebudayaan

Persoalan kebudayaan merupakan bagian penting dalam suatu proses pembangunan, karena Kebudayaan sangat terkait dengan persoalan karakter dan mental bangsa yang menentukan keberhasilan Pembangunan itu sendiri. Pembangunan kebudayaan pada



hakekatnya diarahkan pada upaya untuk mewujudkan ketahanan budaya. Ketahanan budaya sangat diperlukan, mengingat semakin pesatnya arus globalisasi akan membawa konsekuensi terjadinya ekspansi seni dan budaya global yang dapat mempengaruhi kelestarian budaya daerah.

Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan kebudayaan dapat diukur dengan indikator, melalui penyelenggaraan festival seni dan budaya, sarana penyelenggaraan seni dan budaya serta terpeliharanya benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 2.99 :

Tabel 2.99.
Indikator Fokus Layanan Urusan Kebudayaan Kota Solok Tahun 2010-2015

No	Indikator Capaian Kinerja	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Satuan
1.	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	2	2	3	3	3	2	Kali
2.	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	3	3	3	3	3	3	Buah
3	Persentase benda, situs budaya dan benda cagar budaya yang dilindungi	66,67	66,67	53,33	53,33	53,33	44,44	%
4	Jumlah Seluruh benda, situs budaya dan benda cagar budaya	15	15	15	15	15	18	Buah
5	Jumlah benda, situs budaya dan benda cagar budaya yang dilindungi	8	8	8	8	8	8	Buah

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Solok

Perkembangan jumlah penyelenggaraan festival Seni dan Budaya di Kota Solok dari tahun 2010 s/d 2015 tidak mengalami banyak peningkatan dari 2 kali pada tahun 2011 menjadi 3 kali dari tahun 2012 s/d tahun 2015. Sedangkan 8 (delapan) benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kota Solok meliputi Lasuang Inyik Gulambai, Lasuang Jawi Orok, Makam Syech Sialahan, Lasuang Baiduang, Batu Laweh, Batu Nan Tujuh, Surau Latiah, dan Rumah Gadang Gajah Maaram yang kesemuanya telah dituangkan dalam buku Benda Cagar Budaya.

17. Perpustakaan

Dalam pembangunan karakter masyarakat, kecerdasan mutlak diperlukan. Upaya peningkatan kecerdasan tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan, tetapi juga menjadi tanggung jawab berbagai pihak yaitu keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Perpustakaan merupakan salah satu dimensi dalam sistem pendidikan yang perannya sangat strategis dalam menunjang upaya mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter.

Salah satu tugas yang harus diemban oleh perpustakaan adalah meningkatkan minat baca masyarakat yang secara jangka panjang diharapkan dapat mendorong dan mempercepat terwujudnya budaya baca pada masyarakat. Untuk mengukur capaian kinerja urusan perpustakaan tersebut, indikator yang digunakan adalah jumlah pengunjung perpustakaan per tahun dan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah. Capaian tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.100:



Tabel 2.100
Hasil Kinerja Urusan Perpustakaan
Pemerintah Kota Solok Periode Tahun 2010-2015

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja						Satuan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun	10.438	9.215	10.756	8.619	10.065	11.459	orang
2.	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	10.092	10.801	10.801	13.453	14.771	15.471	buku

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solok

Berdasarkan data tabel 2.100, jumlah pengunjung perpustakaan selama 5 tahun memiliki trend positif walaupun sedikit berfluktuatif, kunjungan tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu berjumlah 11.459 kunjungan. Data pengunjung tersebut hanya bersumber dari kunjungan masyarakat ke Perpustakaan Daerah Kota Solok. Data pengunjung keseluruhan perpustakaan yang ada di Kota Solok, sampai saat ini belum tersedia. Kedepan, Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan akan di dorong untuk melakukan pendataan terhadap data kunjungan seluruh perpustakaan yang ada di Kota Solok

Seiring dengan berjalannya waktu, koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah terus ditambah/dilengkapi. Pada tahun 2010, koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah Kota Solok sebagaimana yang tercatat dalam database berjumlah 10.092 buah buku sampai pada tahun 2015 koleksi buku tersebut tercatat berjumlah 15.471 buah. Dengan adanya pengadaan buku setiap tahunnya, maka koleksi buku mengalami peningkatan. Ini suatu upaya dalam meningkatkan minat baca dimana disediakan buku-buku yang merupakan referensi terbaru, sehingga dapat dimanfaatkan oleh banyak kalangan, baik siswa, mahasiswa, maupun masyarakat lainnya.

18. Kearsipan

Penyelenggaraan kearsipan merupakan keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya. Program yang dijalankan dalam penyelenggaraan kearsipan pemerintah daerah adalah program perbaikan sistem administrasi kearsipan, dengan melaksanakan sistem kearsipan pola baru (sistem baku). Arsip pola baru (sistem baku) adalah arsip yang mempergunakan kartu kendali sebagai sarana pengendalian, pola klasifikasi sebagai sarana penataan arsip dan jadwal retensi sebagai sarana penyusutan. SKPD yang menerapkan arsip secara baku merupakan SKPD yang memiliki tenaga arsip dan telah mengikuti pembekalan serta pelatihan sistem kearsipan pola baru.

Dalam rangka mewujudkan program tersebut, telah dilakukan pendampingan pembinaan dan pengawasan arsip terhadap sekolah dan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Solok. Pendampingan bertujuan untuk membina arsiparis tentang tata cara pengelolaan kearsipan, baik yang terkait arsip aktif maupun arsip inaktif dan dilakukan secara bertahap setiap tahunnya dengan target 10 SKPD.

Tabel berikut menggambarkan jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku pada tahun 2010-2015 :



Tabel 2.101.
Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku
Tahun 2010 -2015

No.	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah SKPD	-	-	-	-	10	10

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solok

Demikian juga untuk tenaga pengelola fungsional arsiparis yang terampil dan terlatih, sampai tahun 2015 ini baru berjumlah 4 (empat) orang, dan itupun berada pada Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah, sedangkan di masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Solok belum mempunyai tenaga fungsional arsiparis.

Tabel berikut menggambarkan jumlah tenaga fungsional arsiparis pada tahun 2010-2015 :

Tabel 2.102.
Jumlah Tenaga Fungsional Arsiparis Dari Tahun 2010 -2015

No.	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Tenaga Fungsional Arsiparis	-	-	-	-	4	4

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solok Tahun 2010-2015

Untuk mendukung pengelolaan arsip lebih efektif dan efisien, diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana penyimpanan arsip yang memadai sebagai upaya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip. Dengan adanya pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan arsip yang memadai tersebut, akan dapat meningkatkan kualitas/mutu dalam penataan arsip baik aktif maupun in aktif yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. Adapun jumlah sarana penyimpanan arsip dapat dilihat pada tabel 2.103:

Tabel 2.103.
Jumlah rak penyimpanan arsip dari tahun 2010 -2015

No.	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Rak	14	14	14	16	16	18

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solok Tahun 2010-2015

2.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Sektor perikanan cukup strategis untuk pengembangan ekonomi masyarakat, karena usaha budidaya ikan cukup menjanjikan untuk meningkatkan pendapatan. Perkembangan sektor perikanan di Kota Solok 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.104 :

Tabel 2.104
Capaian Kinerja Urusan Perikanan Tahun 2010-2015

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Satuan
1	Produksi Ikan	60,23	70,13	81,81	130,67	168,93	130,60	Ton

Sumber : Dinas Pertanian Kota Solok



Dari Tabel diatas terlihat bahwa produksi perikanan masih berfluktuasi setiap tahunnya . Hal ini disebabkan petani perikanan masih mengharapkan bantuan dari Pemerintah dalam melaksanakan budidaya ikan.

2. Pariwisata

Perkembangan urusan pilihan pariwisata memperlihatkan kinerja semakin baik selama periode 2010-2015. Jumlah kunjungan wisata mengalami kenaikan dalam kurun waktu 2010-2015 seperti terlihat pada Tabel 2.105.

Tabel 2.105.
Angka Kunjungan Wisata di Kota Solok Tahun 2010-2015

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Satuan
Jumlah kunjungan wisata	13.675	15.215	16.915	74.500	91.082	112.358	orang
Pertumbuhan kunjungan wisata	8,77	10,12	10,1	77,3	18,2	18,9	%
Tingkat hunian hotel	15.730	15.730	17.165	18.247	23.096	35.276	orang

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Solok

Perkembangan pariwisata di Kota Solok secara umum masih belum memperlihatkan pertumbuhan yang signifikan. Saat ini di Kota Solok terdapat 3 objek wisata alam (Pulau Belibis, Sarasah Batimpo dan Laing Park). Minimnya fasilitas dan prasarana wisata yang ada pada objek wisata tersebut sampai saat ini belum mempengaruhi minat kunjungan wisata ke Kota Solok secara signifikan

Berdasarkan Tabel 2.101 dapat dilihat bahwa secara umum terjadi peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Solok dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 23,89% per tahun sejak tahun 2010. Demikian juga halnya dengan tingkat hunian hotel, dari 115 unit kamar hotel yang ada di Kota Solok rata-rata setiap tahunnya dihuni sebesar 81,6% dari total kamar yang ada di hotel. Jumlah wisatawan asing juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Adapun peningkatan hunian hotel sangat besar dipengaruhi pengadaan beberapa event pariwisata seperti Solok Folklore of Festival (SoFF) yang dilaksanakan pada tahun 2011 dan tahun 2013 dan event-event lainnya.

Untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, Pemerintah Kota Solok melakukan pembenahan terhadap beberapa destinasi wisata, kesiapan masyarakat, sarana dan prasarana pendukung dan promosi. Selain itu pemerintah daerah juga mendukung beberapa event tahunan pariwisata. Upaya yang dilakukan ini masih tahap awal dan belum maksimal. Oleh sebab itu upaya-upaya yang telah dilakukan perlu lebih diintensifkan untuk masa yang akan datang dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan wisata ke Kota Solok.

3. Pertanian

Sektor pertanian masih menjadi salah satu sektor strategis bagi perekonomian Kota Solok. Selain memberikan kontribusi pada PDRB, sektor ini juga menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Berdasarkan data dari BPS sektor pertanian memberikan kontribusi pada PDRB sebanyak 8.31% dari nilai total PDRB Kota Solok pada tahun 2013. Kalau dilihat persentase penduduk menurut lapangan kerja, maka penduduk yang bekerja disektor pertanian cukup besar yaitu pada urutan ke 3 setelah sektor perdagangan dan jasa.



Pada urusan pertanian ini ada 3 (tiga) sub sektor yaitu sub sektor tanaman pangan dan hortikultura, sub sektor perkebunan dan sub sektor peternakan. Pada tabel 2.106 dapat dilihat perkembangan hasil pembangunan pertanian dalam 5 (lima) tahun terakhir .

Tabel 2.106.
Perkembangan Indikator Capaian Pembangunan Pertanian di Kota Solok
Tahun 2010-2015

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Satuan
1	Tingkat produksi tanaman - Padi - Ubi kayu	14,042 1.853	17.237 1.872	15.807 2.342	15.255 1.390	15.656,76 663,86	15.187 196,80	Ton/th Ton/th
2	Tingkat produktivitas Pertanian/Perkebunan - Padi - Cacao - Tanaman atsiri	5,9 0,85 12,00	7,24 0,88 12,00	6,90 0,88 12,00	6,90 0,89 13,00	6,54 0,90 14,00	6,60 0,90 15,00	Ton/ha Ton/ha Ton/ha
3	Klasifikasi Kelompok tani - Poktan utama - Poktan Madya	- 10	- 10	- 5	- 4	- 9	- 9	Klp Klp
4	Pelaku Usaha Agribisnis	65	66	67	65	68	70	Klp
5	Tingkat Populasi Ternak - Sapi - Unggas - Daging	1850 142.000 856.736	1.820 140.137 858.746,38	2.013 219.233 772.006	1.945 187.206 612.733	2.129 171.409 720.936,77	2.086 205.719 708.688,24	Ekor Ekor Kg
6	Pencegahan dan pengobatan penyakit hewan	1.374	1.336	1.015	950	823	798	Ekor/Tahun

Sumber : Dinas Pertanian Kota Solok

Dari Tabel 2.106 dapat dilihat bahwa capaian yang diperoleh dari tahun 2011 sampai 2015 berfluktuasi dan hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Produktivitas tanaman tahun 2010- 2013 diperoleh dari hasil ubinan yang dilakukan sendiri oleh Dinas Pertanian tanpa keterlibatan BPS. Data produktivitas yang diperoleh relatif lebih tinggi, hal ini disebabkan lokasi pengambilan ubinan pada lokasi yang produktivitasnya memang lebih baik. Tahun 2014 dan tahun 2015 pengambilan ubinan dilakukan bersama-sama dengan BPS karena data yang diakui secara nasional adalah data yang dikeluarkan oleh BPS. Jadi untuk tahun selanjutnya yaitu tahun 2015 kita sudah bertolak dari angka yang dikeluarkan oleh BPS.
2. Sedangkan untuk Produksi padi setiap tahunnya berfluktuasi , tahun 2010 sebanyak 14.042 ton dan tahun 2015 naik menjadi 15.187 ton, hal ini dipengaruhi factor produktivitas dan luas panennya.
3. Populasi sapi tahun 2010 sebanyak 1.850 ekor dan tahun 2015 meningkat menjadi 2.086 ekor. Peningkatan produksi ini diperoleh dengan ditingkatkannya pelayanan IB dan bantuan ternak kepada kelompok.
4. Populasi kambing tahun 2010 sebanyak 2.200 ekor dan tahun 2015 turun menjadi 2.041 ekor. Penurunan ini karena banyak ternak kambing yang tidak tahan terhadap penyakit sementara program bantuan kambing dari Pemerintah tidak ada tahun 2014 dan tahun 2015.
5. Populasi unggas tahun 2010 sebanyak 142.000 ekor dan tahun 2015 sebanyak 205.719 ekor. Peningkatan ini didorong oleh adanya program bantuan pemerintah berupa pengembangan unggas lokal.
6. Jumlah petani dan poktan yang melaksanakan kegiatan agribisnis dari tahun 2010 sampai 2015 terlihat adanya kecenderungan meningkat. Jumlah gapoktan yang



melaksanakan usaha agribisnis tahun 2010 belum ada dan tahun 2015 tumbuh sebanyak 3 gapoktan. Hal ini berkat adanya program pemerintah berupa Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) dan diberikan dana stimulan sebesar Rp. 100.000.000,-. Usaha yang dikelola saat ini adalah penyediaan benih unggul (benih berlabel) yang di produksi oleh kelompok tersebut

7. Tingkat klasifikasi kelompok tani cenderung stagnan karena cukup sulit untuk mencapai kelas yang tertinggi yaitu kelompok tani Utama, namun upaya pembinaan tetap dilakukan.

4. Energi dan Sumber Daya Mineral

Energi dan Sumber daya mineral Kota Solok lebih banyak diarahkan pada pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang usaha masyarakat di bidang energi yang meliputi penambangan galian C, pemakaian air bawah tanah, penyaluran gas dan BBM

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang energi dan sumber daya mineral di Kota Solok telah disalurkan melalui SPBU, agen serta pangkalan seperti Tabel 2.107:

Tabel 2.107.
Jumlah Pangkalan, Agen dan SPBU di Kota Solok Tahun 2010-2015

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Satuan
1	Pangkalan minyak tanah	16	16	18	18	17	-	Unit
2	Agen LPG	2	2	2	2	3	3	Unit
3	Pangkalan Gas	-	-	-	-	6	20	Unit
4	SPBU	4	4	4	4	4	4	Unit

Sumber : Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM

Pada tahun 2015 terlihat bahwa masyarakat sudah banyak yang mempergunakan bahan bakar gas, dengan telah banyaknya jumlah pangkalan gas dan berkurangnya pangkalan minyak tanah di Kota Solok

5. Perdagangan

Sektor perdagangan di Kota Solok merupakan sektor strategis penyumbang PDRB Kota Solok. Dimana kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB yang cukup besar bila dibandingkan dengan sektor lainnya. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kota Solok sekitar 22% dari total PDRB Kota Solok. Hal ini sangat mendukung terhadap visi Kota Solok sebagai Kota Perdagangan dan Jasa. Berikut kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kota Solok :

Tabel 2.108.
Perkembangan Sektor Perdagangan di Kota Solok Tahun 2010-2015

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	22	22,5	22,64	22,77	22,93	25,25
2.	Prasarana Pasar	1	1	1	1	1	1
3.	Jumlah pedagang di Pasar Raya	2.170	2.224	2.336	2.420	2.490	2.519
4.	Cakupan bina kelompok pedagang	40	40	50	70	30	90
5.	Ketersediaan lokasi PKL	10	10	20	40	50	60

Sumber : Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM



Berdasarkan tabel 2.108. dapat dilihat bahwa kontribusi sektor perdagangan selalu meningkat setiap tahunnya. Disisi lain jumlah pedagang juga mengalami peningkatan dari Tahun 2010 sampai Tahun 2015. Saat ini konsentrasi perdagangan terpusat di Pasar Raya Solok, dengan pertumbuhan pedagang setiap tahunnya meningkat rata-rata 2,5%, kebutuhan untuk relokasi pedagang menjadi hal yang sangat penting untuk dilaksanakan. Saat ini ada pasar komoditi yang berlokasi di terminal bareh Solok yang beroperasi setiap hari Selasa dan Jumat tetapi karena belum memadainya fasilitas di pasar tersebut belum bisa dijadikan alternatif untuk merelokasi pedagang yang ada di Pasar Raya Solok. Pada tabel dibawah ini dapat dilihat kondisi sarana perdagangan yang ada di Pasar Raya Solok:

Tabel 2.109
Sarana Perdagangan/Niaga di Pasar Raya Kota Solok Tahun 2015

No	Lokasi	Penempatan (Unit)			
		Toko	Kios	Los	Pelataran
I.	Bangunan Inpres	-	904	-	1346
1	Ps. Raya Tahap I	-	594	-	884
2	Ps. Raya Tahap II	-	32	-	48
3	Ps. Raya Tahap III	-	278	60	-
II.	Bangunan Sewa	-	358	60	-
1	Komp Dang Tuanku	-	31	-	-
2	Komp Lenggo Geni	-	32	-	-
3	Komp Toko Mini	-	17	-	-
4	Bangunan Servis	-	16	-	-
5	Plaza Depan Pasar	-	2	-	-
6	Los Sayur	-	0	-	-
7	Bangunan Bawah Tangga	-	32	-	-
8	Ps Raya Tahap IV	-	102	-	-
9	Kios Minuman	-	16	-	-
10	Kios Buah-buahan	-	0	15	0
11	Kios Jl. Koto Panjang	-	68	-	-
12	Kios dalam pasar	-	43	-	-
13	Pasar Raya Tahap V		111		144
III.	Bangunan swasta	160	33	-	-
1	Pert Bundo Kandung	36	-	-	-
2	Komp Deretan Bioskop	-	6	-	-
3	Pert Pandan Permai	16	-	-	-
4	Pert Indo Jati	25	-	-	-
5	Pertokoan Belibis	10	-	-	-
6	Pert Jl. Koto Panjang	13	-	-	-
7	Pert di Luar Komp Pasar	44	-	-	-
8	Ruko Ex. SMEA	11	-	-	-
9	Kios Terminal Bus	-	27	-	-
10	Ruko Solinda	5	-	-	-
Total		160	1.404	60	1.490

Sumber: Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM

6. Perindustrian

Sektor industri di Kota Solok didominasi oleh industri mikro dan kecil yang perkembangannya selama periode 2010 – 2015 menunjukkan kondisi yang cukup baik. Berikut perkembangan industri kecil dan menengah di Kota Solok 2010-2015, dapat dilihat pada Tabel 2.110:



Tabel 2.110.
Perkembangan Industri Kota Solok Tahun 2010-2015

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	6,19	6,29	6,09	5,75	5,37	5,99
2.	Jumlah industri	355	390	402	421	421	406
3.	Jumlah tenaga kerja sektor industri	1.587	1.713	1.742	1.780	2.078	1.992

Sumber : Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kota Solok mengalami trend penurunan sejak tahun 2010 sampai tahun 2015. Hal ini merupakan dampak dari pertumbuhan sektor lain yang cukup tinggi. Tetapi jika dikaitkan dengan perkembangan jumlah IKM sampai dengan tahun 2015 selalu mengalami peningkatan,

Walaupun terjadi stagnansi pada tahun 2014 dengan tidak bertambahnya jumlah IKM dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan jumlah IKM yang tidak lagi memproduksi (mati) pada tahun 2014 sama besarnya dengan jumlah IKM yang tumbuh di tahun yang sama. Selama lima tahun terakhir industri di Kota Solok didominasi oleh industri dan industri kimia dan bahan bangunan.

Perkembangan industri kecil dan menengah di Kota Solok 2010-2015, dapat dilihat pada Tabel 2.111:

Tabel 2.111
Perkembangan IKM di Kota Solok 2010-2015

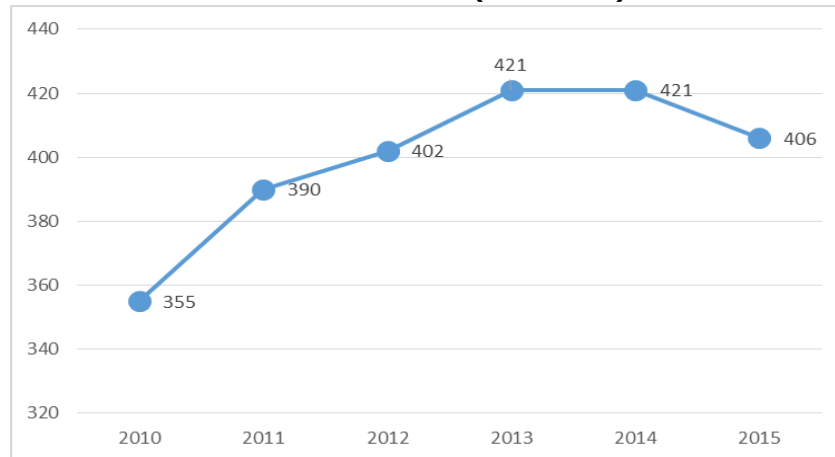
No.	Kelompok Industri	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Industri Pangan						
	a. Unit Usaha	140	151	154	165	157	188
	b. Tenaga Kerja	608	644	652	670	852	721
2	Industri Sandang						
	a. Unit Usaha	32	36	37	39	40	50
	b. Tenaga Kerja	157	174	176	179	182	195
3	Industri Kimia dan Bahan bangunan						
	a. Unit Usaha	74	80	86	90	94	111
	b. Tenaga kerja	355	382	395	406	514	984
4	Industri mesin, logam dan elektronika						
	a. Unit Usaha	27	33	34	35	36	33
	b. Tenaga Kerja	98	123	125	128	130	75
5	Industri Kerajinan						
	a. Unit Usaha	82	90	91	92	94	5
	b. Tenaga Kerja	369	390	394	397	400	17
	Unit Usaha	355	390	402	421	421	406

Sumber : Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM

Berdasarkan tabel 2.111, dapat dilihat bahwa industri di Kota Solok didominasi oleh industri pangan yang sampai tahun 2015 berjumlah 188 unit usaha dengan jumlah tenaga kerja 721 orang, disamping itu sektor industri kimia dan bahan bangun juga cukup banyak dengan jumlah unit usaha 111 unit dengan jumlah tenaga kerja 984 orang. Berikut ini dapat dilihat perkembangan industry di Kota Solok.



Gambar 2.16.
Perkembangan Industri di Kota Solok
Tahun 2010 – 2015 (Dalam unit)



Sumber : Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM

Berdasarkan gambar tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa perkembangan industri di Kota Solok pada Tahun 2010 berjumlah 355 unit. Setelah lima tahun berjalan yaitu tahun 2015 jumlah industri meningkat menjadi 406 unit, berarti terjadi penambahan industri sebesar 51 unit (14,4%). Untuk periode pembangunan yang akan datang peningkatan jumlah industri diharapkan akan mendorong terjadinya peningkatan jumlah produksi yang akan berimplikasi pada kenaikan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di sektor industri. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah industri merupakan salah satu indikator yang memiliki peran dalam memberikan kontribusi yang cukup berarti terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Solok.

2.3.4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

1. Administrasi Pemerintahan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik dan bersih serta terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang efektif, efisien, transparan, profesional dan akuntabel dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik merupakan tujuan dari Otonomi Daerah. Sejalan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme menyebutkan bahwa salah satu azas umum penyelenggaraan negara adalah azas akuntabilitas yaitu azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Solok dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Solok Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Solok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Solok Nomor 35 Tahun 2015. Berikut gambaran hasil penilaian terhadap laporan kinerja dan keuangan Pemerintah Kota Solok.

Tabel 2.112.
Hasil Penilaian Kinerja dan Laporan Keuangan Kota Solok Tahun 2011 – 2015

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Hasil Evaluasi Laporan kinerja	CC	CC	CC	CC	CC	CC
2	Hasil Audit Laporan Keuangan	WDP	WDP	WDP	WTP	WDP	WDP

Sumber : Sekretariat Daerah dan Badan Keuangan Daerah Kota Solok

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Pemerintah Kota Solok dari tahun 2010 sampai dengan 2015 tidak mengalami peningkatan atau tetap pada posisi CC (cukup baik). Hal ini disebabkan karena RPJMD dan Renstra SKPD sebagai salah satu dokumen yang di evaluasi, tidak pernah dilakukan revisi. Dengan RPJMD yang baru pada tahun 2016 hasil evaluasi Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Solok memperoleh nilai B (baik). Hasil audit BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Solok pada tahun 2013 (laporan keuangan tahun 2012) memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun hasil ini tidak dapat dipertahankan pada laporan keuangan dua tahun berikutnya. Dengan berbagai perbaikan yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan dan aset, maka pada tahun 2017 (laporan Keuangan 2016) kembali memperoleh opini WTP.

Disamping dua indikator diatas, untuk mengukur kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah juga dapat melalui hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh BPKP bekerjasama dengan Inspektorat Provinsi. Berikut Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) dari tahun 2010 sampai dengan 2015.

Tabel 2.113.
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Kota Solok Tahun 2011-2015

Tahun	Skor Penilaian	Status	Peringkat di Nasional
2010	-	-	-
2011	-	-	-
2012	2.7345	Tinggi	31
2013	2.9974	Tinggi	13
2014	3.0248	Sangat Tinggi	19
2015	2.9980	Tinggi	21

Sumber : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Solok

Dari tabel diatas terlihat bahwa hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Solok mencapai Status penilaian sangat tinggi pada tahun 2014, status penilaian ini tidak dapat dipertahankan pada tahun berikutnya. Demikian juga kalau dilihat peringkat di tingkat nasional mengalami peningkatan dan penurunan, peringkat tertinggi diperoleh pada tahun 2013 yaitu peringkat 13 Nasional dan peringkat terendah pada tahun 2012 yaitu peringkat 31. Walaupun status penilaian sangat tinggi pada tahun 2014, namun secara nasional peringkat Kota Solok menurun dibandingkan tahun 2013. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini dilaksanakan oleh Kementrian Dalam Negeri yang hasilnya disampaikan pada saat hari otonomi daerah pada tahun berikutnya. Hasil penilain Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2010 dan 2011 tidak dapat disampaikan karena ketersediaan data.

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan umum telah dilakukan penyempurnaan produk hukum dengan memperhatikan kesesuai dengan produk hukum yang lebih tinggi,



dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas produk hukum daerah. Jumlah Produk hukum daerah yang telah dihasilkan terlihat pada Tabel 2.114 :

Tabel 2.114.
Produk Hukum yang Dihasilkan Selama Tahun 2010 – 2015

No	Produk Hukum	Jumlah					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Perda	4	8	14	6	4	7
2	Perwako	53	39	45	33	116	37

Sumber : Bagian Hukum Setda Kota Solok

Untuk mendorong percepatan peningkatan pelayanan publik pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan Publik sebagai kebijakan dan acuan bagi seluruh instansi pelayanan publik dalam menyelenggarakan pelayanan publiknya secara berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, terukur dan sesuai dengan standar pelayanan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah adalah dalam rangka memenuhi hak dan kebutuhan dasar dari masyarakat. Sistem Informasi Pelayanan Publik dalam bentuk e-goverment merupakan salah satu metode yang dilakukan untuk kemudahan pelayanan publik. Untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan diberikan oleh Pemerintah Kota Solok melalui Perangkat Daerah pelaksana Pelayanan Publik dapat dilakukan melalui Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Tabel 2.115.
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pemerintah Kota Solok Tahun 2011-2016

Tahun	IKM	
	Nilai Rata-rata IKM Perangkat Daerah	Kategori
2010	75,39	Baik
2011	73,98	Baik
2012	72,23	Baik
2013	76,02	Baik
2014	76,81	Baik
2015	-	-

Sumber : Bagian Organisasi dan Aparatur Sekretariat Daerah Kota Solok

Dari tabel 2.115 dapat dilihat bahwa walaupun nilai IKM dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, namun semuanya masih dalam kategori baik. Pada Tahun 2015 tidak dilakukan penilaian terhadap IKM karena ketertatasan anggaran. Pada Tahun 2016 nilai IKM Pemerintah Kota Solok 74,09 juga dalam kategori baik. Untuk kategori sangat baik diperlukan upaya yang keras dan komitmen dari semua Perangkat Daerah.

Pengaduan masyarakat yang merasa tidak puas dengan pelaksanaan pelayanan publik merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pelayanan publik. Melalui Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, Pemerintah berkomitmen untuk menampung dan menindaklanjuti setiap pengaduan pelayanan publik dengan menerbitkan aplikasi "LAPOR! SP4N". Setiap Pemerintah Daerah harus melaksanakan tindaklanjut pengaduan pelayanan publik melalui aplikasi "LAPOR! SP4N" ini.

Penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri bertujuan untuk meningkatkan ketahanan bangsa di bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan ekonomi. Dalam pelaksanaan urusan ini, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mempertahankan persatuan dan kesatuan serta mewujudkan sistem politik yang demokratis. Untuk mewujudkan semua itu tidak cukup dengan usaha yang dilakukan oleh



Pemerintah saja, baik Pemerintah Pusat maupun Daerah. Namun harus didukung juga oleh komponen-komponen lain yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kesatuan, persatuan dan politik bangsa. Dari beberapa komponen tersebut diantaranya adalah keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Kepemudaan.

Capaian indikator kinerja urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri selama tahun 2010-2015 disajikan pada tabel 2.116 :

Tabel 2.116.
Capaian indikator kinerja urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase penanganan konflik sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase organisasi kemasyarakatan yang terverifikasi	-	-	-	1,67%	1,67%	1,67%
3	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pilpres, Pileg dan Pilkada	-	-	-	-	71,70%	70,40%
4	Persentase Parpol yang memahami tentang bantuan keuangan	-	-	-	60%	70%	60%

Sumber : Kantor Kesbangpol Kota Solok

Dari tabel di atas terlihat bahwa konflik-konflik sosial yang terjadi yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa telah dapat ditangani dengan baik. Penanganan konflik ini dapat dilakukan dengan baik karena adanya peran serta tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat dalam penyelesaiannya.

Untuk mewujudkan kemitraan yang harmonis antara Organisasi Massa (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di Kota Solok, Pemerintah Kota Solok memfasilitasi pemberdayaan Ormas dan LSM. Fasilitas dan pemberdayaan Ormas dan LSM bertujuan untuk menjadikan Ormas dan LSM tetap berada pada koridor fungsi dan tujuan pendiriannya. Ormas dan LSM merupakan infrastruktur politik non kenegaraan yang dalam perjalanannya harus selaras dalam persepsi demi tergalangnya persatuan dan kesatuan bangsa.

Ormas dan LSM yang ada di Kota Solok cukup banyak yaitu 60 organisasi, namun organisasi yang telah terdaftar dan terverifikasi di Kementerian Hukum dan HAM baru 3 organisasi atau 1,67%. Ke depan, pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP terus dilakukan untuk memberikan pemahaman dan menyatukan persepsi terkait kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pembinaan organisasi masyarakat sehingga jumlah LSM yang terverifikasi dapat ditingkatkan.

Dari segi politik, partisipasi politik masyarakat cukup baik baik dalam Pemilihan Legislatif, Pilkada maupun Pilpres. Pada tahun 2014 pada saat pemilihan legislatif partisipasi politik masyarakat mencapai 71,70%, sedangkan pada tahun 2015 pada saat pilkada dan pilpres partisipasi masyarakat sebesar 70,40%. Dalam rangka pengelolaan bantuan keuangan partai politik, pada tahun 2013 dan 2015 persentase parpol yang memahami tentang bantuan keuangan sebesar 60% yaitu 6 parpol dari 10 Parpol yang ada di Kota Solok.



2. Pengawasan

Salah satu cara yang harus dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah adalah dengan melaksanakan pengawasan secara berkala dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan meminimalisir kemungkinan terjadinya penyimpangan terhadap kebijakan dan aturan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara umum.

Pengawasan Internal pada Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Inspektorat dengan melakukan pembinaan, pemeriksaan, monitoring, evaluasi dan reviu kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah. Pengawasan di daerah juga dilaksanakan oleh DPRD sebagai lembaga legislatif yang mempunyai fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan di daerah. Dan tidak kalah pentingnya penerapan Sistem Pengendalian Intren Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP), yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Solok dengan Peraturan Walikota Solok Nomor 6 Tahun 2010 tentang penerapan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP). Pada tahun 2016 berdasarkan hasil penilaian BPKP terhadap maturitas/kematangan pelaksanaan SPIP oleh Pemerintah Kota Solok berada pada level 2 atau level berkembang yang berarti bahwa Pemerintah kota Solok telah melaksanakan praktek pengendalian interen namun tidak terdokumentasi dengan baik, kebijakan umum dan kebijakan/SOP telah dikomunikasikan kepada seluruh pihak yang berkepentingan namun dipraktekkan hanya disebagian unit kerja belum melibatkan seluruh unit organisasi dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu.

Hasil pelaksanaan pembinaan tentunya tidak terlepas dari aparatur-aparatur pengawas. Kedepan agar hasil pengawasan dan pembinaan kepada SKPD semakin baik harus diiringi juga dengan peningkatan kualitas dan kuantitas dari aparatur pengawas. Sebagai gambaran Kualifikasi Pengawas Intern yang ada di Inspektorat Kota Solok dapat dilihat dari Tabel berikut 2.117 :

Tabel 2.117.
Kualifikasi Pengawas Interen Kota Solok Tahun 2010 – 2015

No	Kualifikasi	Jumlah (orang)					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Auditor Madya	1	1	1	1	1	1
2	Auditor Muda	1	1	1	2	2	2
3	Auditor Petama	3	5	11	9	8	9
4	Auditor Pelaksana Lanjutan	1	2	3	2	2	1
5	Auditor Pelaksana	2	2	2	2	1	1
6	Auditor Penyelia	2	2	2	2	2	2
	Jumlah	10	13	20	18	16	16

Sumber : Inspektorat Kota Solok

Dari Tabel 2.113 dapat dilihat bahwa terjadi penurunan jumlah auditor sejak tahun 2012 dari 20 orang menjadi 16 orang disebabkan adanya yang pensiun dan pindah tugas ke daerah lain. Dari 16 orang auditor pada Inspektorat Kota Solok baru satu orang yang mempunyai kualifikasi auditor madya dan dua orang auditor muda sedangkan auditor pertama sebanyak sembilan orang. Sehingga kedepan sangat perlu dilaksanakan program Peningkatan Profesionalisme pemeriksa dan aparatur pengawas.



Peningkatan profesionalisme aparatur pengawas dilakukan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan baik itu diklat fungsional maupun diklat teknis. Disamping itu juga dilakukan pelatihan kantor sendiri (PKS) untuk peningkatan wawasan dan pemahaman aparatur pengawasan terhadap peraturan yang berlaku dan teknis-teknis pengawasan.

3. Perencanaan

Perencanaan pembangunan akan tepat mengenai sasaran, terlaksana dengan baik dan bermanfaat hasilnya jika dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pandangan ini menunjukkan asas demokrasi dalam konsep pembangunan nasional. Masyarakat perlu dilibatkan secara langsung bukan karena mobilisasi, melainkan sebagai bentuk partisipasi yang dilandasi oleh kesadaran.

Pentingnya keterlibatan masyarakat di dalam penyusunan perencanaan pembangunan sangat ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pendekatan partisipatif masyarakat terdapat pada 4 (empat) pasal Undang-Undang ini yaitu pada Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7. Sistem perencanaan yang diatur dalam UU 25/2004 dan aturan pelaksanaannya menerapkan kombinasi pendekatan antara top-down (atas-bawah) dan bottom-up (bawah-atas), yang lebih menekankan cara-cara aspiratif dan partisipatif.

Perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya harus berorientasi ke bawah dan melibatkan masyarakat luas, melalui pemberian wewenang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah. Dengan cara ini pemerintah makin mampu menyerap aspirasi masyarakat banyak, sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat memberdayakan dan memenuhi kebutuhan rakyat banyak. Rakyat harus menjadi pelaku dalam pembangunan, masyarakat perlu dibina dan dipersiapkan untuk dapat merumuskan sendiri permasalahan yang dihadapi, merencanakan langkah-langkah yang diperlukan, melaksanakan rencana yang telah diprogramkan, menikmati produk yang dihasilkan dan melestarikan program yang telah dirumuskan dan dilaksanakan. Paradigma pembangunan yang sekarang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Artinya, pemerintah tidak lagi sebagai provider dan pelaksana, melainkan lebih berperan sebagai fasilitator dan katalisator dari dinamika pembangunan, sehingga dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan, masyarakat mempunyai hak untuk terlibat dan memberikan masukan dan mengabil keputusan, dalam rangka memenuhi hak-hak dasarnya, salah satunya melalui proses musrenbang.

Penyelenggaraan Musrenbang di Kota Solok di atur melalui Peraturan Daerah Kota Solok nomor 2 Tahun 2005 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan Peraturan Walikota Solok Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Solok nomor 13 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Partisipatif.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 juga mengamanatkan pemerintah Kota Solok untuk menyusun dokumen perencanaan meliputi : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan penjabarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam dokumen-dokumen tersebut di cantumkan target-target strategis yang hendak dicapai dalam periode tertentu.

Terkait dengan kinerja penyelenggaraan Perencanaan di Kota Solok tahun 2010-2015 dapat dilihat pada tabel 2.118 :



Tabel 2.118
Kinerja Perencanaan Pembangunan
Pemerintah Kota Solok Periode 2010-2015

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Persentase usulan masyarakat yang diakomodasi dalam RKPD	83	96,11	72,03	59,18	38,27	65,32
2.	Persentase partisipasi komponen masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan tahunan	40,46	40,56	63,56	82,61	90,21	66,67
3.	Tingkat pencapaian target sasaran strategis RPJMD	86,94	84,86	70,22	61,45	62,01	59,09

Sumber : Bappeda Kota Solok

Berdasarkan data diatas, persentase usulan masyarakat yang diakomodasi dalam RKPD berfluktuasi dan cenderung turun capaiannya, hal itu disebabkan oleh jumlah usulan masyarakat terus meningkat namun usulan tersebut belum disertai dengan data dukung yang memadai terutama yang berkaitan dengan usulan fisik sehingga banyak dari usulan tersebut dikembalikan ke masyarakat. Sementara itu tingkat partisipasi masyarakat makin membaik walaupun pada tahun 2015 terjadi penurunan. Hal ini menandakan bahwa masyarakat semakin peduli terhadap pembangunan yang dilakukan pemerintah.

Berdasarkan tabel diatas juga dapat diketahui bahwa tingkat capaian sasaran strategis RPJMD setiap tahunnya mengalami penurunan. Hal ini tentu saja menjadi catatan penting dalam menetapkan sasaran yang akan dicapai dalam RPJMD selanjutnya.

4. Keuangan

Fungsi keuangan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah. Keberhasilan dari suatu pembangunan di daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah yang di kelola dengan manajemen yang baik pula. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Belanja daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Selama 5 tahun terakhir, pendapatan daerah dan belanja daerah terus mengalami peningkatan. Perkembangan pendapatan, belanja dan defisit selama tahun 2010 – 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.119:



Tabel 2.119.
Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Defisit pada APBD tahun 2010 – 2015

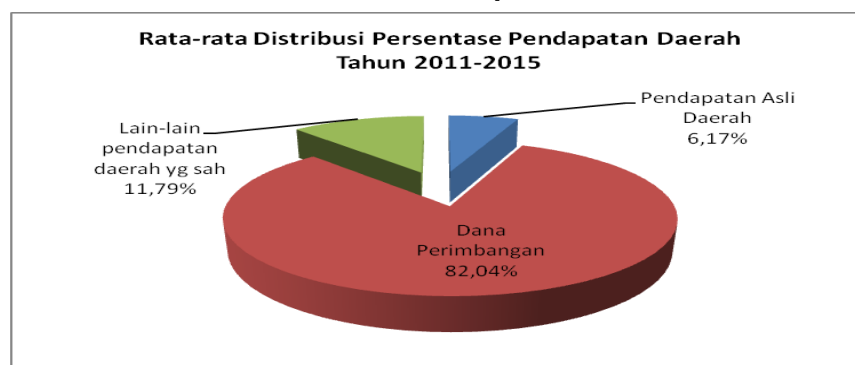
Tahun	Pendapatan	Belanja	Pembiayaan	Surplus / (Defisit)	% Pendapatan	%PDB
2010	283.562.213.567,98	309.573.887.557,50	1.189.000.000,00	(27.200.673.989,52)	(9,59)	(0,19)
2011	353.058.001.476,85	357.351.554.494,00	2.843.752.999,00	(7.137.306.016,15)	(2,02)	(0,44)
2012	387.727.303.216,45	397.859.893.269,98	7.961.766.350,00	(18.094.356.403,53)	(4,67)	(0,19)
2013	434.102.982.810,46	420.777.699.292,36	16.748.499.650,00	(3.423.216.131,90)	(0,79)	(1,11)
2014	489.525.802.312,46	452.972.592.178,46	19.548.682.238,61	17.004.527.895,39	3,47	0,22
2015	524.519.843.153,45	477.740.630.854,00	12.942.035.724,00	33.837.176.575,45	6,45	0,15

Sumber : BKD Kota Solok

Dari segi pendapatan daerah, rata-rata Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah tahun 2010-2015 sangat rendah yaitu hanya 6,17%, sedangkan kontribusi Dana Perimbangan mencapai 82,04% dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mencapai 11,79%. Hal ini berarti bahwa penerimaan daerah Kota Solok sangat tergantung pada dana transfer baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Provinsi (Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah).

Dalam penganggaran daerah sering sekali terdapat selisih antara anggaran pendapatan dengan anggaran belanja mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit di APBD. Faktor yang menyebabkan pemerintah daerah memutuskan defisit pada penganggaran daerahnya antara lain disebabkan oleh adanya SiLPA pada tahun sebelumnya, sehingga pemerintah daerah berani menganggarkan defisit pada APBD. Namun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD, 3% dari PDB dan 6% dari Pendapatan Daerah, Kota Solok selama tahun 2011 – 2015 masih dalam batas maksimal.

Gambar 2.17.
Rata-rata Distribusi Persentase Pendapatan Daerah Tahun 2011-2015



Selama tahun 2011-2015, rata-rata proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung terhadap Belanja Daerah cukup berimbang yaitu Belanja Tidak Langsung sebesar 49,57% dan Belanja Langsung 50,43%. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.120.

Tabel 2.120.
Belanja Langsung dan Tidak Langsung

Tahun	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Total (BTL + BL)
2010	168,020,037,946.50	141,553,849,611.00	309,573,887,557.50
2011	189,151,204,535.50	168,200,349,958.50	357,351,554,494.00
2012	200,614,919,526.98	197,244,973,743.00	397,859,893,269.98
2013	211,021,726,410.00	209,755,972,882.36	420,777,699,292.36
2014	228,410,900,985.00	224,561,691,193.46	452,972,592,178.46
2015	240,474,071,917.00	237,266,558,937.00	477,740,630,854.00
Rata-rata pertumbuhan	7.47%	11.03%	9.13%

Sumber : BKD Kota Solok

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung menurut Permendagri 13/2006 pasal 37 terdiri: belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tak terduga sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program kegiatan. Belanja langsung terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Jenis belanja daerah yang paling dominan di Kota Solok adalah untuk belanja pegawai pada belanja tidak langsung, yang mengalami peningkatan proporsinya dari 46,88% pada Tahun 2010 menjadi 48,68% pada Tahun 2015, dengan rata-rata proporsi sebesar 47,76% per Tahun atau mengalami pertumbuhan rata-rata per Tahun sebesar 0,86%. Namun proporsi sebesar ini masih dibawah dari peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yang maksimum sebesar 50%.

Untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Solok sejak Tahun 2009 telah mengimplementasikan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). SIPKD merupakan aplikasi terpadu yang digunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah untuk meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel. SIPKD ini terus dikembangkan baik aspek perencanaan, penganggaran, penatausahaan maupun pertanggung jawaban.

Untuk mengoptimalkan pengelolaan asset daerah, Pemerintah Kota Solok telah melakukan sensus dan revaluasi/appraisal asset daerah dan sejak 2015 telah mulai dikembangkan SIPKD modul asset. Dengan diimplementasikannya SIPKD modul asset ini, diharapkan pengelolaan asset dapat lebih ditingkatkan.

5. Kepegawaian

Sumber daya manusia dalam bidang aparatur pemerintahan merupakan power bagi pelayanan publik demi suksesnya pembangunan di seluruh bidang serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesiapan sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah dalam pelaksanaan wewenang dari daerah merupakan suatu tuntutan profesionalitas aparatur pemerintah yang berarti memiliki kemampuan pelaksanaan tugas, adanya komitmen terhadap kualitas kerja, dedikasi terhadap kepentingan masyarakat sebagai pihak yang dilayani oleh pemerintah daerah.

Tabel berikut menggambarkan komposisi pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Solok berdasarkan pendidikan, dari tahun 2010-2015.



Tabel 2.121.
Komposisi Pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Solok berdasarkan Pendidikan Tahun 2010-2015

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	S3	-	-	-	-	-	1
2	S2	119	133	198	216	236	254
3	S1	1.316	1.433	1.554	1.540	1.652	1.705
4	D3	358	400	316	316	293	291
5	D2	263	288	248	231	164	127
6	D1	37	35	31	29	25	15
7	SLTA	632	614	478	459	426	381
8	SLTP	46	30	25	22	26	26
9	SD	27	22	18	17	21	21
	Total	2.798	2.955	2.868	2.830	2.843	2.821

Sumber : BKPSDM Kota Solok

Dari tabel di atas terlihat bahwa rasio S2 terhadap jumlah aparatur sampai dengan tahun 2015 adalah sebesar 9,0% dan rasio S1 terhadap jumlah aparatur sebesar 60,44%, sedangkan sisanya sebesar 30,56% berpendidikan S3, D3, D2, D1, SLTA, SLTP dan SD. Aparatur Pemerintah Kota Solok hanya sebagian kecil saja yang masih berpendidikan dasar. Walau didominasi PNS berpendidikan menengah dan tinggi, tapi pada segmen S2 & S3 terbilang minim (< 10%). Begitu pula di level diploma, yang diharapkan bisa memberi layanan teknis lebih maksimal, masih dibawah 15%. Namun demikian, Rasio S1 dan S2 terhadap jumlah aparatur dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, hal ini disebabkan karena dampak dari perekrutan pegawai yang memberi porsi lebih banyak bagi sarjana/pascasarjana, kelonggaran penerbitan Izin Belajar dan Tugas Belajar sebagai motivasi kepada aparatur untuk melanjutkan pendidikan serta relative rutinnnya pelaksanaan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah (KPPI).

Sedangkan untuk komposisi Pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Solok berdasarkan jabatan struktural (Eselon) Tahun 2010-2015 dapat dilihat pada tabel 2.122 :

Tabel 2.122.
Komposisi Pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Solok berdasarkan Jabatan Struktural (Eselon) Tahun 2010-2015

No.	Eselon	Jumlah					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	II	22	19	23	22	22	21
2	III	81	88	93	89	91	90
3	IV	235	346	354	351	355	349
4	V	10	10	10	10	10	10
5	Staf	871	880	819	807	827	855
6	Fungsional	1.479	1.612	1.569	1.551	1.538	1.496
	Total	2.798	2.955	2.868	2.830	2.843	2.821

Sumber : BKPSDM Kota Solok

Untuk komposisi pegawai berdasarkan jabatan struktural (eselon) bersifat paten sesuai kotak jabatan yang ada (unit kerja pada organisasi) dan harus melalui proses rotasi (promosi/demosi).

6. Pendidikan dan Pelatihan

Pengembangan SDM tidak dapat dipisahkan dari peran pendidikan dan pelatihan. Melalui pendidikan dan pelatihan diharapkan menjadi daya ungkit (*leverage*) yang paling kuat



dalam mewujudkan sosok pegawai negeri sipil yang kompeten dan profesional, yang dicapai melalui upaya inovasi dan pengembangan dalam program, kurikulum, metode, serta sarana dan prasarana diklat. Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai, sampai saat ini dinilai sebagai upaya organisasi yang memiliki pengaruh signifikan dalam peningkatan kompetensi pegawai. Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai merupakan proses pembelajaran yang dirancang dan dilakukan secara sistematis serta berkesinambungan untuk meningkatkan kompetensi agar mampu melaksanakan tugas-tugas pekerjaannya secara profesional. Dengan meningkatnya kompetensi yang dimiliki, pada akhirnya akan berpengaruh pada kinerja organisasi secara keseluruhan.

Tabel 2.123.
Komposisi pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Solok
yang telah mengikuti diklat kepemimpinan tahun 2010-2015

No	Diklat Kepemimpinan	Jumlah					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pim II	24	29	24	25	22	21
2	PIM III	68	76	79	88	96	96
3	PIM IV	396	368	380	391	370	361
Total		2.798	2.955	2.868	2.830	2.843	2.821

Sumber : BKPSDM Kota Solok

Dari tabel di atas terlihat bahwa terjadinya fluktuasi dari tahun ke tahun terhadap jumlah aparatur yang mengikuti diklat penjenjangan/kepemimpinan. Hal ini tentunya diakibatkan oleh proses mutasi dalam kepegawaian. Seperti pensiun, meninggal dunia, mengundurkan diri, promosi, sanksi disiplin, atau karena pindah wilayah kerja.

7. Penelitian dan Pengembangan

Pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan di lingkungan pemerintah seyogyanya dilakukan melalui koordinasi kegiatan penelitian terapan serta pengembangan daerah sebagai bahan masukan perencanaan, menyusun rencana jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek pembangunan kota serta menyusun bahan perencanaan pengembangan daerah. Akan tetapi, pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kota Solok belum dapat dilakukan dalam bentuk program/ kegiatan pada periode RPJMD 2011 – 2015. Namun demikian, pada Tahun 2015 telah dimulai melalui fasilitasi pelaksanaan sosialisasi Dewan Riset Daerah Propinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan di Kota Solok. Untuk melaksanakan urusan Penelitian dan Pengembangan ini, pada tahun 2016 melalui Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah dibentuk Dinas Penelitian dan Pengembangan.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya Saing Daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dan tetap terbuka pada persaingan dengan Provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional dan internasional, sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah,

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multiplier effect bagi peningkatan



daya saing daerah, Kapasitas ekonomi daerah dapat dilihat dari pengeluaran per kapita atau konsumsi rata-rata perkapita (pangan dan non pangan), dan produktivitas total daerah.

Pada tahun 2015, rata-rata pengeluaran per kapita Kota Solok sebesar Rp. 1.113.220,49,- mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun 2010 yang sebesar Rp. 921.006,19. Kenaikan tersebut karena terjadi kenaikan baik dari pengeluaran komoditas makanan maupun non makanan. Rata-rata pengeluaran per kapita Kota Solok sebahagian besar masih didominasi oleh kelompok komoditas non makanan, yaitu sebesar 59,42% pada tahun 2015. Rata-rata pengeluaran per kapita menurut kelompok komoditas di Kota Solok Tahun 2010-2014 seperti pada Tabel 2.124:

Tabel 2.124.
Rata-rata Pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok komoditas di Kota Solok Tahun 2010-2015

Kelompok Komoditas	Tahun									
	2010		2011		2012		2013		2014	
	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
Makanan	404,874.32	43.96	414,026.17	42.97	431,510.87	42.56	439,414.95	41.59	451,775.96	40.58
Bukan Makanan	516,131.87	56.04	549,465.59	57.03	582,353.40	57.44	617,073.43	58.41	661,444.53	59.42
Jumlah	921,006.19	100.00	963,491.76	100.00	1,013,864.27	100.00	1,056,488.38	100.00	1,113,220.49	100.00

Dari Tabel 2.124 terlihat bahwa selama kurun waktu 2010 – 2014 persentase pengeluaran yang dialokasikan untuk makanan makin menurun menjadi sekitar 40,58% dan non makanan meningkat menjadi sekitar 59,42% pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan kecenderungan peningkatan untuk pengeluaran non makanan yang mengindikasikan terjadinya peningkatan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat.

Di samping pengeluaran per kapita, ukuran lain yang dapat digunakan adalah Produktivitas total daerah, yang dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor, dengan menghitung produktivitas daerah per sektor yang merupakan jumlah PDRB dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang bersangkutan. Produktifitas total daerah Kota Solok tahun 2010-2015 dapat dilihat pada tabel 2.125 :

Tabel 2.125.
Rata-Produktivitas Total Daerah Tahun 2010-2015

Produktifitas Total Daerah	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kota Solok	69,81	75,43	82,64	91,83	100,79	100,79
Sumatera Barat	50,33	56,63	61,81	69,35	74,84	74,84

Berdasarkan tabel 2.125 diatas dapat dilihat bahwa produktivitas total daerah Kota Solok jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera berada diatas provinsi. Hal ini mengindikasikan bahwa angkatan kerja di Kota Solok cukup produktif untuk mendorong pertumbuhan sektor ekonomi di Kota Solok.

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur akan dapat meningkatkan mobilitas manusia dan barang antar daerah dan antar kabupaten/kota, yang meliputi fasilitas transportasi (jalan dan jembatan), fasilitas kelistrikan, fasilitas komunikasi, fasilitas perdagangan, fasilitas pendidikan, fasilitas



kesehatan, dan fasilitas air bersih. Tersedianya infrastruktur yang memadai merupakan nilai tambah bagi perwujudan pembangunan suatu kota, serta dapat meningkatkan daya saing terhadap daerah lainnya. Untuk meningkatkan daya saing daerah, perlu disiapkan fasilitas wilayah/infrastruktur yang memadai, yakni berupa:

a. Aksesibilitas Daerah

Secara geografis, Kota Solok terletak pada posisi yang sangat strategis dan potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan yang mampu mengakses daerah sekitarnya melalui penyediaan prasarana dan sarana serta berbagai fasilitas pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Kota Solok tidak hanya strategis karena dikelilingi oleh wilayah administrasi pemerintahan dan masyarakat Kabupaten Solok, tetapi menjadi lebih strategis lagi karena terletak di jalur jalan arah utara menuju Kota Bukittinggi dan Medan, arah barat menuju Ibukota Propinsi Sumatera Barat (Padang) dan arah timur menuju Jambi, Palembang, Bengkulu dan Pulau Jawa. Dengan demikian, Kota Solok merupakan penopang jalur distribusi bagi perekonomian Propinsi Sumatera Barat.

Kondisi infrastruktur merupakan unsur penting yang perlu mendapatkan perhatian agar dapat berfungsi dengan optimal. Dalam mendukung aksesibilitas, Kota Solok memiliki panjang jalan yang semakin meningkat dalam 5 tahun terakhir. Berdasarkan Peraturan Walikota Solok Nomor: 41 Tahun 2009 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Dalam Kota Solok, panjang jalan yang ada di Kota Solok adalah 200,54 km. Secara faktual dilapangan, panjang jalan pada tahun 2015 meningkat dibanding tahun 2010 yang lalu, karena setiap tahun ada pembukaan jalan baru yang sudah tentu akan menambah panjang jalan yang ada. Namun karena Peraturan Walikota di atas belum diubah, maka sampai saat ini panjang jalan yang ada tetap dipublikasikan sepanjang 200,54 km.

Selain itu, untuk mendukung aksesibilitas daerah ini, adalah adanya ketersediaan angkutan umum yang menuju Kota Solok, dengan perkembangan sebagaimana terlihat pada tabel 2.126:

Tabel 2.126.
Jumlah Angkutan Umum Kota Solok Tahun 2010 - 2015

No.	Jenis Angkutan Umum	Tahun (Unit)					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	AKDP	130	214	205	205	211	264
2.	AKAP	13	15	18	18	10	10
3.	Angkutan Kota	128	128	44	47	33	20

Sumber : Kota Solok Dalam Angka Tahun 2010 s/d 2014 dan Dinas Perhubungan Kota Solok

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah angkutan umum berdasarkan jenisnya berfluktuasi setiap tahunnya. Namun bila dibandingkan dengan tahun 2010, terlihat adanya peningkatan yang signifikan pada AKDP, karena tingginya mobilitas orang dari dan ke Kota Solok dalam propinsi Sumatera Barat. Namun untuk angkutan kota mengalami penurunan yang signifikan, karena meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4 serta adanya angkutan umum alternatif berupa ojek dan becak motor.

b. Penataan Wilayah

Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2004-2013, Kota Solok dibagi atas 4 Bagian Wilayah Kota (BWK). Pembagian BWK tersebut adalah sebagai berikut: BWK I (Pusat Kota), memiliki kesamaan fungsi sebagai pusat kegiatan komersial kota (Central Business District) dengan kegiatan utama perdagangan (regional dan lokal), transportasi lokal, jasa, perkantoran, permukiman terbatas, pertanian, dan kesehatan. BWK II (Solok



Bagian Selatan), diperuntukkan bagi perdagangan (regional dan lokal), transportasi (regional dan lokal), kesehatan, permukiman, pertanian, dan industri kecil. BWK III (Solok Bagian Barat), mempunyai fungsi sebagai kawasan konservasi, hutan lindung, pertanian, pemerintahan kota, pemerintahan skala lingkungan, permukiman terbatas, dan perdagangan. BWK IV (Solok Bagian Utara), mempunyai fungsi sebagai kawasan konservasi, hutan lindung, pemerintahan skala kota, pendidikan tinggi, pariwisata, pertanian, industri (kecil dan menengah), jasa perhotelan, perdagangan, transportasi (regional dan lokal), olahraga, kesehatan, permukiman, dan fasilitas pemakaman umum.

Sementara itu dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2012 – 2031, dijelaskan bahwa rencana struktur ruang wilayah kota merupakan kerangka sistem pusat-pusat pelayanan kegiatan kota yang berhierarki dan satu sama lain dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kota. Rencana struktur ruang wilayah kota berfungsi :

- Sebagai arahan pembentuk sistem pusat-pusat pelayanan wilayah kota yang memberikan layanan bagi wilayah kota.
- Sebagai arahan perletakan jaringan prasarana wilayah kota sesuai dengan fungsi jaringannya yang menunjang keterkaitan antar pusat-pusat pelayanan kota.
- Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun.

Rencana struktur ruang wilayah kota dirumuskan berdasarkan :

- Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota
- Kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah kota dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi
- Daya dukung dan daya tampung wilayah kota
- Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengembangan pusat-pusat pelayanan di Kota Solok dimaksudkan untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah/kawasan yang diharapkan akan diperoleh optimalisasi perkembangan pelayanan sehingga secara bertahap seluruh wilayah/kawasan dapat berkembang/ terlayani dengan baik.

Dalam konteks pengembangan Kota Solok pengembangan pusat-pusat pelayanan sangat dibutuhkan untuk membentuk struktur kota yang tersambung dengan prasarana dan sarana yang ada yang berorientasi dari pusat pertumbuhan yang satu dan lainnya sehingga seluruh bagian kota berkembang dengan baik.

Secara teknis kebutuhan pengembangan pusat-pusat pelayanan di Kota Solok didasari oleh pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Mengoptimalkan jangkauan pelayanan yang dapat diberikan kepada penduduk kota, khususnya pada kawasan-kawasan yang letaknya jauh dari pusat kota.
- Terjadinya pemerataan pelayanan di pusat-pusat pertumbuhan
- Mendorong pemerataan pembangunan ke semua bagian wilayah kota dengan tersedianya pusat-pusat pelayanan di berbagai bagian wilayah kota.

Dengan pertimbangan tersebut di atas, pusat pusat pelayanan yang dibutuhkan dan diarahkan pengembangannya :

- Pusat Pelayanan Perdagangan dan Jasa; diarahkan pengembangannya di Kawasan Kelurahan Pasar Pandan Air Mati dan sekitarnya (sebagian Kelurahan Kampung Jawa dan Kelurahan Koto Panjang);
- Pusat Pelayanan Pemerintahan Kota Solok; Pusat pelayanan ini diarahkan pengembangannya ke Kelurahan Laing;



- Pembangunan kawasan industri/agroindustri untuk mewujudkan Kota Solok sebagai kota perdagangan dan diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih dinamis dan menciptakan la kerja bagi angkatan kerja di Kota Solok.
- Pusat pelayanan transportasi meliputi optimalisasi pemanfaatan terminal Regional Bareh Solok dan pembangunan Sub Terminal angkutan dalam kota untuk menunjang pergerakan kawasan pusat pertumbuhan baru. Di samping itu ditunjang pula dengan pembangunan jalan lingkar Utara dan Selatan untuk mempertinggi aksesibilitas dari masing-masing pusat pertumbuhan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan hasil analisis, maka struktur pusat pelayanan yang direncanakan adalah sebagai berikut :

1. **Pusat Pelayanan Kota**, yaitu : Kawasan Pusat Kota Solok yang berlokasi di Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, sebahagian Kelurahan Kampung Jawa dan Kelurahan Koto Panjang, dengan skala pelayanan regional dan kota;
2. **Sub Pusat Pelayanan Kota**, terdiri dari :
 - a. Kawasan Tanah Garam yang berlokasi di Kelurahan Tanah Garam dengan skala pelayanan regional dan kota.
 - b. Kawasan Simpang Rumbio yang berlokasi di Kelurahan Simpang Rumbio dengan skala pelayanan regional dan kota
 - c. Kawasan Laing yang berlokasi di Kelurahan Laing dengan skala pelayanan regional dan kota.
3. **Pusat Lingkungan**, terdiri dari 6 (enam) yang masing-masing berlokasi di Kelurahan Kampung Jawa, Tanjung Paku, Aro IV Korong, IX Korong, KTK dan VI Suku.

Karena itu, dalam penyusunan perencanaan tata ruang, arahan peruntukan lahan perlu mempertimbangkan daya tarik daerah bagi investor dan kemudahan aksesibilitas bagi pelaku ekonomi, sehingga daya saing daerah dapat ditingkatkan.

c. Ketersediaan Air Bersih

Penyediaan dan pengelolaan air bersih di Kota Solok pada saat ini terbagi ke dalam 2 (dua) sistem, yaitu sistem jaringan perpipaan yang dikelola oleh PDAM dan sistem non perpipaan yang dikelola secara mandiri oleh penduduk. Untuk pelayanan dengan sistem perpipaan sudah meliputi seluruh kelurahan yang ada di Kota Solok. Sistem jaringan perpipaan di Kota Solok saat ini, pelayanan dan pengelolaannya dilakukan oleh PDAM dengan cakupan pelayanan pada tahun 2010 sudah mencapai 94,47% dari jumlah penduduk. Pelayanan penyediaan air bersih ini akan semakin membaik dengan selesainya pembangunan jaringan distribusi dari sumber air baku baru yakni dari Guguak Rantau Kabupaten Solok. Dengan semakin baiknya tingkat layanan/ketersediaan air bersih ini, maka diharapkan Kota Solok semakin diminati oleh calon investor untuk menanamkan modalnya, yang pada akhirnya dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

Tabel 2.127.
Perkembangan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Kota Solok Tahun 2010-2015

No.	Tahun	Jumlah Rumah Tangga	Rumah tangga pengguna air bersih	
			Jumlah	Persentase
1.	2010	n.a	n.a	n.a
2.	2011	12.144	8.929	73,53
3.	2012	13.484	8.956	66,42
4.	2013	13.587	9.150	67,34
5.	2014	12.914	9.827	76,10
6.	2015	13.301	10.719	82,56

Sumber: PDAM Kota Solok



Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pada tahun 2015 baru sebesar 60,95% rumah tangga yang terlayani air bersih oleh PDAM Kota Solok, sedangkan sisanya menggunakan air bersih dari berbagai sumber. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelayanan air bersih masih merupakan prioritas untuk dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya, sehingga target pemerintah pusat untuk layanan air bersih sebesar 100% dapat dicapai.

d. Fasilitas Listrik dan Telepon

Ketersediaan sumber daya listrik, sudah menjangkau seluruh kelurahan yang ada di Kota Solok. Ketersediaan sumber daya listrik yang mencukupi merupakan fasilitas wilayah yang perlu menjadi perhatian dari pemerintah daerah. Walaupun kewenangan penyediaan energi listrik berada pada PT.PLN, namun pemerintah daerah perlu berkoordinasi dengan PT.PLN tersebut. Adapun perkembangan rumah tangga pengguna listrik dapat dilihat pada tabel 2.128:

Tabel 2.128.
Perkembangan Rumah Tangga Pengguna listrik Kota Solok Tahun 2010-2015

NO.	Tahun	Jumlah Rumah Tangga	Rumah tangga pengguna listrik	
			Jumlah	Persentase
1.	2010	n.a	n.a	NA
2.	2011	12.144	14.096	97.22
3.	2012	13.484	14.211	96.11
4.	2013	13.587	14.292	95.07
5.	2014	12.914	14.339	89.20
6.	2015	13.301	n.a	n.a

Sumber: PLN Cab. Solok

Dari tabel di atas, terlihat bahwa belum semua rumah tangga yang ada di Kota Solok yang menggunakan listrik. Kondisi ini tentu akan menjadi perhatian pemerintah daerah, sehingga target elektrifikasi sebesar 100% bisa diwujudkan.

Sementara itu, perkembangan teknologi seluler saat ini sudah semakin memudahkan bagi masyarakat untuk melakukan komunikasi. Jika dilihat dari sebarannya, maka jaringan telepon baik telepon tetap dan maupun telepon seluler telah menjangkau seluruh kelurahan yang ada di Kota Solok.

Ketersediaan energi listrik dan jaringan telepon akan dapat meningkatkan daya tarik daerah bagi calon investor untuk menanamkan modalnya di Kota Solok.

e. Ketersediaan Fasilitas Perdagangan dan Jasa

Tersedianya fasilitas perdagangan dan jasa merupakan indikator capaian kinerja dalam peningkatan daya saing daerah di bidang perdagangan dan jasa. Peningkatan prasarana dan sarana perdagangan, peningkatan jumlah kamar hotel serta peningkatan jumlah restoran baru yang terjadi selama ini merupakan salah satu pertanda bahwa potensi ekonomi masyarakat masih akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Kota Solok sebagai daerah yang sedang berkembang sangat membutuhkan investasi yang besar untuk melanjutkan pembangunan dan untuk mengatasi berbagai masalah perekonomian seperti pengangguran, kemiskinan, dan lainnya yang akan dapat ditanggulangi melalui berbagai cara salah satunya adalah investasi. Sehingga dalam suatu



perekonomian salah satu variabel yang memegang peranan penting adalah investasi atau penanaman modal, hal ini dapat dilihat dari :

Pertama, investasi akan mendorong pertambahan pendapatan (pertumbuhan ekonomi) secara berganda melalui proses multiplier;

Kedua, investasi akan mendorong penciptaan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan akan mengurangi kemiskinan;

Ketiga, investasi bisa dipakai sebagai alat untuk pemerataan baik untuk pemerataan antar daerah, antar sektor dan antar perorangan. Sebagai alat pemerataan investasi tidak dapat dibiarkan berjalan sendiri atau berjalan menurut mekanisme pasar tetapi harus ada intervensi pemerintah seperti memberi insentif pembebasan pajak bagi investor yang bersedia berinvestasi di daerah tertinggal, mempermudah izin investasi, dan kebijakan lainnya.

Untuk memperbesar atau menarik investasi baik domestik ataupun asing perlu diketahui lebih dahulu faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berikut beberapa faktor yang akan mempengaruhi iklim investasi :

a. Promosi Investasi

Peran promosi dalam usaha meraih investasi memegang peranan yang sangat penting. Promosi investasi mencoba untuk mengenalkan peluang-peluang investasi di suatu daerah sekaligus juga menggambarkan keuntungan yang akan diperoleh oleh investor.

Promosi yang baik adalah promosi yang dilakukan dengan orientasi pasar, dan yang menjadi sasaran pada promosi investasi ini adalah para pemodal atau investor. Untuk itu, potensi investasi haruslah memenuhi segala kebutuhan informasi bagi calon investor dan akan memberikan keuntungan bagi investor dikemudian hari, sehingga potensi investasi yang akan diinformasikan harus sesuai dengan kondisi di lapangan.

Dalam mempromosikan peluang investasi di Kota Solok, hal yang telah dilakukan adalah:

- Membuat profil dan leaflet peluang investasi di Kota Solok
- Mengikuti event-event promosi baik tingkat propinsi maupun nasional
- Menyusun Rancangan Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Solok
- Menyusun Ranperda Kemudahan Berinvestasi dan Pemberian Insentif bagi Investor.

b. Stabilitas politik dan Keamanan

Stabilitas politik dan keamanan merupakan faktor penting bagi investor karena akan menjamin kelangsungan investasinya untuk jangka panjang. Untuk stabilitas politik di Kota Solok sudah sangat kondusif, ini terlihat dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang telah dilakukan meskipun ada riak-riak kecil tetapi tidak sampai membesar menjadi konflik dan kerusakan yang membahayakan.

Dari sisi keamanan juga cukup kondusif hal ini dapat dilihat dari angka kriminalitas dan demonstrasi yang terjadi selama 5 (lima) tahun terakhir :

- **Angka Kriminalitas**
Angka kriminalitas mempengaruhi investasi asing yang akan masuk ke suatu daerah. Semakin rendah angka kriminalitas pada suatu daerah maka semakin tinggi pula ketertarikan investor untuk menanamkan investasinya di daerah tersebut. Angka kriminalitas di Kota Solok dapat dijelaskan seperti Tabel 2.129 :



Tabel 2.129.
Angka Kriminalitas di Kota Solok Tahun 2010-2015

No	Jenis Kriminalitas	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Curat (Pencurian dan pemberatan)	52	55	42	36	33	22
2	Penggelapan	30	31	55	38	40	32
3	KDRT	22	20	13	8	9	6
4	Penipuan	32	33	42	23	36	21
5	Pengrusakan	15	15	31	25	21	8
6	Curanmor	19	18	48	38	41	36
7	Pembakaran/kebakaran	2	2	3	4	7	6
8	Anirat (Penganiayaan, pemberatan)	41	40	85	46	56	41
9	Curas (pencurian dengan pemerasan)	3	2	1	2	2	3
10	Perkosaan/cabul	3	3	4	4	6	5
11	Pembunuhan	1	2	2	3	1	0
	Total jumlah tindak kriminal	220	219	326	227	252	180

Sumber : Polres Solok

Dari Tabel 2.129 dapat terlihat bahwa angka kriminalitas di Kota Solok selama tahun 2010-2015 mengalami fluktuasi namun cenderung mengalami peningkatan.

- Jumlah Demo

Jumlah investasi yang akan masuk ke suatu daerah juga dipengaruhi oleh keamanan suatu daerah, yang salah satu indikatornya adalah jumlah demonstrasi yang terjadi. Semakin rendah jumlah demonstrasi pada suatu daerah, maka semakin tinggi pula ketertarikan investor untuk menanam investasi di daerah tersebut.

c. Birokrasi Perizinan

Birokrasi perizinan merupakan faktor sangat penting yang akan mempengaruhi investasi karena birokrasi yang panjang dan berbelit-belit akan menimbulkan biaya tinggi bagi investor, hal ini akan menyebabkan pertumbuhan investasi tidak akan meningkat seperti yang diharapkan. Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, salah satunya kemudahan perizinan. Kemudahan perizinan suatu daerah sangat menunjang dalam pembuatan proses administrasi suatu investasi. Lamanya waktu untuk pengurusan izin tersebut serta biaya resmi dalam mengurus izin tersebut dapat dilihat pada tabel 2.130 :

Tabel 2.130.
Lama Proses Dan Biaya Perizinan Di Kota Solok pada Tahun 2014

No	Uraian	Lama Mengurus (Hari)	Biaya
1	SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)	3	Gratis
2	TDP (Tanda Daftar Perusahaan)	3	Gratis
3	TDI (Tanda Daftar Industri)	3	Gratis
4	IMB (Izin Mendirikan Bangunan)	10	
5	HO (Izin Gangguan)	3	
6	IUP (Izin Usaha Pertambangan)	-	



No	Uraian	Lama Mengurus (Hari)	Biaya
7	IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan)	-	
8	Izin Pengumpulan Bahan Tambang Industri	-	
9	Izin Penumpukan Bahan Bakar Industri	-	
10	Reklame (Izin Pemasangan Reklame)	3	Gratis

Sumber : DPMPTSP Kota Solok

Berdasarkan Tabel 2.130 terlihat bahwa Pemerintah Kota Solok telah memberikan kemudahan kepada orang pribadi ataupun perusahaan dalam proses pengurusan perizinan yang diperlukan untuk kelengkapan administrasi yang diperlukan dan sebagian besar dari proses perizinan tersebut tidak dipungut biaya seperti pengurusan SIUP, TDP, TDI dan lainnya.

d. Pajak serta Retribusi Daerah

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan perusahaan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan/perusahaan.

Berikut secara lengkap disajikan data mengenai jumlah realisasi serta macam pajak dan retribusi di Kota Solok selama kurun waktu 2011 – 2015 :

Tabel 2.131.

**Jumlah Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Di Kota Solok
Tahun 2010 – 2015 (Juta Rupiah)**

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015 (s/d Triwulan II)
1	Jumlah Pajak Daerah	1.878,90	2.328,08	3.911,74	3.777,93	4.523,65	3.952,09
	Pajak Hotel	45,38	90,56	190,08	327,85	365,67	265,09
	Pajak Restoran	202,03	182,81	374,69	534,49	813,90	469,03
	Pajak Hiburan	3,98	9,76	9,03	4,19	3,04	0,41
	Pajak Reklame	45,16	61,99	94,66	161,63	87,81	71,21
	Pajak Penerangan Jalan	1.558,55	1.602,79	1.915,49	2.081,72	2.354,39	1.974,34
	Pajak Parkir	-	-	3,89	3,39	8,29	4,37
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	23,77	19,25	29,72	-	-	-
	Pajak BPHTB	-	360,92	1.294,18	664,66	890,55	1.167,64
2	Jumlah Retribusi Daerah	2.958,04	4.500,58	4.747,49	5.312,94	5.302,52	4.377,40
	Retribusi Jasa Umum	1.238,05	1.930,82	2.302,29	2.403,35	2.648,13	1.951,66
	Retribusi Jasa Usaha	1.345,73	2.168,98	2.094,37	2.354,10	2.324,40	2.256,71
	Retribusi Perizinan Tertentu	374,25	400,78	350,83	555,49	329,99	169,03
3	Dana Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak (PBB, PPh psl 21, PPh 25/29, HPH, Eksplorasi dan Eksploitasi dll	18.982,93	15.706,60	20.414,56	17.352,06	13.751,73	10.463,43

Sumber : BKD Kota Solok



Dari Tabel 2.131 dapat terlihat rata-rata pertumbuhan pajak daerah dari kurun waktu 2011–2015 sebesar 17,92%, dimana tahun 2011 pajak daerah Kota Solok sebesar Rp. 2.328.080.000 menjadi Rp. 3.952.090.000 pada tahun 2015, hal disebabkan oleh kenaikan pajak hotel, pajak restoran, pajak penerangan jalan umum dan Pajak BPHTB.

Penerimaan retribusi daerah selama kurun waktu 2011–2015 mengalami peningkatan, pada tahun 2015 data yang digunakan kondisi sampai dengan triwulan II. Sedangkan dana bagi hasil pajak/bukan pajak untuk tahun 2011 sebesar Rp. 15.706.600.000 dan menurun menjadi Rp.10.463.430.000 pada tahun 2015, yang disebabkan adanya penyerahan dan pengalihan oleh Pemerintah Pusat ke Daerah atas pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah mulai tahun 2013 dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) mulai tahun 2014.

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Kualitas Sumber daya Manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk merupakan indikator kualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah yang digunakan untuk melihat sejauh mana beban ketergantungan penduduk.

2.4.4.1. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah salah satunya ditentukan oleh tingkat pendidikan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3.

Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Kota Solok pada tahun 2010-2015 dapat dilihat pada Tabel 2.132:

Tabel 2.132.
Perkembangan Rasio lulusan S1/S2/S3
Kota Solok Tahun 2010 - 2015

NO	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah lulusan S1	4008	4279	3932	4.051	4.079	4.331
2.	Jumlah lulusan S2	219	240	227	243	248	265
3.	Jumlah lulusan S3	12	12	11	11	8	7
4.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	4.239	4.531	4.170	4.305	4.335	4.603
5.	Jumlah penduduk	59.396	72.372	67.422	67.936	64.573	65.157
	Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5)	713	626	618	633	671	706

Sumber: Dinas Dukcapil Kota Solok (data diolah)

Berdasarkan Tabel 2.132 dapat dilihat bahwa Perkembangan rasio lulusan S1/S2/S3 selama periode 2010-2015 cukup berfluktuasi. Tahun 2015 rasio lulusan S1/S2/S3 Kota Solok mencapai 706, artinya terdapat 706 orang lulusan S1/S2/S3 dari 10.000 penduduk Kota Solok

2.4.4.2. Tingkat ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio Ketergantungan (dependency ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun keatas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Semakin tingginya Rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif



untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Perkembangan Rasio Ketergantungan Kota Solok Tahun 2010- 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.133 :

Tabel 2.133.
Rasio Ketergantungan Kota Solok Tahun 2010- 2015

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	18.788	20.076	19.135	19.449	18.470	18.115
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	4.138	3.142	2.695	2.775	2.511	2.716
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2)	22.926	23.218	21.830	22.224	20.981	20.831
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	45.539	49.154	45.592	45.712	43.592	44.326
5.	Rasio ketergantungan (3) / (4)	50,34	47,24	47,88	48,62	48,13	46,99

Sumber: Dinas Dukcapil Kota Solok (data diolah)

Rasio ketergantungan Kota Solok mulai Tahun 2010 berfluktuasi sampai Tahun 2015. Jika tahun 2011 rasio ketergantungan hanya sebesar 47,24%, maka tahun 2012 meningkat menjadi 47,88%. Sampai dengan tahun 2015, rasio ketergantungan ini cenderung mengalami sedikit penurunan setiap tahunnya, menjadi 46,99%. Dengan kata lain, setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) di Kota Solok mempunyai tanggungan sebanyak 47 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan sub sistem yang sangat krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel mempunyai dampak secara langsung terhadap keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah dan memberikan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan *good governance* dan *clean governance*

Untuk memahami kinerja pengelolaan keuangan daerah, maka perlu dianalisis data-data keuangan daerah, meliputi kondisi kinerja keuangan daerah terutama kinerja keuangan masa lalu. Analisis data keuangan daerah ini sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dan analisisnya merupakan informasi yang penting untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah dan menyusun kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah Kota Solok mengacu kepada Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Sebagai implementasi dari peraturan perundang-undangan tersebut di atas, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan peraturan teknis operasional pelaksanaan peraturan tersebut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali dirubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Peranan dan kontribusi kinerja keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan kewenangannya tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk dapat mengetahui kemampuan sumber daya keuangan daerah tersebut, maka perlu dilakukan analisis terhadap kinerja keuangan daerah selama beberapa tahun terakhir beserta kebijakan yang berkaitan. Analisis kinerja keuangan daerah dimulai dengan analisis kinerja pendapatan daerah, kinerja belanja daerah, kinerja pembiayaan daerah, serta neraca daerah.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

A. Kinerja Pendapatan Daerah

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapatan daerah Kota Solok terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD juga dapat dibedakan menurut jenisnya meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan daerah yang berasal dari Dana Perimbangan dibagi menurut beberapa jenis meliputi bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Pendapatan daerah yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana



penyesuaian dan otonomi khusus serta bantuan keuangan dari pemerintah provinsi atau daerah lainnya.

Pajak Daerah yang dipungut oleh Kota Solok terdiri dari 8 jenis yakni pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan umum, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) dan pajak parkir. Sedangkan Retribusi Daerah terdiri dari 16 jenis retribusi yang dikelompokkan atas 3 yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah bersumber dari 2 pos jenis yaitu bagian laba BUMD (PDAM) dan bagian laba atas penyertaan modal pada Bank Nagari. Pelaporan pendapatan daerah tersebut dapat dilakukan berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006 dan berdasarkan PP 24 tahun 2005.

Perkembangan pendapatan Kota Solok tahun 2010 – 2015 berdasarkan klasifikasi pendapatan dapat diperlihatkan pada Tabel 3.1 berikut:



Tabel 3.1.
Perkembangan Jumlah Pendapatan Kota Solok Tahun 2010 – 2015

URAIAN		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-Rata Pertumbuhan
PENDAPATAN		283.562.213.567,98	353.058.001.476,85	387.727.303.216,45	434.102.982.810,46	489.525.802.312,46	524.519.843.153,45	13,24
Pendapatan Asli Daerah		18.574.273.779,98	23.695.904.149,85	23.320.507.696,45	24.140.144.814,46	29.522.681.473,46	36.630.731.403,45	15,18
1	Pajak Daerah	1.878.901.842,00	2.328.100.238,94	3.911.741.905,00	3.777.934.782,82	5.383.370.492,00	6.319.833.716,40	29,68
2	Retribusi Daerah	2.958.048.980,00	4.500.815.401,00	4.747.471.791,00	5.312.909.865,00	5.302.503.073,00	5.699.277.296,00	15,37
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.716.430.768,00	6.190.201.052,00	6.230.004.549,00	7.089.551.430,00	7.494.951.066,00	8.042.687.631,00	18,81
4	Lain-Lain PAD yang Sah	10.020.892.189,98	10.676.787.457,91	8.431.289.451,45	7.959.748.736,64	11.341.856.842,46	16.568.932.760,05	13,70
Dana Perimbangan		242.829.016.609,00	267.303.113.914,00	324.818.849.521,00	361.383.291.916,00	400.411.687.249,00	415.678.886.750,00	11,49
1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	18.902.653.609,00	15.706.601.914,00	20.414.562.521,00	17.352.062.916,00	13.751.725.249,00	11.376.804.750,00	(7,99)
2	Dana Alokasi Umum	210.134.688.000,00	237.102.087.000,00	280.495.627.000,00	318.606.999.000,00	360.719.232.000,00	360.719.232.000,00	11,55
3	Dana Alokasi Khusus	13.791.675.000,00	14.494.425.000,00	23.908.660.000,00	25.424.230.000,00	43.582.850.000,00	43.582.850.000,00	27,67
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		22.158.923.179,00	62.058.983.413,00	39.587.945.999,00	48.579.546.080,00	59.591.433.590,00	72.210.225.000,00	42,08
1	Dana Hibah	-	875.360.400,00	-	-	596.363.000,00	1.000.000.000,00	
2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	
3	Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	8.607.322.116,00	11.290.062.883,00	11.713.659.999,00	12.096.958.000,00	15.834.013.590,00	19.076.293.000,00	17,91
4	Bantuan Keuangan dari Propinsi/Pemerintah Daerah Lainnya	307.600.000,00	100.000.000,00				900.000.000,00	
5	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	10.523.121.600,00	5.429.318.750,00		36.191.549.000,00	42.774.893.000,00	51.233.932.000,00	
6	Penerimaan Lain-Lain Yang Sah	2.720.879.463,00	44.364.241.380,00	27.874.286.000,00	291.039.080,00	386.164.000,00		265,41

Sumber: LKPD Kota Solok Tahun 2010 – 2015 (diolah)



Pertumbuhan pendapatan daerah Kota Solok selama 6 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Pertumbuhan rata-rata per tahun pendapatan daerah Kota Solok tahun 2010 hingga tahun 2015 mencapai 13,24% atau meningkat dari Rp.283.562.213.567,98 pada tahun 2010 menjadi Rp.524.519.843.153,45 pada tahun 2015. Idealnya pertumbuhan seperti ini lebih banyak didorong oleh pertumbuhan PAD. Hal ini dapat dicapai oleh Kota Solok karena memiliki pertumbuhan PAD yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan Pendapatan Dana Perimbangan.

Analisis perkembangan PAD menunjukkan bahwa pertumbuhan rata-rata per tahun dari pajak daerah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sumber PAD lainnya. Penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan dari Rp.1.878.901.842,00 pada tahun 2010 menjadi Rp.6.319.833.716,40 pada tahun 2015. Hal ini berarti terjadi pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 29,68%. Sedangkan pertumbuhan rata-rata per tahun retribusi daerah hanya sebesar 15,37%, yaitu dari Rp.2.958.048.980,00 pada tahun 2010 menjadi Rp.5.699.277.296,00 pada tahun 2015. Hal yang sama juga diperlihatkan oleh sumber PAD lainnya, yaitu Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah, masing-masing dengan tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 18,81% dan 13,70%.

Salah satu hal yang mendorong terjadi pertumbuhan pendapatan pajak daerah yang lebih tinggi ini adalah karena ada pengalihan PBB-P2 dan PBHTB dari pajak pusat menjadi pajak daerah. Akan tetapi pertumbuhan pajak daerah yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sumber PAD lainnya belum menunjukkan kinerja yang optimal. Hal ini dapat dibuktikan dengan perbedaan penurunan Bagi Hasil Pajak dengan peningkatan Pajak Daerah. Penurunan bagi hasil pajak antara tahun 2013 – 2014 adalah Rp.3.600.337.667,00, sedangkan peningkatan penerimaan pajak daerah hanya Rp.1.605.435.709,18.

Untuk penerimaan retribusi daerah dalam kurun waktu enam tahun telah menunjukkan hasil yang terus meningkat. Pada tahun 2010 realisasi retribusi daerah hanya sebesar Rp.2.958.048.980,- dan mengalami peningkatan yang cukup baik pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp.5.699.277.296,-

Kinerja retribusi Kota Solok tersebut dapat dilihat secara positif sebagai keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan iklim usaha di Kota Solok. Namun demikian terjadi pergeseran kontribusi nilai retribusi daerah dari retribusi perijinan tertentu dan retribusi jasa usaha. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kegiatan yang berkaitan dengan ijin penggunaan tanah, IMB dan retribusi izin gangguan (HO). Dikaitkan dengan tingginya konversi lahan untuk perumahan, nilai retribusi ini menunjukkan meningkatnya jumlah dan kualitas sektor properti yang harus diantisipasi dengan kesiapan infrastruktur lainnya. Disamping itu berfluktuasinya kontribusi nilai retribusi jasa usaha menunjukkan fluktuasi kinerja sektor jasa usaha sehingga pemerintah daerah perlu memperkuat basis usaha ekonomi masyarakat dengan perangkat aturan, akses permodalan dan pemasaran.

Pencapaian hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan menunjukkan hasil yang cukup signifikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini. Pada tahun 2010, realisasi bagian laba atas penyertaan modal yang dipisahkan sebesar Rp.3.716.430.768,00 dan meningkat menjadi Rp.8.042.687.631,00 pada tahun 2015 dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 18,81%. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ini terdiri dari komponen Penyertaan Modal pada BUMD PT. Bank Nagari dan bagi hasil dari pelaksanaan kegiatan PDAM Kota Solok.

Untuk realisasi penerimaan Dana Perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Kota Solok dalam kurun waktu enam tahun terakhir menunjukkan tren yang positif. Hal ini terlihat dari realisasi dana



perimbangan tahun 2010 sebesar Rp.242.829.016.609,00 dan meningkat menjadi Rp.415.678.886.750,00 pada tahun 2015.

Penerimaan DAU menunjukkan tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 11,55%. Jumlah penerimaan DAU pada tahun 2010 berjumlah Rp. 210.134.688.000,00 pada tahun 2015 dan meningkat menjadi Rp.360.719.232.000,00. Peningkatan penerimaan DAU ini sejalan dengan kenaikan penerimaan negara dan peningkatan jumlah pegawai serta kenaikan gaji pegawai. Pada masa datang penyempurnaan data kependudukan dan data-data lain yang mempengaruhi perhitungan DAU perlu disempurnakan agar peningkatan DAU yang lebih tinggi dapat dicapai.

Kinerja penerimaan dana perimbangan yang lebih baik ditunjukkan dari penerimaan dana DAK. Jika pada tahun 2010 penerimaan dana DAK berjumlah Rp.13.791.675.000,00, maka pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp.43.582.850.000,00. Ini berarti dalam kurun waktu tersebut terjadi pertumbuhan rata-rata sebesar 27,67%. Oleh sebab itu, kebijakan untuk mendapatkan dana DAK melalui penyusunan proposal perencanaan perlu ditingkatkan sehingga penerimaan DAK dapat lebih besar.

Penerimaan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak menunjukkan kinerja yang kurang baik. Sekalipun salah satu penyebab penurunan kinerja dana bagi hasil pajak dan bukan pajak ini adalah karena adanya pengalihan 2 jenis pajak pusat ke daerah, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), namun penurunan penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak pada tahun 2015 harus menjadi perhatian yang serius dari pengelola pendapatan daerah. Jumlah pendapatan bagi hasil pajak dan bukan pajak pada tahun 2010 berjumlah Rp.18.902.653.609,00 menurun menjadi Rp.13.751.725.249,00 pada tahun 2014, dan menurun lagi menjadi Rp.11.376.804.750,00 pada tahun 2015. Penurunan seperti ini pada masa mendatang harus tidak terjadi lagi, dan upaya-upaya untuk meningkatkan penerimaan pendapatan Kota Solok dari sumber pendapatan ini perlu menjadi program prioritas dinas terkait.

Sementara itu realisasi pendapatan yang berasal dari lain-lain Pendapatan yang Sah dalam kurun waktu enam tahun terakhir mengalami peningkatan penurunan yang berfluktuasi. Hal ini terlihat dari realisasi pada tahun 2010 sebesar Rp.22.158.923.179,00 dan pada tahun 2015 terealisasi hanya sebesar Rp.72.210.225.000,00. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian Otonomi Daerah dan Bantuan Keuangan dari Provinsi. Capaian dari komponen lain-lain Pendapatan Daerah yang sah tahun 2010-2015.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kinerja pendapatan, maka analisis berikutnya dapat dilakukan berdasarkan perkembangan proposi (kontribusi) masing-masing sumber pendapatan terhadap total pendapatan daerah Kota Solok. Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Kota Solok mengalami peningkatan dari 6,55% pada tahun 2010 menjadi 6,98% pada tahun 2015. Rendahnya peningkatan kontribusi PAD ini terutama didorong oleh penurunan kontribusi selain Pajak Daerah. Kontribusi Lain-lain PAD yang Sah mengalami penurunan dari 3,53% pada tahun 2010 menjadi 3,16% pada tahun 2015, Retribusi Daerah mengalami sedikit peningkatan kontribusi, yaitu dari 1,04% pada tahun 2010 menjadi 1,09% pada tahun 2015. Sedangkan penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami sedikit peningkatan dari 1,31% pada tahun 2010 menjadi 1,53% pada tahun 2015. Pada masa datang perlu dirumuskan berbagai kebijakan yang dapat meningkatkan kontribusi PAD sehingga bisa menceminkan kinerja nyata dari pelimpahan kewenangan pengelolaan keuangan kepada daerah dalam memungut PAD.

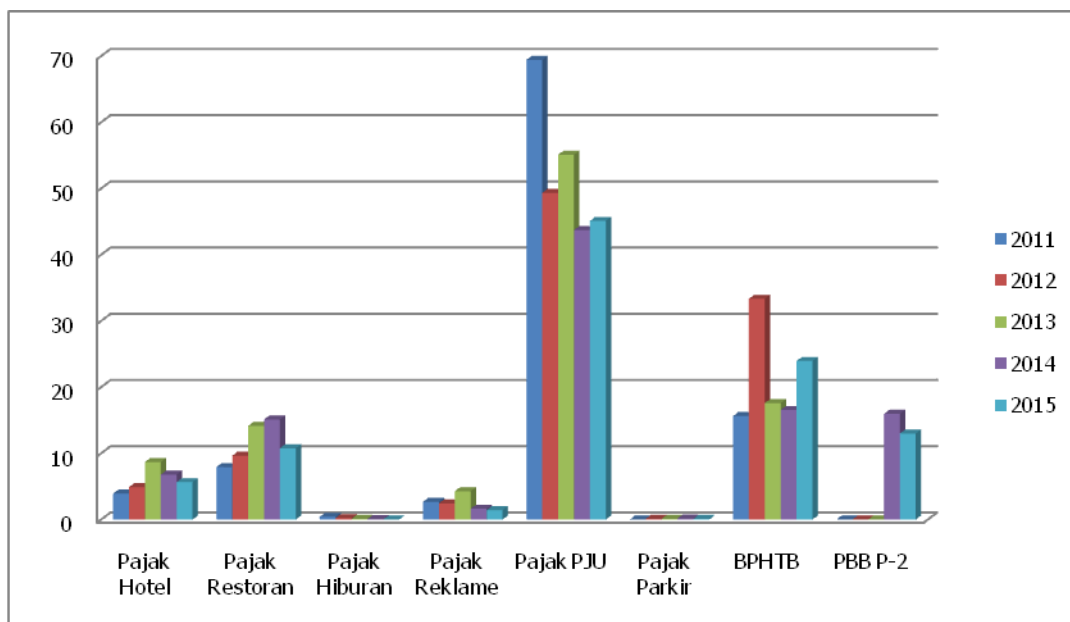


Dari sisi kontribusi, pajak penerangan jalan umum (PJU) memberikan kontribusi terbesar terhadap total penerimaan pajak daerah mencapai 69,42 % pada tahun 2011, dengan trend berfluktuasi dari tahun ke tahun. Hal ini karena dipengaruhi oleh adanya penyerahan BPHTB dan PBB P-2 menjadi pajak daerah. Kontribusi masing-masing jenis pajak daerah terhadap total realisasi dalam 5 tahun terakhir tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini.

Tabel 3.2
Kontribusi Masing-Masing Jenis Pajak Daerah Kota Solok
Tahun 2011 – 2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Pajak Hotel	3,92	4,90	8,68	6,79	5,65
Pajak Restoran	7,92	9,65	14,15	15,12	10,77
Pajak Hiburan	0,42	0,23	0,11	0,06	0,01
Pajak Reklame	2,69	2,44	4,28	1,63	1,43
Pajak PJU	69,42	49,34	55,10	43,73	45,10
Pajak Parkir	-	0,10	0,09	0,15	0,09
BPHTB	15,63	33,34	17,59	16,54	23,95
PBB P-2	-	-	-	15,97	13,00
Total Pajak Daerah	100	100	100	100	100

Gambar 3.1
Kontribusi Masing-Masing Jenis Pajak Daerah Kota Solok
Tahun 2011 – 2015



Sejalan dengan pertumbuhan jumlah penerimaan DAK yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sumber dana perimbangan/transfer lainnya, maka kontribusi DAK terhadap pendapatan daerah juga mengalami peningkatan yang signifikan. Jika pada tahun 2010 kontribusi DAK hanya berjumlah 4,86%, maka pada tahun 2015 meningkat menjadi 8,31%.

Pendapatan DAU sebagai sumber penerimaan daerah yang paling besar mengalami penurunan kontribusi, yaitu dari 74,11% pada tahun 2010 menjadi 68,77% pada tahun 2015. Bahkan pendapatan Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah yang pada banyak daerah lain (termasuk propinsi Sumatera Barat) mengalami peningkatan yang cukup signifikan, namun di Kota Solok, kontribusi Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah mengalami sedikit peningkatan dari 3,71% pada

tahun 2010 menjadi 9,77% pada tahun 2015. Oleh sebab itu, analisis secara lebih detail perlu dilakukan untuk mengupayakan bagaimana dana DAU dan Dana Penyesuaian dapat ditingkatkan pada masa datang.

Tabel 3.3 berikut ini menunjukkan perkembangan kontribusi pendapatan daerah.

Tabel 3.3
Perkembangan Kontribusi Sumber Pendapatan Daerah Kota Solok Tahun 2010 – 2015 (%)

URAIAN		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-Rata Pertumbuhan Proporsi	Rata- Rata Proporsi
PENDAPATAN		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Pendapatan Asli Daerah		6,55	6,71	6,01	5,56	6,03	6,98	1,76	6,31
1	Pajak Daerah	10,12	9,82	16,77	15,65	18,23	17,25	14,46	14,64
2	Retribusi Daerah	15,93	18,99	20,36	22,01	17,96	15,56	0,56	18,47
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20,01	26,12	26,71	29,37	25,39	21,96	3,14	24,93
4	Lain-Lain PAD yang Sah	53,95	45,06	36,15	32,97	38,42	45,23	(2,16)	41,96
Dana Perimbangan		85,64	75,71	83,78	83,25	81,80	79,25	(1,28)	81,57
1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	7,78	5,88	6,28	4,80	3,43	2,74	(17,99)	5,15
2	Dana Alokasi Umum	86,54	88,70	86,35	88,16	88,50	86,78	0,08	87,51
3	Dana Alokasi Khusus	5,68	5,42	7,36	7,04	8,06	10,48	14,29	7,34
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		7,81	17,58	10,21	11,19	12,17	13,77	22,90	12,12
1	Dana Hibah	-	1,41	-	-	1,00	1,38	-	0,63
2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	38,84	18,19	29,59	24,90	26,57	26,42	(0,05)	27,42
4	Bantuan Keuangan dari Propinsi/Pemerintah Daerah Lainnya	1,39	0,16	-	-	-	1,25	-	0,47
5	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	47,49	8,75	-	74,50	71,78	70,95	-	45,58
6	Penerimaan Lain-Lain Yang Sah	12,28	71,49	70,41	0,60	0,65	-	57,94	25,90

Sumber: LKPD Kota Solok Tahun 2010 – 2015 (diolah)



Capaian kinerja pendapatan sebagaimana dijelaskan di atas dapat juga dievaluasi berdasarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasi. Perbandingan seperti ini dapat menunjukkan seberapa efektif pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh aparatur pemda atau SKPD terkait. Sesuai dengan Permendagri Nomor 27 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015, tingkat capaian di atas 90,00% dikategorikan sangat tinggi dan antara 76,00% sampai dengan 90,00% dikategorikan tinggi.

Berdasarkan konsep perbandingan ini, maka secara total capaian kinerja pendapatan daerah rata-rata Kota Solok tahun 2010 – 2015 termasuk kategori sangat tinggi. Karena, selama periode tersebut capaian realisasi pendapatan daerah Kota Solok di atas 100,00%. Bahkan, hanya pada tahun 2010 dan tahun 2012 saja capaian kinerja realisasi pendapatan sedikit dibawah 100,00%, yaitu 98,89% dan 99,94%.

Analisis berdasarkan jenis pendapatan daerah menunjukkan bahwa penerimaan Retribusi Daerah, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Penerimaan Lain-Lain Yang Sah, merupakan 3 jenis pendapatan daerah yang memiliki tingkat capaian kinerja realisasi yang termasuk kategori tinggi. Sedangkan jenis pendapatan daerah lainnya memiliki tingkat capaian tergolong sangat tinggi. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa kinerja realisasi pendapatan daerah Kota Solok tergolong baik atau sangat tinggi.

Tabel 3.4 berikut menyajikan perkembangan capaian realisasi pendapatan daerah Kota Solok tahun 2010 – tahun 2015.



Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi dan Anggaran Pendapatan Daerah Kota Solok Tahun 2010 – 2015 (%)

URAIAN		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-Rata
PENDAPATAN		98,89	100,13	99,94	101,25	102,44	100,94	100,60
Pendapatan Asli Daerah		93,79	100,72	87,19	94,67	107,41	105,93	98,28
1	Pajak Daerah	125,81	99,79	125,76	100,40	109,97	105,65	111,23
2	Retribusi Daerah	75,22	98,14	72,58	72,01	81,96	94,35	82,38
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	99,56	100,00	98,08	98,83	100,00	100,00	99,41
4	Lain-Lain PAD yang Sah	94,13	102,49	78,49	110,78	131,46	114,14	105,25
Dana Perimbangan		99,81	98,46	100,97	100,71	100,65	100,04	100,11
1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	109,68	104,40	118,15	117,33	123,19	101,52	112,38
2	Dana Alokasi Umum	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Dana Alokasi Khusus	86,67	74,99	100,00	100,00	100,00	100,00	93,61
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		93,64	107,77	100,11	109,38	113,35	103,86	104,68
1	Dana Hibah	-	-	-	-	-	-	-
2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-
3	Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	110,95	145,53	100,36	177,88	98,25	100,56	122,26
4	Bantuan Keuangan dari Propinsi/Pemerintah Daerah Lainnya	102,53	100,00	-	-	-		101,27
5	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	98,66	101,06	-	98,11	120,53	101,34	86,62
6	Penerimaan Lain-Lain Yang Sah	55,08	100,02	-	-	-	-	77,55

Sumber: LKPD Kota Solok Tahun 2010 – 2015 (diolah)



B. Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Berdasarkan Permendagri 13 tahun 2006, belanja daerah dapat diklasifikasikan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Oleh sebab itu, pelaksanaan belanja langsung bertujuan untuk meningkatkan kinerja. Komponen belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

Sejalan dengan perkembangan pendapatan daerah, jumlah belanja daerah Kota Solok mengalami peningkatan yang relatif tinggi yaitu dari Rp. 309,573,887,557.50 pada tahun 2010 menjadi Rp.477,740,630,854.00 pada tahun 2015. Hal ini berarti dalam kurun waktu tersebut terjadi pertumbuhan rata-rata sebesar 9,13% per tahun. Analisis perbandingan pertumbuhan belanja langsung dengan belanja tidak langsung, menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan rata-rata belanja langsung lebih tinggi dibandingkan dengan belanja tidak langsung. Pertumbuhan rata-rata per tahun belanja langsung tersebut adalah 11,03%, sedangkan untuk belanja tidak langsung mengalami pertumbuhan sebesar 7,47% per tahun. Kondisi seperti ini menunjukkan kinerja pengelolaan belanja yang baik karena orientasi belanja Kota Solok lebih bertujuan untuk meningkatkan Kinerja Pembangunan dibandingkan dengan belanja pegawai.

Kinerja yang baik ini juga dapat dilihat berdasarkan pertumbuhan jenis belanja daerah. Misalkan, pertumbuhan belanja langsung pegawai yang minus 4,91%, sedangkan belanja barang dan jasa serta belanja modalnya mengalami pertumbuhan yang positif. Di samping itu, juga dapat dilakukan analisis berdasarkan pertumbuhan rata-rata per tahun dari belanja barang dan jasa serta belanja modal yang lebih tinggi dibandingkan dengan belanja pegawai tidak langsung. Belanja barang dan jasa mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 13,84% per tahun dan belanja modal 17,35% per tahun, sedangkan belanja pegawai tidak langsung hanya mengalami pertumbuhan sebesar 10,09% per tahun.

Perkembangan jumlah belanja daerah Kota Solok dapat dilihat pada Tabel 3.5.



Tabel 3.5
Perkembangan Jumlah Belanja Daerah Kota Solok Tahun 2010 – 2015

URAIAN	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Rata-Rata Pertumbuhan
BELANJA	309,573,887,557.50	357,351,554,494.00	397,859,893,269.98	420,777,699,292.36	452,972,592,178.46	477,740,630,854.00	9.13
Belanja Tidak Langsung	168,020,037,946.50	189,151,204,535.50	200,614,919,526.98	211,021,726,410.00	228,410,900,985.00	240,474,071,917.00	7.47
1 Belanja Pegawai	144,502,412,828.50	167,563,946,033.50	192,801,988,823.98	199,940,463,347.00	218,973,363,488.00	232,571,849,226.00	10.09
2 Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-
3 Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-
4 Belanja Hibah	20,116,515,433.00	17,550,279,093.00	6,804,154,249.00	8,489,174,298.00	6,053,007,784.00	7,438,415,001.00	(11.01)
5 Belanja Bantuan Sosial	3,303,859,685.00	3,645,566,409.00	950,506,654.00	2,269,732,100.00	1,476,105,000.00	43,269,500.00	(11.37)
6 Belanja Bantuan Keuangan	-	-	50,000,000.00	322,356,665.00	340,387,713.00	235,538,190.00	173.17
7 Belanja Tidak Terduga	97,250,000.00	391,413,000.00	8,269,800.00	-	1,568,037,000.00	185,000,000.00	4.10
Belanja Langsung	141,553,849,611.00	168,200,349,958.50	197,244,973,743.00	209,755,972,882.36	224,561,691,193.46	237,266,558,937.00	11.03
1 Belanja Pegawai	19,344,658,500.00	15,812,902,840.00	16,466,795,570.00	23,147,847,427.00	13,136,997,525.00	12,118,725,081.00	(4.91)
2 Belanja Barang dan Jasa	72,221,285,674.00	90,441,637,141.50	76,384,051,153.00	97,770,221,354.36	127,611,878,193.30	128,862,427,055.00	13.84
3 Belanja Modal	49,987,905,437.00	61,945,809,977.00	104,394,127,020.00	88,837,904,101.00	83,812,815,475.16	96,285,406,801.00	17.35

Sumber : LKPD Kota Solok Tahun 2010 – 2015 (data diolah)

Analisis proporsi setiap jenis belanja daerah lebih memperjelas kinerja pengelolaan belanja daerah Kota Solok tersebut. Jenis belanja daerah yang paling dominan di Kota Solok adalah untuk belanja pegawai pada belanja tidak langsung, yang mengalami peningkatan proporsinya dari 46,88% pada tahun 2010 menjadi 48,68% pada tahun 2015, dengan rata-rata proporsi sebesar 47,76% per tahun atau mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 0,86%. Namun proporsi sebesar ini masih dibawah dari peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yangmaksimum sebesar 50%.

Proporsi terbesar kedua adalah untuk belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa mengalami peningkatan proporsi dari 23,33% pada tahun 2010 menjadi 28,17% pada tahun 2014 dan menjadi 26,97% pada tahun 2015, dengan rata-rata proporsi sebesar 24,37% per tahun atau mengalami pertumbuhan rata-rata 4,47% per tahun. Proporsi terbesar ketiga adalah untuk belanja modal yang mengalami peningkatan dari 16,15% pada tahun 2010 menjadi 20,15% pada tahun 2015 dengan rata-rata proporsi sebesar 19,92% per tahun atau mengalami pertumbuhan 7,15% per tahun. Pertumbuhan proporsi belanja barang dan jasa serta belanja modal yang lebih besar dari pada pertumbuhan belanja tidak langsung pegawai merupakan gambaran capaian kinerja pengelolaan belanja daerah yang baik dari Kota Solok dalam tahun 2010 – tahun 2015.

Namun, kinerja pengelolaan belanja daerah yang baik tersebut sedikit terkoreksi karena proporsi jumlah belanja modal dibawah batas ideal yang diharapkan pemerintah yaitu sebesar 30% dari total belanja. Hal ini terjadi karena jumlah pendapatan Kota Solok yang sangat terbatas sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan akan belanja daerah yang lainnya.

Tabel 3.6 berikut memperlihatkan perkembangan proporsi belanja daerah berdasarkan jenis belanja.

Tabel 3.6.
Perkembangan Proporsi Belanja Daerah Kota Solok Tahun 2010 – 2015 (%)

URAIAN	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Rata-Rata Pertumbuhan Proporsi	Rata-Rata Proporsi
BELANJA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	100.00
Belanja Tidak Langsung	54.27	52.93	50.42	50.15	50.42	50.34	(1.48)	51.42
1 Belanja Pegawai	46.68	46.89	48.46	47.52	48.34	48.68	0.86	47.76
2 Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Belanja Hibah	6.50	4.91	1.71	2.02	1.34	1.56	(17.78)	3.01
5 Belanja Bantuan Sosial	1.07	1.02	0.24	0.54	0.33	0.01	(18.40)	0.53
6 Belanja Bantuan Keuangan	-	-	0.01	0.08	0.08	0.05	-	0.04
7 Belanja Tidak Terduga	0.03	0.11	0.00	-	0.35	0.04	-	0.09
Belanja Langsung	45.73	47.07	49.58	49.85	49.58	49.66	1.69	48.58
1 Belanja Pegawai	6.25	4.43	4.14	5.50	2.90	2.54	(12.51)	4.29
2 Belanja Barang dan Jasa	23.33	25.31	19.20	23.24	28.17	26.97	4.47	24.37
3 Belanja Modal	16.15	17.33	26.24	21.11	18.50	20.15	7.15	19.92

Sumber : LKPD Kota Solok Tahun 2010 – 2015 (data diolah)



C. Kinerja Pembiayaan

Secara umum, tidak banyak daerah yang telah membuat kebijakan pembiayaan yang berpengaruh signifikan terhadap proses pembangunan, kecuali memanfaatkan SiLPA yang tersedia. Pada kebanyakan daerah, kebijakan yang dibuat dalam penganggaran adalah kebijakan anggaran berimbang. Hal ini berarti semua SiLPA tahun sebelumnya direncanakan untuk digunakan untuk menggerakkan pembangunan pada tahun berikutnya. Hal ini juga dilakukan oleh pemerintah Kota Solok dalam periode Tahun 2010 – 2015.

Pada setiap tahun SiLPA tahun sebelumnya akan dijadikan sebagai Pembiayaan Terima dan dianggarkan semua penerimaan daerah dapat dibelanjakan pada tahun berikutnya. Akan tetapi karena adanya keterbatasan dalam pelaksanaan anggaran, maka pada setiap tahun masih sering terjadi SiLPA. Namun demikian, SiLPA Kota Solok setiap tahun menunjukkan penurunan dan secara otomatis pembiayaan terima pada tahun berikutnya juga lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan pembiayaan seperti ini adalah baik, karena semua dana yang tersedia diusahakan untuk menggerakkan pembangunan di daerah.

Perkembangan jumlah pembiayaan Kota Solok tahun 2010 – 2015 dapat dilihat pada Tabel 3.7 berikut:

Tabel 3.7
Perkembangan Jumlah Pembiayaan Daerah Kota Solok
Tahun 2010– 2015

URAIAN	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Rata-Rata Pertumbuhan
Penerimaan Pembiayaan	130,937,990,901.58	103,825,316,912.06	94,460,867,995.91	76,369,197,773.38	73,020,981,641.48	91,307,546,665.87	(5.64)
Pengeluaran Pembiayaan	1,189,000,000.00	2,843,752,999.00	7,961,766,350.00	16,748,499,650.00	19,548,682,238.61	12,942,035,724.00	82.49
Pembiayaan Netto	129,748,990,901.58	100,981,563,913.06	86,499,101,645.91	59,620,698,123.38	53,472,299,402.87	78,365,510,941.87	(6.27)

Sumber : LKPD Kota Solok Tahun 2010 – 2015 (data diolah)

3.1.2. NERACA DAERAH

Neraca menggambarkan tentang aset, kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki oleh suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintah daerah. Secara umum, transaksi yang akan mempengaruhi neraca daerah adalah transaksi yang berasal dari belanja modal dan pembiayaan. Jika ada belanja modal maka akan terjadi peningkatan aset tetap. Sedangkan jika ada pengeluaran pembiayaan maka akan terjadi peningkatan investasi jangka panjang, pembentukan dana cadangan dan atau penurunan kewajiban. Jika ada penerimaan pembiayaan maka akan terjadi penurunan investasi jangka panjang, pencairan dana cadangan, sisa lebih perhitungan anggaran dan atau kenaikan kewajiban.

Analisis kinerja Neraca Kota Solok tahun 2010 – tahun 2015 terlihat bahwa rata-rata proporsi aset tetap jauh lebih besar dibandingkan aset lancar dan investasi jangka panjang, yaitu dengan perbandingan 86,0%, 8,64%, dan 4,33% sedangkan sisanya adalah aset lainnya. Perbandingan atau perkembangan proporsi kelompok aset tersebut tidak mengalami perubahan yang signifikan antara tahun 2010 dibandingkan dengan tahun 2015.



Analisis berdasarkan pos-pos aset menunjukkan bahwa jumlah nilai aset yang dimiliki Kota Solok mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dari Rp.1.048.008.646.104,52 pada tahun 2010 menjadi Rp.1.539.997.018.680,63 pada tahun 2015, yang berarti dalam kurun waktu tahun 2010 – 2015 terjadi pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 8,09%. Peningkatan seperti ini dihasilkan antara lain melalui peningkatan aset tetap, investasi jangka panjang, dan aset lancar. Dari tiga sumber peningkatan aset Kota Solok tersebut, peningkatan jumlah aset tetap jauh lebih tinggi dibandingkan dua kelompok aset lainnya. Namun dari segi pertumbuhan rata-rata per tahun, peningkatan nilai investasi lebih tinggi dibandingkan peningkatan aset tetap dan aset lancar. Nilai aset tetap meningkat dari Rp.897.199.572.865,60 pada tahun 2010 menjadi Rp.1.249.107.263.097,05 pada tahun 2015 atau mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 6,97%. Sedangkan rata-rata pertumbuhan pertahun investasi jangka panjang relatif lebih besar yaitu sebesar 20,89%, dan rata-rata pertumbuhan per tahun aset lancar adalah sebesar 8,49%.

Sesuai dengan konsep keseimbangan, pertumbuhan aset tersebut juga akan sama dengan jumlah pertumbuhan kewajiban dan ekuitas. Pertumbuhan ekuitas per tahun adalah sebesar 8,19% dan pertumbuhan kewajiban per tahun minus 3,22%. Namun karena komposisi ekuitas jauh lebih besar yaitu 99,13% dibandingkan kewajiban yang hanya 0,87%, maka pertumbuhan kewajiban tersebut tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap komposisi kewajiban dan ekuitas dana.

Tabel 3.8 berikut menyajikan perkembangan jumlah elemen/pos-pos neraca dan tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun.



Tabel 3.8.
Perkembangan Neraca Kota Solok Tahun 2010 – 2015

No	Uraian	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Rata-Rata Pertum- buhan
1	Aset							
2	Aset Lancar							
3	Kas di Kas Daerah	723,636,591.06	23,184,598,603.41	3,145,410,748.38	2,420,928,606.48	6,234,463,695.87	33,832,865,094.32	718.93
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	4,844,545,839.00	2,541,737,875.50	2,547,607,256.00	1,453,474,289.00	249,355,116.00	241,487,088.00	(35.25)
5	Kas di Bendahara Penerimaan	51,628,100.00	199,919,240.00	-	-	804,000.00	-	29.08
6	Setara Kas	98,500,000,000.00	71,000,000,000.00	71,000,000,000.00	69,456,257,319.00	85,436,936,229.00	93,206,211,352.00	0.40
7	Piutang Pajak	123,840,713.00	193,668,294.00	391,202,745.00	226,561,709.00	9,796,916,808.00	10,813,334,627.00	870.17
8	Penyisihan piutang pajak	-	-	-	-	(5,176,835,977.95)	(6,843,683,410.48)	32.20
9	Piutang Retribusi	312,077,471.00	662,177,440.00	485,283,989.00	699,071,628.00	774,361,464.00	883,723,894.00	30.88
10	Piutang Angsuran/Cicilan Kendaraan Dinas	230,552,513.00	186,580,982.00	58,887,200.00	-	-	(732,566,341.50)	(43.76)
11	Piutang Bagi Hasil Pajak Propinsi	823,363,430.00	-	-	263,139,711.82	1,311,546,944.00	-	66.14
12	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	10,608,415,774.00	-
13	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	50,000,000.00	-	-	-	-	-	(100.00)
14	Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan	-	-	-	52,972,874.00	39,313,819.00	19,805,819.00	(37.70)
15	Piutang Lainnya	6,148,201,102.00	6,230,004,549.00	7,051,634,330.00	7,255,901,086.00	8,261,985,781.00	-	(13.74)
16	Persediaan	3,029,666,935.86	2,718,090,111.28	2,586,989,789.20	3,355,359,824.75	5,151,437,391.01	12,984,591,156.03	44.04
17	Belanja dibayar dimuka	-	613,595,713.00	597,302,028.67	624,320,135.67	707,963,795.83	609,441,133.33	0.34
18	Jumlah Aset Lancar	114,837,512,694.92	107,530,372,808.19	87,864,318,086.25	85,807,987,183.72	112,788,249,065.76	155,623,626,185.70	8.49
19	Investasi Jangka Panjang							
20	Investasi Nonpermanen							
21	Investasi Nonpermanen Lainnya	2,292,551,995.00	2,407,363,145.00	2,769,699,919.78	4,696,050,570.44	4,713,984,966.22	4,726,727,908.66	18.05
22	Investasi Nonpermanen Yang Diragukan Tidak Tertagih	-	-	-	(1,848,004,780.00)	(1,839,871,380.00)	(1,830,896,380.00)	(0.46)
23	Jumlah Investasi Nonpermanen	2,292,551,995.00	2,407,363,145.00	2,769,699,919.78	2,848,045,790.44	2,874,113,586.22	2,895,831,528.66	4.91

No	Uraian	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Rata-Rata Pertum- buhan
24	Investasi Permanen							
25	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	15,343,247,001.00	17,612,000,000.00	24,323,899,000.00	32,429,899,000.00	41,879,898,999.61	53,812,898,999.61	28.77
26	Investasi Permanen Lainnya	17,576,368,204.00	17,576,368,204.00	17,613,146,090.45	26,418,460,737.08	33,479,472,982.39	32,428,861,193.61	14.76
27	Jumlah Investasi Permanen	32,919,615,205.00	35,188,368,204.00	41,937,045,090.45	58,848,359,737.08	75,359,371,982.00	86,241,760,193.22	21.78
28	Jumlah Investasi Jangka Panjang	35,212,167,200.00	37,595,731,349.00	44,706,745,010.23	61,696,405,527.52	78,233,485,568.22	89,137,591,721.88	20.89
29	Aset Tetap							
30	Tanah	151,462,386,497.60	153,157,147,503.60	152,308,483,508.60	204,089,704,537.60	205,407,060,605.60	216,912,971,539.60	8.16
31	Peralatan dan Mesin	78,444,424,747.00	103,384,207,761.00	121,692,601,426.00	134,593,644,661.28	147,381,276,346.00	148,263,310,210.00	14.04
32	Gedung dan Bangunan	227,866,174,285.00	247,116,762,417.00	252,930,919,595.00	312,774,394,333.00	328,179,329,574.00	384,484,546,952.98 (cari kenaikan dr tahun sebelumnya)	11.31
33	Jalan, Irigasi dan Jaringan	430,058,138,101.00	449,627,881,119.00	473,256,563,713.00	512,866,432,169.00	554,421,065,630.00	591,688,757,770.00	6.60
34	Aset Tetap Lainnya	4,570,686,547.50	6,904,891,934.50	6,607,527,435.50	7,819,881,912.00	8,779,049,162.00	9,282,416,105.00	16.62
35	Konstruksi dalam Pengerjaan	4,793,520,800.00	14,672,637,536.00	49,963,249,782.00	30,868,581,049.00	32,894,043,385.00	14,936,344,440.00	72.07
36	KDP - Aset Tetap Lainnya	4,241,887.50	-	-	-	80,588,000.00	-	(100.00)
37	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-	-	-	-	-	(116,461,083,920.53)	-
38	Jumlah Aset Tetap	897,199,572,865.60	974,863,528,271.10	1,056,759,345,460.10	1,203,012,638,661.88	1,277,142,412,702.60	1,249,107,263,097.05	6.97
39	Dana Cadangan							
40	Dana Cadangan				-	-		
41	Jumlah Dana Cadangan				-	-		
42	Aset Lainnya							
43	Tuntutan Perbendaharaan	211,204,158.00	211,204,158.00	211,204,158.00	230,545,103.00	211,204,158.00	532,684,600.00	30.60
44	Aset Tak Berwujud	-	-	-	-	395,937,000.00	466,067,600.00	0.18
45	Aset Lain-Lain	548,189,186.00	-	-	-	44,745,003,561.00	45,129,785,476.00	(49.57)
46	Jumlah Aset Lainnya	759,393,344.00	211,204,158.00	211,204,158.00	230,545,103.00	45,352,144,719.00	46,128,537,676.00	3,902.08
47	Jumlah Aset	1,048,008,646,104.52	1,120,200,836,586.29	1,189,541,612,714.58	1,350,747,576,476.12	1,513,516,292,055.58	1,539,997,018,680.63	8.09
48	Kewajiban							
49	Kewajiban Jangka Pendek							

No	Uraian	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Rata-Rata Pertum- buhan
50	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	330,865,518.00	38,325,583.00	326,506,412.00	-	-	-	331.76
51	Utang PPN	-	-	-	243,850,692.00	74,125,675.00	14,762,203.00	(74.84)
52	Utang PPh Ps. 21	-	-	-	71,010,358.00	17,814,660.00	25,753,168.00	(15.18)
53	Utang PPh Ps. 22	-	-	-	29,439,421.00	9,196,089.00	2,184,420.00	(72.50)
54	Utang PPh Ps. 23	-	-	-	21,579,209.00	4,653,712.00	155,175.00	(87.55)
55	Utang PPh Ps. 4 Ayat (2)	-	-	-	290,000.00	1,983,182.00	355,658.00	250.89
56	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	-	-	-	-	-	1,404,200.00	-
57	Utang Bunga	9,432,592,108.96	9,432,592,108.96	9,432,592,108.96	9,432,592,108.96	9,432,592,108.96	9,432,592,108.96	-
58	Utang Belanja	2,025,890,515.00	1,519,375,000.00	1,559,402,675.00	1,457,620,725.28	595,474,447.81	475,964,972.00	(21.62)
59	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	11,789,348,141.96	10,990,292,691.96	11,318,501,195.96	11,256,382,514.24	10,135,839,874.77	9,953,171,904.96	(3.22)
60	Kewajiban Jangka Panjang							
61	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat				-	-		
62	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang				-	-	-	-
63	Jumlah Kewajiban	11,789,348,141.96	10,990,292,691.96	11,318,501,195.96	11,256,382,514.24	10,135,839,874.77	9,953,171,904.96	(3.22)
64	Ekuitas							
65	Ekuitas	1,036,219,297,962.56	1,109,210,543,894.33	1,178,223,111,518.62	1,339,491,193,961.88	1,503,380,452,180.81	1,530,043,846,775.67	8.19
66	Jumlah Ekuitas	1,036,219,297,962.56	1,109,210,543,894.33	1,178,223,111,518.62	1,339,491,193,961.88	1,503,380,452,180.81	1,530,043,846,775.67	8.19
67	Jumlah Ekuitas dan Kewajiban	1,048,008,646,104.52	1,120,200,836,586.29	1,189,541,612,714.58	1,350,747,576,476.12	1,513,516,292,055.58	1,539,997,018,680.63	8.09

Sumber : LKPD Kota Solok Tahun 2010 – 2015 (data diolah)

Untuk memahami kemampuan keuangan Kota Solok dapat dilakukan berdasarkan analisis rasio keuangan. Secara konseptual ada 4 macam analisis rasio keuangan yang dapat digunakan, meliputi rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio leverage, dan rasio profitabilitas.

1. Analisa Rasio likuiditas

Analisa rasio likuiditas bertujuan untuk melihat kemampuan organisasi dalam melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo. Semakin tinggi rasio likuiditas berarti semakin tinggi kemampuan organisasi dalam melunasi hutangnya. Analisa rasio likuiditas dapat dilakukan berdasarkan rasio lancar, rasio quick, dan rasio kas. Ketiga rasio sama-sama bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam membayar hutang lancarnya pada saat jatuh tempo, tetapi rasio kas lebih menunjukkan kemampuan riil berdasarkan kas yang dimiliki.

2. Analisa Rasio solvabilitas

Analisa rasio solvabilitas bertujuan untuk melihat kemampuan organisasi dalam melunasi seluruh hutangnya, baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Analisis solvabilitas ini secara tidak langsung juga dapat dilakukan melalui rasio leverage, dimana rasio leverage ini bertujuan untuk melihat sejauhmana organisasi menggunakan dana pinjaman (hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang) dalam menjalankan roda organisasinya. Analisis rasio solvabilitas dapat dihitung berdasarkan perbandingan total hutang dengan total aset, dan atau total hutang dengan modal. Kedua rasio ini sama-sama bertujuan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi seluruh kewajibannya seandainya seluruh aset dan atau modal digunakan.

3. Analisis Rasio Profitabilitas

Analisa rasio profitabilitas bertujuan menilai kemampuan menghasilkan laba. Karena organisasi pemerintah daerah tidak bertujuan laba maka rasio ini menjadi tidak relevan dilakukan.

Karena rasio profitabilitas tidak relevan dilakukan pada organisasi pemerintahan, maka dalam pembahasan berikutnya, analisis rasio keuangan yang digunakan dalam menilai kemampuan keuangan Kota Solok hanya berdasarkan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas saja.

Baik rasio lancar maupun rasio kas menunjukkan kemampuan yang sangat luar biasa, namun semua rasio ini menunjukkan peningkatan. Rasio lancar mengalami peningkatan dari 974,08 % pada tahun 2010 menjadi 1.563,56 % pada tahun 2015. Sedangkan rasio quick naik dari 948,38 % pada tahun 2010 menjadi 1.433,10 % pada tahun 2015. Hal yang sama ditunjukkan oleh rasio kas yaitu naik dari 883,17% pada tahun 2010 menjadi 1.278,79% pada tahun 2015. Ketiga rasio ini menunjukkan bahwa Kota Solok mempunyai kemampuan untuk melunasi hutang lancar puluhan kali lipat, dan atau jumlah hutang yang sangat kecil sekali. Namun dari sisi lain, jumlah kas yang sangat besar ini kurang baik dari fungsi pemerintah sebagai penggerak pembangunan. Pada masa datang, saldo kas pada akhir tahun hanya sebatas kebutuhan minimal bulanan pelaksanaan kegiatan administrasi rutin tahun berikutnya.

Kondisi jumlah hutang yang sangat kecil itu juga dapat dilihat berdasarkan rasio total hutang terhadap ekuitas dan atau total aset, yaitu berkisar di bawah 1% saja. Artinya, hutang yang dimiliki Kota Solok hanya kurang dari 1% dari jumlah aset atau ekuitas. Dengan demikian, ke 5 (lima) rasio keuangan ini



menunjukkan kemampuan pemerintah daerah Kota Solok yang sangat baik dalam melunasi seluruh hutangnya.

Tabel 3.9 berikut menyajikan rasio keuangan Kota Solok untuk tahun 2010 sampai dengan tahun 2015.

Tabel 3.9
Rasio Keuangan Kota Solok Tahun 2010 – 2015

No	Uraian	Tahun (%)						Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	Rasio Lancar (<i>current ratio</i>)	974.08	978.41	776.29	762.31	1112.77	1563.56	12.89
2	Rasio quick (<i>quick ratio</i>)	948.38	953.68	753.43	732.50	1,061.94	1,433.10	11.34
3	Kas Rasio	883.17	881.93	677.59	651.46	906.90	1278.79	10.61
4	Rasio total hutang terhadap total asset	1.12	0.98	0.95	0.83	0.67	0.65	(10.27)
5	Rasio hutang terhadap modal	1.14	0.99	0.96	0.84	0.67	0.65	(10.35)

Sumber : LKPD Kota Solok Tahun 2010 – 2015 (data diolah)

3.2. PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Kebijakan pengelolaan keuangan di masa lalu diarahkan pada upaya meningkatkan PAD guna mengurangi ketergantungan Keuangan Daerah pada bantuan Pemerintah Pusat. Hal ini dapat terlihat dari data yang ditampilkan pada bagian kinerja keuangan masa lalu di atas, dimana dalam kurun waktu enam tahun terakhir, terjadi peningkatan proporsi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Solok, sedangkan di sisi lain terjadi penurunan proporsi pendapatan yang berasal dari dana perimbangan.

Dari sisi belanja aparatur, selama kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2015, juga telah terjadi penurunan proporsi belanja aparatur. Pada tahun 2010 belanja aparatur memiliki proporsi sebesar 57,03% dari total pengeluaran pemerintah daerah, sedangkan pada tahun 2015 proporsi belanja ini menurun menjadi 56,11% dari total pengeluaran daerah. Sebenarnya proporsi belanja aparatur pada tahun 2011 sudah turun menjadi 50,94% dan kembali naik terus sampai pada tahun 2015. Hal ini disebabkan karena dalam (4) empat tahun terakhir pemerintah daerah banyak melaksanakan pembangunan gedung kantor untuk melengkapi sarana dan prasana aparatur pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk tahun selanjutnya akan diupayakan proporsi belanja aparatur ini terus menurun dan meningkatkan proporsi untuk pembangunan publik

Tabel 3.10 berikut memperlihatkan perkembangan proporsi belanja aparatur Kota Solok tahun 2010 – tahun 2015.



Tabel 3.10
Perkembangan Proporsi Belanja Aparatur Kota Solok
Tahun 2010 – Tahun 2015

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Prosentase (%)
1	Tahun 2010	177,239,378,049.50	310,762,887,557.50	57.03
2	Tahun 2011	183,473,739,134.50	360,195,307,493.00	50.94
3	Tahun 2012	223,552,226,636.98	405,821,659,619.98	55.09
4	Tahun 2013	239,597,785,156.00	437,526,198,942.36	54.76
5	Tahun 2014	262,391,957,225.00	472,521,274,417.07	55.53
6	Tahun 2015	275,321,501,694.00	490,682,666,578.00	56.11

Sumber : LKPD Kota Solok Tahun 2010 – 2015 (data diolah)

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan dapat dibedakan atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pasal 5 ayat 3 undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sumber pembiayaan dibutuhkan untuk menutupi defisit yang terjadi, sedangkan jika terjadi surplus maka kelebihan tersebut dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan dana pada masa datang.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa kebijakan Kota Solok dalam penyusunan anggaran menggunakan prinsip “anggaran berimbang”. Berdasarkan prinsip ini, maka SiLPA yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya diupayakan untuk dapat dibelanjakan pada tahun guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan, dan meningkatkan daya saing daerah.

Perkembangan pendapatan daerah Kota Solok dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 13,24%. Jika pada tahun 2010, jumlah pendapatan daerah Kota Solok baru berjumlah Rp.283.562.213.567,98 dan pada tahun 2015 pendapatan daerah ini mengalami peningkatan menjadi Rp.524.519.843.153,45. Sebaliknya, belanja daerah mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun yang lebih rendah, yaitu sebesar 9,13% per tahun. Pada tahun 2010, belanja daerah Kota Solok berjumlah Rp.309.573.887.557,50 dan meningkat menjadi Rp.477.740.630.854,00 pada tahun 2015. Sedangkan jumlah pengeluaran pembiayaan mengalami peningkatan dari Rp.1.189.000.000,00 pada tahun 2010 menjadi Rp.12.942.035.724,00 pada tahun 2015.

Namun apabila dilihat perkembangan jumlah pendapatan serta belanja dan pembiayaan, data tahun 2010-2013 menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan yang lebih rendah serta peningkatan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang lebih tinggi, menyebabkan selama 4 tahun tersebut terjadi defisit riil anggaran. Artinya, pendapatan daerah yang dihasilkan pada tahun berjalan tidak mencukupi untuk membiayai pengeluaran, baik untuk belanja maupun untuk pengeluaran pembiayaan.



Data tahun 2014 dan tahun 2015 menunjukkan kebalikan, di mana pendapatan daerah yang dihasilkan pada 2 (dua) tahun tersebut melebihi pengeluaran daerah, baik untuk belanja maupun untuk pengeluaran pembiayaan. Hal ini berarti pada 2 (dua) tahun terakhir tersebut, Kota Solok tidak mampu membelanjakan pendapatan yang diperolehnya secara efektif.

Tabel 3.11 berikut ini memperlihatkan perkembangan Defisit Riil Kota Solok tahun 2010 – tahun 2015.

Tabel 3.11
Perkembangan Defisit Riil Kota Solok Tahun 2010 – Tahun 2015

No	Uraian	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Rata-Rata Pertumbuhan
1	Pendapatan	283,562,213,567.98	353,058,001,476.85	387,727,303,216.45	434,102,982,810.46	489,525,802,312.46	524,519,843,153.45	13.24
2	Belanja	309,573,887,557.50	357,351,554,494.00	397,859,893,269.98	420,777,699,292.36	452,972,592,178.46	477,740,630,854.00	9.13
3	Pengeluaran Pembiayaan	1,189,000,000.00	2,843,752,999.00	7,961,766,350.00	16,748,499,650.00	19,548,682,238.61	12,942,035,724.00	82.49
4	Surplus (Defisit) Riil	(27,200,673,989.52)	(7,137,306,016.15)	(18,094,356,403.53)	(3,423,216,131.90)	17,004,527,895.39	33,837,176,575.45	(99.82)

Sumber : LKPD Kota Solok Tahun 2010 – 2015 (data diolah)

Defisit riil yang terjadi pada tahun 2010 – tahun 2013 ditutupi Kota Solok dengan menggunakan SiLPA tahun-tahun sebelumnya. Namun karena SiLPA tahun-tahun sebelumnya relatif besar, maka sampai akhir tahun 2013 pun SiLPA tersebut belum berkurang secara berarti. Apalagi karena pada tahun 2014 dan tahun 2015 terjadi Surplus Riil anggaran, mengakibatkan jumlah SiLPA akhir tahun 2015 kembali mengalami peningkatan.

Tabel 3.12 memperlihatkan perkembangan Penerimaan Pembiayaan Kota Solok Tahun 2010- 2015.

Tabel 3.12
Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Kota Solok
Tahun 2010 – Tahun 2015

No	Uraian	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Rata-Rata Pertumbuhan
1	Surplus (Defisit) Riil	(27,200,673,989.52)	(7,137,306,016.15)	(18,094,356,403.53)	(3,423,216,131.90)	17,004,527,895.39	33,837,176,575.45	(99.82)
	Penggunaan SiLPA	130,937,990,901.58	103,700,316,912.06	94,385,867,995.91	76,294,197,773.38	72,945,981,641.48	90,025,509,536.87	
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	125,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	
	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	1,207,037,129.00	
2	Jumlah Penerimaan	130,937,990,901.58	103,825,316,912.06	94,460,867,995.91	76,369,197,773.38	73,020,981,641.48	91,307,546,665.87	(5.64)
3	Jumlah SiLPA	103,737,316,912.06	96,688,010,895.91	76,366,511,592.38	72,945,981,641.48	90,025,509,536.87	125,144,723,241.32	6.03

Sumber : LKPD Kota Solok Tahun 2010 – 2015 (data diolah)

SiLPA yang terjadi bisa disebabkan peningkatan pendapatan dan atau juga penurunan belanja dan sebab lainnya. Perkembangan SiLPA yang disebabkan peningkatan pendapatan daerah dan adanya penghematan belanja akan lebih baik dibandingkan dengan peningkatan sebab-sebab lainnya. Namun pada banyak daerah peningkatan SiLPA tersebut lebih/cenderung disebabkan pemda tidak mampu membelanjakan anggaran yang telah ditetapkan.



Kondisi yang sama dapat dilihat di Kota Solok. Selama periode tahun 2010 – tahun 2015 telah terjadi pelampauan pendapatan daerah, baik yang berasal dari PAD, Dana Perimbangan, atau Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Namun pelampauan tersebut tidak lebih dari Rp.10 milyar saja. Penyebab utama peningkatan SiLPA di Kota Solok lebih disebabkan sisa penghematan belanja atau akibat lainnya – cendrungnya adalah ketidakmampuan membelanjakan anggaran yang telah ditetapkan.

Tabel 3.13 berikut ini menunjukkan perkembangan sumber SiLPA Kota Solok Tahun 2010 – tahun 2015.

Tabel 3.13
Perkembangan Realisasi SiLPA Kota Solok
Tahun 2010 – Tahun 2015

N o	Uraian	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Rata- Rata Pertumbu- han
	Jumlah SiLPA	103,737,316,912.06	96,688,010,895.91	76,366,511,592.38	72,945,981,641.48	90,025,509,536.87	125,144,723,241.32	6.03
1	Pelampauan Penerimaan PAD	(3,186,422,681.16)	474,243,278.85	(246,610,817.55)	5,367,152,198.50	11,644,024,637.46	4,902,134,356.15	(496.84)
2	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	(452,085,811.23)	(4,171,138,518.00)	3,135,551,148.00	2,562,803,750.04	2,588,361,347.00	170,658,182.00	107.36
3	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	(1,504,416,400.00)	4,475,564,921.00	42,579,204.00	4,164,371,290.00	7,020,018,990.00	2,681,654,900.00	1,838.10
4	Sisa Penghematan Belanja atau Alibat Lainnya	108,880,241,804.45	95,909,341,214.06	73,434,992,057.93	60,851,654,402.94	68,773,104,562.41	117,390,275,803.17	6.25

Sumber : LKPD Kota Solok Tahun 2010 – 2015 (data diolah)

3.3. KERANGKA PENDANAAN

3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan harus dibayar setiap tahun oleh pemerintah daerah seperti belanja gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya. Pengeluaran mengikat bermakna pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Sedangkan belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh pemerintah daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas pemerintah daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya.

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama dimaksudkan untuk menganalisis jumlah kebutuhan dana yang harus dikeluarkan karena kewajiban pemerintah baik karena peraturan maupun karena ada perjanjian. Semakin tinggi jumlah pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama berarti semakin terbatas dana yang dapat digunakan untuk tujuan lainnya yang tidak terikat.

Karena selama ini Kota Solok tidak memiliki pinjaman, tidak ada dana cadangan dan tidak memiliki kontrak sewa menyewa jangka panjang, maka pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama terbatas pada belanja tidak langsung; gaji dan tunjangan, belanja Dewan dan Kepala Daerah,



serta belanja langsung; Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis, Belanja Beasiswa Pendidikan PNS dan belanja jasa kantor.

Hasil perhitungan pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama menunjukkan jumlah yang cukup besar, yaitu Rp.201.039.333.605,00 pada tahun 2013 dan meningkat menjadi Rp.229.970.334.616,00 pada tahun 2015. Hal ini berarti dalam kurun waktu tersebut terjadi pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 7,06%. Dengan demikian, pemerintah Kota Solok minimal harus menyediakan dana sebesar jumlah tersebut di atas karena ikatan kerjasama yang telah disepakati sebelumnya.

Analisis lebih rinci atas perkembangan pengeluaran wajib dan mengikat tersebut menunjukkan adanya usaha Kota Solok untuk mengendalikan kenaikan untuk jenis-jenis belanja tertentu. Misalnya untuk belanja Gaji dan Tunjangan. Sekalipun terjadi kenaikan jumlah belanja Gaji dan Tunjangan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 7,33%, tetapi dari segi proporsi belanja Gaji dan Tunjangan terhadap total pengeluaran hanya mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,46%. Bahkan ada beberapa jenis belanja wajib dan mengikat yang mengalami penurunan jumlahnya, seperti Belanja Pegawai BOP Sekolah, Belanja Beasiswa dan Pendidikan PNS, Pembiayaan pengeluaran (Penyertaan Modal), dan Pembayaran pokok hutang.

Namun demikian, juga terdapat beberapa jenis belanja wajib dan mengikat yang peningkatannya jumlahnya sulit dipertahankan, seperti Belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH dan Wakil KDH, Honorarium Jasa Tenaga Pelayanan Medis, dan Belanja jasa kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya).

Tabel 3.14 berikut memperlihatkan perkembangan jumlah dan proporsi serta pertumbuhan belanja wajib dan mengikat Kota Solok tahun 2013 – tahun 2015.



Tabel 3.14
Perkembangan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kota Solok Tahun 2013–2015

No	Uraian	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Rata-rata Pertumbuhan Jumlah	Rata-rata pertumbuhan Proporsi
		Jumlah	Proporsi	Jumlah	Proporsi	Jumlah	Proporsi		
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	142,142,387,247.00	70.70	151,985,570,188.00	67.58	164,057,820,466.00	71.34	7.43	0.57
1	Belanja gaji dan tunjangan	140,958,201,788.00	70.11	150,942,611,330.00	67.12	162,369,105,103.00	70.60	7.33	0.46
2	Belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH dan Wakil KDH	779,115,000.00	0.39	801,900,000.00	0.36	1,202,600,000.00	0.52	26.45	19.33
3	Belanja insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah	405,070,459.00	0.20	241,058,858.00	0.11	486,115,363.00	0.21	30.58	25.20
4	Belanja bunga								
5	Belanja Bagi Hasil								
B	BELANJA LANGSUNG	58,896,946,358.00	29.30	72,909,013,418.61	32.42	65,912,514,150.00	28.66	7.10	(0.47)
1	Belanja honorarium PNS khusus guru dan tenaga medis	33,190,689,027.00	16.51	45,314,985,111.00	20.15	42,672,605,953.00	18.56	15.35	7.07
	Sertifikasi dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD	30,121,539,100.00		40,279,360,800.00		39,041,222,260.00			
	Honorarium Kelebihan Jam Mengajar			122,800,000.00					
	Belanja Pegawai BOP Sekolah	2,765,886,933.00		2,979,558,600.00		1,350,361,900.00			
	Honorarium Jasa Tenaga Pelayanan Medis/Pelayanan	303,262,994.00		1,710,145,711.00		2,000,511,793.00			
	Honorarium Piket Malam Puskesmas			223,120,000.00		280,510,000.00			
2	Belanja Beasiswa dan Pendidikan PNS	2,057,296,980.00	1.02	1,802,487,160.00	0.80	1,277,902,870.00	0.56	(20.74)	(26.17)
3	Belanja jasa kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)	6,975,460,701.00	3.47	8,761,415,148.00	3.90	9,519,005,327.00	4.14	17.13	9.26
4	Belanja sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	-		-		-			
5	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	-		-		-			
6	Pembiayaan pengeluaran (Penyertaan Modal)	16,173,499,650.00	8.04	16,530,125,999.61	7.35	11,933,000,000.00	5.9	(12.80)	(19.02)
7	Pembentukan dana cadangan	-		-		-			
8	Pembayaran pokok hutang	500,000,000.00	0.25	500,000,000.00	0.22	510,000,000.00	0.22	1.00	(5.43)
C	Total belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat serta prioritas utama	201,039,333,605.00	100.00	224,894,583,606.61	100.00	229,970,334,616.00	100.00	7,06	

Sumber : LKPD Kota Solok Tahun 2010 – 2015 (data diolah)



3.3.2. Capaian Kinerja Urusan

Salah satu dasar untuk mengalokasikan kapasitas riil kemampuan daerah Kota Solok adalah berdasarkan capaian kinerja keuangan per urusan pada masa lalu. Akan lebih baik jika capaian kinerja keuangan per urusan pada masa lalu ini juga dikaitkan dengan capaian kinerja yang sesuai dengan indikator “aspek fokus”, khususnya untuk urusan Pelayanan Umum.

Analisis terhadap belanja per urusan menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah semua belanja urusan wajib dan mengikat dari Rp.134.111.194.189,00 pada tahun 2010 menjadi Rp.217.194.922.955,00 pada tahun 2015. Pada belanja urusan pilihan juga mengalami peningkatan yaitu dari Rp.7.442.655.422,00 pada tahun 2010 menjadi Rp.20.071.635.982,00 pada tahun 2015. Proporsi belanja urusan wajib menurun dari tahun 2010 sebesar 94,74% menjadi 91,54% pada tahun 2015 dan sebaliknya proporsi belanja urusan pilihan meningkat dari tahun 2010 sebesar 5,26% menjadi 8,46% pada tahun 2015. Hal ini berarti dalam kurun waktu tersebut terjadi pertumbuhan rata-rata belanja urusan per tahun sebesar 11,03%. Akan tetapi jika dipisahkan antara urusan wajib dengan urusan pilihan, data menunjukkan bahwa pertumbuhan rata-rata per tahun urusan pilihan lebih tinggi dibandingkan dengan urusan wajib, yaitu 25,61% berbanding 10,36%.

Analisis lebih rinci menunjukkan 5 (lima) urusan wajib yang memiliki tingkat pertumbuhan belanja rata-rata pertahun tertinggi adalah Urusan Penanaman Modal, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kebudayaan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, serta Urusan Pekerjaan Umum. Sedangkan 5 (lima) urusan wajib yang memiliki tingkat pertumbuhan belanja rata-rata per tahun terendah adalah Urusan Pertanahan, Pemuda dan Olah Raga, Tenaga Kerja, Penataan Ruang, serta Perpustakaan. Secara tidak langsung urusan yang memiliki tingkat pertumbuhan tertinggi ini menggambarkan Prioritas Pembangunan Kota Solok pada 6 (enam) tahun yang lalu.

Untuk urusan pilihan, 3 (tiga) urusan yang memiliki tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun tertinggi adalah untuk Urusan Pariwisata, Perdagangan, dan Urusan Perindustrian. Sedangkan 3 (tiga) urusan yang memiliki tingkat pertumbuhan belanja per tahun yang terendah adalah Urusan Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, serta Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral.

Perkembangan jumlah belanja per urusan dapat dilihat pada tabel 3.15 berikut:

Tabel 3.15
Perkembangan Jumlah Belanja Per Urusan Kota Solok Tahun 2010-Tahun 2015

N o	Urusan	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Rata-Rata Pertumbuhan
	Urusan Wajib	134,111,194,189.00	160,363,043,642.50	190,865,594,271.00	200,509,638,703.36	209,375,061,500.46	217,194,922,955.00	10.36
1	Pendidikan	22,607,899,154.00	37,012,793,452.00	34,343,497,967.00	36,798,474,114.00	42,667,167,098.00	43,860,977,155.00	16.48
2	Kesehatan	10,202,153,657.00	10,754,051,025.00	9,029,995,284.00	11,307,085,427.60	14,392,060,821.00	16,972,186,556.00	11.96
3	Pekerjaan Umum	17,083,551,758.00	26,178,993,795.00	61,332,699,097.00	53,292,813,212.00	49,249,458,634.16	58,542,847,031.00	37.14
4	Perumahan	4,124,158,359.00	3,682,366,047.00	5,073,035,166.00	5,948,209,400.00	6,405,644,800.00	7,555,603,810.00	13.99
5	Penataan Ruang	2,222,728,663.00	2,488,781,688.00	1,965,862,366.00	1,778,058,216.00	1,803,326,294.00	1,590,751,030.00	(5.79)
6	Perencanaan Pembangunan	3,111,139,905.00	3,339,456,552.00	3,428,243,135.00	4,406,948,867.46	4,202,485,455.00	4,855,726,086.00	9.89
7	Perhubungan	2,081,084,731.00	2,479,715,490.00	1,526,064,292.00	2,691,252,682.00	3,187,124,303.00	2,872,176,729.00	13.12
8	Lingkungan Hidup	4,165,533,473.00	5,822,810,919.00	4,969,939,695.00	5,406,501,480.00	5,110,967,898.00	6,308,716,033.00	10.38



N o	Urusan	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Rata-Rata Pertumbuhan
9	Pertanahan	3,719,551,450.00	1,327,452,000.00	1,027,564,200.00	5,501,465,007.00	1,500,592,350.00	988,537,050.00	48.33
10	Kependudukan dan Catatan Sipil	343,070,411.00	876,062,335.00	1,203,043,676.00	1,003,656,036.00	1,094,137,466.00	949,487,664.00	34.38
11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	307,371,950.00	599,652,300.00	401,303,600.00	1,066,723,197.50	1,239,624,887.00	1,179,034,950.00	47.83
12	KB dan Keluarga Sejahtera	2,168,086,950.00	2,423,530,432.00	1,931,927,703.00	2,491,985,468.00	2,419,653,538.00	2,616,054,355.00	5.14
13	Sosial	1,607,569,780.00	1,353,882,352.00	1,508,771,081.00	1,538,505,133.00	2,313,092,685.00	1,720,144,364.00	4.47
14	Tenaga Kerja	174,051,100.00	144,195,500.00	179,482,950.00	157,358,800.00	132,288,450.00	103,754,250.00	(8.50)
15	Koperasi dan UKM	747,029,050.00	924,021,340.00	733,292,887.00	1,134,983,440.00	1,272,655,329.00	1,764,242,570.00	21.72
16	Penanaman Modal	32,361,540.00	65,699,580.00	125,508,000.00	192,533,800.00	234,268,410.00	286,120,850.00	58.25
17	Kebudayaan	361,109,375.00	703,616,500.00	671,468,000.00	989,078,490.00	1,150,311,476.00	1,448,271,368.00	35.96
18	Pemuda dan Olah Raga	5,625,087,980.00	7,070,447,789.00	9,190,900,131.00	5,018,921,780.00	2,929,556,070.00	2,977,440,484.00	(5.94)
19	Kesbang Pol Dalam Negeri	4,136,154,776.00	3,889,910,821.00	2,632,448,005.00	3,568,370,029.00	5,993,678,253.00	4,963,823,957.00	9.61
20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Peningkat Daerah, Kepegawaian, Persandian	43,609,265,518.00	43,076,360,100.50	43,627,904,394.00	49,177,272,601.80	52,369,806,064.50	45,755,176,356.00	1.33
21	Ketahanan Pangan	1,045,738,885.00	1,249,532,256.00	765,211,863.00	880,836,352.00	1,074,810,986.80	1,368,431,114.00	9.04
22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	802,240,150.00	1,810,495,207.00	1,806,935,430.00	1,840,061,670.00	3,046,531,243.00	3,419,934,884.00	41.03
23	Statistik	78,254,700.00	71,143,400.00	114,746,250.00	161,769,000.00	93,621,100.00	79,202,500.00	7.13
24	Kearsipan	455,842,474.00	512,677,062.00	372,009,114.00	509,276,750.00	550,182,812.00	508,785,218.00	4.49
25	Komunikasi dan Informasi	3,155,090,700.00	2,350,239,800.00	2,876,998,035.00	3,556,862,090.00	4,811,031,597.00	4,382,796,831.00	9.38
26	Perpustakaan	145,067,700.00	155,155,900.00	26,741,950.00	90,635,660.00	130,983,480.00	124,699,760.00	40.57
Urusan Pilihan		7,442,655,422.00	7,837,306,316.00	6,379,379,472.00	9,246,334,179.00	15,186,629,693.00	20,071,635,982.00	25.61
1	Pertanian	2,332,050,084.00	2,893,311,832.00	3,467,868,992.00	3,155,754,610.00	5,640,344,026.00	7,071,496,524.00	27.81
2	Kehutanan	810,069,100.00	94,941,500.00	46,599,000.00	70,770,000.00	69,066,000.00	440,457,175.00	89.60
3	Energi dan Sumber Daya Mineral	11,001,000.00	74,906,500.00	103,416,600.00	41,391,500.00	31,641,500.00	28,302,000.00	104.98
4	Pariwisata	597,384,227.00	1,037,457,200.00	451,064,650.00	1,099,836,850.00	1,697,408,600.00	2,827,032,214.00	56.37
5	Kelautan dan Perikanan	1,716,195,775.00	1,261,418,000.00	951,155,400.00	1,780,383,400.00	2,288,274,075.00	2,685,043,300.00	16.39
6	Perdagangan	1,750,402,436.00	2,327,776,844.00	1,287,021,430.00	2,659,379,369.00	4,978,922,642.00	6,305,467,669.00	41.75
7	Perindustrian	225,552,800.00	147,494,440.00	72,253,400.00	438,818,450.00	480,972,850.00	713,837,100.00	95.95
Total Jumlah Belanja Urusan Wajib dan Pilihan		141,553,849,611.00	168,200,349,958.50	197,244,973,743.00	209,755,972,882.36	224,561,691,193.46	237,266,558,937.00	11.03

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2010 – 2015 (data diolah)

3.3.3. Proyeksi Pendapatan, Belanja Tahun 2016-2021

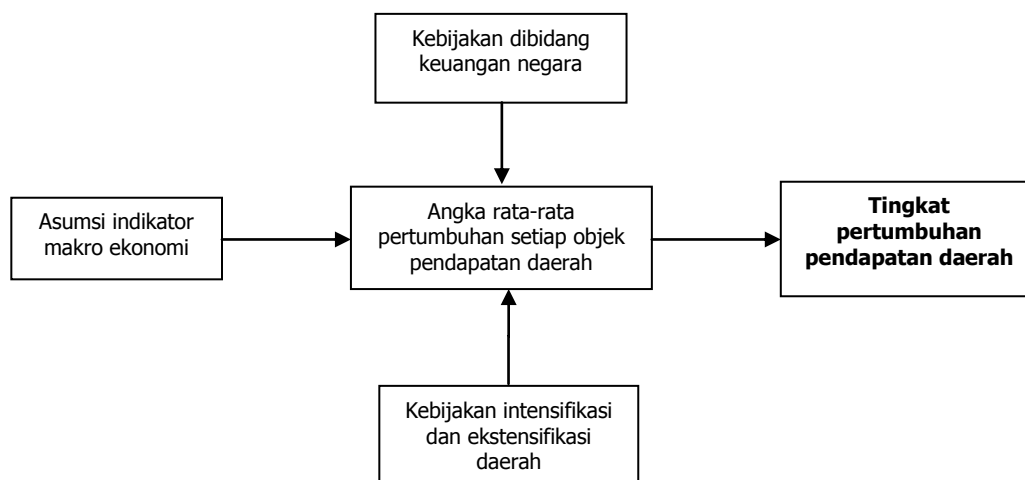
Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka untuk lima tahun ke depan diperlukan peningkatan pendapatan daerah yang lebih besar. Peningkatan ini sangat dimungkinkan karena kinerja keuangan daerah selama periode tahun 2010-2015 memperlihatkan kecenderungan yang semakin baik dan terkendali. Oleh sebab itu berdasarkan potensi yang dimiliki dan untuk memastikan kemampuan keuangan daerah, perlu dibuat proyeksi pendapatan daerah dan proyeksi belanja wajib mengikat serta belanja prioritas.



Dalam memproyeksikan pendapatan Kota Solok tahun 2016 sampai tahun 2021 digunakan asumsi penetapan tahun 2016 sebagai tahun dasar, yaitu penetapan anggaran pendapatan Kota Solok tahun 2016 yang telah disepakati melalui analisis oleh eksekutif dan legislatif. Oleh sebab itu, anggaran pendapatan tahun 2016 dijadikan salah satu tolok ukur atau standar dalam menghitung proyeksi pendapatan.

Secara umum, berbagai metode statistik dapat digunakan dalam memperoyeksikan pendapatan. Metode mana yang lebih tepat dan akan dipilih, tergantung kepada *trend* dan atau konjungtur data-data keuangan masa lalu yang akan digunakan sebagai dasar proyeksi.

Analisa dilakukan berdasarkan pada data dan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain : (1) Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu; (2) Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain); (3) Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; (4) Kebijakan dibidang keuangan negara. Analisa dilakukan dengan kerangka pemikiran sebagaimana disajikan dalam gambar dibawah ini.



Analisa proyeksi pendapatan dengan kerangka diatas, difokuskan pada objek dan rincian objek sumber-sumber pendapatan daerah. Mengingat masing-masing rincian objek memiliki perilaku atau karekteristik yang berbeda.

Sebagaimana gambar di atas, pendapatan daerah pada dasarnya ditunjang oleh 3 (tiga) faktor utama, yaitu Indikator Makro Ekonomi, Kebijakan Keuangan Negara dan Kebijakan Ekstensifikasi dan Intensifikasi. Akumulasi pengelolaan factor-faktor tersebut, akan mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah.

Selanjutnya, proyeksi pendapatan asli daerah yang berasal dari Lain-lain PAD Yang Sah mengalami penurunan karena iuran SPP dari siswa SMA dan SMK mulai tahun 2017 tidak dapat lagi dipungut karena pengelolaan SMA dan SMK sudah menjadi kewenangan pemerintah propinsi. Pada Lain-lain Pendapatan yang Sah dialokasikan Anggaran BOP-BOS dari Provinsi untuk SD dan SMP Negeri mulai Tahun 2017.

Hasil proyeksi pendapatan sebagaimana yang dijelaskan di atas dapat dilihat pada tabel 3.16. berikut :



Tabel 3.16
Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Solok Tahun 2016– 2021

URAIAN		2016	2017	2018	2019	2020	2021
PENDAPATAN		598.687.962.249,00	617.608.693.004,00	596.377.195.900,00	617.299.869.368,00	649.929.965.000,00	684.581.928.410,00
Pendapatan Asli Daerah		43.875.034.372,00	45.000.000.000,00	45.305.835.000,00	46.951.526.750,00	49.659.545.000,00	52.717.450.000,00
1	Pajak Daerah	5.697.390.000,00	7.524.585.842,00	7.285.835.000,00	8.150.126.750,00	8.250.000.000,00	8.595.950.000,00
2	Retribusi Daerah	6.779.642.372,00	8.513.977.015,00	8.533.977.015,00	8.510.450.000,00	8.650.000.000,00	8.686.500.000,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.500.000.000,00	9.975.414.158,00	10.500.000.000,00	11.210.000.000,00	11.770.500.000,00	12.350.000.000,00
4	Lain-Lain PAD yang Sah	22.898.002.000,00	18.986.022.985,00	18.986.022.985,00	19.080.950.000,00	20.989.045.000,00	23.085.000.000,00
Dana Perimbangan		543.914.498.000,00	490.704.881.000,00	520.403.446.900,00	548.181.091.248,00	577.490.370.000,00	608.420.165.910,00
1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	13.234.750.000,00	14.478.470.000,00	13.769.433.900,00	14.044.822.578,00	14.325.720.000,00	14.612.233.410,00
2	Dana Alokasi Umum	405.224.758.000,00	398.106.262.000,00	398.106.262.000,00	418.011.575.100,00	438.912.150.000,00	460.857.757.500,00
3	Dana Alokasi Khusus	125.454.990.000,00	78.120.149.000,00	108.527.751.000,00	116.124.693.570,00	124.252.500.000,00	132.950.175.000,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		10.898.429.877,00	81.903.812.004,00	30.667.914.000,00	22.167.251.370,00	22.780.050.000,00	23.444.312.500,00
1	Dana Hibah	-	13.060.235.898,00	10.962.400.000,00	11.742.400.000,00	11.858.800.000,00	11.977.000.000,00
2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
3	Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	9.928.429.877,00	21.388.833.106,00	19.705.514.000,00	10.424.851.370,00	10.921.250.000,00	11.467.312.500,00
4	Bantuan Keuangan dari Propinsi/Pemerintah Daerah Lainnya	970.000.000,00	-	-	-	-	-
5	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	47.454.743.000,00	-	-	-	-
6	Penerimaan Lain-Lain Yang Sah	-	-	-	-	-	-

Sumber : 1. Badan Keuangan Daerah

2. Data Diolah

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk membiayai program-program pembangunan yang direncanakan. Dari uraian proyeksi pendapatan daerah tersebut diatas, maka secara keseluruhan dapat dilihat kerangka pendanaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan pada Tahun 2016 - 2021 seperti pada tabel 3.16. diatas.

Secara umum kebijakan keuangan daerah oleh Pemerintah Kota Solok diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kemandirian kemampuan keuangan daerah disertai dengan efisiensi anggaran yang ditujukan bagi pembiayaan pembangunan. Oleh sebab itu, pendapatan daerah dalam APBD Kota Solok masih tergantung pada dana perimbangan, hal ini terlihat pada masih besarnya kontribusi (proporsi) dana perimbangan terhadap APBD. Sampai Tahun 2021 Kontribusi dana perimbangan pada kisaran 88,23 % dan kontribusi PAD pada kisaran angka 7,18%. Kenyataan ini membuat Pemerintah Kota Solok masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat dalam membiayai pembangunannya. Sehingga dalam merumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan sumber-sumber pendapatan daerah dalam APBD perlu benar-benar memperhatikan potensi untuk penetapan target pendapatan daerah dan upaya-upaya yang akan ditempuh dalam mencapai target tersebut serta memperhatikan dasar hukum penerimaannya.

Strategi yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan melalui, (1) Perbaikan manajemen terhadap potensi pendapatan daerah yang kemudian dapat secara langsung direalisasikan, dengan manajemen profesional dibidang sumber daya manusia yang diikuti dengan kemudahan pengoperasionalan alat bantu teknologi sehingga prosedur dapat disederhanakan dan mutu pelayanan dapat ditingkatkan; (2) Peningkatan investasi dengan membangun iklim usaha yang kondusif dalam hal ini adanya ketersediaan data serta sarana penunjang sehingga nilai investasi dapat meningkat.

Peningkatan pendapatan daerah ditempuh dengan kebijakan antara lain sebagai berikut:

1. Penyempurnaan dan pemberlakuan peraturan daerah yang mengatur tentang pendapatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
2. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola pendapatan daerah;
4. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah baik dengan SKPD pengelola pendapatan daerah, pemerintah propinsi dan pemerintah pusat.
5. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;
6. Peningkatan pelayanan kepada wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah dan pemberian penghargaan terhadap wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah yang patuh terhadap peraturan dan menerapkan sanksi bagi yang melanggar;
7. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah;
8. Penegakkan peraturan dengan tegas dan adil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Upaya yang dilakukan dalam pencapaian target pendapatan antara lain dengan :

1. Melakukan penghitungan potensi pendapatan daerah, melakukan up-date (pembaharuan) data base pajak daerah dan retribusi daerah ;
2. Memberikan pelatihan dan bimbingan teknis pengelolaan pendapatan daerah kepada aparatur pengelola pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Melakukan penyederhanaan sistim dan prosedur pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah dan mengembangkan sistim pengelolaan pendapatan daerah berbasis teknologi (komputer);
4. Melakukan intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
5. Memberikan pelayanan pembayaran pajak daerah kepada masyarakat dengan mobil pembayaran PBB P-2 keliling;
6. Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah

Berdasarkan perhitungan proyeksi pendapatan yang sebagaimana yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, dimana terjadi peningkatan pendapatan Kota Solok dari Rp.598.687.962.249,00 pada tahun 2016 menjadi Rp.684.581.928.410,00 pada tahun 2021. Di samping itu, juga dilakukan proyeksi atas Belanja Wajib dan Mengikat untuk tahun 2016 – tahun 2021. Proyeksi atas Belanja Wajib dan Mengikat ini dilakukan berdasarkan tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun. Hasil proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat tetap tahun 2016 sebesar Rp.242.175.690.968,86 menjadi Rp.326.361.940.716,45 pada tahun 2021.

Di samping pembiayaan berdasarkan tabel 3.16 di atas, diperlukan dukungan pemerintah pusat melalui dana Tugas Pembantuan, APBD propinsi dan investasi lainnya untuk membiayai pembangunan program-program strategis sampai tahun 2021 sebagai berikut:

No	OPD	Program Strategis	Anggaran (Rp.)
1	Dinas Perumahan dan Permukiman	Prasarana perkantoran, sanitasi dan perumahan	350.000.000.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum	Jalan lingkar utara, jalan 2 (dua) jalur, irigasi dan embung.	150.000.000.000,00
3	Dinas Kesehatan	RSUD	150.000.000.000,00
4	Dinas Pendidikan	SMP Boarding	50.000.000.000,00
5	Dinas Perdagangan dan KUKM	Pasar	150.000.000.000,00
6	Dinas Pariwisata	Pengembangan objek wisata	100.000.000.000,00
7	Dinas Pertanian	Alsintan dan jalan usaha tani	25.000.000.000,00
8	Dinas Pemuda dan Olahraga	GOR	250.000.000.000,00
9	Total		1.225.000.000.000,00



Dalam perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan Kota Solok ini juga digunakan asumsi bahwa jumlah sisa lebih Rill perhitungan anggaran pada tahun 2016 adalah sama Rp.71.527.054.464,00 dan meningkat sampai tahun 2021 sehingga menjadi Rp.94.229.407.543,00. Karena Kota Solok juga tidak memiliki Dana Cadangan, maka hasil perhitungan kapasitas riil keuangan daerah dapat dilihat pada Tabel 3.17. berikut:



Tabel 3.17
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Untuk Mendanai Pembangunan Kota Solok Tahun 2016 – Tahun 2021

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Pendapatan	598.687.962.249,00	617.608.693.004,00	596.377.195.900,00	617.299.869.368,00	649.929.965.000,00	684.581.928.410,00
2	Pencairan Dana Cadangan						
3	SILPA	71.527.054.464,00	130.815.066.448,85	106.891.047.051,00	96.054.152.910,00	96.842.339.278,00	94.229.407.543,00
	Total Penerimaan	670.215.016.713,00	748.423.759.452,85	703.268.242.951,00	713.354.022.278,00	746.772.304.278,00	778.811.335.953,00
	Dikurangi :						
4	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama	242.175.690.968,86	255.912.033.144,60	271.153.946.595,08	287.671.939.256,91	306.041.500.846,60	326.361.940.716,45
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	428.039.325.744,15	529.589.636.466,25	456.677.759.989,04	465.056.024.062,39	472.962.350.692,27	477.904.019.834,80

Sumber : 1. Badan Keuangan Daerah

2. Data Diolah

Kebijakan belanja daerah akan difokuskan untuk pembiayaan pembangunan yang berorientasi kepada masyarakat, sedangkan pembiayaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan aparatur lebih pada fungsi-fungsi pemerintah yaitu sebagai fasilitator pembangunan dan pelayanan. Adapun beberapa langkah yang perlu diupayakan diantaranya adalah:

- Mensinergikan alokasi belanja dari berbagai sumber dana pembiayaan program dan kegiatan, agar semaksimal mungkin dapat mendukung pencapaian target yang ditetapkan pemerintah pusat pada masing-masing urusan;
- Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan belanja hibah agar kemampuan keuangan yang ada semaksimal mungkin dapat dimanfaatkan untuk pembangunan;
- Penyusunan anggaran belanja daerah yang dituangkan dalam program dan kegiatan harus didasarkan pada asas manfaat dan data capaian kinerja

Berdasarkan proyeksi pendapatan sebagaimana telah dijelaskan diatas baru dapat diproyeksikan belanja daerah yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Untuk belanja hibah dan bantuan sosial diacress sebesar 5% dan belanja tidak terduga dari alokasi tahun 2016 sebesar Rp.3.000.000.000,00 terus turun sampai tahun 2021 menjadi sebesar Rp.2.000.000.000,00. Sisanya dialokasikan untuk belanja langsung yang akan membiayai program dan kegiatan urusan wajib dan urusan pilihan.

Dengan asumsi proyeksi diatas maka didapatkan proporsi belanja tidak langsung dari total belanja daerah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 berkisar antara 46% sampai 55%. Sedangkan belanja langsung dibandingkan dengan belanja daerah berkisar antara 45% sampai 54%.

Proyeksi belanja daerah dapat dilihat dari Tabel 3.18 berikut ini :



Tabel 3.18
Proyeksi Belanja Daerah Kota Solok Tahun 2016– 2021

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
BELANJA	653.715.016.713,00	725.123.759.452,85	688.268.242.951,00	697.604.022.278,00	730.234.804.278,00	761.446.960.953,00
Belanja Tidak Langsung	305.659.611.097,00	269.873.173.978,00	267.797.513.778,00	270.818.792.278,00	277.000.604.278,00	283.646.960.953,00
1 Belanja Pegawai	295.976.256.819,00	258.502.823.700,00	256.851.176.500,00	263.272.455.000,00	269.854.267.000,00	276.600.623.675,00
2 Belanja Bunga		-	-		-	-
3 Belanja Subsidi		-	-	-	-	-
4 Belanja Hibah	6.137.017.000,00	7.835.463.000,00	6.800.000.000,00	5.000.000.000,00	4.600.000.000,00	4.500.000.000,00
5 Belanja Bantuan Sosial		488.550.000,00	1.100.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
6 Belanja Bantuan Keuangan	546.337.278,00	546.337.278,00	546.337.278,00	546.337.278,00	546.337.278,00	546.337.278,00
7 Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
Belanja Langsung	348.055.405.616,00	454.725.999.632,85	420.463.729.173,00	426.785.230.000,00	453.234.200.000,00	477.800.000.000,00
1 Belanja Pegawai	10.926.616.700,00	14.042.542.876,55	12.984.478.455,00	11.842.665.000,00	11.984.200.000,00	12.750.000.000,00
2 Belanja Barang dan Jasa	169.358.501.775,00	202.759.276.078,54	187.481.959.275,00	171.154.715.000,00	186.025.000.000,00	198.500.000.000,00
3 Belanja Modal	167.770.287.141,00	237.924.180.677,76	219.997.291.444,00	243.787.850.000,00	255.225.000.000,00	266.550.000.000,00

Sumber : 1. Badan Keuangan Daerah

2. Data Diolah

Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah. kebijakan alokasi anggaran pemerintah daerah digunakan untuk membiayai urusan wajib dan urusan pilihan.

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan

Identifikasi permasalahan pembangunan diperlukan untuk mengetahui dan membantu untuk menganalisis permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan diketahuinya permasalahan dan kendala pembangunan tersebut, selanjutnya dapat dirumuskan isu-isu strategis yang akan mempengaruhi dan menentukan penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah yang berorientasi hasil dan relevan untuk mempercepat capaian pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan.

Permasalahan pada dasarnya dapat muncul dalam berbagai bentuk sesuai dengan jenis kegiatan dan kondisi masyarakat yang dihadapi. Dalam bidang pembangunan daerah, masalahnya adalah terdapatnya perbedaan (*gaps*) antara apa yang seharusnya terjadi menurut logikanya atau ilmu pengetahuan dengan apa yang sebenarnya terjadi dalam kenyataannya. Dengan kata lain, permasalahan pembangunan dapat diidentifikasi melalui perbedaan antara apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat daerah bersangkutan.

Berdasarkan pemahaman tersebut dan memperhatikan kenyataan dalam beberapa tahun terakhir, maka masalah pembangunan yang dihadapi oleh Kota Solok secara umum adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya pemahaman dan pengamalan serta berubahnya metoda pendidikan agama, adat dan budaya

Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai agama, adat dan budaya saat ini menjadi sangat penting. Pada saat ini terjadi kecenderungan penurunan pemahaman dan pengamalan serta berubahnya metoda pendidikan agama, adat dan budaya di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, agar gejala penurunan pemahaman dan pengamalan nilai agama, adat dan budaya dapat dihindari, maka perlu dilakukan antisipasi melalui metoda penguatan pendidikan nilai agama, pelestarian adat dan budaya.

2. Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik

Good Governance sering diartikan sebagai indikator terealisasikannya reformasi birokrasi dengan terpenuhinya prinsip-prinsip, partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, kepedulian kepada stakeholders, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas. Hal ini perlu didukung dengan kualitas aparatur daerah yang lebih profesional sesuai dengan-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kondisinya saat ini masih dirasakan relatif rendah dan perlu terus ditingkatkan.

3. Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas Sumber Daya Manusia dapat dilihat dari tingkat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat. Tingkat pendidikan dapat ditandai dengan capaian indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dimana Kota Solok pada tahun 2015 baru mencapai 10,77. Artinya rata-rata pendidikan masyarakat Kota Solok setara dengan tamat SMP. Disamping masih rendahnya tingkat pendidikan di Kota Solok, permasalahan lain yang dihadapi di bidang pendidikan adalah belum meratanya kualitas layanan pendidikan



dasar. Hal ini ditandai dengan persentase SD dengan nilai rata-rata UN $\geq 7,7$ hanya sebesar 42,22% dan sisanya sebesar 57,88% nilainya dibawah 7,7 dan Perentase SMP dengan nilai rata-rata UN $\geq 6,0$ sebesar 14,29% dan sisanya sebesar 85,71% nilainya dibawah 6,0.

Di bidang kesehatan ditandai dengan indikator Usia Harapan Hidup (UHH) pada tahun 2015 mencapai usia 72,74 tahun. Usia Harapan Hidup dipengaruhi oleh Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI) dan angka kesakitan. Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Rikesdas) tahun 2013 tingkat Provinsi Sumatera Barat Kota Solok termasuk 3 tertinggi prevalensi hipertensi, 2 tertinggi prevalensi stroke dan 7 tertinggi prevalensi jantung coroner.

4. Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pemberdayaan perempuan menuju kesetaraan gender masih terdapatnya kesenjangan gender di berbagai bidang, hal ini tercermin dari rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, serta meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan.

Anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan investasi masa depan bagi orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam rangka mewujudkan anak sebagai generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, bertaqwa dan terlindungi maka diperlukan pembangunan yang memegang prinsip-prinsip pemenuhan hak-hak anak. Prinsip-prinsip tersebut meliputi non diskriminasi dalam mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, perlindungan dan menghargai partisipasi anak. Perlindungan bagi anak dari berbagai tindakan eksploitasi, diskriminasi dan kekerasan juga masih belum optimal, sehingga pelayanan dan penanganan pada perempuan dan anak sebagai kelompok rentan dan korban terbesar akibat kekerasan juga masih relatif rendah.

5. Kontribusi Sektor Perdagangan dan jasa dalam struktur Ekonomi Daerah

Sumber daya Kota Solok yang ada belum dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa yang seharusnya dapat menjadi penggerak pada perekonomian dan investasi. Hal ini terlihat dari pertumbuhan sektor perdagangan yang relatif lambat.

6. Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK)

Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang ada dan aktif sebagai pelaku utama kegiatan perekonomian, perdagangan dan jasa dirasakan masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh relatif rendahnya kualitas produk UMKMK, akses ke pembiayaan, akses ke pasar, SDM serta promosi dan informasi, ketersediaan layanan pengembangan usaha dan jaringan bisnis, sehingga masih perlu menjadi prioritas.

7. Investasi

Sampai saat sekarang sumber dana untuk mendukung upaya pembangunan daerah masih sangat terbatas. Hal ini terjadi karena keterbatasan sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan dari pemerintah pusat. Sementara upaya untuk meningkatkan investasi swasta, baik berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang belum optimal dan kecenderungan Penanaman Modal Asing (PMA) sampai saat ini belum ada realisasi.



8. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kota Solok sangat penting untuk dilakukan intervensi, agar indeks keparahan dan indeks kedalaman kemiskinan dapat diturunkan. Intervensi yang dilakukan lebih kepada mengurangi kesenjangan antar rumah tangga miskin dan meningkatkan rata-rata pendapatan per kapita per bulan penduduk miskin agar bergerak semakin membaik dan melewati batas garis kemiskinan.

9. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Jumlah PMKS di Kota Solok mengalami peningkatan setiap tahunnya. Walaupun jumlah PMKS yang dibantu dan ditangani juga terus meningkat, namun perlu dilakukan penanganan yang komprehensif untuk dapat mengeluarkan masyarakat Kota Solok dari permasalahan kesejahteraan sosial.

10. Ketersediaan Infrastruktur

Dengan dicanangkannya target *universal access* air minum dan sanitasi oleh pemerintah pusat, perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah. Hal ini disebabkan karena masih belum optimalnya layanan air bersih dan sanitasi, sehingga memerlukan upaya yang lebih merata pendistribusiannya dalam rangka mencapai target dimaksud. Masih banyak keluhan dari masyarakat terkait dengan layanan air bersih, baik terhadap kualitas, kuantitas maupun kontinuitas.

Untuk meningkatkan aksesibilitas daerah, penyediaan infrastruktur perhubungan juga perlu didorong, dimana kondisi saat ini prasarana dan sarana perhubungan masih belum memadai, kondisi ini dapat dilihat dengan terjadinya kemacetan lalu lintas di beberapa lokasi, disebabkan kurang lebarnya jalan yang ada.

Berkaitan dengan pengembangan perumahan dan pemukiman penduduk dirasakan masih belum memadai. Karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni serta meningkatkan kawasan permukiman, maka pembangunan perumahan dan kawasan permukiman perlu menjadi perhatian yang lebih dari semua pihak.

11. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Kota Solok sudah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan melalui Perda Nomor 13 Tahun 2012. Namun pengendalian pemanfaatan ruang kota belum berjalan optimal terutama dalam pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya dalam RTRW. Kondisi ini terutama disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap rencana tata ruang dan keterbatasan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

12. Kualitas lingkungan hidup

Pengendalian, pengawasan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup kota saat ini dirasakan masih sangat kurang dan perlu terus ditingkatkan. Hal ini terlihat dari banyaknya aktifitas rumah tangga dan aktivitas usaha/kegiatan pertanian, peternakan, industri, tanpa proses pengolahan dibuang ke badan sungai.

4.2. Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan pembangunan Kota Solok yang masih dihadapi dan mempertimbangkan janji politik yang perlu diwujudkan, maka ditetapkan isu-isu strategis pembangunan daerah yang mempunyai pengaruh besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dan memiliki



daya ungkit untuk percepatan pembangunan daerah. Isu-isu strategis daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman, pengamalan nilai-nilai agama, pelestarian adat dan budaya

Peningkatan pemahaman, pengamalan dan pelestarian nilai-nilai agama, adat dan budaya merupakan isu penting yang harus menjadi perhatian khusus agar gejala pergeseran nilai-nilai dan budaya ke arah yang kurang baik tidak berkembang lebih cepat dan mempengaruhi generasi muda. Antisipasi dan pencegahan dilakukan melalui penguatan nilai-nilai agama, adat dan budaya dengan penguatan peran lembaga daerah, lembaga sosial masyarakat, pemangku adat dan budaya dalam mewujudkan masyarakat dan pemuda yang bermartabat dan berkarakter.

2. Optimalisasi reformasi birokrasi

Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan *Good Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik). Titik berat pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis dan terpadu, melalui peningkatan kapasitas ASN. Upaya ini sangat penting artinya dalam rangka meningkatkan profesionalisme yang akan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

3. Peningkatan dan pemerataan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan

Pemerataan kualitas layanan pendidikan lebih banyak terletak pada aspek distribusi siswa per sekolah, nilai hasil UN belum mencapai target yang diharapkan dan rata-rata lama sekolah yang merupakan presentasi dari tingkat pendidikan masyarakat masih rendah pada tingkat SD dan SLTP.

Layanan dibidang kesehatan menjadi isu yang perlu mendapat perhatian, terutama berkaitan dengan angka harapan hidup (AHH), angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang masih tinggi dari rata-rata nasional. Indikator AKI dan Indikator AKB capaiannya setiap tahun di Kota Solok masih diatas rata-rata nasional, akan tetapi untuk wilayah kota kecil angka ini masih cukup tinggi, sehingga perlu ditekan melalui berbagai upaya preventif, promotif dan kuratif. Untuk mewujudkan indikator sebagaimana di atas perlu penyediaan sarana pelayanan kesehatan yang berkualitas baik.

4. Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, keterlibatan dan ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan serta mendapatkan manfaat dari kebijakan program pembangunan yang ditandai dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Disamping IPG, untuk menunjukkan capaian dalam upaya meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), guna melihat peranan perempuan dibidang ekonomi, politik dan sosial. Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas juga sangat ditentukan oleh meningkatnya kualitas hidup dan tumbuh kembang anak serta perlindungan terhadap anak dari segala bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya.



5. Peningkatan prasarana dan sarana perdagangan dan pariwisata.

Peningkatan prasarana dan sarana perdagangan serta pengembangan pariwisata menjadi isu yang sangat penting. Hal ini dimuat dalam visi Kota Solok dalam RPJPD untuk menjadi Kota Perdagangan dan Jasa. Dengan mewujudkan Kota Solok sebagai Kota Perdagangan, pada hakikatnya akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

6. Peningkatan daya saing produk UMKMK, industri dan agribisnis.

Peningkatan daya saing UKM, industri dan agribisnis menjadi isu pembangunan daerah karena merupakan sektor dominan yang menggerakkan ekonomi Kota Solok. Oleh sebab itu kegiatan yang mendorong perkembangan UMKMK, industri dan agribisnis dalam pembenahan manajemen dan kelembagaan, penguasaan teknologi, inovasi dan diversifikasi produk serta peningkatan akses produk dan perluasan pasar harus diprioritaskan supaya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesempatan kerja.

7. Peningkatan Nilai Investasi

Peningkatan nilai investasi merupakan isu penting pembangunan daerah khususnya Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Hal ini bisa terwujud dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan optimalisasi pelayanan investasi.

8. Penurunan angka kemiskinan dan Peningkatan Kesempatan kerja

Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesempatan kerja menjadi isu pembangunan daerah karena akan menjadi hambatan dalam pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, peningkatan kualitas hidup penduduk miskin dan peningkatan kompetensi tenaga kerja dan membuka lapangan kerja.

9. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Penanganan PMKS di Kota Solok menjadi isu penting yang harus ditangani. Hal ini dilakukan dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dimana kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial masyarakat agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

10. Peningkatan layanan air bersih, sanitasi, prasarana dan sarana perhubungan serta perumahan dan kawasan permukiman.

Target *Universal Access* air minum dan sanitasi secara nasional sudah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2014-2019. Guna mendukung pencapaian target *Universal Access* tersebut, penyediaan layanan air bersih dan sanitasi juga menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Solok. Untuk layanan air bersih terlihat masih ada masyarakat yang belum terlayani, disamping masih rendahnya kualitas, kuantitas dan kontinuitas air bersih. Demikian juga terhadap layanan sanitasi masih ada masyarakat yang buang air besar sembarangan.

Prasarana dan sarana perhubungan sangat dibutuhkan guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Aksesibilitas orang dan barang dari dan ke kota solok sangat ditentukan oleh kualitas prasarana dan sarana perhubungan tersebut. Kondisi prasarana dan sarana perhubungan yang ada di kota Solok saat ini dirasakan sudah kurang mampu mendukung pertambahan jumlah kendaraan yang selalu meningkat setiap tahunnya, hal ini disebabkan karena kurangnya kapasitas jalan serta kondisi



jalan itu sendiri yang kurang bagus. Selain itu jalan yang ada juga belum sepenuhnya dilengkapi dengan marka dan rambu-rambu lalu lintas.

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan kebutuhan dasar masyarakat, oleh sebab itu perlu menjadi perhatian khusus terutama dalam meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni menjadi layak huni serta penyediaan prasarana, sarana dan utilitas kawasan permukiman.

11. Optimalisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang ini sangat diperlukan dalam rangka mengimplementasikan Perda RTRW, sehingga rencana struktur dan pola ruang yang sudah dibuat dapat direalisasikan.

12. Peningkatan kualitas lingkungan hidup

Untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup perlu adanya pengendalian, pengawasan baik oleh aparatatur maupun partisipasi masyarakat yang intensif dan terpadu dalam meningkatkan kualitas lingkungan yang bersih, elok, rapi, aman dan sejahtera, untuk itu perlu mengevaluasi dan penambahan sarana dan prasarana

4.3. Keterkaitan dengan dokumen lainnya

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan lainnya, maka arah kebijakan RPJMD Kota Solok Tahun 2016-2021 disusun dengan berpedoman dan memperhatikan beberapa dokumen perencanaan sebagai berikut:

4.3.1. Rencana Tata Ruang Kota Solok Tahun 2012-2031

1. STRUKTUR RUANG

Rencana struktur ruang wilayah Kota Solok merupakan kerangka sistem pusat-pusat pelayanan kegiatan kota yang berhierarki dan satu sama lain dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kota. Rencana struktur wilayah kota meliputi rencana sistem pusat pelayanan kota dan rencana sistem jaringan prasarana.

A. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota

Rencana sistem pusat pelayanan kota bertujuan untuk meningkatkan pelayanan eksternal wilayah secara regional. Rencana sistem pusat pelayanan kota mengikuti karakteristik dan kondisi eksisting wilayah Kota Solok yang meliputi : Pusat Pelayanan Kota; Sub Pusat Pelayanan Kota; dan Pusat Lingkungan.

Dalam konteks pengembangan Kota Solok sistem pusat pelayanan kota sangat dibutuhkan untuk membentuk struktur kota yang tersambung dengan prasarana dan sarana yang ada yang berorientasi dari pusat pertumbuhan yang satu dengan lainnya berkembang dengan baik.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan hasil analisis, maka rencana sistem pusat pelayanan Kota Solok adalah sebagai berikut :

- 1) **Pusat Pelayanan Kota**, yaitu : Kawasan Pusat Kota Solok yang berlokasi di Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kelurahan Koto Panjang dan Kelurahan Kampung Jawa dengan skala pelayanan regional dan kota yang memiliki fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa.



- 2) **Sub Pusat Pelayanan Kota**, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan internal yang tersebar di 3 (tiga) kawasan, yaitu :
 - a. Kawasan Laing yang berlokasi di Kelurahan Laing dengan skala pelayanan regional dan kota yang memiliki fungsi sebagai pusat perkantoran pemerintah.
 - b. Kawasan Simpang Rumbio yang berlokasi di Kelurahan Simpang Rumbio dengan skala pelayanan regional dan kota yang memiliki fungsi sebagai pusat transportasi regional
 - c. Kawasan Tanah Garam yang berlokasi di Kelurahan Tanah Garam dengan skala pelayanan regional dan kota yang memiliki fungsi pertanian.
- 3) **Pusat Lingkungan**, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan lingkungan yang tersebar pada 6 (enam) kelurahan yaitu Kelurahan Kampung Jawa, Tanjung Paku, Aro IV Korong, IX Korong, KTK dan VI Suku yang memiliki fungsi perumahan.

B. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Kota

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana utama bertujuan untuk mengembangkan keterhubungan antar pusat kegiatan dan memperkuat sistem pergerakan antar wilayah baik internal maupun eksternal. Sistem jaringan prasarana utama yang direncanakan di Kota Solok adalah sistem jaringan transportasi darat berupa sistem jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan sistem jaringan perkeretaapian.

1. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama

1) Rencana Sistem Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Sistem Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Solok terdiri dari jaringan jalan; jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; jaringan pelayanan lalu lintas dan sistem perpajakan.

1. Rencana Jaringan Jalan

Rencana Jaringan jalan di Kota Solok terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.

1) Sistem jaringan jalan primer di Kota Solok meliputi :

a) Jaringan Jalan Arteri Primer

Jalan arteri primer di Kota Solok meliputi:

- Ruas Jalan Imam Bonjol (2,339 km)
- Ruas Jalan KH. Dewantoro (0,887 km)
- Ruas Jalan A. Yani (0,581 km)
- Ruas Jalan Diponegoro (0,352 km)
- Ruas Jalan Proklamasi (0,395 km)
- Ruas Jalan M. Hatta (0,176 km)
- Ruas Jalan A. Dahlan (0,558 km)
- Ruas Jalan Prof. M. Yamin (0,721 km)
- Ruas Jalan Lubuk Sikarah (0,779 km)
- Ruas Jalan Hamka (1,098 km),
- Ruas Jalan Sudirman (0,340 km),
- Ruas Jalan KH. Ahmad Dahlan (0,51 km), dan
- Ruas Jalan Ir. Soekarno (0,43 km).

Rencana **Peningkatan fungsi ruas jalan menjadi jalan arteri primer**, meliputi :

- Ruas jalan Solok By Pass (Jl. Nasir Pamuncak)
- Ruas jalan batas Kota Bandar Pandung - batas kota Selayo (jalan Imam Bonjol, Jalan KH. Dewantoro, jalan A. Yani, jalan Diponegoro, jalan Lubuk Sikarah, jalan Hamka)



b) Jaringan Jalan Kolektor Primer

Jalan kolektor primer di Kota Solok meliputi:

- Ruas jalan Bioskop Karya - Simpang Pulai (jalan Pemuda, jalan Perpatih Nan Sabatang, Jalan Pulai);
- Ruas jalan SMP I - Simpang Laiang Pasir (jalan Adityawarman, jalan Sawah Sianik, jalan Tembok Raya, jalan Bahar Hamid); dan
- Ruas jalan Simpang Laiang Damar – Simpang Damar (jalan Mukhtar)

2) Sistem Jaringan Jalan Sekunder di Kota Solok, meliputi :

a) Jaringan Jalan Arteri Sekunder

Jalan arteri primer di Kota Solok adalah ruas Jalan Solok By Pass/Jl. Nasir Pamuncak sepanjang 3,117 km.

Rencana **Peningkatan fungsi ruas jalan menjadi jalan arteri sekunder di Kota Solok** meliputi :

- Ruas jalan Simpang Poliguna - Pandan Ujung (jalan Ir. Soekarno, jalan M. Hatta, jalan A. Dahlan, jalan Prof. M. Yamin)
- Ruas jalan Simpang Ambacang - Simpang Tugu Pasar Raya (jalan Proklamasi, jalan Sudirman).

b) Jaringan Jalan Kolektor Sekunder

Jalan kolektor sekunder di Kota Solok meliputi:

- Ruas jalan Masjid Kampung Jawa- Simpang Damar (jalan Yos Sudarso, Jalan Marahadin, jalan Transad);
- Ruas jalan Masjid Syukur-Asam Jao (jalan Syekh Supayang);
- Ruas jalan Batas Kota Pandan-Pulai (jalan Zuhlul Sutan Kabasaran);
- Ruas jalan Pulai-Simpang Bypass KTK (jalan A. Murad, jalan Syekh Sialahan);
- Ruas jalan Simpang Lampu Merah Pandan-Simpang Tanjung Paku (jalan Pattimura);
- Ruas jalan Simpang Tanjung Paku – Simpang Laiang (jalan Batu Laweh);
- Ruas jalan Simpang BRI – Simpang Tanjung Paku (jalan Sutan Syahrir, jalan Syekh Kukut, jalan Veteran);
- Ruas jalan Tanah Garam-Payo (jalan Syekh Ismail Alkhalibi, jalan Siti Nurjida); dan
- Ruas jalan Simpang Sigege-Ampang Kualo (jalan Tandikat, jalan Dr. A. K. Gani).

c) Jaringan Jalan lokal Sekunder

Ruas jalan lokal sekunder di Kota Solok meliputi seluruh jalan eksisting di Kota Solok yang tidak termasuk jalan arteri dan jalan kolektor:

Selain ruas-ruas jalan tersebut di atas, rencana pembangunan jaringan jalan di Kota Solok berupa **Rencana pembangunan Jalan Lingkar (*Ringroad*)** yang meliputi :

- Jalan Lingkar Utara
- Jalan Lingkar Selatan, dan
- Jalan Lingkar Timur

Rencana pembangunan jaringan jalan untuk ruas jalan lingkar utara, selatan dan timur yang diharapkan menjadi jalan arteri sekunder untuk meningkatkan aksesibilitas dari masing-masing pusat pertumbuhan, sertaantisipasi



meningkatnya volume lalu lintas di sekitar Jalan A. Yani, Jalan Diponegoro dan Jalan Lubuk Sikarah.

2. Rencana Jaringan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Rencana jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Solok diarahkan untuk menunjang terlaksananya keterpaduan intramoda dan antarmoda, kelancaran perpindahan orang atau barang yang diwujudkan dengan dibangun dan diselenggarakannya terminal. Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Solok meliputi terminal penumpang dan terminal barang dengan rencana sebagai berikut :

- 1) Terminal Penumpang Tipe A Bareh Solok (sesuai arahan RTRW Provinsi tahun 2029) berlokasi di Simpang Rumbio untuk melayani angkutan umum Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), Angkutan Perdesaan dan Angkutan Dalam Kota. Terminal ini akan dioptimalisasikan fungsinya sehingga dapat berjalan secara maksimal. Dalam rangka optimalisasi fungsi terminal perlu dilakukan pengembangan kawasan di sekitar terminal tersebut.
- 2) Terminal Penumpang Tipe C Lintas Sumatera berlokasi di Kelurahan Kampung Jawa;
- 3) Pembangunan Terminal Barang (Truk) di Kawasan Laing dan Kawasan Simpang Rumbio, yang berfungsi untuk pelayanan skala regional dan lokal.

3. Rencana Jaringan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang dikembangkan adalah : Jaringan trayek Angkutan orang dan jaringan lintas angkutan barang.

1) Jaringan Trayek Angkutan Orang

Rencana jaringan trayek angkutan orang di Kota Solok meliputi jaringan trayek angkutan umum melalui peningkatan dan pengembangan trayek angkutan kota, meliputi :

- a) Terminal Bareh Solok – Simpang Rumbio – Air Mati – Simpang Karya – Terminal Angkot – Stasiun – SMPN 1 – Simpang Denpal – Simpang Ambacang – Tanah Garam – Tanah Garam – Payo.
Payo – Tanah Garam – Simpang Ambacang – Simpang Denpal – Simpang BRI – Terminal Angkot – Jl.Syeikh Kukut – Kampung Baru – Tanjung Paku – Jl. Pattimura – Pandan Ujung – Terminal Angkot.
- b) Terminal Bareh Solok – Pandan Ijung – Terminal Angkot – Stasiun – SMPN 1 – Simpang Denpal – Simpang Ambacang – Tanah Garam – Batas Kota – Padang Galundi.
Padang Galundi – SMPN 6 – Wisma Solok Nan Indah – Simpang KUD – Simpang Ambacang – Simpang Denpal – Terminal Angkot – Jl. Cindur Mato – Pandan Ujung – Terminal Bareh Solok.
- c) Terminal Bareh Solok – By Pass KTK – Simpang Koramil – Balai Kota – Simpang Poliguna – Tanah Garam – Simpang KUD – Jl.Rajin – Perumnas Sawah Piai.
Perumnas Sawah Piai – Taratak – Gawan – Simpang Kemenag – Simpang Ambacang – Simpang Denpal – Simpang BRI – Terminal Angkot – Jl.Syeikh Kukut – Kampung Baru – Tanjung Paku – Jl.Pattimura – Pandan Ujung – Terminal Bareh Solok
- d) Terminal Bareh Solok – Simpang Rumbio – RSUD Kota Solok – MAN – SMAN2 – Batu Gadang – Batas Kota – Pandan Ujung – Simpang Bioskop Karya – Terminal Angkot.



- Terminal Angkot – Stasiun – SMPN 1 – Simpang Denpal – Taman Kota – Simpang Surya – Jl.Sihorok Aro – By Pass KTK – SMP 5 – Simpang Pulai –Simpang Rumbio – Terminal Bareh Solok.
- e) Terminal Bareh Solok – Simpang Rumbio – Jl.Dt.Perpatih Nan Sabatang – Mesjid Agung – Polsek Kota – Terminal Angkot – SMA 3 – Pulau Belibis – Ampang Kualo Via SMK 2 – SMA 4 –AKPER – Nan Balimo – Sawah Sianik – Terminal Angkot – Jl.Syeikh Kukut – Jl.Cindur Mato – Pandan Ujung – By Pass – Terminal Bareh Solok.
- f) Terminal Bareh Solok – Simpang Rumbio – By Pass KTK – Jl.Sihorok Aro – Terminal Angkot – Tembok – Laing - Simpang Dama – Transad – Pulau Belibis – Kampung Jawa – Terminal Angkot.
Terminal angkot – Stasiun – SMPN 1 – Taman Kota – Simpang Surya – Jl.Dt Perpatih Nan Sabatang – Polsek Kota – Mesjid Agung – Simpang Rumbio – Terminal Bareh Solok.
- g) Terminal Bareh Solok – By Pass – Pandan Ujung – Jl.Kh.Ahmad Dahlan – Simpang Bioskop – Terminal Angkot.
Terminal Angkot – Stasiun – Sawah Sianik – Gurun Mutiara – Nan Balimo – Laing – Pasir Via Puskesmas Nan Balimo – Tanjung Paku - Jl.Pattimura – Pandan – Terminal Bareh Solok.

Rencana jaringan angkutan kota yang dikembangkan di Kota Solok, yaitu Jaringan angkutan umum yang berbasis moda jalan dan dilayani oleh angkutan kota.

- 2) Jaringan Lintas Angkutan Barang
Rencana jaringan lintas angkutan barang di Kota Solok dikembangkan melalui peningkatan dan pengembangan trayek angkutan barang meliputi :
- a) Rute Utara dari arah Kota Padang Panjang menuju Jalan Lingkar Utara – Terminal Barang di Kawasan Laing – menuju Kabupaten Solok (Saok Laweh); dan
- b) Rute Selatan dari arah Kota Padang menuju Jalan Nasir Sutan. Pamuncak – Terminal Barang Kawasan Simpang Rumbio – menuju Kabupaten Solok (Saok Laweh).

4. Rencana Sistem Perparkiran

Sistem perparkiran yang dikembangkan di Kota Solok meliputi :

- 1) Parkir di luar badan jalan (*off street*) berupa parkir pada kawasan pelataran parkir
Sistem parkir di luar badan jalan di Kota Solok diarahkan pada kawasan-kawasan yang banyak menarik pergerakan lalu lintas, meliputi
- Kawasan perdagangan dan jasa
 - Kawasan perkantoran
 - Kawasan pariwisata
 - Kawasan pendidikan
 - Kawasan pelayanan umum.
- 2) Parkir dalam bangunan, yang menyatu dengan bangunan utama dan atau didalam gedung parkir yang terletak di atas permukaan tanah dan atau di bawah permukaan tanah (*basement*).

Sistem parkir dalam bangunan di Kota Solok dikembangkan secara terbatas pada bangunan-bangunan bertingkat yang memiliki aktifitas tinggi



2) Rencana Sistem Jaringan Perkeretaapian

Sistem Jaringan Perkeretaapian ditetapkan untuk memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara massal, menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas serta sebagai pendorong dan penggerak pembangunan kawasan. Sistem jaringan perkeretaapian yang dikembangkan di Kota Solok adalah sebagai berikut :

1. Jaringan Jalur Kereta Api

Rencana pengembangan angkutan kereta api di Kota Solok diarahkan untuk jangka panjang untuk angkutan penumpang melalui pembangunan jalan pintas (shortcut) antara Pauh Limo (Padang) – Kota Solok melalui Kelurahan Tanah Garam yang merupakan bagian dari rencana pembangunan jaringan Kereta Api Trans Sumatera (Connecting Trans Sumatera Railway).

Rencana pengembangan jaringan rel kereta api dinilai dapat berpengaruh terhadap pengembangan wilayah Kota Solok. Pengembangan jaringan rel KA ini menjadi alternatif moda selain jalan darat yang dapat ditempuh dari Kota Padang sebagai PKN menuju wilayah Kota Solok sebagai PKW. Alternatif moda ini menjadi potensi dalam peningkatan aksesibilitas dan pengembangan potensi kunjungan wisatawan ke wilayah Kota Solok dan sekitarnya. Jaringan jalur kereta api perkotaan; Jaringan jalur kereta api perkotaan adalah jaringan jalur kereta api yang melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan dan/atau perjalanan ulang alik.

2. Stasiun Kereta Api

Stasiun kereta api sebagai simpul jaringan jalur kereta api antar kota dikembangkan pada stasiun kereta api eksisting Kota Solok yang berlokasi di Kampung Jawa. Selain itu, dalam rencana sistem jaringan jalur kereta api ini juga dilakukan upaya penertiban terhadap kawasan sempadan jalur kereta api yang sudah beralih fungsi menjadi bangunan.

2. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Rencana sistem prasarana lainnya di Kota Solok merupakan sistem jaringan prasarana pelengkap yang mengintegrasikan dan memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada di wilayah daerah, meliputi : sistem jaringan listrik; sistem jaringan telekomunikasi; sistem jaringan sumber daya air; dan infrastruktur perkotaan.

1) Rencana Sistem Jaringan Listrik

Rencana pengembangan sistem jaringan listrik di Kota Solok -adalah sebagai berikut :

- a) Sistem Transmisi Tenaga Listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) tetap berlokasi pada kondisi eksisting yaitu Kelurahan Kampung Jawa, VI Suku, dan Tanah Garam, serta penetapan dan penertiban sempadan perlu segera dilakukan sebagai upaya tindakan preventif.
- b) Sistem transmisi kabel tegangan rendah adalah mengikuti pola jaringan jalan dan disarankan untuk menggunakan sistem jaringan bawah tanah dengan pertimbangan keamanan dan kenyamanan serta estetika.
- c) Sistem interkoneksi berupa Gardu Induk dengan kapasitas 200 MW berlokasi di Kelurahan Tanah Garam; dan
- d) Pengembangan dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) dengan kapasitas 50 MW dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) dengan kapasitas 100 MW yang berlokasi pada kawasan yang tidak terlayani oleh PLN atau pada kawasan industri pengolahan hasil pertanian yang membutuhkan daya listrik cukup besar.



2) Rencana sistem jaringan telekomunikasi

bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan dunia usaha terhadap layanan telekomunikasi. Secara umum Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi di Kota Solok meliputi :

- a) jaringan tetap dikembangkan sesuai dengan pengembangan jaringan jalan dan kawasan perumahan dengan lokasi sentral telekomunikasi;
- b) jaringan bergerak seluler meliputi menara bersama telekomunikasi ditetapkan lebih lanjut oleh penyelenggara telekomunikasi dengan memperhatikan efisiensi pelayanan, keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitarnya;
- c) jaringan bergerak teresterial meliputi radio trunking dan radio panggil untuk umum akan ditetapkan lebih lanjut oleh penyelenggara telekomunikasi; dan
- d) Zona bebas menara diarahkan pada seluruh kawasan permukiman dengan pertimbangan keamanan dan kenyamanan. Lokasi menara seluler (*Base Transceiver Station*) berada pada :
 1. Kelurahan Aro IV Korong sebanyak 4 (empat) unit;
 2. Kelurahan Pasar Pandan Air Mati sebanyak 3 (tiga) unit;
 3. Kelurahan Kampung Jawa sebanyak 4 (empat) unit;
 4. Kelurahan Nan Balimo sebanyak 2 (dua) unit;
 5. Kelurahan Simpang Rumbio sebanyak 1 (satu) unit;
 6. Kelurahan Sinapa Piliang sebanyak 1 (satu) unit; dan
 7. Kelurahan VI Suku sebanyak 1 (satu) unit.

3) Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Penetapan sistem jaringan sumber daya air di Kota Solok bertujuan untuk memberikan akses secara adil kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan air agar mampu berperikehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. Sistem jaringan sumber daya air yang dikembangkan di Kota Solok meliputi Wilayah Sungai (WS); jaringan dan prasarana air baku; sistem pengendalian banjir atau genangan; sistem jaringan irigasi.

a) Wilayah Sungai

Sistem wilayah sungai bertujuan untuk menjaga keseimbangan siklus hidrologis daerah aliran sungai dan sub daerah aliran sungai. Wilayah sungai memiliki fungsi sebagai sumber air untuk pertanian dan sumber air permukiman. Sistem wilayah sungai yang dikembangkan di Kota Solok meliputi pengelolaan Wilayah Sungai (WS) Indragiri yang mencakup DAS Indragiri, terdiri dari :

1. Jaringan sungai yang termasuk dalam DAS Batang Lembang (9.155 m)
2. Jaringan sungai yang termasuk dalam DAS Batang Gawan (3.125 m)
3. Jaringan sungai yang termasuk dalam DAS Batang Binguang (2.650 m)

b) Jaringan dan Prasarana Air Baku

Jaringan dan Prasarana Air Baku yang dikembangkan di Kota Solok terdiri atas :

- Sungai meliputi Sungai Batang Lembang, Sungai Batang Binguang, dan Sungai Batang Gawan;
- Mata air meliputi pincuran gadang, tabek puyuh, air tabit, sungai Guntung dan Imang Payo

c) Sistem Pengendalian Banjir atau Genangan

Sistem pengendalian banjir atau genangan bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan daerah rawan genangan dengan arahan pengembangan berupa :

- Peningkatan volume atau daya tampung drainase
 - Pembuatan sumur resapan dan lubang biopori
- Pelaksanaan sistem ini diutamakan pada daerah yang sering mengalami terkena banjir atau genangan, yaitu di Kelurahan PPA seluas 45,00 Ha, Koto Panjang 20,00 Ha, VI Suku 75,00 Ha, Aro IV Korong 39,00 Ha, Simpang Rumbio 1,20 Ha,



KTK 50,50 Ha, IX Korong 110,00 Ha, Sinapa Piliang 6,00 Ha, Tanah Garam 63,00 Ha, Nan Balimo 0,30 Ha, Tanjung Paku 0,40 Ha, Kampung Jawa 0,67 Ha, dan Kelurahan Laing seluas 0,50 Ha.

d) Sistem Jaringan Irigasi

Sistem jaringan irigasi bertujuan untuk melayani kebutuhan air baku pada areal persawahan dalam kesatuan Daerah Irigasi. Pengembangan sistem irigasi di Kota Solok meliputi revitalisasi daerah irigasi (DI) dan revitalisasi bangunan irigasi yang melayani areal persawahan guna meningkatkan produktivitas hasil pertanian tanaman pangan dan mendukung program nasional lahan pangan abadi (UU No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan). Selain itu sesuai dengan potensi dan masalah eksisting, maka dalam jangka pendek perlu dilakukan penyusunan rencana induk sistem Jaringan Irigasi Kota Solok.

Selain itu, di Kota Solok juga terdapat Cekungan Air Tanah (CAT) yang merupakan Cekungan Air Tanah Lintas Kabupaten/Kota yang melintasi Kota Solok, Kota Padang, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok dengan luas lebih kurang 1.325 Km²

3. Rencana Sistem Infrastruktur Perkotaan

1) Sistem Penyediaan Air MInum

Rencana Pengembangan Pelayanan air bersih dengan sistem perpipaan di Kota Solok dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas produksi sumber mata air Pincuran Gadang dengan kapasitas debit air 8,01 liter perdetik;
2. Peningkatan kapasitas produksi sumber mata air Tabek Puyuh dengan kapasitas debit air 25,22 liter perdetik;
3. Peningkatan kapasitas produksi sumber air Tabit dengan kapasitas debit air 18,27 liter perdetik;
4. Peningkatan kapasitas unit produksi IPA KTK dengan kapasitas debit air 80 liter perdetik;
5. Peningkatan kapasitas produksi sumber air Sungai Guntung dengan kapasitas debit air 36,27 liter perdetik;
6. Peningkatan kapasitas produksi sumber air Batang Sumani dengan kapasitas debit air 100 liter per detik;
7. Peningkatan kapasitas produksi sumber air Batang Lembang dengan kapasitas debit air 200 liter per detik;
8. Peningkatan kapasitas produksi sumber air Payo dengan kapasitas debit air 50 liter per detik
9. Pengembangan Jaringan pipa primer berlokasi pada pinggiran jalan Arteri dan Kolektor yang berhubungan langsung dengan sumber air bersih.
10. Pengembangan jaringan pipa sekunder berlokasi pada sepanjang pinggiran jalan Kolektor sekunder dan jalan lokal.

Selain itu dalam menjaga kuantitas dan kualitas sumber air bersih maka perlu dilakukan pengamanan dan pengawasan serta penindakan terhadap kegiatan yang merusak sumber air bersih

2) Sistem Pengelolaan Air Limbah

Sistem Pengelolaan Air limbah bertujuan di Kota Solok bertujuan untuk pengurangan, pemanfaatan kembali, dan pengolahan bagi limbah dari kegiatan permukiman, perkantoran dan kegiatan ekonomi dengan memperhatikan baku mutu limbah yang berlaku.

Rencana pengembangan sistem pengelolaan air limbah di Kota Solok, meliputi :

- a) Sistem pengelolaan air limbah terpusat (*off-site system*) dilakukan pada kawasan perumahan kepadatan tinggi di Kelurahan Koto Panjang; kawasan perdagangan dan



- jasa di Kelurahan PPA, dan kawasan industri di Kelurahan Simpang Rumbio dan Kelurahan Tanah Garam;
- b) Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang terletak di Kelurahan Kampung Jawa
 - c) sistem pengelolaan air limbah setempat (*on-site system*) dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat pada kawasan-kawasan yang belum memiliki sistem terpusat; dan
 - d) Lokasi instalasi pengolahan air limbah harus memperhatikan aspek teknis, lingkungan, sosial budaya masyarakat setempat, serta dilengkapi dengan zona penyangga, berlokasi di Kelurahan Kampung Jawa.

3) Sistem Persampahan

Sistem persampahan di Kota Solok bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Sistem persampahan yang dikembangkan di Kota Solok, meliputi :

- 1) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem lahan urug saniter (*Sanitary Landfill*) berlokasi di Kelurahan Kampung Jawa dengan luas lahan lebih kurang 8,50 Ha;
- 2) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) berlokasi pada kawasan di luar pusat kota;
- 3) Kontainer berlokasi pada kawasan pusat pelayanan kota dan sub pusat pelayanan kota; dan
- 4) Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) dengan konsep 3R (*reduce, reuse, dan recycle*) berlokasi pada koridor jalan-jalan utama yang padat kawasan terbangun.

4) Sistem Drainase

Secara umum Rencana pengembangan saluran pembuangan air hujan (drainase) di Wilayah Kota Solok meliputi :

- a) Rencana saluran Drainase Primer (Badan air penerima) berupa sungai Batang Lembang, Batang Gawan dan Batang Bingung.
- b) Rencana saluran Drainase Sekunder mengikuti kondisi alam (kontur eksisting) dan sebagian mengikuti Pola Jaringan Jalan Arteri dan Kolektor.
- c) Rencana saluran Drainase tersier yang berlokasi pada seluruh jaringan jalan yang akan ditetapkan secara lebih detail dalam rencana induk sistem drainase.

5) Prasarana dan Sarana Pejalan Kaki (Pedestrian)

Rencana prasarana dan sarana pejalan kaki (pendestrian) di Kota Solok bertujuan untuk mengakomodasi pejalan kaki supaya diperolehnya keamanan dan keselamatan pejalan kaki. Rencana pengembangan jalur-jalur pedestrian di Kota Solok tahun 2031, dengan lebar sekurang-kurangnya 1,20 (satu koma dua) meter, adalah untuk mendukung pengembangan sistem pedestrian di kawasan pusat kota dan sub pusat kota, melalui rencana berikut :

- a) Rencana pedestrian sepanjang sisi sungai dari balai kota ke pasar raya Solok
- b) Rencana peningkatan jalur pedestrian eksisting berupa trotoar pada ruas jalan batas kota selayo, smp 1 - simpang laing damar, jalan bypass, jalan lingkar utara, ruas jalan simpang ambacang- batas kota pandan ujung.
- c) Rencana peningkatan fasilitas pedestrian yang sudah ada (berupa trotoar di jalan-jalan di kawasan pusat kota dan sub pusat kota), yang menghubungkan antar kawasan fungsional di pusat kota utamanya kawasan perdagangan, perkantoran, sekolah dan rekreasi/wisata, serta mengkaitkannya dengan lokasi-lokasi perhentian angkutan umum (halte) yang berlokasi di kelurahan kampung jawa, kelurahan koto panjang, kelurahan pasar pandan air mati serta kelurahan simpang rumbio seluas lebih kurang 0,008 hektar; dan
- d) Rencana peningkatan fasilitas pedestrian yang sudah ada (berupa trotoar di jalan-jalan di luar kawasan pusat kota), menghubungkan antar kawasan fungsional sekitar utamanya kawasan perumahan, sekolah dan



rekreasi/wisata, serta mengkaitkannya dengan tempat perhentian angkutan umum (halte) yang berlokasi di kelurahan tanah garam, kelurahan tanjung paku dan kelurahan vi suku seluas lebih kurang 0,007 hektar.

6) Jalur Evakuasi Bencana

Rencana jalur evakuasi bencana di Kota Solok, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Jalur evakuasi bencana gempa bumi diutamakan menggunakan jaringan jalan arteri dan kolektor di Kota Solok yang meliputi :
 - a) Ruas Jalan Imam Bonjol;
 - b) Ruas Jalan KH. Dewantoro;
 - c) Ruas Jalan A. Yani;
 - d) Ruas Jalan Diponegoro;
 - e) Ruas Jalan Lubuk Sikarah;
 - f) Ruas Jalan Proklamasi;
 - g) Ruas Jalan M. Hatta;
 - h) Ruas Jalan Ahmad Dahlan; dan
 - i) Ruas Jalan Nasir ST Pamuncak.
- 2) Jalur evakuasi bencana banjir diutamakan menggunakan ruas jalan Masjid Agung Aro dan jalan Bypass KTK.
- 3) Jalur evakuasi bencana longsor menggunakan jalur jalan Lingkar Utara dan jalan Tanah Garam-Payo.

2. POLA RUANG

1) Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Kota Solok

Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, telah disebutkan bahwa pada dasarnya kelompok utama dari kawasan lindung adalah sebagai berikut:

- a) Kawasan Hutan Lindung; Kawasan Yang Memberikan Pelindungan Kawasan Bawahannya, Antara Lain, Kawasan Bergambut Dan Kawasan Resapan Air;
- b) Kawasan Perlindungan Setempat, Antara Lain, Sempadan Pantai, Sempadan Sungai, Kawasan Sekitar Danau/Waduk, Dan Kawasan Sekitar Mata Air;
- c) Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam, Antara Lain Kawasan Suaka Alam, Kawasan Suaka Alam Laut Dan Perairan Lainnya, Kawasan Pantai Berhutan Bakau, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam, Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Serta Kawasan Cagar Budaya Dan Ilmu Pengetahuan;
- d) Kawasan Rawan Bencana Alam, Antara Lain, Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi, Kawasan Rawan Gempabumi, Kawasan Rawan Tanah Longsor, Kawasan Rawan Gelombang Pasang, Dan Kawasan Rawan Banjir; Dan
- e) Kawasan Lindung Lainnya, Misalnya Taman Buru, Cagar Biosfer, Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah, Kawasan Pengungsian Satwa, Dan Terumbu Karang.

2) Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kota Solok

Penjelasan masing-masing pola ruang kawasan budidaya dan proses penetapannya adalah sebagai berikut:

- a) Kawasan Peruntukan Perumahan; berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana yang berlokasi tersebar pada setiap Kelurahan dengan arahan kepadatan sesuai dengan arahan kepadatan penduduk, yaitu sebagai berikut :
- b) Perumahan kepadatan tinggi pada kawasan sekitar pusat kota (Pusat Pelayanan Kota), yang sebagian besar berlokasi di Kelurahan Koto Panjang, Pasar Pandan Air Mati, Tanjung Paku, Nan Balimo dan Kampung Jawa dengan luas $\pm 352,02$ Ha.
- c) Perumahan kepadatan sedang pada kawasan yang berdekatan dengan pusat pelayanan kota yang berlokasi di Kelurahan Kampung Jawa, Nan Balimo dan Simpang Rumbio dengan luas $\pm 97,99$ Ha.
- d) Perumahan kepadatan rendah berlokasi pada kawasan yang tidak termasuk kawasan sekitar pusat pelayanan kota, yaitu dikembangkan ke arah utara, Barat, dan selatan



Kota Solok. Perumahan kepadatan rendah ini mencapai luas yang dominan, yaitu 1.320,06 Ha.

- 3) **Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa;** berfungsi untuk menyediakan ruang bagi pengembangan sektor ekonomi melalui lapangan usaha perdagangan, pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern serta sektor jasa dengan lahan seluas $\pm 265,74$ Ha berlokasi pada kawasan sebagai berikut :
 - a) Kawasan Pusat Pelayanan kota
 - b) Kawasan Sub Pusat Simpang Rumbio
 - c) Kawasan Sub Pusat Tanah Garam
 - d) Kawasan Sub Pusat Laing
 - e) Seluruh kawasan koridor Jalan kolektor yaitu Jl. Nasir Sutan Pamuncak yang melewati Terminal Bareh Solok;
 - f) Kawasan Koridor Jl. Soekarno – Jl. M Hatta (Jalan Arteri Primer).
- 4) **Kawasan Peruntukan Perkantoran;** berfungsi untuk menyediakan ruang bagi kegiatan perkantoran pemerintah dan perkantoran swasta dengan luas lahan $\pm 23,53$ Ha, yang berlokasi di Kelurahan Laing, Kampung Jawa, Nan Balimo, Pasar Pandan Air Mati, Aro IV Korong, Simpang Rumbio, dan Kampai Tabu Kerambia.
- 5) **Kawasan Peruntukan Industri;** berfungsi untuk menyediakan ruang bagi kegiatan industri meliputi lahan seluas 7,89 Ha, terdiri dari :
 - a) Kawasan peruntukan Industri Kecil dan Mikro berupa industri rumah tangga berlokasi tersebar pada setiap Kelurahan.
 - b) Kawasan peruntukan Industri Menengah berupa industri pengolahan hasil pertanian dan alat-alat pertanian diarahkan pengembangannya di Kawasan Simpang Rumbio dan Tanah Garam.
- 6) **Kawasan Peruntukan Pariwisata;** berfungsi untuk menyelenggarakan jasa pariwisata atau mengusahakan objek dan pariwisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait dengan sektor pariwisata. Kawasan peruntukan pariwisata di Kota Solok terbagi atas 2 jenis obyek wisata berupa jenis obyek wisata alam serta jenis obyek wisata sejarah dan budaya, dengan arahan pengembangan sebagai berikut:
 - a) Kawasan pariwisata alam, berupa Wisata Alam Air Terjun Sarasa Batimpo Indah berlokasi di Kelurahan Laing, Taman Rekreasi Pulau Belibis berlokasi di Kelurahan Kampung Jawa, Panorama Puncak Payo berlokasi di Kelurahan Tanah Garam;
 - b) Kawasan pariwisata budaya, yaitu Makam Syeh Sialahan (Kelurahan KTK), Surau Latiah (Kelurahan KTK), Lesung Batu Inyik Gulambai (Kelurahan Aro IV Korong), Lesung Batu Baiduang (Kelurahan KTK), Batu Laweh Tempat Sujud Syeh Maulana (Kelurahan Tanjung Paku), Gedung SMPN 1 / Bekas HIS (Kelurahan Kampung Jawa), Rumah Gadang Gajah Maaram (Kelurahan KTK), Arena Pacuan Kuda Ampang Kualo (Kelurahan Kampung Jawa), Medan Nan Bapaneh (Kelurahan IX Korong), serta Stasiun KA (Kelurahan Kampung Jawa).
- 7) **Kawasan Peruntukan Pertanian;** berfungsi untuk menjaga keberlangsungan ketersediaan pangan dan lahan pertanian di Kota Solok, meliputi ;
 - a) Kawasan budidaya tanaman pangan pertanian berupa sawah (seluas 490,06 ha); yang lokasinya tersebar di Kelurahan VI Suku, Tanjung Paku, Sinapa Piliang, IX Korong, Kampai Tabu Kerambil, Aro IV Korong, dan Tanah Garam
 - b) Kawasan budidaya hortikultura (seluas 1.171,64 ha), yang lokasinya tersebar Kelurahan Tanah Garam, Laing, Tanjung Paku, Nan Balimo, Kampung Jawa, vi Suku
 - c) Kawasan budidaya peternakan (seluas 10,07 ha), yang lokasinya berada di Kelurahan Tanah Garam dan Kelurahan Kampung Jawa.
- 8) **Kawasan peruntukan lainnya;** berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada kawasan-kawasan yang tidak termasuk dalam kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan Perkantoran, kawasan industri dan kawasan pariwisata, yang terdiri dari



- a) Kawasan TPA sampah dan IPLT dengan luas masing-masing $\pm 8,50$ Ha dan $0,36$ Ha, berlokasi di Kelurahan Kampung Jawa
 - b) Kawasan Pendidikan berlokasi tersebar pada setiap kelurahan dengan luas lahan $\pm 35,43$ Ha;
 - c) Kawasan Peribadatan berlokasi tersebar pada setiap Kelurahan dengan luas lahan $\pm 2,13$ Ha;
 - d) Kawasan Kesehatan berlokasi di kawasan pusat kota dengan luas lahan $\pm 3,56$ Ha;
 - e) Kawasan Prasarana Olahraga utama di Kawasan Laiang dan didukung oleh kawasan lainnya yang tersebar di seluruh wilayah Kota Solok;
 - f) Kawasan Stasiun berlokasi di Kampung Jawa, dengan luas lahan $\pm 0,53$ Ha;
 - g) Kawasan Terminal dengan luas lahan $\pm 3,36$ Ha berlokasi di Simpang Rumbio, kawasan pusat kota dan kawasan Lain
- 9) **Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan** meliputi Kecamatan Tanjung Harapan dan Kec. Lubuk Sikarah dengan luas lahan $\pm 1,09$ Ha;

4.3.2. Pembangunan Daerah Tahap III (2016-2021) dalam RPJPD Kota Solok Tahun 2005-2025

1. Visi RPJPD 2005-2025

Visi pembangunan jangka panjang daerah pada dasarnya merupakan kondisi objektif yang diinginkan dan dapat dicapai oleh masyarakat Kota Solok pada 20 tahun mendatang. Kondisi yang diinginkan tersebut ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi Pemerintah Indonesia, visi misi Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025. Disamping itu, visi tersebut juga ditetapkan dengan memperhatikan keadaan umum daerah dewasa ini, prediksi untuk 20 tahun mendatang dan keinginan, aspirasi serta cita-cita yang berkembang dalam masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, visi ini sebenarnya adalah merupakan kondisi realistis yang diharapkan akan dapat dicapai Kota Solok. Memperhatikan kondisi umum Kota Solok, prediksi 20 tahun mendatang dan berdasarkan hasil penjarangan aspirasi masyarakat, maka visi pembangunan jangka panjang Kota Solok untuk tahun 2025 mendatang dapat diformulasikan secara ringkas sebagai berikut:

"Solok Menjadi Kota Sentra Perdagangan, Jasa dan Pendidikan di Sumatera Bagian Tengah Tahun 2025"

2. Misi RPJPD 2005-2025

Misi pada dasarnya adalah merupakan kondisi yang harus dilaksanakan agar visi yang telah ditetapkan di atas dapat diwujudkan dengan memperhatikan kondisi objektif yang terdapat di daerah dewasa ini. Dengan kata lain misi menunjukkan beberapa upaya utama pembangunan yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan semula. Misi pembangunan daerah dalam RPJPD Kota Solok sampai dengan tahun 2025 ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan perdagangan dan jasa berdaya saing global;
- 2) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas;
- 3) Mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
- 4) Mewujudkan kehidupan beragama dan berbudaya;
- 5) Mewujudkan prasarana dan sarana kota berkualitas;
- 6) Mewujudkan tata ruang dan lingkungan yang sehat.

- 1. Misi untuk mewujudkan usaha perdagangan dan jasa berdaya saing global merupakan unsur penting untuk dapat mendorong kemajuan ekonomi dan kemakmuran masyarakat, terutama



dalam era globalisasi dewasa ini. Usaha ekonomi yang demikian akan dapat diwujudkan dengan menciptakan kondisi persaingan yang sehat dan kondusif dalam dunia usaha, mencegah timbulnya monopoli dan monopsoni serta praktek kegiatan usaha yang tidak adil dan merugikan pihak lain, mengembangkan kewirausahaan daerah, menyediakan prasarana dan sarana ekonomi yang berkualitas secara merata ke seluruh pelosok daerah, dan mewujudkan kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif bagi para investor.

2. Misi untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan prasyarat mutlak untuk dapat mewujudkan kota perdagangan dan jasa yang maju dan mampu bersaing. Sumber daya manusia yang berkualitas tersebut akan dapat diwujudkan melalui tiga pilar utama, yaitu: pendidikan yang bermutu tinggi di semua strata, pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, dan derajat kesehatan yang tinggi dan merata ke seluruh pelosok daerah dan lapisan masyarakat. Termasuk dalam kualitas sumber daya manusia ini adalah adanya disiplin dan etos kerja yang baik, sehingga tingkat efisiensi dan produktivitas tenaga kerja menjadi cukup tinggi, dan terdapatnya kesetaraan gender sehingga tenaga kerja wanita dapat pula dimanfaatkan semaksimal mungkin sesuai dengan keahliannya.
3. Misi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik merupakan persyaratan yang tidak kalah pentingnya untuk dapat mendorong proses pembangunan Solok sebagai kota perdagangan dan jasa. Tata pemerintahan yang baik adalah suatu kondisi pelaksanaan pemerintahan berjalan secara demokratis, taat pada aturan hukum, transparan, dan menerapkan sistem perencanaan, penganggaran, dan pengawasan secara terpadu berlandaskan pada partisipasi masyarakat serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dengan cara demikian, pola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, bersih, berwibawa, dan didukung oleh segenap lapisan masyarakat diharapkan akan dapat diwujudkan.
4. Misi untuk mewujudkan kehidupan beragama dan berbudaya adalah landasan utama kehidupan masyarakat Minangkabau, yang dijadikan sebagai landasan dan upaya utama untuk dapat mewujudkan Solok sebagai Kota Perdagangan dan Jasa. Landasan filosofis ini sudah dimiliki sejak lama oleh masyarakat Kota Solok dan Sumatera Barat umumnya. Ciri-ciri tata kehidupan yang demikian, antara lain adalah: taat beragama, berakhlak mulia, jujur, peduli kepada sesama manusia, menerapkan tata kehidupan beragama dan berbudaya yang baik, rukun dengan agama lain, dan peduli terhadap masa depan dan keselamatan masyarakat dan bumi ciptaan Allah S.W.T.
5. Misi untuk mewujudkan prasarana dan sarana perkotaan berkualitas sangat penting artinya dalam mewujudkan Solok sebagai Kota perdagangan dan jasa. Tidak dapat disangkal, bahwa kegiatan perdagangan dan jasa sangat tergantung pada ketersediaan prasarana dan sarana perkotaan, seperti jalan, terminal, tenaga listrik, air minum, fasilitas telekomunikasi, fasilitas pasar, dan pertokoan. Dengan tersedianya prasarana dan sarana tersebut secara cukup dan berkualitas, usaha perdagangan dan jasa akan dapat dikembangkan dengan lebih cepat dan mempunyai daya saing yang kuat.
6. Misi untuk mewujudkan tata ruang dan lingkungan yang sehat juga tidak kalah pentingnya untuk dapat mewujudkan Solok sebagai kota perdagangan dan jasa yang sejahtera dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Kualitas lingkungan hidup yang baik dan menyenangkan akan dapat diwujudkan melalui pencegahan polusi udara, pencegahan pengotoran air, pengupayaan lingkungan yang bersih dan segar, dan penerapan rencana



tata ruang secara konsekuen. Termasuk dalam hal ini adalah pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan yang dapat diupayakan dengan memelihara kawasan hutan lindung, mencegah eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, memelihara cadangan air, dan meningkatkan konservasi alam.

4.3.3. RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

1. VISI RPJMD 2016-2021

Visi Gubernur Sumatera Barat merupakan gambaran kondisi masa depan yang di cita-citakan dan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2016-2021. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Provinsi Sumatera Barat yang akan diwujudkan pada akhir tahun 2021 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya. Misi Gubernur Sumatera Barat pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. Visi dan Misi menjadi gambaran otentik Provinsi Sumatera Barat dalam 5 tahun (lima) tahun mendatang pada kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk periode RPJMD Tahun 2016-2021. Sesuai dengan visi gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah:

TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Provinsi Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN 2015-2019, dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025. Untuk memahami Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat tersebut jelaskan pengertian sebagai berikut:

Madani Sumatera Barat

Madani adalah suatu masyarakat yang berperadaban tinggi dan maju yang berbasis pada nilai-nilai, norma hukum, moral yang ditopang oleh keimanan. Masyarakat madani menghormati pluralistis, bersikap terbuka dan demokratis serta selalu bergotong royong menjaga kedaulatan negara. Dengan demikian, masyarakat madani tersebut pada dasarnya adalah masyarakat yang agamais yang ditandai oleh adanya keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, lahir dan batin serta material dan sipiritual

Sejahtera Sumatera Barat Sejahtera merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi serta hiburan; terciptanya hubungan antar masyarakat yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian, serta tersedianya prasarana dan sarana publik terkait dengan infrastruktur pelayanan publik, transparansi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpelihara dengan baik. Pemenuhan kebutuhan dasar rakyat bersifat dinamis, dari waktu ke waktu akan mengalami perubahan sesuai dengan aspirasi dan tuntutan yang berkembang di masyarakat. Untuk itu sarana dan prasarana dalam usaha memenuhi kebutuhan dasar harus terus menerus mengikuti dinamika perubahan, serta dibuka ruang yang seluas-luasnya untuk mencapai kemajuan dan perkembangan bagi kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.



2. MISI

Misi pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan dan dilaksanakan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. Berdasarkan pengertian ini maka misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah".
Misi ini diarahkan untuk perubahan sikap mental yang lebih baik sesuai nilai-nilai agama, adat, budaya dan kearifan lokal ditengah kehidupan masyarakat, peningkatan kesalehan sosial, penguatan kelembagaan agama, adat dan budaya.
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional.
Misi ini diarahkan untuk membangun tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi
Misi ini diarahkan untuk membangun sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, berkualitas tinggi, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdaya saing dengan berlandaskan kesetaraan gender.
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah;
Misi ini diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang lebih tinggi dan merata dengan mengembangkan kegiatan ekonomi yang lebih produktif berbasis kerakyatan, mendorong sektor unggulan daerah dan memanfaatkan sumberdaya lokal untuk menghasilkan produk yang berdaya saing.
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.
Misi ini diarahkan untuk penyediaan infrastruktur bagi peningkatan kegiatan ekonomi, pengembangan wilayah dan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan sesuai dengan tata ruang daerah.

4.3.4. Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Prioritas Pembangunan Nasional yang dirumuskan ke dalam 3 Dimensi Pembangunan yaitu sebagai berikut :

1. Dimensi Pembangunan Manusia, terdiri dari :
 - a) Pendidikan
 - b) Kesehatan
 - c) Perumahan
 - d) Mental / Karakter
2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan terdiri dari :
 - a) Kedaulatan Pangan
 - b) Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan
 - c) Kemaritiman dan kelautan
 - d) Pariwisata dan Industri
3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, terdiri dari :
 - a) Antar Kelompok Pendapatan
 - b) Antar Wilayah, Desa, pembangunan luar jawa dan kawasan timur



5. RPJMD Daerah Tetangga

Kota Solok dalam melaksanakan pembangunan tidak dapat berdiri sendiri dan perlu memperhatikan keselarasan pembangunan dengan Kabupaten Solok, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang dan Kabupaten Sijunjung yang bertetangga langsung dengan wilayah Kota Solok. Untuk menjamin keselarasan tersebut perlu memperhatikan visi dan misi keempat kabupaten/kota tetangga tersebut:

1. RPJMD Kabupaten Solok

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016-2021, dengan Visi **TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SOLOK YANG MAJU DAN MANDIRI MENUJU KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG MADANI DALAM NUANSA ADAT BASANDI SYARA“, SYARA“ BASANDI KITABULLAH**, dengan Misi 1) Mensukseskan Program Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun 2) Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, Pembudayaan Hidup Bersih dan Lingkungan Sehat 3) Meningkatkan Peluang dan Akses Ekonomi Masyarakat yang Lebih Luas, didukung oleh Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang Memadai 4) Membangun Karakter Masyarakat sesuai Filosofi „Adat Basandi Syara“, Syara“ Basandi Kitabullah” 5) Memantapkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih.

2. RPJMD Kota Padang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2014-2019 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2014-2019, dengan Visi **Mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata Yang Sejahtera, Religius dan Berbudaya**, dengan Misi 1) Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing 2) Menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan wilayah Barat Sumatera 3) Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan 4) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan 5) Menciptakan Kota Padang yang aman, bersih, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan lokal 6) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.

3. RPJMD Kota Sawahlunto

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018, dengan Visi **“Terwujudnya Masyarakat Kota Sawahlunto yang Produktif, Mandiri, Religius, Sejahtera dan Pemerintahan yang Melayani**, dengan Misi 1) Mengembangkan usaha ekonomi produktif dan menciptakan peluang usaha melalui keunggulan pariwisata dan produk lokal 2) Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah 3) Memupuk kehidupan sosial yang agamis dan berakhlak mulia serta mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan berkarakter 4) Menumbuhkan masyarakat yang berintelektualitas, sehat dan sejahtera yang menguasai berbagai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya 5) Menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih, melayani, kreatif, inovatif dan efisien 6) Mengoptimalkan



pengelolaan dan pemanfaatan potensi daerah 7) Memperluas jaringan sosial, ekonomi secara nasional dan internasional.



BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah adalah visi dan misi kepala daerah yang terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Visi dan misi kepala daerah ini selanjutnya dijadikan dasar utama untuk penyusunan strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah dalam RPJMD ini. Alasannya karena visi dan misi sudah disetujui oleh mayoritas masyarakat Kota Solok yang dibuktikan oleh hasil pemungutan suara dalam Pilkada tahun 2015 yang lalu. Hal ini dilakukan sesuai dengan prinsip pembangunan dalam era demokratisasi dan otonomi yaitu seluruh kebijakan pembangunan daerah harus sesuai dengan keinginan dan aspirasi masyarakat daerah bersangkutan secara keseluruhan.

Visi Pembangunan jangka menengah tidak terlepas dari visi pembangunan jangka panjang. Adapun visi Jangka Panjang Kota Solok menurut RPJPD Kota Solok tahun 2005-2025 adalah “Menjadi Kota Sentra Perdagangan, Jasa dan Pendidikan di Sumatera Bagian Tengah Tahun 2025”. Sedangkan misi pembangunan daerah dalam RPJPD Kota Solok sampai dengan tahun 2025 ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan perdagangan dan jasa berdaya saing global;
- 2) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas;
- 3) Mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
- 4) Mewujudkan kehidupan beragama dan berbudaya;
- 5) Mewujudkan prasarana dan sarana kota berkualitas;
- 6) Mewujudkan tata ruang dan lingkungan yang sehat

Penyusunan visi pembangunan jangka panjang daerah ini dilakukan dengan mengacu pada visi dan misi pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025* dan memperhatikan *Rencana Pembangunan Jangka Panjang* (RPJP) Provinsi Sumatera Barat untuk periode yang sama.

Sedangkan visi pembangunan jangka menengah daerah pada dasarnya adalah kondisi masyarakat yang diharapkan dapat diwujudkan melalui kegiatan pembangunan dalam periode 5 tahun mendatang. Visi tersebut harus ditetapkan secara realistis dengan memperhatikan kondisi masyarakat dewasa ini serta kemampuan daerah untuk mewujudkan visi tersebut dimasa mendatang. Karena itu, visi haruslah bersifat kongkrit, realistis dan tidak muluk-muluk sesuai dengan kondisi dan kemampuan warga kota dan pemerintah daerah setempat.

Visi Walikota dan Wakil Walikota Solok terpilih dalam pemilihan kepala daerah (PILKADA) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 yang lalu adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA SOLOK YANG BERIMAN, BERTAQWA DAN SEJAHTERA MENUJU KOTA PERDAGANGAN, JASA SERTA PENDIDIKAN YANG MAJU DAN MODERN”

Dari visi tersebut terlihat bahwa terdapat 4 ciri pokok yang masa depan kondisi masyarakat kota Solok yang diharapkan dapat diwujudkan dalam periode 5 tahun mendatang. yaitu:



1. Masyarakat yang *beriman dan bertaqwa* adalah masyarakat yang tatanan kehidupannya berlandaskan pada tuntunan agama Islam. Ini berarti bahwa warga kota yang diharapkan adalah yang taat menjalankan syariat Islam dalam seluruh segi kehidupan bermasyarakat. Tata kehidupan masyarakat yang demikian ditandai oleh moral dan akhlak yang baik berdasarkan ketentuan agama, peduli sosial dan hidup rukun dengan seluruh warga masyarakat termasuk yang beragama non Islam. Dengan kata lain warga kota yang diharapkan dimasa mendatang adalah masyarakat selalu menjaga keseimbangan antara hubungan dengan Tuhan dan dengan sesama warga Kota Solok yang madani;
2. Masyarakat yang *sejahtera* adalah warga kota yang memenuhi paling kurang tiga unsur penting dalam kehidupan, yaitu berpenghasilan cukup, berbadan sehat dan terdidik. Indikasi masyarakat yang berpenghasilan cukup ditandai oleh terus berkurangnya jumlah penduduk miskin dalam masyarakat. Berbadan sehat ditandai oleh derajat kesehatan masyarakat yang semakin tinggi dan terus menurunnya jumlah penderita sakit. Sedangkan masyarakat terdidik ditandai oleh terlaksananya wajib belajar 12 tahun dan meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat secara menyeluruh;
3. Menuju *kota perdagangan dan jasa* berarti bahwa masa depan kegiatan ekonomi kota diharapkan menjadi kota yang didominasi oleh kegiatan perdagangan dan jasa. Ini berarti bahwa orientasi kehidupan ekonomi kota adalah pada kegiatan bisnis yang mampu bersaing dalam era globalisasi dan persaingan bebas dewasa ini;
4. *Pendidikan yang maju dan modern* berarti bahwa karakteristik sumberdaya kota yang diharapkan terwujud di Kota Solok ke depan adalah yang berpendidikan tinggi yang mampu mengikuti percepatan kemajuan *Ilmu Pengetahuan dan Teknologi* (IPTEK). Pendidikan yang maju tersebut ditandai oleh terdistribusinya kegiatan pendidikan secara merata keseluruhan lapisan warga kota dengan kualitas yang cukup tinggi.

5.2. Misi

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Untuk mencapai visi tersebut, Walikota Solok menyusun misi sebagai berikut:

Tabel 5.1. Keterkaitan Visi dan Misi Daerah

Visi	Misi
Terwujudnya Masyarakat Kota Solok Yang Beriman, Bertaqwa Dan Sejahtera Menuju Kota Perdagangan, Jasa, Serta Pendidikan Yang Maju dan Modern	1. Mewujudkan Kehidupan masyarakat yang berlandaskan <i>ABS-SBK "Syara' Mangato Adaik Mamakai"</i> .
	2. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Reformasi Birokrasi
	3. Mewujudkan Pendidikan dan Kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang Berkualitas Untuk Menghasilkan Sumberdaya manusia dan generasi muda yang Beriman, sehat, cerdas, kreatif, tangguh dan Berdaya Saing



Visi	Misi
	4. Menjadikan Kota Solok Sebagai Pusat Perdagangan Hasil-Hasil Pertanian, Perkebunan dan Ekonomi Kerakyatan yang Tangguh Berbasis Potensi Unggulan Daerah Melalui Perdagangan, Pariwisata dan Jasa Lainnya Serta Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif
	5. Menekan Angka Kemiskinan dan Mengurangi Permasalahan Sosial lainnya
	6. Mewujudkan Pembangunan Prasarana dan Sarana yang Berwawasan Lingkungan

5.3. Tujuan dan Sasaran

5.3.1. Tujuan Umum

Tujuan pembangunan secara umum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang secara makro dapat dilihat dari peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan derajat kesehatan, tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan merata, penurunan kesenjangan pembangunan antar wilayah dan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran pembangunan ekonomi secara makro dalam RPJMD Kota Solok Tahun 2016 – 2021 dapat dikemukakan melalui proyeksi sejumlah indikator ekonomi makro dan indikator kesejahteraan sosial, seperti terlihat dalam tabel 5.2. dibawah ini :

Tabel 5.2.
Proyeksi Perkembangan Ekonomi Kota Solok Tahun 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2015)	Proyeksi					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,97	5,95	6,10	6,20	6,30	6,40	6,50
2	PDRB Harga Konstan	(Rp.Juta)	2.307.302,87	2.440.002,52	2.588.842,67	2.749.350,92	2.922.560,03	3.109.603,87	3.311.728,12
3	PDRB harga Berlaku	(Rp.Juta)	2.964.009,38	3.238.355,21	3.626.957,84	4.062.192,78	4.549.655,91	5.095.614,62	5.707.088,37
4	PDRB/Kapita	(Rp.Juta)	44,84	48,11	52,85	58,11	63,91	70,32	77,39
5	Investasi	(Rp.Milyar)	284,435	319,415	338,580	358,895	380,429	403,254	427,450
6	Jumlah Penduduk	Orang	65.157	65.495	66.795	68.095	69.395	70.695	71.995
7	Indeks Gini	%	0,303	0,293	0,290	0,280	0,275	0,270	0,265
8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks (%)	76,83	77,07	77,51	77,95	78,39	78,83	79,27
9	Tingkat Kemiskinan	%	4,12	4,01	3,74	3,48	3,22	2,95	2,69
10	Tingkat Pengangguran	%	4,72	4,51	4,30	4,09	3,88	3,67	3,46



Dari Tabel 5.2 dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sebesar 5,75% dan pada tahun 2021 diperkirakan sebesar 6,50%. Sedangkan PDRB perkapita juga ditargetkan mengalami peningkatan yaitu dari Rp. 45.51 juta pada tahun 2016 menjadi Rp. 63.35 juta pada tahun 2021. Berkaitan dengan investasi sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi diharapkan juga mengalami peningkatan.

5.3.1. Tujuan Pembangunan Menurut Misi

Pada dasarnya tujuan mengandung makna sebagai penjabaran/implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran mengandung makna sebagai penjabaran dari tujuan, merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Berikut ini adalah penjabaran tujuan dan sasaran dari masing-masing misi.

Tabel 5.3
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Kota Solok

VISI Terwujudnya Masyarakat Kota Solok Yang Beriman, Bertaqwa Dan Sejahtera Menuju Kota Perdagangan, Jasa, Serta Pendidikan Yang Maju dan Modern		
MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 1: Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat Berlandaskan ABS-SBK "Syara' Mangato Adaik Mamakai"	Meningkatkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan agamais	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat
		Meningkatnya keluarga sakinah mawaddah wa rahmah
	Meningkatkan aplikasi adat dan budaya dalam kehidupan masyarakat	Meningkatnya peran lembaga adat
		Meningkatnya pelestarian adat dan budaya
Misi 2: Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Reformasi Birokrasi	Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Professional dan Akuntabel Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih
Misi 3: Mewujudkan Pendidikan dan Kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang Berkualitas Untuk Menghasilkan Sumberdaya manusia dan generasi muda yang Beriman, sehat, cerdas, kreatif, tangguh dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang beriman, sehat, kreatif dan berdaya saing	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat dan pemerataan kualitas pendidikan
		Meningkatnya prestasi olahraga dan partisipasi generasi muda dalam pembangunan
		Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
		Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak



VISI Terwujudnya Masyarakat Kota Solok Yang Beriman, Bertakwa Dan Sejahtera Menuju Kota Perdagangan, Jasa, Serta Pendidikan Yang Maju dan Modern		
MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 4: Menjadikan Kota Solok Sebagai Pusat Perdagangan Hasil-Hasil Pertanian, Perkebunan dan Ekonomi Kerakyatan yang Tangguh Berbasis Potensi Unggulan Daerah Melalui Perdagangan, Pariwisata dan Jasa Lainnya Serta Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif	Meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah berbasis ekonomi kerakyatan
		Meningkatnya daya saing daerah
		Meningkatnya daya tarik wisata
	Meningkatkan ketahanan dan diversifikasi konsumsi pangan	Meningkatnya ketahanan pangan
		Meningkatnya keragaman konsumsi pangan
	Meningkatkan investasi dan lapangan kerja	Meningkatnya nilai investasi
		Meningkatnya penyediaan lapangan kerja
Misi 5: Menekan Angka Kemiskinan dan Mengurangi Permasalahan Sosial lainnya	Berkurangnya penduduk miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Menurunnya penduduk miskin
		Meningkatnya akses dan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), serta menurunnya Penyakit Masyarakat (PEKAT)
Misi 6: Mewujudkan Pembangunan Prasarana dan Sarana yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan prasarana dan sarana kota yang berkualitas	Meningkatnya prasarana dan sarana kota yang berkualitas
		Meningkatnya Kualitas Perumahan dan kawasan Permukiman (Air Minum, Sanitasi, dan Prasarana, Sarana dan utilitas Kawasan Permukiman
		Meningkatkan ketersediaan sumber daya air irigasi
		Menurunnya luasan genangan banjir
	Meningkatkan pelaksanaan tata ruang yang baik dan berkelanjutan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Selanjutnya Indikator dan target kinerja RPJMD Kota Solok Tahun 2016 – 2021 untuk setiap misi dan sasaran yang ingin dicapai dapat dilihat pada Tabel 5.4.



Tabel 5.4
Target dan Indikator Kinerja RPJMD Kota Solok Tahun 2016 – 2021

Misi I : Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat Berlandaskan ABS-SBK “Syara’ Mangato Adaik Mamakai”

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja Sasaran						OPD
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Meningkatkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan agamais	1 Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	- Pertumbuhan nilai zakat	%	30	30	35	40	50	55	60	Bag. Kesra Setda
		- Jumlah penduduk yang sudah haji	Orang	532	638	738	838	938	1038	1138	Bag. Kesra Setda
		- Jumlah penduduk yang hafizh Al-Qur'an (1 juz sampai 30 juz)	Orang	390	490	1090	1690	2290	2890	3.500	Bag. Kesra Setda
		- Jumlah masjid yang mempunyai BMT, TPA/MDA, Perpustakaan, Majelis Ta'lim, Remaja Masjid	Masjid	2	2	12	22	32	42	52	Bag. Kesra Setda
	2 Meningkatnya keluarga sakinah mawaddah wa rahmah	- Angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	Jumlah	33	15	14	13	12	11	10	Dinas PPPA
2 Meningkatkan aplikasi adat dan budaya dalam kehidupan masyarakat	1 Meningkatnya peran lembaga adat	- Persentase peran lembaga adat	%	60	65	70	75	80	85	90	Dinas Pariwisata
	2 Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	- Penggiat seni budaya	Jumlah Klp	10	15	20	25	25	25	30	Dinas Pariwisata
		- Penggiat adat dan budaya	Jumlah Klp	45	43	48	52	57	62	64	Dinas Pariwisata



Tujuan dari misi pertama ini adalah untuk Meningkatkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan agamaiserta meningkatkan aplikasi adat dan budaya dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dilatarbelakangi oleh posisi Kota Solok yang terletak di persimpangan jalan utama dari beberapa daerah di dalam Provinsi Sumatera Barat. Posisi Kota Solok yang menjadi daerah perlintasan ini sangat berpotensi untuk masuknya pengaruh-pengaruh dari luar yang berdampak pada lunturnya nilai-nilai adat dan budaya lokal. Selain itu berdasarkan perkembangan pembangunan Kota Solok beberapa tahun terakhir, diperkirakan masyarakat Kota Solok berpotensi menjadi masyarakat yang multikultur, karena kehidupan kota yang sangat terbuka terhadap kedatangan berbagai kelompok masyarakat dari wilayah lain, baik dari dalam Provinsi Sumatera Barat atau dari daerah lain di Indonesia secara langsung ataupun tidak langsung akan turut mewarnai kehidupan sosial, adat dan budaya. Dalam kondisi sosial yang beranekaragam tersebut, sikap toleran antar masyarakat yang multikultur sangat diperlukan. Perbedaan latar belakang agama, kebudayaan dan asal usul perlu disatukan dengan Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya.

Untuk mewujudkan misi I ini maka sasaran yang perlu dicapai 5 tahun yang akan datang adalah:

1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat;

Untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat dilakukan dengan strategi meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai - nilai keagamaan dan pelayanan kehidupan beragama yang ditandai dengan Pertumbuhan nilai zakat, Jumlah penduduk usia 25 th ke atas yang sudah haji, Jumlah penduduk yang hafizh Al-Qur'an (1 juz sampai 30 juz) dan Jumlah masjid yang mempunyai BMT, TPA/MDA, Perpustakaan, Majelis Ta'lim, Remaja Masjid.

2. Meningkatnya keluarga sakinah mawaddah wa rahmah;

Keluarga sakinah mawaddah wa rahmah dapat diwujudkan dengan mengimplementasikan keharmonisan kehidupan rumah tangga dan kehidupan bermasyarakat yang ditandai dengan berkurangnya angka perceraian dan angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

3. Meningkatnya peran lembaga adat;

Untuk meningkatkan peran lembaga adat akan diwujudkan dengan mengembangkan kelompok peserta pendidikan adat di masyarakat sehingga pelaku dan lembaga adat semakin kuat sesuai dengan fungsinya.

4. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya

Untuk meningkatkan pelestarian adat dan budaya diwujudkan dengan melestarikan dan menjaga warisan adat dan budaya dengan meningkatkan apresiasi terhadap keragaman seni dan kreatifitas karya budaya. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penggiat seni, adat dan budaya daerah.



Tabel 5.5
Target dan Indikator Kinerja RPJMD Kota Solok Tahun 2016 – 2021

Misi II. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Reformasi Birokrasi

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja Sasaran						OPD
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1. Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Professional dan Akuntabel Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik	- Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	NA	Baik	Baik	Baik	Baik	Amat Baik	Amat Baik	SETDA (Bag. Organisasi)
		- Persentase Pengaduan Masyarakat tentang Pelayanan Publik yang Ditindaklanjuti (Lapor Sistem Pelaporan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional)	%	-	-	100	100	100	100	100	Dinas Kominfo
	2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih	- Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Nilai	CC	CC	B	BB	BB	A	A	SETDA (Bag. Organisasi)
		- Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Nilai	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SETDA (Bag. Pemerintahan)
		- Opini BPK	Opini	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BKD
		- Tingkat kematangan implementasi SPIP	Level	Level 1	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Inspektorat
		- Indeks <i>e-government</i>	Nilai	-	-	1,5	2	2,5	3	3,5	Dinas Kominfo



Tujuan yang ditetapkan untuk merealisasikan Misi ke Dua ini adalah dengan Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Professional dan Akuntabel Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta Reformasi Birokrasi merupakan dasar pencapaian misi Walikota Solok yang lainnya. Sikap mental dan penerapan etika yang baik serta penghayatan terhadap tugas fungsi dan tanggung jawab setiap aparatur sipil negara (ASN) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, mutlak dibutuhkan sebagai wujud tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Kinerja aparatur pemerintah harus dapat diukur. Keterlibatan aktif masyarakat dalam berpartisipasi dan mengawal pembangunan sangat diperlukan, sebagai langkah untuk membangun komposisi pemerintahan yang baik dan bersih, selain itu juga diperlukan penyediaan prasarana dan sarana yang memadai dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut.

Untuk mewujudkan tujuan dari Misi II ini telah dirumuskan melalui 3 (tiga) sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Untuk mewujudkan peningkatan pelayanan prima adalah dengan upaya terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan profesionalisme aparatur serta penerapan *e-government*. Disamping itu juga perlu mengembangkan sistem informasi manajemen pemerintah daerah dengan pengukuran melalui indek kepuasan masyarakat. Sedangkan respon dengan semua upaya pelayanan yang telah dilakukan akan tercermin dari tingkat indeks kepuasan masyarakat yang pada akhir periode RPJMD ini dapat dinilai Amat Baik.

2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Untuk mewujudkan sasaran ke dua ini yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan melaksanakan prinsip pemerintahan yang transparan, akuntabel. Karakteristik ini akan tercermin dari gerak langkah pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan, keuangan dan asset daerah, meningkatkan sistem dan manajemen pengawasan internal pemerintah daerah serta meningkatkan kapasitas produk hukum daerah. Kerja keras dan upaya yang dilakukan pemerintah Kota Solok berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian BPK diharapkan dapat memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sasaran ini juga ditujukan untuk peningkatan kualitas kelembagaan daerah, penataan ketatalaksanaan instansi pemerintah, peningkatan kualitas dan pengendalian perencanaan daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat dan stakeholder dalam pembangunan. Disamping itu juga meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah daerah serta meningkatkan peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam pemeliharaan keamanan/ketertiban umum dan peningkatan dalam penanggulangan bencana yang terjadi di daerah, berbagai upaya yang dilaksanakan tersebut akan terlihat dari hasil penilaian/evaluasi Laporan Kinerja (LKj) yang diharapkan pada akhir periode RPJMD akan memperoleh nilai B serta hasil evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dengan kategori sangat tinggi.



Tabel 5.6
Target dan Indikator Kinerja RPJMD Kota Solok Tahun 2016 – 2021

Misi III. Mewujudkan Pendidikan dan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang Berkualitas Untuk Menghasilkan Sumberdaya manusia dan generasi muda

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja sasaran						OPD
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang beriman, sehat, kreatif dan berdaya saing	1 Meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat dan pemerataan kualitas pendidikan	- Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,77	10,78	10,79	10,81	10,82	10,84	10,85	Dinas Pendidikan
		- Persentase sekolah dengan rata-rata hasil UN									Dinas Pendidikan
		- SD ($\geq 7,7$)	%	42,22	46,67	53,33	60,00	66,67	73,33	80,00	
		- SMP ($\geq 6,0$)	%	14,29	14,29	28,57	42,86	57,14	71,43	85,71	
		- SMA/MTs	%	36,36	36,36	45,45	-	-	-	-	
	2 Meningkatkan prestasi olahraga dan partisipasi generasi muda dalam pembangunan	- Jumlah Organisasi kepemudaan yang aktif	organisasi	23	23	24	24	25	25	26	Dispora
		- Jumlah Atlit Berprestasi tingkat provinsi dan Nasional	orang	18	73	20	79	24	90	28	Dispora
	3 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	- Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	72,74	72,83	72,92	73,01	73,10	73,19	73,28	Dinas Kesehatan
		- Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1000 KH	7	12,5	9	9	9	8	8	
		- Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	75	166	75	75	75	75	75	
	4. Meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	- Index Pembangunan Gender (IPG)	%	95,45	95,9	96,4	96,8	97,2	97,6	98	Dinas PPPA
		- Index Pemberdayaan Gender (IDG)	%	64,07	64,77	65,42	66,25	67,09	67,94	68,81	Dinas PPPA
		- Predikat evaluasi kota layak anak	predikat	0	0	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Nindya	Dinas PPPA

** : Kewenangan pendidikan SMA/SMK dilimpahkan ke propinsi mulai tahun 2017



Tujuan dari misi III ini adalah untuk Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang beriman, sehat, kreatif dan berdaya saing. Hal ini perlu diwujudkan karena Sumberdaya manusia yang berkualitas merupakan prasyarat mutlak untuk dapat menjadikan Kota Solok yang maju dan mampu bersaing dengan daerah lain. Sumberdaya manusia yang berkualitas tersebut akan dapat diwujudkan melalui pendidikan yang bermutu tinggi disemua tingkatan, pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan derajat kesehatan yang tinggi dan merata keseluruh lapisan masyarakat.

Untuk mewujudkan misi III ini maka sasaran yang perlu dicapai 5 tahun yang akan datang adalah:

1. Meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat dan pemerataan kualitas pendidikan

Untuk meningkatkan pendidikan masyarakat dan pemerataan kualitas pendidikan dilakukan dengan peningkatan rata-rata lama sekolah serta diperolehnya peningkatan hasil UN.

2. Meningkatkan prestasi olahraga dan partisipasi generasi muda dalam pembangunan

Untuk meningkatkan partisipasi generasi muda dalam pembangunan diwujudkan dengan peningkatan pelayanan kepemudaan yang berkualitas untuk menumbuhkan jiwa patriotisme, budaya prestasi, dan profesionalitas, serta untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan, serta dengan meningkatkan budaya olahraga dan prestasi olahraga di tingkat daerah, regional dan nasional di kalangan generasi muda. Peningkatan partisipasi generasi muda dalam bidang pembangunan dapat dilihat dari jumlah organisasi kepemudaan yang aktif.

3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dilakukan dengan Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat untuk hidup sehat, Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB serta kesejahteraan keluarga. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat ini ditandai dengan meningkatnya usia harapan hidup, semakin menurunnya angka kematian ibu melahirkan, menurunnya angka kematian bayi, prevelensi kekurangan gizi pada balita dan berbagai indikator lainnya.

4. Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Dalam meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat diwujudkan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender dan Predikat Kota Layak Anak.



Tabel 5.7
Target dan Indikator Kinerja RPJMD Kota Solok Tahun 2016 – 2021

Misi IV. Menjadikan Kota Solok Sebagai Pusat Perdagangan Hasil-Hasil Pertanian, Perkebunan dan Ekonomi Kerakyatan yang Tangguh Berbasis Potensi Unggulan Daerah Melalui Perdagangan, Pariwisata dan Jasa lainnya Serta Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja Sasaran						OPD
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1. Meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan	1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah berbasis ekonomi kerakyatan	- Pertumbuhan sektor industri dalam PDRB Kota Solok	%	2,26	3,04	3,43	3,63	3,72	3,77	3,80	Disdag KUKM
		- Pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB Kota Solok	%	5,65	6.30	6.30	6.63	6,79	6,87	6,91	Disdag KUKM
		- Pertumbuhan sektor pertanian dalam PDRB Kota Solok	%	2,26	2,43	2,51	2,55	2,57	2,58	2,58	Dinas Pertanian
		- Peningkatan produksi komoditi padi	%	1.06	1.06	3.31	3.78	4.24	4.53	5.26	Dinas Pertanian
	2. Meningkatnya daya saing daerah	- Volume Perdagangan	Rp. (Juta)	578,905.08	615,382.17	654,157.70	697,511.68	744,877.29	796,067.16	851,099.72	Disdag KUKM
	3. Meningkatnya daya tarik wisata	- Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	112.358	125.000	150.000	175.000	250.000	275.000	300.000	Dinas Pariwisata
2. Meningkatkan ketahanan dan diversifikasi konsumsi pangan	1. Meningkatnya ketahanan pangan	- Ketersediaan pangan Utama	ton	10.184	10.194	10.204	10.214	10.224	10.234	10.244	Dinas Pangan
	2. Meningkatnya keragaman konsumsi pangan	- Skor pola pangan harapan	Nilai	80	81	82	83	84	85	86	Dinas Pangan



Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja Sasaran						OPD
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
3. Meningkatkan investasi dan lapangan kerja	1. Meningkatnya nilai investasi	- Total nilai Investasi	Rp. (000.000)	284.435	319.415	338.580	358.895	380.429	403.254	427.450	DPM-PTSP
	2. Meningkatnya penyediaan lapangan kerja	- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,72	4,51	4,30	4,09	3,88	3,67	3,46	DPM-PTSP



Tujuan dari Misi keempat ini adalah Meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan, meningkatkan ketahanan dan diversifikasi konsumsi pangan serta meningkatkan investasi dan lapangan kerja. Hal ini dilatar belakangi oleh belum optimalnya pemanfaatan posisi strategis Kota Solok, prasarana, sarana utilitas kota dalam pengembangan potensi ekonomi, pariwisata, peningkatan daya saing daerah serta nilai tambah produk UKM dan industri untuk mewujudkan Solok sebagai Kota perdagangan dan jasa. Disamping itu tingginya ekspektasi masyarakat terhadap Kota Solok yang maju dalam bidang perdagangan dan jasa, sehingga menuntut pemerintah agar menggerakkan perekonomian Kota Solok terutama di sektor perdagangan. Hal ini juga membutuhkan campur tangan stakeholders perekonomian untuk terus menggali ide, pengetahuan, dan teknologi yang dibutuhkan agar mampu menumbuhkan kembangkan sektor – sektor penggerak ekonomi di Kota Solok.

Untuk itu, pengembangan sektor perdagangan, industri, koperasi dan UKM, pertanian, pariwisata adalah jawaban untuk pencapaian misi tersebut. Adapun sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan adalah :

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah berbasis ekonomi kerakyatan

Ekonomi rakyat yang tangguh ditandai dengan terjadinya peningkatan pertumbuhan sektor yang terkait langsung dengan ekonomi rakyat, yaitu perdagangan, industri dan pertanian. Adapun strategi pembangunan RPJMD pada misi keempat ini mengamanatkan kepada peningkatan prasarana dan sarana pertanian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah lainnya. Pemberdayaan tersebut sangat erat kaitannya dengan upaya meningkatkan kemampuan keunggulan lokal. Strategi untuk melaksanakan Misi keempat ini juga mengamanatkan pelaksanaan kebijakan untuk memberdayakan dan meningkatkan industri dan pertanian.

2. Meningkatnya daya saing daerah

Peningkatan daya saing daerah pada periode ini lebih focus ditunjukkan dengan peningkatan volume perdagangan. Untuk strategi peningkatan prasarana dan sarana daerah akan menjadi prioritas, sehingga visi untuk menjadikan Kota Solok sebagai Kota Perdagangan akan dapat diwujudkan. Sampai tahun 2021 ditargetkan volume perdagangan dapat dicapai sebesar Rp. 851.099.720.000,-.

3. Meningkatnya daya tarik wisata

Meningkatnya daya Tarik pariwisata dapat dilihat dari meningkatnya kunjungan wisata. Kedepan, potensi wisata akan terus dioptimalkan sehingga target kunjungan wisatawan pada akhir RPJMD sebanyak 300.000 orang dan tingkat hunian hotel sebanyak 46.795 kamar/tahun tercapai. Untuk mendukung target tersebut, pemerintah daerah bersama stakeholder pariwisata akan menyiapkan rencana di antaranya melanjutkan pembangunan prasarana dan sarana objek wisata dengan ciri dan daya tarik sendiri dan melakukan promosi wisata.

4. Meningkatnya ketahanan pangan

Salah satu indikator untuk melihat ketahanan pangan suatu daerah adalah dari ketersediaan pangan daerah. Peningkatan ketahanan pangan merupakan prioritas utama dalam pembangunan, karena pangan merupakan kebutuhan yang paling dasar bagi manusia. Ketahanan pangan diartikan dengan tersedianya pangan dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan harga terjangkau dan aman dikonsumsi bagi setiap warga untuk menopang aktivitasnya sehari-hari sepanjang waktu. Untuk itu, sampai tahun 2021 ditargetkan tingkat ketersediaan pangan di Kota Solok adalah sebesar 10.244 ton.



5. Meningkatnya keragaman konsumsi pangan

Meningkatnya keragaman konsumsi pangan ditandai dengan meningkatkan skor pola pangan harapan (PPH). Pola pangan harapan mencerminkan susunan konsumsi pangan yang dijadikan sebagai anjuran untuk hidup sehat, aktif dan produktif. Dengan pendekatan PPH dapat dinilai mutu pangan berdasarkan skor pangan dari 9 bahan pangan. Konsumsi pangan dipengaruhi oleh ketersediaan pangan, yang pada tingkat makro ditunjukkan oleh tingkat produksi nasional dan cadangan pangan yang mencukupi dari pada tingkat regional sedangkan untuk tingkat lokal ditunjukkan oleh tingkat produksi dan distribusi pangan. Ketersediaan pangan sepanjang waktu, dalam jumlah yang cukup dan terjangkau sangat menentukan tingkat konsumsi pangan di tingkat rumah tangga. Sampai Tahun 2021 skor PPH ditargetkan poinnya sebesar 90.

6. Meningkatnya nilai investasi

Untuk menciptakan realisasi investasi yang baik diperlukan sebuah iklim investasi yang kondusif. Iklim investasi yang kondusif dalam perekonomian merupakan harapan bagi masyarakat, investor, pelaku usaha dan pemerintah. Penciptaan iklim investasi yang kondusif tidak hanya berdasarkan faktor ekonomi saja seperti suku bunga, inflasi, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDB), upah minimum, dan nilai tukar. Namun faktor-faktor non-ekonomi lainnya juga sangat berpengaruh, seperti kemudahan perizinan usaha, kestabilan politik, penegakkan hukum, masalah kepastian kepemilikan lahan usaha, tingkat kriminalitas dalam masyarakat, demonstrasi buruh, komitmen pemerintahan, komitmen perbankan, perpajakan, dan infrastruktur. Untuk itu lima tahun ke depan regulasi tentang penanaman modal dan penyelesaian masalah pertanahan akan menjadi prioritas sehingga target nilai investasi sebesar Rp. 427.450.197.986,- pada akhir RPJMD dapat direalisasikan.

7. Meningkatnya penyediaan lapangan kerja

Meningkatnya penyediaan lapangan kerja merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan perekonomian daerah. Fasilitas terhadap akses informasi bursa tenaga kerja dan peningkatan keterampilan masyarakat menjadi prioritas lima tahun kedepan sehingga target tingkat pengangguran terbuka pada akhir tahun RPJMD sebesar 3,46% dapat direalisasikan.



Tabel 5.8
Target dan Indikator Kinerja RPJMD Kota Solok Tahun 2016 – 2021

Misi V. Menekan Angka Kemiskinan dan Mengurangi Permasalahan Sosial lainnya

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja Program						OPD
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Berkurangnya penduduk miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	1 Menurunnya penduduk miskin	- Angka Kemiskinan	%	4,12	4,01	3,74	3,48	3,22	2,95	2,69	Dinas Sosial
	2 Meningkatnya akses dan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), serta menurunnya Penyakit Masyarakat (PEKAT)	- Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	orang	4863	4927	4681	4447	4224	4013	3812	Dinas Sosial
		- Jumlah kasus PEKAT	kasus	40	31	27	23	19	16	14	Dinas Satpol PP Damkar



Posisi Kota Solok yang terletak di persimpangan jalan utama beberapa kota besar di dalam Provinsi Sumatera Barat berpotensi terhadap peningkatan angka kemiskinan dan munculnya berbagai masalah sosial lainnya. Hal ini menjadi isu strategis yang perlu mendapat perhatian serius di Kota Solok.

Misi ke-5 Walikota dan Wakil Walikota Solok periode 2016-2021 melakukan upaya untuk menekan angka kemiskinan dan mengurangi permasalahan sosial lainnya di Kota Solok. Tujuan dari misi ini adalah Berkurangnya penduduk miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Penyakit Masyarakat (PEKAT).

Sasaran yang hendak dicapai dari tujuan diatas untuk periode 2016-2021 adalah :

1. Menurunnya penduduk miskin

Kualitas ekonomi masyarakat miskin disuatu daerah dapat ditandai dengan tingkat kemiskinan daerah tersebut. Angka kemiskinan yang rendah merupakan indikator bahwa pemerintah berhasil dalam mensejahterakan sebagian besar warganya. Untuk menekan tingkat kemiskinan, Pemerintah Kota Solok akan melakukan intervensi program-program yang menjadikan masyarakat miskin sebagai sasarannya. Sampai tahun 2021 ditargetkan angka kemiskinan di Kota Solok menurun dari 4,12% pada tahun 2015 menjadi 2,69% pada tahun 2021.

2. Meningkatnya akses dan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), serta menurunnya Penyakit Masyarakat (PEKAT).

Permasalahan kesejahteraan sosial dan penyakit masyarakat merupakan masalah yang akan selalu muncul di wilayah perkotaan. Upaya Pemerintah Kota Solok dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah meningkatkan kualitas hidup dan akses PMKS, disabilitas dan lanjut usia, melalui pengembangan sarana dan prasarana sosial, meningkatkan pembinaan, penguatan lembaga, pemberdayaan kelembagaan sosial dan peningkatan kapasitas pekerja sosial. Sementara untuk menurunkan penyakit masyarakat, pemerintah akan meningkatkan sistem penanganan terpadu yang melibatkan partisipasi masyarakat melalui koordinasi, penyusunan regulasi, penguatan, pemantauan dan pengendalian serta penegakan peraturan terkait penanganan PMKS dan penyakit masyarakat.



Tabel 5.9
Target dan Indikator Kinerja RPJMD Kota Solok Tahun 2016 – 2021

Misi VI. Mewujudkan Pembangunan Prasarana dan Sarana yang Berwawasan Lingkungan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja Sasaran						OPD
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1. Meningkatkan prasarana dan sarana kota yang berkualitas	1. Meningkatnya prasarana dan sarana kota yang berkualitas	- Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	87,99	91	92	93	94	95	96	Dinas PUPR
	2. Meningkatnya Kualitas Perumahan dan kawasan Permukiman (Air Minum, Sanitasi, dan Prasarana, Sarana dan utilitas Kawasan Permukiman	- Persentase Penduduk Berakses sanitasi	%	79,85	81	82	83	84	85	86	Dinas Perkim
		- Persentase Penduduk Berakses Air bersih/air minum	%	82,26	83	85	87	90	92	95	Dinas Perkim
		- Persentase Luasan Permukiman Kumuh	%	2,92	2,92	2,57	2,22	1,87	1,53	1,18	Dinas Perkim
	3. Meningkatkan ketersediaan sumber daya air irigasi	- persentase areal sawah yang terairi dengan baik	%	85	85	85,75	86,5	87	87,5	88	Dinas PUPR
2. Meningkatkan pelaksanaan tata ruang yang baik dan berkelanjutan	4. Menurunnya luasan genangan banjir	- % pengurangan luasan genangan akibat banjir	%	7,93	6,93	5,93	4,93	3,93	2,93	1,93	Dinas PUPR
	1. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	- Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	%	NA	75,94	77	79	81	83	85	Dinas PUPR



Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja Sasaran						OPD
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Indeks kualitas lingkungan hidup	%	NA	NA	48	50	55	58	61	Dinas Lingkungan Hidup
		- Persentase luasan RTH publik	%	17,16	17,16	17,20	17,20	17,25	17,25	17,30	Dinas Lingkungan Hidup Dinas PUPR



Tujuan yang ditetapkan untuk melaksanakan misi keenam ini adalah Meningkatkan prasarana dan sarana kota yang berkualitas dan Meningkatkan pelaksanaan tata ruang yang baik dan berkelanjutan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pembangunan prasarana dan sarana kota merupakan bagian integral dari pembangunan kota sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Kondisi infrastruktur seperti jaringan jalan, jaringan transportasi, sumber daya air dan pelayanan air bersih, persampahan, jaringan air limbah, jaringan drainase serta sarana dan prasarana lainnya sangat berpengaruh pada penguatan aktivitas masyarakat. Namun demikian pembangunan prasarana dan sarana kota ini harus tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan serta kesesuaiannya dengan rencana tata ruang wilayah.

Untuk mewujudkan pembangunan prasarana dan sarana kota yang berwawasan lingkungan, dirumuskan 6 sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya prasarana dan sarana kota yang berkualitas

Prasarana dan sarana transportasi yang berkualitas dapat dilihat dari tingkat kemantapan jalan. Dengan adanya jaringan jalan yang mantap maka aktivitas manusia yang menghubungkan antara satu lokasi dengan lokasi lainnya dapat terlaksana dengan baik. Untuk lima tahun mendatang ditargetkan tingkat kemantapan jalan telah mencapai 95%. Tingkat kemantapan jalan ini mencakup kemantapan konstruksi jalan dan kemantapan layanan lalu lintas. Peningkatan kemantapan jalan ini dimaksudkan untuk mengurangi kemacetan dan menekan angka kecelakaan lalu lintas. Upaya ini dapat dilakukan dengan pembangunan, perbaikan jalan serta melalui peningkatan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan *guardrail*) pada jalan disertai, penetapan kebijakan berupa penetapan pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah, larangan, petunjuk dan peringatan pada setiap ruas jalan.

2. Meningkatnya Kualitas Perumahan dan kawasan Permukiman (Air Minum, Sanitasi, dan Prasarana, Sarana dan utilitas Kawasan Permukiman

Sesuai dengan program pemerintah pusat, untuk memastikan tersedianya akses air minum dan sanitasi yang layak kepada seluruh lapisan masyarakat serta wilayah perkotaan tanpa kawasan kumuh, maka dalam RPJMN Tahun 2015 – 2019 telah ditargetkan. Pada tahun 2019 sebesar 100% penduduk mendapatkan layanan air minum, 0% luas permukiman kumuh dan 100% penduduk berakses sanitasi yang dikenal dengan Gerakan 100 0 100. Gerakan 100 0 100 ini juga menjadi target Kota Solok untuk lima tahun ke depan dalam rangka peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman.

Dari segi air bersih, kualitas air minum harus memenuhi standar yang berlaku dan secara kuantitas maupun kontinuitasnya harus mencukupi kebutuhan penduduk kota secara keseluruhan. Untuk lima tahun mendatang ditargetkan 95% penduduk Kota Solok telah memperoleh akses air minum yang aman baik melalui perpipaan maupun melalui sumber lain. Untuk mencapai target cakupan pelayanan ini maka diupayakan untuk meningkatkan produksi air baku dan meminimalkan kehilangan air.

Berkaitan dengan sektor sanitasi, penanganan sampah merupakan salah satu titik krusial yang menjadi fokus dalam mewujudkan sanitasi masyarakat yang berkualitas dan merata. Pengolahan sampah saat ini masih dengan cara *controlled landfill* di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ampang Kualo direncanakan akan dikelola secara *sanitary landfill* serta dengan menerapkan pengolahan sampah menggunakan teknologi ramah lingkungan dan konsep 3-R atau pengurangan sampah dari sumbernya.



Untuk sektor perumahan dan permukiman, ditargetkan seluruh lingkungan perumahan yang ada telah memiliki prasarana, sarana dan utilitas umum. Di samping itu, juga terus diupayakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman kumuh sehingga lima tahun ke depan tidak ada lagi kawasan kumuh di Kota Solok sehingga lingkungan perumahan yang sehat dan aman dapat diciptakan.

3. Meningkatkan ketersediaan sumber daya air irigasi

Ketersediaan sumber daya air irigasi dapat dilihat dari persentase areal sawah yang terairi dengan baik. Hal ini merupakan salah satu upaya dalam peningkatan sarana kota khususnya rangka peningkatan ketahanan pangan di Kota Solok. Sampai tahun 2021 ditargetkan 92% areal sawah di Kota Solok sudah terairi dengan baik.

4. Menurunnya luasan genangan banjir

Kota Solok dilewati oleh 3 sungai yaitu, Batang Lembang, Batang Gawan dan Batang Binguang. Kondisi ketiga sungai ini pada beberapa bagian sangat rawan longsor dan sering meluap pada waktu musim penghujan yang menimbulkan genangan pada beberapa kawasan. Untuk menganggulangi banjir yang diakibatkan oleh luapan sungai ini untuk lima tahun ke depan dilakukan penanganan terhadap tebing sungai yang rawan longsor. Untuk mengatasi genangan akibat sistem drainase yang kurang baik, maka untuk lima tahun ke depan ditargetkan pembangunan dan pemeliharaan sistem jaringan drainase skala kota yang mampu mengalirkan air sehingga sampai Tahun 2021 terjadi pengurangan luasan genangan akibat banjir sebesar 1,93%.

5. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang

Dalam rangka mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan maka dilakukan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang kota yang konsisten. Pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk mewujudkan struktur dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang ada. Untuk lima tahun ke depan, ditargetkan tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW mencapai 85%. Untuk mencapai target ini, akan dilakukan peninjauan kembali dan revisi RTRW Kota Solok Tahun 2012-2031. Disamping itu juga disusun Perda tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi, revisi Perda IMB, serta Peraturan Walikota tentang izin pemanfaatan ruang. Dari segi pemanfaatan ruang, diupayakan untuk terus memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang seluruh regulasi yang ada serta meningkatkan pengawasan sehingga pelanggaran terkait dengan pemanfaatan ruang dapat diminimalisir.

6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Meningkatnya kualitas lingkungan ditandai dengan peningkatan Indeks kualitas lingkungan dan luasan RTH publik. Indeks Kualitas Lingkungan dapat dimanfaatkan untuk mengukur keberhasilan program-program pengelolaan lingkungan. Selain sebagai sarana untuk mengevaluasi efektifitas program-program pengelolaan lingkungan. Sampai tahun 2021 ditargetkan indeks kualitas lingkungan hidup di Kota Solok sebesar 61% dan luasan RTH publik sebesar 17,50%.

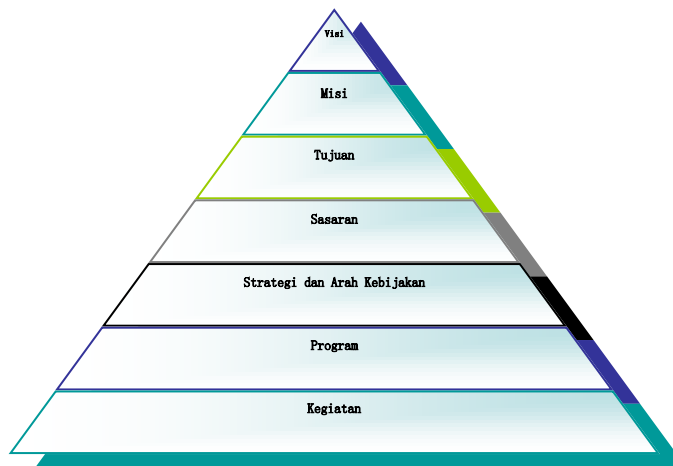


BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dapat dipahami sebagai sekumpulan cara yang direncanakan secara cermat dan teliti guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi merupakan operasionalisasi dari misi, yang disusun guna memastikan bahwa setiap misi yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik. Oleh karenanya strategi dikembangkan sesuai dengan misi yang hendak dilaksanakan. Demikian pula halnya dengan arah kebijakan, yang pada dasarnya merupakan arah atau tindakan yang akan diambil oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai tujuan. Relasi antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan hingga program dan kegiatan dapat dianalogikan secara grafis sebagai berikut:

Gambar 6.1
Relasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, dan Kegiatan



Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kota Solok Tahun 2016-2021 maka prioritas pembangunan dititik beratkan untuk tetap melanjutkan program yang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dan dicapai pada tahun 2010-2015 serta disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional Tahun 2015-2019 dan memperhatikan arah kebijakan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025, maka prioritas pembangunan Kota Solok pada tahun 2016-2021 dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Pembangunan mental dan pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat berlandaskan ABS-SBK
2. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta reformasi birokrasi.
3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan.
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
5. Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
6. Pengembangan industri, perdagangan, koperasi dan UKM, investasi, pariwisata dan pengangguran
7. Peningkatan penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial.
8. Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana kota.
9. Peningkatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang dan lingkungan hidup.

Berpedoman pada prioritas pembangunan daerah tersebut, maka strategi dan arah kebijakan dirumuskan dengan memperhatikan implementasi prioritas pembangunan tersebut dalam penjabaran program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan di tingkat

operasional. Adapun rumusan strategi dan arah kebijakan dimaksud dapat dilihat pada tabel 6.1 di bawah ini.

Tabel 6.1.
Strategi dan Arah Kebijakan Kota Solok

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kota Solok yang Beriman, Bertaqwa dan Sejahtera Menuju Kota Perdagangan dan Jasa serta Pendidikan yang Maju dan Modern			
Misi I : Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat Berlandaskan ABS-SBK "Syara' Mangato Adai Mamakai"			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan agamais	1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	1. Meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai - nilai keagamaan	1. Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai - nilai keagamaan kepada masyarakat
			2. Peningkatan pelayanan keagamaan dan pengembangan prasarana/sarana pendidikan keagamaan dan rumah ibadah
			3. Peningkatan efektivitas pembinaan malam bina iman dan taqwa (Mabit) bagi peserta didik
	2. Meningkatnya keluarga sakinah mawaddah wa rahmah	1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah	1. Peningkatan Pemahaman tentang keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah 2. Peningkatan pencatatan pernikahan yang sah 3. Peningkatan fasilitasi terhadap perlindungan perempuan dan anak
2. Meningkatkan aplikasi adat dan budaya dalam kehidupan masyarakat	1. Meningkatnya peran lembaga adat	1. Mengembangkan pendidikan adat dan budaya daerah dengan memperkuat peran pemangku adat dan budaya	1. Peningkatan kapasitas SDM pemangku adat, lembaga adat, seni dan budaya daerah
			2. Pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas adat dan budaya melalui peningkatan sosialisasi dan advokasi nilai adat dan budaya
	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	1. Melestarikan warisan adat dan budaya baik bersifat benda maupun tidak	1. Peningkatan kualitas pengelolaan, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan adat dan budaya dimasyarakat serta Peningkatan aktivitas seni dan budaya yang diinisiasi oleh masyarakat
			2. Pengembangan sarana dan prasarana dan promosi seni dan budaya 3. Pengembangan keragaman Budaya daerah



Misi II : Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta reformasi Birokrasi			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Professional dan Akuntabel Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik	1. Mengembangkan manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik	1. Peningkatan kualitas prosedur pelayanan publik
		2. Meningkatkan kualitas keterbukaan informasi guna mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik	1. Peningkatan manajemen pengelolaan pengaduan masyarakat dan pelayanan informasi dan komunikasi
	2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih	1. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah	1. Pengoptimalan kinerja pemerintahan melalui penataan kelembagaan
		2. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan	1. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah berbasis teknologi informasi
			2. Peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders
			3. Peningkatan ketersediaan informasi dan data yang akurat untuk perencanaan pembangunan daerah Berbasis Teknologi Informasi
		3. Meningkatkan pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset	1. Peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan daerah
			2. Pengoptimalan penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah
			3. Pengoptimalan pengelolaan aset daerah yang berbasis teknologi Informasi
		4. Meningkatkan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa	1. Pengoptimalan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui <i>e-procurement</i>
		5. Meningkatkan sistem dan manajemen pengawasan internal pemerintah daerah	1. Pelaksanaan pembinaan, evaluasi, review dan konsultasi OPD serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah
		6. Meningkatkan penerapan sistem informasi dalam tata kelola pemerintahan	1. Peningkatan implementasi e-government
		7. Menerapkan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan	1. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan manajemen kepegawaian
		8. Meningkatkan Pengelolaan Kearsipan	1. Meningkatkan manajemen kearsipan



Misi III : Mewujudkan Pendidikan dan Kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang Berkualitas Untuk Menghasilkan Sumberdaya manusia dan generasi muda			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang beriman, sehat, kreatif dan berdaya saing	1. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat dan pemerataan kualitas pendidikan	1. Meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan pemerataan dalam Penyelenggaraan pendidikan	1. Peningkatkan Akses dan kualitas pelayanan PAUD
			2. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan Pembangunan sekolah berasrama (boarding school)
			3. Peningkatan kualitas dan profesionalisme guru, pengawas, penilik, pamong dan tenaga kependidikan
			4. Peningkatan tata kelola dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan
			5. Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan pendidikan non formal
	2. Meningkatnya prestasi olahraga dan partisipasi generasi muda dalam pembangunan	2. Meningkatkan budaya gemar membaca	1. Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan perpustakaan, sarana dan prasarana perpustakaan serta keterpaduan dalam menggerakkan minat baca dan budaya membaca masyarakat
			1. Peningkatan kualitas pemuda dan kelembagaan pemuda
			2. Perlindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan napza dan minuman keras
			3. Peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan dalam pembangunan
			1. Peningkatan akses dan partisipasi masyarakat, atlit dan tenaga keolahragaan dibidang olahraga rekreasi dan prestasi
	3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	2. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga
			1. Peningkatan status kesehatan ibu, anak, remaja, dan lansia
			2. Peningkatan Status gizi masyarakat
			3. Peningkatan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
			4. Peningkatan mutu, sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
			5. Peningkatan ketersediaan dan mutu sumber daya manusia kesehatan
			6. Peningkatan upaya kesehatan masyarakat
			7. Peningkatan ketersediaan dan pengawasan kualitas farmasi, alat kesehatan, dan makanan
			8. Pemantapan pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) bidang kesehatan



Misi III : Mewujudkan Pendidikan dan Kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang Berkualitas Untuk Menghasilkan Sumberdaya manusia dan generasi muda			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat untuk hidup sehat	1. Peningkatan upaya preventif dan promosi kesehatan bagi masyarakat
		3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB serta kesejahteraan keluarga	1. Peningkatan pelayanan KB dengan MKJP dan Non MKJP
			2. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang kesehatan reproduksi bagi remaja
			3. Penguatan dan pemberdayaan lembaga/ organisasi ditingkat masyarakat
			4. Peningkatan advokasi, informasi, komunikasi dan pengendalian penduduk dan KB
	4 Meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak	1. Peningkatan komitmen pengambil kebijakan dalam pengintegrasian perspektif gender
			2. Peningkatan peran serta perempuan di bidang sosial, ekonomi, politik, hukum, HAM dan bidang lainnya
			3. Peningkatan akses terhadap pemenuhan hak anak
			4. Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak
		2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak	1. Penguatan lembaga PUG
			2. Pemanfaatan data terpilah dalam Penerapan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender serta Peningkatan layanan informasi terkait tindak kekerasan bagi anak dan perempuan serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Misi IV : Menjadikan Kota Solok Sebagai Pusat Perdagangan Hasil-Hasil Pertanian, Perkebunan dan Ekonomi Kerakyatan yang Tangguh Berbasis Potensi Unggulan Daerah Melalui Perdagangan, Pariwisata dan Jasa Lainnya serta Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan	1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis ekonomi kerakyatan	1. Meningkatkan daya saing dan nilai tambah IKM	1. Peningkatan fasilitas pengembangan IKM
			2. Pengembangan diversifikasi produk IKM
		2. Penguatan kelembagaan dan usaha koperasi	1. Peningkatan kuantitas dan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi serta fasilitas pendirian lembaga ekonomi syariah
		3. Penguatan Pengelolaan UMKM	1. Peningkatan kualitas dan kapasitas pengelolaan UMKM
	4. Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam usaha tani	1. Peningkatan pemanfaatan benih dan bibit unggul	
	2. Meningkatnya daya saing daerah	1. Meningkatkan Volume Perdagangan	1. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana perdagangan
			2. Peningkatan kualitas pengelolaan pasar
			3. Peningkatan jaringan kerjasama perdagangan dan perdagangan elektronik (<i>e-commerce</i>)
		2. Meningkatkan Perlindungan Konsumen	1. Peningkatan intensitas perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
	3. Meningkatnya daya tarik wisata	1. Penguatan dan pengembangan destinasi wisata	1. Peningkatan dan pengelolaan destinasi wisata, pengembangan agrowisata dan wisata halal
		2. Meningkatkan promosi pariwisata daerah	1. Penyelenggaraan Event Pariwisata dan optimalisasi media promosi wisata
		3. Mengembangkan industri pariwisata melalui usaha kreasi.	1. Peningkatan keterlibatan pelaku ekonomi kreatif dalam mendukung kepariwisataan
	2. Meningkatkan Ketahanan dan Diversifikasi Konsumsi Pangan	1. Meningkatnya ketahanan pangan	1. Meningkatkan Produktivitas dan produksi usaha pertanian dan perikanan
2. Peningkatan produksi peternakan			
3. Peningkatan produktivitas dan produksi perikanan budi daya			
		2. Menjaga ketersediaan dan distribusi pangan	1. Peningkatan koordinasi kelembagaan pangan
2. Meningkatnya keragaman konsumsi pangan		1. Penganekaragaman pola konsumsi pangan	1. Peningkatan diversifikasi produk pangan dan pengawasan keamanan pangan



Misi IV : Menjadikan Kota Solok Sebagai Pusat Perdagangan Hasil-Hasil Pertanian, Perkebunan dan Ekonomi Kerakyatan yang Tangguh Berbasis Potensi Unggulan Daerah Melalui Perdagangan, Pariwisata dan Jasa Lainnya serta Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
3. Meningkatkan investasi dan lapangan kerja	1. Meningkatnya nilai investasi	1. Meningkatkan promosi dan pelayanan investasi	1. Peningkatan promosi peluang investasi daerah
			2. Peningkatan pelayanan perijinan investasi dan pemberian insentif investasi
			3. Peningkatan pengendalian penanaman modal
	2. Meningkatnya penyediaan lapangan kerja	1. Memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kompetensi tenaga kerja	1. Perluasan kesempatan kerja
			2. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan kualitas pencari kerja
			3. Peningkatan perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja

Misi V : Menekan Angka Kemiskinan dan Mengurangi Permasalahan Sosial Lainnya			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Berkurangnya penduduk miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	1. Menurunnya penduduk miskin	1. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin	1. Pemberdayaan kelembagaan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan masyarakat miskin
			2. Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap permodalan
		2. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	1. Peningkatan akses pelayanan dasar mencakup kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar dan identitas hukum bagi masyarakat miskin dan penyandang disabilitas serta lansia
	2. Meningkatnya akses dan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), serta menurunnya Penyakit Masyarakat (PEKAT)	3. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan	1. Peningkatan koordinasi dalam rangka penyempurnaan pengukuran kemiskinan yang menyangkut kriteria, standarisasi dan pemanfaatan Basis Data Terpadu dalam Intervensi program
		1. Meningkatkan akses dan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), termasuk disabilitas, dan lanjut usia	1. Peningkatan pembinaan dan fasilitasi, rehabilitasi PMKS 2. Penguatan, pemantauan dan pengendalian serta penegakan peraturan terkait penanganan PMKS dan pekat

Misi VI : Mewujudkan Pembangunan Prasarana dan Sarana Kota Yang Berwawasan Lingkungan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan prasarana dan sarana kota yang berkualitas	1. Meningkatnya prasarana dan sarana kota yang berkualitas	1. Meningkatkan kapasitas, kualitas dan kuantitas infrastruktur jaringan jalan	1. Peningkatan kapasitas, kualitas dan kuantitas jaringan jalan
		2. Meningkatkan prasarana dan sarana perhubungan	1. Peningkatan dan pengembangan pelayanan angkutan 2.. Peningkatan keselamatan transportasi
		3. Meningkatkan prasarana dan sarana publik	1. Peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana publik
	2. Meningkatnya Kualitas Perumahan dan kawasan Permukiman (Air Minum, Sanitasi, dan Prasarana, Sarana dan utilitas Kawasan Permukiman	1. Meningkatkan layanan dan akses masyarakat terhadap air minum	1. Peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan air minum
		2. Meningkatkan akses layanan air limbah	1. Peningkatan akses layanan melalui sistem pengelolaan air limbah
		3. Meningkatkan cakupan layanan pengelolaan sampah perkotaan dengan pola 3R	1. Peningkatan kinerja pengelolaan persampahan melalui peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dengan pola 3R
		4. Menciptakan Lingkungan Permukiman yang sehat dan layak huni	1. Peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman
	3. Meningkatkan ketersediaan sumber daya irigasi	1. Mengembangkan Sistem Pengelolaan Irigasi	1. Peningkatan sistem pengelolaan irigasi dan bangunan penampung air lainnya
	4. Menurunnya luasan genangan banjir	1. Normalisasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	1. Peningkatan Pengamanan Tebing Sungai
	2. Meningkatkan pelaksanaan tata ruang yang baik dan berkelanjutan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	1. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien berkelanjutan dan konsisten	1. Penyediaan regulasi perencanaan, pengawasan & pengendalian yang mengacu kepada rencana tata ruang
		1. Mengendalikan pencemaran lingkungan hidup	1. Peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup 2. Peningkatan pengelolaan ruang terbuka hijau



BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

7.1. KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN DAERAH

Kebijakan umum menggambarkan upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sesuai dengan visi dan misi yang sudah ditetapkan. Kebijakan umum pembangunan daerah Kota Solok Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya pembangunan secara efektif dan efisien serta mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
2. Peningkatan peran semua stakeholders (pemangku kepentingan) dalam pengelolaan pembangunan daerah dengan mengembangkan pengelolaan pembangunan yang bersifat partisipatif, sinergis, transparan dan akuntabel.
3. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia, sehingga memiliki etos kerja, disiplin, santun dan berintegritas,
4. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
5. Peningkatan daya saing daerah dalam menghadapi perubahan tatanan ekonomi regional, nasional dan global yang semakin terbuka.
6. Pengembangan sektor-sektor unggulan dalam percepatan dan peningkatan ekonomi seperti pariwisata, pertanian dengan sistem agribisnis, industri secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
7. Pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah.
8. Perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja dan program prioritas (*money follow programme*).
9. Peningkatan pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi
10. Peningkatan pendapatan daerah

7.2. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan sasaran serta indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program prioritas pembangunan jangka menengah daerah. Adapun program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Guna menjabarkan prioritas, sasaran dan arah kebijakan pembangunan dalam menjawab isu dan permasalahan, maka selanjutnya dijabarkan operasionalisasi dari upaya-upaya yang telah dirumuskan di atas dalam bentuk kebijakan umum dan program pembangunan yang perlu dilaksanakan selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.



Tabel 7.1.
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Solok

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR					
MISI I : Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat Berlandaskan ABS-SBK "Syara' Mangato Adaik Mamakai"										
PRIORITAS I. Pembangunan mental dan pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat berlandaskan ABS-SBK										
1.	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	- Pertumbuhan nilai zakat	%	30	60	1. Meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai - nilai keagamaan	1. Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai - nilai keagamaan kepada masyarakat	- Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat yang beriman dan bertaqwa	Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum	Bagian Kesra Setda
		- Jumlah penduduk yang sudah haji	Orang	532	1138					
		- Jumlah penduduk yang hafizh Al-Qur'an (1 juz sampai 30 juz)	Orang	390	3.500					
		- Jumlah masjid yang mempunyai BMT, TPA/MDA, Perpustakaan, Majelis Ta'lim, Remaja Masjid	Masjid	2	52					
							2. Peningkatan pelayanan keagamaan dan pengembangan prasarana/sarana pendidikan keagamaan dan rumah ibadah	- Peningkatan pelayanan kehidupan beragama	Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum	Bagian Kesra Setda
							3. Peningkatan efektivitas pembinaan malam bina iman dan taqwa (Mabit) bagi peserta didik	Manajemen - Pelayanan Pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
2.	Meningkatnya keluarga sakinah mawaddah wa rahmah	- Angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	Jumlah	33	10	1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah	1. Peningkatan Pemahaman tentang keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah	- Peningkatan pelayanan kehidupan beragama	Pendidikan	Bagian Kesra Setda
							2. Peningkatan pencatatan pernikahan yang sah	- Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Dukcapil
							3. Peningkatan fasilitasi terhadap perlindungan perempuan dan anak	- Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan gender dan anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas PPPA



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR					
3.	Meningkatnya peran lembaga adat	- Persentase peran lembaga adat	%	60	90	1. Mengembangkan pendidikan adat dan budaya daerah dengan memperkuat peran pemangku adat dan budaya	1. Peningkatan kapasitas SDM pemangku adat, lembaga adat, seni dan budaya daerah 2. Pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas adat dan budaya melalui peningkatan sosialisasi dan advokasi nilai adat dan budaya	- Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Lembaga adat seni, dan Budaya	Kebudayaan	Dinas Pariwisata
4.	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	- Penggiat seni budaya - Penggiat adat dan budaya	Jumlah Klp	10	30	1. Melestarikan warisan adat dan budaya baik bersifat benda maupun tidak	1. Peningkatan kualitas pengelolaan, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan adat dan budaya dimasyarakat serta Peningkatan aktivitas seni dan budaya yang diinisiasi oleh masyarakat	- Pengelolaan kekayaan budaya	Kebudayaan	Dinas Pariwisata
			Jumlah Klp	45	64		2. Pengembangan sarana dan prasarana, promosi seni dan budaya	- Pengembangan Nilai Budaya	Kebudayaan	Dinas Pariwisata
							3. Pengembangan keragaman Budaya daerah	- Pengelolaan Keragaman Budaya	Kebudayaan	Dinas Pariwisata



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR					
MISI II :Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Reformasi Birokrasi										
PRIORITAS II. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Serta Reformasi Birokrasi										
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik	- Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	NA	Amat Baik	1. Mengembangkan manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik	1. Peningkatan kualitas prosedur pelayanan publik	- Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Otonomi daerah dan Pemerintahan Umum	Setda (Bagian Organisasi)
		- Persentase Pengaduan Masyarakat tentang Pelayanan Publik yang Ditindaklanjuti (Lapor Sistem Pelaporan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional)	%	-	100	2. Meningkatkan kualitas keterbukaan informasi guna mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik	1. Peningkatan manajemen pengelolaan pengaduan masyarakat dan pelayanan informasi dan komunikasi	- Peningkatan pelayanan publik - Peningkatan akses dan kualitas informasi publik - Kerjasama informasi dan media massa	Penanaman Modal Komunikasi dan Informatika Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum	Dinas PMTSP Dinas Kominfo Setda (Bagian Humas)
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih	- Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Nilai	CC	A	1. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah	1. Pengoptimalan kinerja pemerintahan melalui penataan kelembagaan	- Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Otonomi daerah dan Pemerintahan Umum	Setda (Bagian Organisasi), Setda (Bagian Pemerintahan)
		- Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Nilai	Tinggi	Sangat Tinggi	2. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan	1. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah berbasis teknologi informasi	- Perencanaan pembangunan daerah	Perencanaan	Bappeda
		- Opini BPK	Opini	WDP	WTP		2. Peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders	- Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan	Perencanaan	Bappeda
		- Tingkat kematangan implementasi SPIP	Level	Level 1	Level 3			- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Perencanaan	Bappeda
		- Indeks e-government	Nilai	-	3,5					



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR					
							3. Peningkatan ketersediaan informasi dan data yang akurat untuk perencanaan pembangunan daerah Berbasis Teknologi Informasi	- Pengembangan data informasi perencanaan pembangunan	Perencanaan	Bappeda
								Pengembangan data informasi statistik Sektoral	Statistik	Dinas Kominfo
						3. Meningkatkan pengelolaan pendapatan, keuangan dan asset	1. Peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan daerah	- Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Keuangan	BKD
							2. Pengoptimalan penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah	- Peningkatan, pengembangan dan Pengendalian Penganggaran	Keuangan	BKD
								- Pengelolaan dan Pengendalian Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan	BKD
								- Peningkatan, pengembangan dan pengendalian Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan	BKD



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR					
							3. Pengoptimalan pengelolaan aset daerah yang berbasis teknologi Informasi	- Peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset daerah	Keuangan	BKD
						4. Meningkatkan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa	1. Pengoptimalan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui <i>e-procurement</i>	- Peningkatan Layanan Pengadaan Elektronik	Otonomi daerah dan Pemerintahan Umum	Setda (Bagian PAP)
						5. Meningkatkan sistem dan manajemen pengawasan internal pemerintah daerah	1. Pelaksanaan pembinaan, evaluasi, review dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah	- Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Otonomi daerah dan Pemerintahan Umum	Inspektorat Daerah
								- Peningkatan Profesionalisme Pemeriksa dan Aparatur Pengawas	Otonomi daerah dan Pemerintahan Umum	Inspektorat Daerah
								- Pengendalian Intern dan Penegakan Etika Pemerintah Daerah	Otonomi daerah dan Pemerintahan Umum	Inspektorat Daerah
						6. Meningkatkan penerapan sistem informasi dalam tata kelola pemerintahan	1. Peningkatan implementasi <i>e-government</i>	- E-government - Persandian untuk pengamanan Informasi	komunikasi dan informatika Persandian	Dinas Kominfo Dinas Kominfo



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR					
						8. Menerapkan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan	1. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan manajemen kepegawaian	- Pembinaan dan pengembangan aparatur	Kepegawaian	BKPSDM
						9. Meningkatkan Pengelolaan Kearsipan	1. Meningkatkan manajemen kearsipan	Perbaikan sistem administrasi kearsipan	Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR					
MISI III :Mewujudkan Pendidikan dan Kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang Berkualitas Untuk Menghasilkan Sumberdaya manusia dan generasi muda yang Beriman, sehat, cerdas, kreatif, tangguh dan Berdaya Saing										
PRIORITAS III. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan.										
1.	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat dan pemerataan kualitas pendidikan	- Rata-rata Lama Sekolah - Persentase sekolah dengan rata-rata hasil UN - SD ($\geq 7,7$) - SMP ($\geq 6,0$) -SMA/SMK	Tahun	10,77	10,85	1. Meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan pemerataan dalam Penyelenggaraanpendidikan	1. Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan PAUD	- Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan	Dinas Pendidikan
							2. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan pembangunan sekolah berasrama (boarding school)	- Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	Dinas Pendidikan
				42,22	80,00		3. Peningkatan kualitas dan profesionalisme guru, pengawas, penilik, pamong dan tenaga kependidikan	- Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
				14,29	85,71		4. Peningkatan tata kelola dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan	- Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
				36,36	-		5. Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan pendidikan non formal	- Pendidikan Non Formal	Pendidikan	Dinas Pendidikan
						2. Meningkatkan budaya gemar membaca	1. Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan perpustakaan, sarana dan prasarana perpustakaan serta keterpaduan dalam menggerakkan minat baca dan budaya membaca masyarakat	- Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Arsip



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB					
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR										
2.	Meningkatnya prestasi olahraga dan partisipasi generasi muda dalam pembangunan	- Jumlah Organisasi kepemudaan yang aktif	organisasi	23	26	1. Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan	1. Peningkatan kualitas pemuda dan kelembagaan pemuda	- Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Kepemudaan dan Olahraga	Dispora					
		JumlahAtlit Berprestasi tingkat provinsi dan Nasional	orang	18	28		2. Perlindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan napza dan minuman keras	Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Kepemudaan dan Olahraga	Dispora					
							3. Peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan dalam pembangunan	- Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Kepemudaan dan Olahraga	Dispora					
							2. Meningkatkan prestasi olahraga dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga	1. Peningkatan akses dan partisipasi masyarakat, atlit dan tenaga keolahragaan dibidang olahraga rekreasi dan prestasi	- Pembinaan Pemasarakatan Olahraga	Kepemudaan dan Olahraga	Dispora				
												2. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Kepemudaan dan Olahraga	Dispora
PRORITAS IV. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.															
3.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	- Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	72,74	73,28	1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	1. Peningkatan status kesehatan ibu, anak, remaja, dan lansia	- Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Kesehatan	Dinas Kesehatan					
		- Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1000 KH	7	8			Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Kesehatan	Dinas Kesehatan					
								- Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Kesehatan	Dinas Kesehatan					
		- Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	75	75			2. Peningkatan Status qizi masyarakat	- Perbaikan Gizi Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan				



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR					
							3. Peningkatan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	- Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular - Pengembangan lingkungan sehat	Kesehatan Kesehatan	Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
							4. Peningkatan mutu, sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	- Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya - Pengadaan, peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata - Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Kesehatan Kesehatan Kesehatan	Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
							5. Peningkatan ketersediaan dan mutu sumber daya manusia kesehatan	- Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
							6. Peningkatan upaya kesehatan masyarakat	- Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
							7. Peningkatan ketersediaan dan pengawasan kualitas farmasi, alat kesehatan, dan makanan	- Obat dan Perbekalan Kesehatan - Pengawasan obat dan makanan	Kesehatan Kesehatan	Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
							8. Pemantapan pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) bidang kesehatan	- Pelayanan Kesehatan Penduduk miskin	Kesehatan	Dinas Kesehatan



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB	
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR						
						2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat untuk hidup sehat	1. Peningkatan upaya preventif dan promosi kesehatan bagi masyarakat	- Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan	
						3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB serta kesejahteraan keluarga	1. Peningkatan pelayanan KB dengan MKJP dan Non MKJP	- Keluarga Berencana	Penduk & KB	Dinas Penduk & KB	
								- Pelayanan Kontrasepsi	Penduk & KB	Dinas Penduk & KB	
								2. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang kesehatan reproduksi bagi remaja	- Kesehatan Reproduksi Remaja	Penduk & KB	Dinas Penduk & KB
								3. Penguatan dan pemberdayaan lembaga/ organisasi ditingkat masyarakat	- Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Penduk & KB	Dinas Penduk & KB
								4. Peningkatan advokasi, informasi, komunikasi dan pengendalian penduduk dan KB	- Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Penduk & KB	Dinas Penduk & KB
PRIORITAS V: Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak											
4.	Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	- Index Pembangunan Gender (IPG) - Index Pemberdayaan Gender (IDG) - Predikat evaluasi kota layak anak	% % predikat	95,45 64,07 0	98 68,81 Nindya	1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak	1. Peningkatan komitmen pengambil kebijakan dalam pengintegrasian perspektif gender	- Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DPPPA	
								2. Peningkatkan peran serta perempuan di bidang sosial, ekonomi, politik, hukum, HAM dan bidang lainnya	- Peningkatan Ketahanan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DPPPA
								3. Peningkatan akses terhadap pemenuhan hak anak	- Pemenuhan hak anak dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DPPPA



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR					
							4. Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak	- Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DPPPA
						2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak	1. Penguatan lembaga PUG	- Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan gender dan anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DPPPA
							2. Pemanfaatan data terpilah dalam Penerapan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender serta Peningkatan layanan informasi terkait tindak kekerasan bagi anak dan perempuan serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	- Peningkatan Sistem Informasi dan Data	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DPPPA



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR					
Misi IV : Menjadikan Kota Solok Sebagai Pusat Perdagangan Hasil-Hasil Pertanian, Perkebunan dan Ekonomi Kerakyatan yang Tangguh Berbasis Potensi Unggulan Daerah Melalui Perdagangan, Pariwisata dan Jasa Lainnya Serta Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif										
Prioritas VI. Pengembangan industri, perdagangan, koperasi dan UKM, investasi, pariwisata dan pengangguran										
1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah berbasis ekonomi kerakyatan	- Pertumbuhan sektor industri dalam PDRB Kota Solok	%	2,26	3,80	1. Meningkatkan daya saing dan nilai tambah IKM	1. Peningkatan fasilitas pengembangan IKM	- Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Perindustrian	Disdag-KUKM
		- Pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB Kota Solok	%	5,65	6,91		2. Pengembangan diversifikasi produk IKM	- Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Perindustrian	Disdag-KUKM
		- Pertumbuhan sektor pertanian dalam PDRB Kota Solok	%	2,26	2,58	2. Penguatan kelembagaan dan usaha koperasi	1. Peningkatan kuantitas dan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi serta fasilitasi pendirian lembaga ekonomi syariah	- Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Koperasi dan UKM	Disdag-KUKM
						3. Penguatan Pengelolaan UMKM	1. Peningkatan kualitas dan kapasitas pengelolaan UMKM	- Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	Koperasi dan UKM	Disdag-KUKM
								- Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM	Koperasi dan UKM	Disdag-KUKM
		- Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil dan Menengah	Koperasi dan UKM	Disdag-KUKM						
		- Peningkatan produksi komoditi padi	%	1,06	5,26	4. Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam usaha tani	1. Peningkatan pemanfaatan benih dan bibit unggul	- Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pertanian	Dinas Pertanian



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR					
2.	Meningkatnya daya saing daerah	- Volume Perdagangan	Rp. (Juta)	578,905.08	851,099.72	1. Meningkatkan Volume Perdagangan	1. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana perdagangan	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan Dalam Negeri	Perdagangan	Disdag-KUKM
							2. Peningkatan kualitas pengelolaan pasar	- Peningkatan pengembangan pengelolaan pasar	Perdagangan	Disdag-KUKM
							3. Peningkatan jaringan kerjasama perdagangan dan perdagangan elektronik (e-commerce)	- Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Perdagangan	Disdag-KUKM
						2. Meningkatkan Perlindungan Konsumen	1. Peningkatan intensitas perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	- Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Perdagangan	Disdag-KUKM
3.	Meningkatnya daya tarik wisata	- Jumlah wisatawan	Orang	112.358	300.000	1. Penguatan dan pengembangan destinasi wisata	1. Peningkatan dan pengelolaan destinasi wisata, pengembangan agrowisata dan wisata halal	- Pengembangan Destinasi Wisata	Pariwisata	Dinas Pariwisata
						2. Meningkatkan promosi pariwisata daerah	1. Penyelenggaraan Event Pariwisata dan optimalisasi media promosi wisata	- Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pariwisata	Dinas Pariwisata
						3. Mengembangkan industri pariwisata melalui usaha kreasi.	1. Peningkatan keterlibatan pelaku ekonomi kreatif dalam mendukung kepariwisataan	- Pengembangan ekonomi kreatif	Pariwisata	Dinas Pariwisata
4.	Meningkatnya ketahanan pangan	- Ketersediaan pangan Utama	ton	10.184	10.244	1. Meningkatkan Produktivitas dan produksi usaha pertanian dan perikanan	1. Peningkatan produktivitas dan produksi pertanian	- Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Pertanian	Dinas Pertanian
							2. Peningkatan produksi peternakan	- Peningkatan Produksi hasil peternakan	Pertanian	Dinas Pertanian



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR					
						3. Peningkatan produktivitas dan produksi perikanan budi daya		- Pengembangan Budidaya Perikanan	Kelautan dan Perikanan	Dinas Pertanian
						2. Menjaga ketersediaan dan distribusi pangan	1. Peningkatan koordinasi kelembagaan pangan	- Peningkatan Ketahanan Pangan	Pangan	Dinas Pangan
5.	Meningkatnya keragaman konsumsi pangan	- Skor pola pangan harapan	Poin	80	86	1. Penganekaragaman pola konsumsi pangan	1. Peningkatan diversifikasi produk pangan dan pengawasan keamanan pangan	- Peningkatan Diversifikasi dan Pengawasan Keamanan Pangan	Pangan	Dinas Pangan
6.	Meningkatnya nilai investasi	- Total nilai Investasi	Rp. (000.000)	284.435	427.450	1. Meningkatkan promosi dan pelayanan investasi	1. Peningkatan promosi peluang investasi daerah	- Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	Penanaman Modal	DPM-PTSP
							2. Peningkatan pelayanan perijinan investasi dan pemberian insentif investasi	- Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Penanaman Modal	DPM-PTSP
							3. Peningkatan pengendalian penanaman modal	- Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Penanaman Modal	DPM-PTSP
7.	Meningkatnya penyediaan lapangan kerja	- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,72	3,46	1. Memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kompetensi tenaga kerja	1. Perluasan kesempatan kerja	- Peningkatan Kesempatan Kerja	Tenaga Kerja	DPM-PTSP
							2. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan kualitas pencari kerja	- Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja	Tenaga Kerja	DPM-PTSP
							3. Peningkatan perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja	- Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja	DPM-PTSP



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNA N DAERAH	BIDANG URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR					
MISI V : Menekan Angka Kemiskinan dan Mengurangi Permasalahan Sosial Lainnya										
Prioritas VII. : Peningkatan penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan permasalahan sosial										
1.	Menurunnya penduduk miskin	Angka Kemiskinan	%	4,12	2,69	1. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin	1. Pemberdayaan kelembagaan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas dan masyarakat miskin	- Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Sosial	DinasSosial
							2. Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap permodalan	- Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah dalam penanggualang an kemiskinan	Sosial	DinasSosial
						2. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	1. Peningkatan akses pelayanan dasar mencakup kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar dan identitas hukum bagi masyarakat miskin dan penyandang disabilitas serta lansia	- Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sosial	DinasSosial
								- Pembinaananak terlantar	Sosial	DinasSosial
						3. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan	1. Peningkatan Koordinasi dalam rangka penyempurnaan pengukuran kemiskinan yang menyangkut kriteria, standarisasi dan pemanfaatan Basis Data Terpadu dalam Intervensi program	- Penanganan fakir miskin	Sosial	DinasSosial
1.	Meningkatnya akses dan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), serta menurunnya Penyakit Masyarakat (PEKAT)	- Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) - Jumlah kasus PEKAT	orang kasus	4,863 40	3,812 14	1. Meningkatkan akses dan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), termasuk disabilitas, dan lanjut usia	1. Peningkatan pembinaan dan fasilitasi, rehabilitasi PMKS	- Pembinaan eks. Penyandang penyakit sosial	Sosial	Dinas Sosial



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR					
							2. Penguatan, pemantauan dan pengendalian serta penegakan peraturan terkait penanganan PMKS dan pekat	- Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan peraturan daerah dan kebijakan KDH	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat	Dinas Satpol PP dan Damkar
								- Peningkatan pemberantasan Pekat	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat	Dinas Satpol PP dan Damkar
								- PeningkatanKeamanan dan ketertibanyamlingkungan	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat	Dinas Satpol PP dan Damkar



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR					
Misi VI : Mewujudkan Pembangunan Prasarana dan Sarana Kota Yang Berwawasan Lingkungan										
Prioritas VIII. Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana kota.										
Prioritas IX. Peningkatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang dan lingkungan hidup										
1.	Meningkatnya prasarana dan sarana kota yang berkualitas	- Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	87,99	96	1.Meningkatkan kapasitas, kualitas dan kuantitas infrastruktur jaringan jalan	1. Peningkatan kapasitas, kualitas dan kuantitas jaringan jalan	- Pembangunan Jalan dan Jembatan - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PUPR
				-	-	2. Meningkatkan prasarana dan sarana perhubungan	1. Peningkatan dan pengembangan pelayanan angkutan 2. Peningkatan keselamatan transportasi	- Peningkatan Pelayanan Angkutan - Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Perhubungan Perhubungan	Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
						3. Meningkatkan prasarana dan sarana publik	1. Peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana publik	- Pembangunan sarana dan prasarana pemerintah daerah - Pembangunan prasarana dan sarana publik	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perkim
									Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perkim
2.	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan kawasan Permukiman (Air Minum, Sanitasi, dan Prasarana, Sarana dan utilitas Kawasan Permukiman	- Persentase Penduduk Berakses sanitasi	%	79,85	86	1. Meningkatkan layanan dan akses masyarakat terhadap air minum	1. Peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan air minum	- Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perkim
		- Persentase Penduduk Berakses Air bersih/air minum	%	82,26	95					
		- Persentase Luasan Permukiman Kumuh	%	2,92	1,18	2. Meningkatkan akses layanan air limbah	1. Peningkatan akses layanan melalui sistem pengelolaan air limbah	- Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perkim



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR					
						3. Meningkatkan cakupan layanan pengelolaan sampah perkotaan dengan pola 3R	1. Peningkatan kinerja pengelolaan persampahan melalui peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dengan pola 3R	- Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
						4. Menciptakan Lingkungan Permukiman yang sehat dan layak huni	1. Peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	- Lingkungan Sehat Perumahan - Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong - Pengembangan Perumahan - Pemberdayaan komunitas perumahan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perkum
3.	Meningkatkan ketersediaan sumber daya irigasi	- persentase areal sawah yang terairi dengan baik	%	85	88	1. Mengembangkan Sistem Pengelolaan Irigasi	1. Peningkatan sistem pengelolaan irigasi dan bangunan penampung air lainnya	- Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya - Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PUPR
4.	Menurunnya luasan genangan banjir	- % pengurangan luasan genangan akibat banjir	%	7,93	1,93	1. Normalisasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	1. Peningkatan Pengamanan Tebing Sungai	- Pengendalian Banjir	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PUPR
5.	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	- Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	%	n.a	85	1. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan	1. Penyediaan regulasi perencanaan, pengawasan & pengendalian yang	- Perencanaan Tata Ruang - Pemanfaatan Ruang - Pengendalian	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PUPR



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR					
						tata ruang wilayah yang efisien berkelanjutan dan konsisten	mengacu kepada rencana tata ruang	Pemanfaatan Ruang		
6.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Indeks kualitas lingkungan hidup	%	n.a	61	1. Mengendalikan pencemaran lingkungan hidup	1. Peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup	- Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		- Persentase luasan RTH publik	%	17,16	17.30		2. Peningkatan pengelolaan ruang terbuka hijau	- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau - pengelolaan areal permakaman - Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup



Tabel 8.1. Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Solok

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan				Indikator Kinerja Program (outcome)		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab					
2016		2017-2021		2016			2017-2021		2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target		Rp. Jt	
Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt		Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	2016	2017-2021
BELANJA TIDAK LANGSUNG																								
Belanja Pegawai																								
Belanja Bunga																								
Belanja Subsidi																								
Belanja Hibah																								
Belanja Bantuan Sosial																								
Belanja Bantuan Keuangan																								
Belanja Tidak Terduga																								
BELANJA LANGSUNG																								
Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar																								
Pendidikan																								
Program Adm perkantoran	Program Adm perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	3,531.12	100	3,365.03	100	3,514.34	100	3,531.12	100	3,531.12	100	3,531.12	100	3,531.12	100	21,003.85	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan		
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	%	100	383.14	100	573.94	100	279.01	100	383.14	100	383.14	100	383.14	100	383.14	100	2,385.50	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan		
Program Peningkatan disiplin aparatur	Program Peningkatan disiplin aparatur	Persentase pelanggaran disiplin berpakaian	Persentase pelanggaran disiplin berpakaian	%	0	1,310.50	0	862.22	0	874.70	0	1,310.50	0	1,310.50	0	1,310.50	0	1,310.50	0	6,978.92	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan		
Program peningkatan kapasitas Sumber daya aparatur	Program peningkatan kapasitas Sumber daya aparatur	cakupan pemenuhan kebutuhan peningkatan SDM aparatur	cakupan pemenuhan kebutuhan peningkatan SDM aparatur	%	-	-	-	-	100	-	100	60.00	100	60.00	100	60.00	100	60.00	100	180.00	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan		
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	-	%	100	9.88	-	9.94	-	10.00	-	9.88	-	9.88	-	9.88	-	9.88	-	59.47	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan		
		Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai	NA			Baik		Baik		Baik		Amat Baik		Amat Baik		Amat Baik		Amat Baik	-	Dinas Pendidikan			
		Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	nilai	NA			B		BB		BB		A		A		A		A	-	Dinas Pendidikan			
		Tingkat kematangan implementasi SPIP	level	NA			Level 2		Level 2		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3	-	Dinas Pendidikan			
		Persentase penatausahaan keuangan yang sesuai regulasi	%	NA			100		100		100		100		100		100		100	-	Dinas Pendidikan			
		Persentase keselarasan dokumen perencanaan PD	%	NA			90		90		90		90		90		90		90	-	Dinas Pendidikan			
Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat yang beriman dan bertakwa	Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat yang beriman dan bertakwa	Jumlah mualligh/da'i/khatib/guru agama/penyuluh agama yang dikaderisasi	Jumlah mualligh/da'i/khatib/guru agama/penyuluh agama yang dikaderisasi	orang	0	4,922.91	40	7,139.03		9,025.00							80		21,086.94	Setda (Bag. Kesra)	Setda (Bag. Kesra)			
		Jumlah pemberian reward bagi Toga/Toma/Lembaga/orga nisasi keagamaan/pemerhati kebangsaan	Jumlah pemberian reward bagi Toga/Toma/Lembaga/org anisasi keagamaan/pemerhati kebangsaan	orang	0		6										30							
		Jumlah guru MDA bersertifikasi :	Jumlah guru MDA bersertifikasi :																					
		- Kategori A	- Kategori A	orang	227		267										339							
		- Kategori B	- Kategori B	orang	71		56										13							
		- Kategori C	- Kategori C	orang	37		16																	
		- Belum bersertifikasi	- Belum bersertifikasi	orang	-		15										10							
		Persentase MDA yang terfasilitasi	- Persentase MDA yang terfasilitasi	%	0		100										100							
		Jumlah cabang MTQ yang diunggulkan	- jumlah cabang MTQ yang diunggulkan	cabang	-		2										6							
		Persentase qori/qorih yang meraih peringkat 3 besar	- Persentase qori/qorih yang meraih peringkat 3 besar	%	-		30										30							
		Persentase keterlibatan pejabat dalam Mabti	- Persentase keterlibatan pejabat dalam Mabti	%	0		70										90							

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (outcome)		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab	
2016	2017-2021	2016	2017-2021		Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	2016	2017-2021
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Kepala sekolah yang memiliki sertifikat kepala sekolah dan nomor unik kepala sekolah (NUKS)	-	%	70	381.94		791.58		420.09		531.94		531.94		631.94	3,289.44	Dinas Pendidikan
		Persentase guru yang memenuhi standar kualifikasi akademis	Persentase guru yang memenuhi standar kualifikasi akademis															
		- SD	- SD	%	100		97.88		98		98		100		100		100	
		- SMP/MTs	- SMP/MTs	%	100		96		96		97		97		98		98	
		- SMA/MA/SMK	-	%	100		-		-		-		-		-		-	
		Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik															
		- SD	- SD	%	70		75		85		90		95		100		100	
		- SMP/MTs	- SMP/MTs	%	80		85		90		95		100		100		100	
		- SMA/MA/SMK	-	%	70		-		-		-		-		-		-	
		Persentase tenaga pendidik yang memiliki kemampuan bahasa asing	-	%	25		-		-		-		-		-		-	
Program pendidikan Non Formal	Program pendidikan Non Formal	Jumlah lembaga/kursus yang terakreditasi A	Jumlah lembaga/kursus yang terakreditasi A	lembaga	0	496.49	1	654.30	3	629.70	4	996.49	5	1,496.49	6	1,696.49	5,969.98	Dinas Pendidikan
		Jumlah angkatan kerja muda yang mendapatkan pendidikan kecakapan kerja	-	orang	75		-		-		-		-		-		-	
		-	Jumlah warga belajar yang mendapatkan pendidikan kecakapan kerja	orang	-		75		80		85		90		95		425	
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rata-Rata UN SD	Rata-Rata UN SD	nilai	7.5	972.89	7.7	1,133.82	7.7	1,046.82	7.7	1,072.89	8	1,122.89	8	1,172.89	6,522.19	Dinas Pendidikan
		Rata-Rata UN SMP	Rata-Rata UN SMP	nilai	6		6		6.5		6.5		7		7		7	
		Rata-Rata UN SMA/MA/SMK	-	nilai	6		-		-		-		-		-		-	
		Persentase siswa yg mengikuti kegiatan MABIT SLTP	Persentase siswa yg mengikuti kegiatan MABIT SLTP	%	90		90		90		90		90		90		90	
		Persentase siswa yg mengikuti kegiatan MABIT SLTA	-	%	90		-		-		-		-		-		-	
Program Pembinaan dan Pemasarakan Seni dan Olahraga Pelajar	Program Pembinaan dan Pemasarakan Seni dan Olahraga Pelajar	Jumlah pelajar berprestasi sentra olahraga SD di OZSN	-	orang	-	1,185.17		1,089.16		1,087.66		1,285.17		1,335.17		1,335.17	7,317.51	Dinas Pendidikan
		Jumlah pelajar berprestasi sentra olahraga SMP di OZSN	-	orang	3		-		-		-		-		-		-	
		Jumlah perolehan medali OZSN SD/MI	-	medali	-		-		-		-		-		-		-	
		Jumlah perolehan medali OZSN SMP/MTs	-	medali	3		-		-		-		-		-		-	
		Jumlah perolehan medali OZSN SMA/SMK/MA	-	medali	6		-		-		-		-		-		-	
		Jumlah perolehan medali FLSN SMP/MTs	-	medali	2		-		-		-		-		-		-	
		Jumlah perolehan medali FLSN SMA/MA	-	medali	-		-		-		-		-		-		-	
		Jumlah perolehan medali FLSN SMK	-	medali	2		-		-		-		-		-		-	
		Jumlah perolehan medali Popda	Jumlah perolehan medali Popda	medali	7		10		11		12		13		14		67	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembansunan		Indikator Kinerja Program (outcome)		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab			
2016	2017-2021	2016	2017-2021		Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	2016	2017-2021
		-	Jumlah perolehan medali O2SN SD/MI dan SMP/MTs	medali			3		4		5		5		5		22			
-	Penyediaan Bantuan Ooerasional Sekolah		Angka Partisipasi Kasar					13,060.24		-		13,060.24		13,060.24		13,060.24		52,240.94		Dinas Pendidikan
			-SD/MI				110.03		110.03		110.03		110.03		110.03		110.03			
			-SMP/MTS				99.84		99.84		99.84		99.84		99.84		99.84			
			Angka Partisipasi Murni																	
			-Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI				92.3		92.3		92.3		92.3		92.3		92.3			
			-Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS				79.15		79.15		79.15		79.15		79.15		79.15			
Kesehatan						33,156.39		38,596.01		62,353.62		49,733.55		47,500.00		48,000.00		279,339.58		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	2,583.67	100	3,065.72	100	2,893.92	100	4,483.67	100	4,883.67	100	5,023.67	100	22,934.32	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Program peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Program peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	1,994.93	100	1,366.73	100	1,780.70	100	2,500.00	100	2,800.00	100	3,000.00	100	13,442.36	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Program peningkatan Disiplin Aparatur	Program peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin berpakaian	Persentase pelanggaran disiplin berpakaian	%	0	224.93	0	262.33	0	269.25	0	350.00	0	450.00	0	467.58	0	2,024.09	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Program peningkatan kapasitas Sumber daya aparatur	Program peningkatan kapasitas Sumber daya aparatur	Cakupan pemenuhan kebutuhan peningkatan SDM aparatur	Cakupan pemenuhan kebutuhan peningkatan SDM aparatur	%	100	218.27	100	138.34	100	81.85	100	508.27	100	608.27	100	608.27	100	2,163.27	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Program peningkatan pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program peningkatan pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	-	%	100	8.70	-	12.00	-	12.00	-	7.70	-	7.70	-	8.00	-	56.09	Dinas Kesehatan	-
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	-		Baik		Baik		Baik		Amat baik		Amat baik		Amat baik			
			Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	-		B		BB		BB		A		A		A			
			Tingkat kematangan implementasi SPIP	Level	-		Level 2		Level 2		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3			
			persentase penatausahaan keuangan yang sesuai regulasi	%	-		100		100		100		100		100		100			
			Persentase keselarasan dokumen perencanaan PD	%	-		90		90		90		90		90		90			
Program Penyediaan/ pengadaan obat dan Perbekalan Kesehatan	Program obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat , vaksin dan Perbekalan Kesehatan Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar	Persentase ketersediaan obat , vaksin dan Perbekalan Kesehatan Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar	%	97	3,718.19	97	2,477.78	97	3,784.65	97	4,805.75	97	5,505.75	97	5,082.02	97	25,374.14	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Persentase Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Rujukan	Persentase Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Rujukan	%	97		97		97		97		97		97		97			
Program Upaya Kesehatan Masyarakat		Jumlah Puskesmas yang Tersertifikasi Akreditasi	Jumlah Puskesmas yang Tersertifikasi Akreditasi	unit	2	12,226.73	3	12,196.53	4	9,336.24	4	8,151.83	4	7,920.16	4	7,941.19	4	57,772.69	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Jumlah sarana pelayanan kesehatan lainnya yang tersertifikasi (klinik, RS Khusus, BPS, DPS,Laboratorium, dll)	Jumlah sarana pelayanan kesehatan lainnya yang tersertifikasi (klinik, RS Khusus, BPS, DPS,Laboratorium, dll)	unit	0		1		2		2		4		5		5			
		Jumlah puskesmas yang telah ditetapkan sebagai puskesmas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Jumlah puskesmas yang telah ditetapkan sebagai puskesmas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	unit	0		0		4		4		4		4		4			

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (outcome)		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab	
2016	2017-2021	2016	2017-2021		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2016	2017-2021
					Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt		
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olah raga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olah raga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	%	50		75		100		100		100		100			
		Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Upaya Peningkatan Pembinaan pelayanan kesehatan Indra dan fungsional	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Upaya Peningkatan Pembinaan pelayanan kesehatan Indra dan fungsional	unit	4		4		4		4		4		4			
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana laboratorium kesehatan daerah	-	%	97		-		-		-		-		-			
		Jumlah Puskesmas yang Menerapkan Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)	-	unit	4		-		-		-		-		-			
		Persentase Puskesmas yang Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Jiwa	Persentase Puskesmas yang Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Jiwa	%	75		100		100		100		100		100			
Program Pengawasan Obat dan Makanan	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pelaksanaan pengawasan Obat dan makanan	Persentase pelaksanaan pengawasan Obat dan makanan	%	82	46.32	84	49.38	86	40.00	88	66.32	90	85.32	92	86.32	92	373.65 Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Rumah tangga ber PHBS	-	%	58	5,131.18	-	854.01	-	956.48	-	810.00	-	820.40	-	820.20	-	9,392.28 Dinas Kesehatan -
		Jumlah kebijakan PHBS	Jumlah kebijakan PHBS	dok	1		2		2		3		4		5			
		Jumlah kecurahan siaga aktif	-	unit	3		4		-		-		-		-			
		Jumlah Pokjanal UKBM yang aktif	Jumlah Pokjanal UKBM yang aktif	unit	3		4		5		6		7		7			
		Jumlah Puskesmas yang melaksanakan UKK	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan UKK	unit	1		2		3		4		4		4			
		Jumlah kebijakan publik berwawasan kesehatan dalam rangka promosi kesehatan	-	kebijakan	4		-		-		-		-		-			
		Persentase Anak sekolah yang mendapat penjangkaran kesehatan untuk peserta didik kls 1	-	%	80		80		-		-		-		-			
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjangkaran kesehatan untuk peserta didik kelas 7 dan 10	-	%	100		100		-		-		-		-			
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi kekurangan gizi (wasting) (BB/TB) pada balita	-	%	0.1	550.63	-	637.09	-	680.00	-	452.00	-	472.00	-	475.00	-	3,266.72 Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
		Persentase Anemia Ibu Hamil	-	%	21.2		-		-		-		-		-			
		Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	%	10.00		12		14		14		15		15			
		Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif	%	74.4		74.6		74.8		75		75		75			

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (outcome)		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab	
					2016		2017		2018		2019		2020		2021					
2016	2017-2021	2016	2017-2021		Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	2016	2017-2021
		Persentase Balita yg ditimbang Berat badannya (D/S)	Persentase Balita yang mendapatkan penimbangan dan pengukuran tinggi badan sesuai standar	%	68		100		100		100		100		100		100			
		Persentase Balita dengan gizi buruk (kurus sekali)	-	%	0.1		-		-		-		-		-		-			
		Persentase Balita umur 6-59 bln yg mendapat vitamin A	Persentase balita yang mendapatkan kapsul Vitamin A 2 kali setahun	%	88.6		100		100		100		100		100		100			
		-	Persentase ibu hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	%	-		12		14		14		15		15		15			
Program Pengembangan lingkungan sehat	Program Pengembangan lingkungan sehat	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM	desa / kelurahan	3	330.11	4	645.78	4	792.05	5	535.63	5	590.63	5	595.83	5	3,490.03	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan	Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan	%	59		68		75		84		92		100		100			
		Persentase Tempat-Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan	Persentase Tempat-Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan	%	50		60		70		80		90		100		100			
		Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	%	55		65		75		80		90		100		100			
		Persentase Kecamatan dan kelurahan yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat	Persentase Kecamatan dan kelurahan yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat	%	100		100		100		100		100		100		100			
		Persentase akses air minum sehat	Persentase akses air minum sehat	%	93		94		95		97		98		100		100			
		Persentase akses jamban sehat	Persentase akses jamban sehat	%	85		88		91		94		97		100		100			
		Persentase Rumah sehat	Persentase Rumah sehat	%	86		89		92		95		97		100		100			
		Persentase kelurahan yang memenuhi Syarat Kualitas Kesling	-	%	25		-		-		-		-		-		-			
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (Success Rate)	Angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (Success Rate)	%	84	605.36	84	379.64	85	1,790.00	85	380.11	85	420.11	85	425.01	85	4,000.23	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Case Notification Rate (CNR) penyakit TB	Case Notification Rate (CNR) penyakit TB	%	129.9		129.9		131.2		131.2		132.5		132.5		132.5			
		Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat	-	%	82		-		-		-		-		-		-			
		Persentase angka kasus HIV/AIDS yang diobati	Persentase angka kasus HIV/AIDS yang diobati	%	45		47		50		52		55		55		55			
		Prevalensi kasus HIV/AIDS yang terlayani	-	%	100		-		-		-		-		-		-			
		Persentase imunisasi dasar lengkap pada bayi	Persentase balita yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	%	91.5		100		100		100		100		100		100			
		Persentase kelurahan yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi	Persentase kelurahan yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi	%	85		85		90		90		92		92		92			
		Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	84		86		88		90		92		92		92			

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (outcome)		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab	
2016	2017-2021	2016	2017-2021		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2016	2017-2021
					Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt		
		-	Jumlah pemenuhan 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang untuk RSD	orang	-		1		2		6		7		7			
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) sebagai institusi penerima wajib lapor (IPWL) pecandu Narkoba yang aktif	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) sebagai institusi penerima wajib lapor (IPWL) pecandu Narkoba yang aktif	%	25		25		25		25		25		25			
		Persentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	Persentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	%	75		100		100		100		100		100			
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Persentase anak usia 0-9 bulan yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	%	90	84.90	100	49.78	100	250.00	100	110.66	100	160.66	100	134.66	100	790.65 Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Cakupan Pelayanan Lansia	-	%	82	124.18	-	164.70	-	700.00	-	155.10	-	205.10	-	170.10	-	1,519.18 Dinas Kesehatan -
		Persentase Lansia yang Diskrening kesehatan (Usia ≥ 60 tahun)	Persentase Lansia yang Diskrening kesehatan (Usia ≥ 60 tahun)	%	35		100		100		100		100		100			
Program Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Program Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Persentase pelaksanaan pengawasan Obat dan makanan	Persentase pelaksanaan pengawasan Obat dan makanan	%	82	33.91	84	25.11	86	-	88	75.00	90	90.00	92	80.00	92	304.02 Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Angka kematian ibu	-	per 100.000 KH	166	807.92	-	722.36	-	800.00	-	1,000.92	-	1,020.92	-	1,000.92	-	5,353.04 Dinas Kesehatan -
		Angka kematian bayi	-	per 1000 KH	24		-		-		-		-		-			
		-	Persentase Ibu Hamil mendapat Pelayanan K1	%	-		100		100		100		100		100			
		Persentase Ibu Hamil Mendapat Pelayanan K4	Persentase Ibu Hamil Mendapat Pelayanan K4	%	95		100		100		100		100		100			
		Persentase Ibu Bersalin yg Ditolong Oleh tenaga kesehatan (PN)	Persentase Ibu Bersalin yg Ditolong Oleh tenaga kesehatan (PN)	%	87		100		100		100		100		100			
		Persentase Ibu Nifas Yg Mendapatkan Pelayanan (KF)	Persentase Ibu Nifas Yg Mendapatkan Pelayanan (KF)	%	90		100		100		100		100		100			
		Persentase Ibu hamil,bersalin, Nifas yg mendapatkan Penanganan Komplikasi Kebidanan (PK)	Persentase Ibu hamil,bersalin, Nifas yg mendapatkan Penanganan Komplikasi Kebidanan (PK)	%	87.5		88		88		88.5		88.5		90		90	
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil	-	%	100		-		-		-		-		-		-	
		Persentase Puskesmas yang melakukan orientasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)	-	%	100		-		-		-		-		-		-	
		Persentase Pelayanan Neonatus Pertama (KN1)	Persentase Pelayanan Neonatus Pertama (KN1)	%	80		100		100		100		100		100		100	
		Kesehatan Neonatus Lengkap (KN 3)	Kesehatan Neonatus Lengkap (KN 3)	%	80		100		100		100		100		100		100	
		Persentase Pelayanan Komplikasi Neonatus	Persentase Pelayanan Komplikasi Neonatus	%	35		40		45		50		60		60		60	
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi	-	%	93		-		-		-		-		-		-	
Program Peningkatan Kesehatan Reproduksi	Program Peningkatan Kesehatan Reproduksi	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja	%	100	192.47	100	98.57	100	350.00	100	260.55	100	300.55	100	225.55	100	1,427.69 Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (outcome)		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab	
					2016		2017		2018		2019		2020		2021					
					Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt				
2016	2017-2021	2016	2017-2021																	
		Persentase Puskesmas Rawat Inap Mampu Laksana PKPR	Persentase Puskesmas Rawat Inap Mampu Laksana PKPR	%	100		100		100		100		100		100		100			
		Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Esensial (PKRE) terpadu	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Esensial (PKRE) terpadu	%	100		100		100		100		100		100		100			
		Persentase faskes yg memberikan Pelayanan KB sesuai standart	-	%	80		-		-		-		-		-		-			
		Persentase PUS yg menjadi peserta KB Aktif (CPR)	-	%	72		-		-		-		-		-		-			
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Persentase Puskesmas yg melaksanakan pelayanan PTM	Persentase Puskesmas yg melaksanakan pelayanan PTM	%	100	-	100	498.99	100	700.00	100	430.25	100	450.25	100	420.03	100	2,499.51	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Persentase masyarakat usia > 18 th yg melaksanakan pemeriksaan tekanan darah	Persentase masyarakat usia > 18 th yg melaksanakan pemeriksaan tekanan darah	%	65		70		70		75		75		80		80			
		Kumulatif Persentase perempuan usia 30 sampai 50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara	Kumulatif Persentase perempuan usia 30 sampai 50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara	%	5		15		20		25		30		35		35			
		Persentase puskesmas yang melakukan pemeriksaan kesehatan pengemudi di terminal utama	-	%	100		-		-		-		-		-		-			
		Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji (3 bulan sebelum operasional)	Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji (3 bulan sebelum operasional)	%	65		70		75		80		85		85		85			
		Prevalensi obesitas penduduk usia 18+ tahun	Prevalensi obesitas penduduk usia 18+ tahun	%	13.4		13.3		13.2		13.1		13		13		13			
		Jumlah kelurahan melaksanakan Posbindu PTM	Jumlah kelurahan melaksanakan Posbindu PTM	kelurahan	10		11		12		12		13		13		13			
		Persentase sekolah yg melaksanakan Kebijakan kawasan tanpa rokok di sekolah	Persentase sekolah yg melaksanakan Kebijakan kawasan tanpa rokok di sekolah	%	85		90		95		100		100		100		100			
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						117,622.75		94,849.24		75,888.85		79,415.40		81,477.61		85,000.00		534,253.85		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	1,209.60	100	907.33	100	612.74	100	923.40	100	929.61	100	930.00	100	5,512.68	DPU & DKTR	DPUPR
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	%	100	11,763.35	100	569.79	100	510.64	100	650.00	100	820.00	100	850.00	100	15,163.79	DPU & DKTR	DPUPR
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	persentase pelanggaran disiplin berpakaian	persentase pelanggaran disiplin berpakaian	%	0	75.55	0	46.80	0	44.20	0	40.00	0	41.00	0	65.00	0	312.55	DPU & DKTR	DPUPR
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	cakupan pemenuhan kebutuhan peningkatan SDM aparatur	cakupan pemenuhan kebutuhan peningkatan SDM aparatur	%	100	188.52	100	165.48	100	112.18	100	250.00	100	250.00	100	250.00	100	1,216.19	DPU & DKTR	DPUPR
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	-	%	100	2.70	-	2.65	-	1.32	-	2.00	-	2.00	-	3.00	-	13.68	DPU & DKTR	DPUPR
		Indeks Kepuasan Masyarakat		Nilai	-		Baik		Baik		Baik		Amat baik		Amat baik		Amat baik			

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (outcome)		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab	
2016	2017-2021	2016	2017-2021		2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp. Jt	2016	2017-2021				
					Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt						
			Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	-		B		BB		BB		A		A		A							
			Tingkat kematangan implementasi SPIP	Level	-		Level 2		Level 2		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3							
			persentase penatausahaan keuangan yang sesuai regulasi	%	-		100		100		100		100		100		100							
			Persentase keselarasan dokumen perencanaan PD	%	-		90		90		90		90		90		90							
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	panjang jalan yang di bangun	panjang jalan yang di bangun	Km	4	55,832.27	2	57,718.00	2	35,549.00	1	32,500.00	0.5	30,000.00	0.5	33,000.00	10	244,599.27	DPU	DPUPR				
			Jumlah jembatan yang di bangun	unit	3		7		3		2		2		1		21	-	DPUPR					
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase tingkat kondisi jalan kota baik dan sedang	Persentase tingkat kondisi jalan kota baik dan sedang	%	91	1,128.75	92	920.29	93	500.00	94	1,250.00	95	2,000.00	96	2,000.00	96	7,799.04	DPU	DPUPR				
		Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar	Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar	%	9.47		11.47		15.46		20.44		22.44		24.43		24.43		DPUPR					
		Persentase panjang jalan yang memiliki drainase	Persentase panjang jalan yang memiliki drainase	%	41.89		43.36		44.88		46.37		47.87		49.37		49.37		DPUPR					
		-	Persentase jembatan kota kondisi baik	%	-		64		66		68		70		72		72	-	DPUPR					
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah	-	Persentase ketersediaan gedung kantor pemerintah daerah yang memadai	-	%	65.85	-	-		-	-		-	-		-		-	DPU	DPERKIM					
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmagaan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmagaan	Persentase ketersediaan lampu jalan umum	Persentase ketersediaan lampu jalan umum	%	69.81	2,043.39	74.80	1,603.58	79.78	1,290.00	84.77	3,300.00	89.76	4,210.00	94.74	5,042.00	94.74	17,488.97	DPU	DPUPR				
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	68	22,494.66	73	19,739.58	78	10,535.37	83	12,550.00	88	13,850.00	93	13,500.00	93	92,669.61	DPU	DPUPR				
-	Pengembangan, Pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya lainnya	-	Jumlah embung yang dibangun	unit	-	-	1	-	1	17,000.00	1	-	1	-	1	-	5	17,000.00	-	DPUPR				
-	Program Pengembangan Pengelolaan Air Baku	-	Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	%	-		0	-	0	250.00	100	4,500.00	100	4,250.00	100	4,300.00	100	13,300.00	DPU	DPUPR				
Program Pengendalian Banjir	Program Pengendalian banjir	Persentase panjang tebing sungai rawan longsor yang tertangani	Persentase panjang tebing sungai rawan longsor yang tertangani	%	30	12,436.86	40	10,397.87	45	6,530.00	50	19,700.00	55	21,060.00	60	21,000.00	60	91,124.73	DPU	DPUPR				
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Jumlah infrastruktur strategis kota yang dibangun	-		0	2,043.91	-	1,802.86	-	2,634.00	-	2,750.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	15,230.78	DPU	DPUPR				
			Persentase ketersediaan data perencanaan	%	-		90		100		100		100		100		100	-	DPUPR					
			Persentase tersedianya dokumen perencanaan	%	-		90		100		100		100		100		100	-	DPUPR					
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik	-	%	81.25	8,090.55	-		-	-								8,090.55	DPU	DPERKIM				
Program Perencanaan Tata Ruang	Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah dokumen rencana tata ruang yang di susun	Jumlah dokumen rencana tata ruang yang di susun	dok	0	-	0	440.61	1	-	1	400.00		450.00		450.00		1,740.61	DKTR / BAPPEDA	DPUPR				

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (outcome)		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab	
					2016		2017		2018		2019		2020		2021					
					Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt		
Program Pemanfaatan Ruang	Program Pemanfaatan Ruang	Persentase bangunan yang memiliki IMB	Persentase bangunan yang memiliki IMB	%	60	219.29	63	318.64	66	228.64	69	380.00	72	390.00	75	385.00	75	1,921.56	DKTR	DPUPR
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase penanganan pelanggaran izin bangunan	Persentase penanganan pelanggaran izin bangunan	%	25	93.34	30	215.76	35	90.76	40	220.00	45	225.00	50	225.00	50	1,069.86	DKTR	DPUPR

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (outcome)		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab								
2016	2017-2021	2016	2017-2021		Target	2016	Rp. Jt	Target	2017	Rp. Jt	Target	2018	Rp. Jt	Target	2019	Rp. Jt	Target	2020	Rp. Jt	Target	2021	Rp. Jt	Target	2016	2017-2021
Ketentraman, ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat						4,866.05		8,546.98		7,184.64		8,250.00		9,000.00		7,500.00		45,347.68							
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	682.04	100	1,021.00	100	1,057.55	100	1,100.00	100	1,200.00	100	1,200.00	100	6,260.59	Kantor Satpol PP	Satpol PP & Damkar					
						420.72		-		-		-		-		-		420.72	Kantor Kesbangpol	-					
						431.38		684.34		585.58		600.00		735.18		808.69		3,845.17	BPBD	BPBD					
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	%	100	185.93	100	183.48	100	275.13	100	241.00	100	435.49	100	260.00	100	1,581.03	Kantor Satpol PP	Satpol PP & Damkar					
						45.99		-		-		-		-		-		45.99	Kantor Kesbangpol	-					
						194.03		138.73		163.02		199.12		219.03		240.93		1,154.86	BPBD	BPBD					
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin berpakaian	Persentase pelanggaran disiplin berpakaian	%	0	156.01	0	68.75	0	242.35	0	216.15	0	254.38	0	273.22	0	1,210.85	Kantor Satpol PP	Satpol PP & Damkar					
						9.00		-		-		-		-		-		9.00	Kantor Kesbangpol	-					
						8.40		12.15		12.75		14.03		15.43		16.97		79.72	BPBD	BPBD					
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pemenuhan kebutuhan peningkatan SDM aparatur	Cakupan pemenuhan kebutuhan peningkatan SDM aparatur	%	100	285.98	100	220.69	100	281.53	100	309.68	100	350.00	100	360.00	100	1,807.87	Kantor Satpol PP	Satpol PP & Damkar					
						13.24		44.27		34.52								92.03	BPBD	BPBD					
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					0.36		0.46		2.57		2.83		0.99		1.10		8.30	Kantor Satpol PP	Satpol PP & Damkar					
						1.23		-		-		-		-		-		1.23	Kantor Kesbangpol	-					
					100	1.67		1.40		1.64		1.80		1.98		2.18		10.67	BPBD	BPBD					
		Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	-	%	-																				
		-	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	-		Baik		Baik		Baik		Amat baik		Amat baik		Amat baik								
		-	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	-		B		BB		BB		A		A		A								
		-	Tingkat kematangan implementasi SPIP	Level	-		Level 2		Level 2		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3								
		-	persentase penatausahaan keuangan yang sesuai regulasi	%	-		100		100		100		100		100		100								
		-	Persentase keselarasan dokumen perencanaan PD	%	30		90		90		90		90		90		90								
	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal						439.77											439.77		Kantor Kesbangpol					
Program Koordinasi dan Pembinaan Pencegahan Bahaya Narkoba dan Miras	Program Koordinasi dan Pembinaan Pencegahan Bahaya Narkoba dan Miras	Jumlah masyarakat yang tertangkap razia	-	orang	3	246.05	-	1,120.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,366.64	Kantor Kesbangpol	Kantor Kesbangpol					
	-	Cakupan penyuluhan pencegahan peredaran/penyalahgunaan miras dan narkoba	-	kali	90		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Program Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Peraturan Daerah dan kebijakan KDH	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	-	%	11.39	548.64	-	1,620.43	-	1,295.22	-	1,471.87	-	1,480.00	-	1,000.00	-	7,416.16	Kantor Satpol PP	Satpol PP & Damkar					
		Rasio jumlah satpol pp per 10000 penduduk	-	%	90		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Kantor Satpol PP						
		Persentase Kasus Yustisi dan Non Yustisi yang diselesaikan	Persentase Kasus Yustisi dan Non Yustisi yang diselesaikan	%	24		90		90		90		90		90		90		Kantor Satpol PP	Satpol PP & Damkar					

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (outcome)		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab			
					2016		2017		2018		2019		2020						2021	
					2016	2017-2021	2016	2017-2021		Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Razia operasi gabungan	Razia Operasi Gabungan	kali	34		24		26		26		28		28		30		Kantor Satpol PP	Satpol PP & Damkar
		Persentase penyakit masyarakat	-	%	0.97	949.54	-	1,013.93	-	1,166.98	-	1,800.00	-	1,800.00	-	1,184.04	-	7,914.50	Kantor Satpol PP	Satpol PP & Damkar
		Cakupan rasio petugas linmas	-	%	4.5		-		-		-		-		-			Kantor Satpol PP	-	
		Rasio patroli siaga ketertiban umum dan ketertarikan masyarakat	Rasio patroli siaga ketertiban umum dan ketertarikan masyarakat	%	38		7.5		7.5		9		9		9		9	Kantor Satpol PP	Satpol PP & Damkar	
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Jumlah kasus pekat	Jumlah kasus pekat	kali	-	-	36	31.25	34	33.00	32	36.30	30	39.93	28	43.93	28	184.42	Kantor Satpol PP	Satpol PP & Damkar
		Jumlah kasus penyalahgunaan napza, Miras, penyebaran HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual lainnya dikalangan muda	-	kali	-		-		-		-		-		-		-	Kantor Satpol PP	-	
		Peraturan Daerah terkait Penyakit Masyarakat dan Ketertiban Umum yang mengikuti perkembangan zaman	-	buah	100		-		-		-		-		-		-			
Program Peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Program Peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase penanganan bencana dalam waktu tanggap darurat	-	%	85			1,229.45		1,333.45		1,287.23		1,408.43		1,000.00		6,258.55		Satpol PP & Damkar
		Persentase aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	-	%	4		-		-		-		-		-		-	BPBD		
		Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK	Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK	unit	100		4		5		6		6		6		6	BPBD	Satpol PP & Damkar	
		Persentase kasus kebakaran yang tertangani dalam waktu tanggap	Persentase kasus kebakaran yang tertangani dalam waktu tanggap	%	75		100		100		100		100		100		100	BPBD	Satpol PP & Damkar	
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana alam	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana alam	%	65	685.86	80	716.28	80	435.11	80	970.00	85	1,059.16	85	1,108.95	85	4,975.37	BPBD	BPBD
		Persentase tenaga penanggulangan bencana alam yang terampil	Persentase tenaga penanggulangan bencana alam yang terampil	%	0		70		75		80		85		90		90	BPBD	BPBD	
		Persentase Terbentuknya kelurahan tangguh bencana	Persentase Terbentuknya kelurahan tangguh bencana	%			15.38		30.77		46.55		61.54		76.92		76.92	BPBD	BPBD	
	Peningkatan Kesiagaan dan Penanggulangan Bencana									264.23							264.23	BPBD		
Sosial						2,496.83		3,957.92		3,133.35		3,056.26		3,056.26		3,731.79		19,432.42		
Program Adm perkantoran	Program Adm perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	531.34	100	695.07	100	829.06	100	781.87	100	781.87	100	950.00	100	4,569.21	Disosnaker	Dinsos
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	%	100	313.92	100	204.49	100	210.18	100	298.31	100	298.31	100	348.00	100	1,673.21	Disosnaker	Dinsos
Program Peningkatan disiplin aparatur	Program Peningkatan disiplin aparatur	Persentase pelanggaran disiplin berpakaian	Persentase pelanggaran disiplin berpakaian	%	0	26.40	0	27.70	0	34.25	0	39.65	0	39.65	0	47.00	0	214.65	Disosnaker	Dinsos
Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan pemenuhan kebutuhan peningkatan SDM aparatur	Cakupan pemenuhan kebutuhan peningkatan SDM aparatur	%	100	22.22	100	22.82	100	67.92	100	22.22	100	22.22	100	34.00	100	191.40	Disosnaker	Dinsos
Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	-	%	100	2.10	-	2.30	-	7.71	-	5.00	-	5.00	-	7.00	-	29.10	Disosnaker	Dinsos
		Indeks Kepuasan Masyarakat		Nilai	-		Baik		Baik		Baik		Amat baik		Amat baik		Amat baik			

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (outcome)		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab			
2016	2017-2021	2016	2017-2021		Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	2016	2017-2021
		Jumlah gelandangan, pengemis, WTS dan korban penyalahgunaan Napza	Jumlah penanganan penyakit sosial (Gelandangan, pengemis ODGJ, WTS, dan korban penyalahgunaan Napza)	orang	101		95		90		85		80		75		75			
		Persentase penyakit sosial yang ditangani	-	%	7,4		0		0		0		0		0					
Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan	Persentase KP3K yang aktif	-	%	38	-	-	85.14	-	88.04	-	180.00	-	180.00	-	220.00	-	753.18	Disosnaker	Dinsos
		-	Jumlah KP3P yang aktif	Kelompok	-		9		10		11		12		13		13			
		Jumlah KK miskin yang terfasilitasi program penanggulangan kemiskinan	Jumlah KK miskin yang terfasilitasi program penanggulangan kemiskinan	KK	2507		2858		3209		3559		3459		3725		3725			
	Penanganan Fakir Miskin							200.00												
Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar						28,817.64		66,885.75		50,250.69		60,765.69		72,135.98		66,271.72		345,127.47	Sosnaker	DPMPPTSP
Tenaga Kerja						151.79		231.54		629.62		692.58		761.84		838.02		3,305.38		
Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja	Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	-	%	63.89	65.21	-		73.90	-	157.06	-	172.76	-	190.04	-	209.04	-	Dinas Sosnaker	DPMPPTSP
		Rasio tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kerja dan mandiri	-	%	26		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosnaker	-	
		-	Persentase Tenaga Kerja dilatih yang mendapatkan pekerjaan	%	-		63		65		68		70		73		73		-	DPMPPTSP
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Tingkat keselamatan dan perlindungan tenaga kerja	-	%	92.7	48.70	-	59.40	-	123.79	-	136.17	-	149.79	-	164.77	-	682.62	Dinas Sosnaker	DPMPPTSP
			Persentase Keikutsertaan Tenaga kerja dalam BPJS Ketenagakerjaan	%	-		62.5		65		67.5		70		72.5		72.5		-	DPMPPTSP
			Jumlah kasus terselesaikan	-	-		10		10		10		10		10		60		-	DPMPPTSP
			Persentase perusahaan yang memiliki SPST, Tripartit dan Bipartit	-	-		62.5		65		67.5		70		72.5		72.5		-	DPMPPTSP
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang disalurkan	-	orang	200	37.88	-	98.24	-	348.77	-	383.64	-	422.01	-	464.21	-	1,754.74	Dinas Sosnaker	DPMPPTSP
			Rasio tenaga kerja yang mendapatkan pekerjaan	%	-		62.5		65		67.5		70		72.5		72.5		-	DPMPPTSP
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						418.60		2,284.65		4,309.60		4,309.60		4,500.00		5,000.00		20,822.45		
-	Program Pelayanan Administrasi perkantoran	-	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	-	-	100	461.77	100	473.21	100	473.21	100	525.00	100	572.03	100	2,505.21	KBMP	DPPA
-	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	%	-	-	100	333.63	100	313.88	100	313.88	100	325.00	100	350.00	100	1,636.38	KBMP	DPPA
-	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	Persentase pelanggaran disiplin berpakaian	%	-	-	0	17.65	0	28.97	0	28.97	0	28.97	0	28.97	0	133.53	KBMP	DPPA

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (outcome)		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab	
2016	2017-2021	2016	2017-2021		Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	2016	2017-2021
-	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	Cakupan pemenuhan kebutuhan peningkatan SDM aparatur	%	-	-	100	50.00	1	86.25	1	86.25	1	86.25	1	92.50	1	401.25	KBMP	DPPPA
-	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	-	-	Baik	1.50	Baik	1.44	Baik	1.44	Amat baik	1.44	Amat baik	1.50	Amat baik	7.31	KBMP	DPPPA
			Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	-		B		BB		BB		A		A	A				
			Tingkat kematangan implementasi SPIP	Level	-		Level 2		Level 2		Level 3		Level 3		Level 3	Level 3				
			persentase penatausahaan keuangan yang sesuai regulasi	%	-		100		100		100		100		100	100				
			Persentase keselarsaan dokumen perencanaan PD	%	-		90		90		90		90		90	90				
Program Peningkatan Peran serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Persentase kelompok masyarakat / perusahaan yang telah diberikan pemahaman tentang PUG	-	%	0	330.12	16	448.67	32	827.49	48	827.49	60	835.00	72	925.00	72	4,193.77	KBMP	DPPPA
		Persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah	-	%	30.52		32.85		34.25		36.78		38.87		40.63	40.63				
		Persentase partisipasi perempuan dilembaga swasta	-	%	68.12		66.65		64.23		62.56		60.78		58.78	58.78				
		Persentase partisipasi perempuan dilembaga legislatif	-	%	5		5		5		15		15		15	15				
		Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan		%	-															
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase SKPD yang mempunyai program peduli anak	Persentase SKPD yang mempunyai program peduli anak dan perempuan	%	41	-	50	129.31	62	461.18	70	461.18	79	525.00	80	615.00	80	2,191.67	KBMP	DPPPA
		Persentase penurunan kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase penurunan kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	0.64		0.62		0.6		0.58		0.56		0.54	0.54				
		Jumlah lembaga yang melaksanakan perlindungan perempuan dan anak	-	lembaga	10		-		-		-		-		-	-				
		Persentase tersedianya kebijakan pemenuhan hak anak	Persentase tersedianya kebijakan pemenuhan hak anak	%	41		50		62		70		79		80	80				
		Persentase kelembagaan anak yang aktif		%	33		66		100		100		100		100	100				

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (outcome)		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab	
2016	2017-2021	2016	2017-2021		2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp. Jt	2016	2017-2021
				%	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt		
Program Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan gender dan anak	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase SKPD yang menerapkan PPRG	Persentase PD yang melaksanakan PPRG	%	30	88.49	40	186.59	50	457.93	60	457.93	70	464.36	80	515.00		2,170.29	KBPMP	DPPPA
		Persentase SKPD yang memiliki data terpilah		%	0															
-	Program peningkatan ketahanan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	-	Peningkatan ketahanan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga			-		655.53		1,348.98		1,348.98		1,348.98		1,425.00		6,127.48		DPPPA
-	Program Pemenuhan hak anak dan perlindungan anak	-	Kota Solok Menjadi Kota Layak Anak			-	-	-	Pratama	128.84	Madya	128.84	Madya	175.00	Nindya	225.00	Nindya	657.67		
-	Program Peningkatan Sistem Informasi dan Data	-	Persentase OPD yang memiliki data terpilah			-	20	-	30	181.44	40	181.44	50	185.00	60	250.00	60	797.89		
Pangan						1,579.18		1,676.68		2,129.33		2,129.33		2,250.00		2,877.22		12,641.74		
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	242.27	100	452.35	100	371.54	100	371.54	100	548.03	100	907.44	100	2,893.16	Kantor Ketahanan Pangan	Dinas Pangan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	cakupan pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana perkantoran	%	100	57.77	100	46.15	100	133.25	100	133.25	100	155.06	100	201.57	100	727.05	Kantor Ketahanan Pangan	Dinas Pangan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin berpakaian	persentase pelanggaran disiplin berpakaian	%	0	10.20	0	15.10	0	15.70	0	15.70	0	53.66	0	69.75	0	180.11	Kantor Ketahanan Pangan	Dinas Pangan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pemenuhan kebutuhan peningkatan SDM aparatur	cakupan pemenuhan kebutuhan peningkatan SDM Aparatur	%	100	28.00	100	22.70	100	27.80	100	27.80	100	46.98	100	61.08	100	214.36	Kantor Ketahanan Pangan	Dinas Pangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	-	%	100	0.89	-	0.89	-	0.92	-	0.92	-	1.56	-	2.03	-	7.22	Kantor Ketahanan Pangan	Dinas Pangan
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	-	-		Baik		Baik		Baik		Amat baik		Amat baik		Amat baik			
		Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	-	-		B		BB		BB		A		A		A			
		Tingkat kematangan implementasi SPIP	Level	-	-		Level 2		Level 2		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3			
		persentase penatausahaan keuangan yang sesuai regulasi	%	-	-		100		100		100		100		100		100			
		Persentase keselarasan dokumen perencanaan PD	%	-	-		90		90		90		90		90		90			
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	-	nilai	81	1,240.05	-	1,139.49	-	499.51	-	499.51	-	826.82	-	920.01	-	3,885.33		
		Tingkat Ketersediaan Energi (AKE)	-	%	152		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Persentase Ketersediaan protein (AKP)	-	%	156		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	-	%	77.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Tingkat Ketersediaan Energi untuk Dikonsumsi Penduduk	%	-	-		144		145		146		147		148		148		Kantor Ketahanan Pangan	Dinas Pangan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (outcome)		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab	
2016	2017-2021	2016	2017-2021		2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp. Jt	2016	2017-2021
			Tingkat Ketersediaan Protein untuk Dikonsumsi Penduduk	%	-		170		171		172		173		174		174			
-	Program Peningkatan Diversifikasi dan Pengawasan Keamanan Pangan.	-	- Tingkat Kecukupan Konsumsi Protein Masyarakat	%	-	-	91.23	-	92.11	1,080.61	92.98	1,080.61	94.74	617.89	94.7	715.34	94.7	3,494.45	Kantor Ketahanan Pangan	Dinas Pangan
		-	- Tingkat Kecukupan Konsumsi Energi Masyarakat	%	-		90.23		90.93		91.63		92.33		93		93			
Pertanahan						239.27		6,209.71		245.61		300.00		325.00		350.00		7,669.58		
Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah		Penguasaan dan pengamanan tanah fasos			239.27	19	-	21	245.61	23	300.00	25	325.00	27	350.00	27	1,459.87		DPUPR
	Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan							6,209.71												
Lingkungan Hidup						6,342.78		10,657.22		8,974.14		10,500.00		11,500.00		13,500.00		61,474.14		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	247.25	100	824.78	100	866.54	100	875.75	100	900.00	100	950.00	100	4,664.31	KLH	DLH
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	%	100	204.46	100	386.51	100	291.03	100	295.00	100	300.00	100	350.00	100	1,826.99	KLH	DLH
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	persentase peningkatan disiplin berpakaian	persentase pelanggaran disiplin berpakaian	%	0	9.60	0	36.85	0	42.85	0	42.85	0	45.00	0	47.00	0	224.15	KLH	DLH
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	cakupan pemenuhan kebutuhan peningkatan SDM aparatur	cakupan pemenuhan kebutuhan peningkatan SDM aparatur	%	100	18.00	100	124.25	100	94.25	100	94.25	100	97.00	100	100.00	100	527.75	KLH	DLH
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	-	%	100	1.25	-	1.60	-	3.00	-	2.22	-	2.50	-	2.80	-	13.36	KLH	DLH
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	-		Baik		Baik		Baik		Amat baik		Amat baik		Amat baik			
			Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	-		B		BB		BB		A		A		A			
			Tingkat kematangan implementasi SPIP	Level	-		Level 2		Level 2		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3			
			persentase penatausahaan keuangan yang sesuai regulasi	%	-		100		100		100		100		100		100			
			Persentase keselarasan dokumen perencanaan PD	%	-		90		90		90		90		90		90			
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	IKA (Indeks Kualitas Air)	IKA (Indeks Kualitas Air)	%	20	972.96	24	652.73	29	850.94	45	970.00	50	900.00	60	1,000.00	60	5,346.63	KLH	DLH
		IKU (Indeks Kualitas Udara)	IKU (Indeks Kualitas Udara)	%	82		83		84		85		90		90		90		KLH	DLH
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Persentase Luasan RTH Publik	Persentase luasan RTH Publik	%	17.16	716.25	17.2	1,163.59	17.2	1,140.63	17.25	1,450.00	17.25	1,400.00	17.3	1,750.00	17.3	7,620.46	DKTR	DLH
-	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	-	Tersedianya TPU	unit	-	-	1	1,000.00	1	-	1	200.00	1	100.00	1	100.00	1	1,400.00	DKTR	DLH
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase Luas daerah Konservasi	Persentase Luas daerah Konservasi	%	14	121.41	15	79.67	16	113.12	17	115.00	18	125.00	19	150.00	19	704.20	KLH	DLH
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampahan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampahan	Persentase Cakupan Pelayanan Sampahan	Persentase Cakupan Pelayanan Sampahan	%	80	3,782.75	82	6,219.25	84	5,441.85	86	6,325.00	88	7,495.50	90	8,885.20	90	38,149.55	DKTR	DLH
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup	Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup	%	93.35	268.86	93.38	168.00	96.92	129.94	98.46	129.93	98.5	135.00	98.5	165.00	98.5	996.73	KLH	DLH

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (outcome)		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab	
					2016		2017		2018		2019		2020		2021					
					2016	2017-2021	2016	2017-2021	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt		
		persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	%	35		-		38.5		-		-		-		-		BKBPMP	0
		persentase pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	-	%	68.47		-		-		-		-		-		-		BKBPMP	0
		Tingkat partisipasi gotong royong masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Kelurahan	-	%	40.8		-		-		-		-		-		-		BKBPMP	0
			Persentase keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan	%					78											
Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan		Persentase KP3K yang aktif	-	%		93.79			-	-	-	-	-	-	-	-	-	93.79	KBPMP	
Program Pembinaan dan Pengembangan Kelurahan						42.55												42.55		
Pengendalian Penduduk dan KB					100	2,796.24		3,011.61		3,537.59		3,011.61		3,250.00		3,500.00		19,107.05		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran	%	100	551.33	100	464.12	100	550.44	100	464.11	100	464.11	100	504.11	100	2,998.22	KBPMP	Dispenduk-KB
Program peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	%	0	647.91	100	422.08	100	1,204.15	100	422.08	100	422.08	100	422.08	100	3,540.38	KBPMP	Dispenduk-KB
Program peningkatan Disiplin Aparatur	Program peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin berpakaian	Persentase pelanggaran disiplin berpakaian	%	100	34.80	0	38.05	0	27.85	0	38.05	0	38.05	0	38.05	0	214.85	KBPMP	Dispenduk-KB
Program peningkatan kapasitas Sumber daya aparatur	Program peningkatan kapasitas Sumber daya aparatur	Cakupan pemenuhan kebutuhan peningkatan SDM aparatur	Cakupan pemenuhan kebutuhan peningkatan SDM aparatur	%	100	50.46	100	19.04	100	45.56	100	19.04	100	19.04	100	19.04	100	172.18	KBPMP	Dispenduk-KB
Program peningkatan pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program peningkatan pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	-	%	-	2.63		1.19		1.24		1.19		1.19		1.19		8.63	KBPMP	Dispenduk-KB
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	-		Baik		Baik		Baik		Amat baik		Amat baik		Amat baik			
			Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	-		B		BB		BB		A		A		A			
			Tingkat kematangan Implementasi SPIP	Level	-		Level 2		Level 2		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3			
			persentase penatausahaan keuangan yang sesuai regulasi	%	-		100		100		100		100		100		100			
			Persentase keselarasan dokumen perencanaan PD	%			90		90		90		90		90		90			
Program Keluarga Berencana	Program Keluarga Berencana				48.5	717.23		1,314.37		252.99		1,314.37		1,552.76		1,652.76		6,804.48	KBPMP	Dispenduk-KB
		Penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	%			42.05		43		43.5		43.7		44		44			
		Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi :			71.9															
		- peserta KB Aktif			100		-		-		-		-		-		-			
		- peserta KB Baru	- peserta KB Baru	%	72		80		90		90		95		95		95			

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (outcome)		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab	
2016	2017-2021	2016	2017-2021			2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp. Jt	2016
				%	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt		
		Rasio peserta KB terhadap jumlah PUS		%	80															
			Persentase PUS Anggota Poktan Yang Ber - KB	%	10		80		85		85		90		90		90			
			Tingkat ketidakterlaksanaan pemakaian kontrasepsi (DO)	%	-		9.8		9.6		9.4		9		8.8		8.8			
-	Program pelayanan kontrasepsi	-	Persentase faskes pelayanan KB yang berkualitas dalam pengelolaan alokasi Persentase ketersediaan obat dan alat kontrasepsi pada pelayanan KB	%	75	-	-	-	100	14.45	100	-	100	-	100	-	100	14.45	KBMP	Dispenduk-KB
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan konseling KRR	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Angka partisipasi orang tua dalam program pengasuhan remaja	-	-	-	20.93	-	19.27	-	86.55	-	19.27	-	19.27	-	69.27	-	234.55	KBMP	Dispenduk-KB
			Persentase kelahiran pada usia remaja (15-19) (ASFR)	%	80		1,72		1,72		1,70		1,68		1,66		1,66			
Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Indeks pengetahuan remaja tentang generasi remaja		%	80	16.76	-	37.81	-	22.56	-	37.81	-	37.81	-	37.81	-	190.56	KBMP	Dispenduk-KB
			Persentase usia kawin pertama (UKP) dibawah 21 tahun bagi perempuan	%	80		-		-		-		-		-		-			
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri	Cakupan PUS Peserta KB Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	-	%	-	732.41	-	679.69	-	913.93	-	679.69	-	679.69	-	679.69	-	4,365.10	KBMP	Dispenduk-KB
			Cakupan peserta KB Baru		75		85		90		90		95		95		95			
Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD	Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	-	%	77	21.78	-	16.00	-	69.32	-	16.00	-	16.00	-	76.00	-	215.10	KBMP	Dispenduk-KB
			Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	77		-	-	-	-		-	-		-		-			
			Persentase keluarga yang berperan aktif di kelompok BKB				77		78		80		80		85		85			
-	Program Penyediaan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	-	Persentase keluarga yang berperan aktif di kelompok BKL				-		77	73.71	77		80		80		80	73.71	KBMP	Dispenduk-KB
			Persentase keluarga yang berperan aktif di kelompok BKR						75		80		85		90		90			
-	Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	-	Jumlah KK Miskin yang terfasilitasi Program UPPKS				-		36	274.82	42		48		59			274.82	KBMP	Dispenduk-KB
Perhubungan					100	2,445.15		2,265.40		3,136.96		3,100.00		8,100.00		6,000.00		25,047.51		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	828.20	100	944.99	100	900.49	100	1,152.40	100	1,195.00	100	1,312.44	100	6,333.53	Dishubkominfo	Dishub
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	%	0	249.94	100	232.43	100	521.03	100	275.00	100	285.00	100	290.00	100	1,853.40	Dishubkominfo	Dishub
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	persentase pelanggaran disiplin berpakaian	persentase pelanggaran disiplin berpakaian	%	100	80.24	0	74.45	0	101.20	0	138.99	0	158.57	0	178.16	0	731.60	Dishubkominfo	Dishub
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	cakupan pemenuhan kebutuhan peningkatan SDM aparatur	cakupan pemenuhan kebutuhan peningkatan SDM aparatur	%	100	143.90	100	63.22	100	142.95	100	148.70	100	150.30	100	151.90	100	800.98	Dishubkominfo	Dishub

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (outcome)		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab	
					2016		2017		2018		2019		2020		2021					
					Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt				
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Pemerintah daerah	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Pemerintah daerah	Ketersediaan Website dan sistem Informasi Pemd		ada/tidak ada	-		-	104.84	-		-	-	-	-	-	-	104.84	Dishubkominfo	Dinas Kominfo	
			Cakupan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	%	41	-	80		-		-	-	-	-	-	80		Dishubkominfo	Dinas Kominfo	
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Ketersediaan jaringan informasi berbasis teknologi informasi di SKPD	Ketersediaan jaringan informasi berbasis teknologi informasi di SKPD	jaringan	-	821.55	42	2,302.34	-	-	-	-	-	-	-	-	3,123.89	Dishubkominfo	Dinas Kominfo	
Program Pengembangan dan Implementasi e-government	Program Pengembangan dan Implementasi e-government	Jumlah sistem informasi manajemen pmda yang telah dibuat	Jumlah sistem informasi manajemen pmda yang telah dibuat	sistem	-	-	3	141.81	-	-	-	-	-	-	-	-	141.81	Dishubkominfo	Dinas Kominfo	
-	Program Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	-	Indeks keterbukaan informasi publik	%	-	-	55	168.00	65	610.51	75	562.62	85	562.62	95	562.62	2,466.37	-	Dinas Kominfo	
			Cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIM di tingkat Kecamatan						100											
			Rataan masyarakat yang megakses info publik Solok per hari						300											
-	Aplikasi dan Informatika	-	Persentase implementasi e-government	%	-	-	20	95.43	40	2,283.63	60	2,214.97	80	2,214.97	95	2,844.34	9,653.34	-	Dinas Kominfo	
			Jumlah titik infrastruktur jaringan solok kota	titik lokasi	-		-	47			48		49		50			-	Dinas Kominfo	
			Ketersediaan Masterplan e-government	%			100	100		100		100		100		100		-	Dinas Kominfo	
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					100	1,283.29		799.54		1,013.00		1,093.40		1,202.74		1,223.19	6,615.16			
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	-	%	100	678.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	678.35	Koperindag	-	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	-	%	0	145.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145.65	Koperindag	-	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	Persentase pelanggaran disiplin berpakaian	-	%	100	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	Koperindag	-	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	Cakupan pemenuhan kebutuhan peningkatan SDM aparatur	-	%	100	28.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.22	Koperindag	-	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	-	%	90	1.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.51	Koperindag	-	
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif		%	8	48.38	-	95.65	-	217.00	-	245.30	-	269.83	-	196.99	1,073.14	Koperindag	-	
		Persentase Modal sendiri koperasi		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Koperindag	-	
			Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	-		90	95		95		95		95		95		-	Disdag-KUKM	
			Persentase Koperasi Sehat	%	25		10	20		22		25		30		30		-	Disdag-KUKM	
Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	Persentase UKM berkualitas	-	%	1	152.83	-	408.24	-	425.00	-	467.50	-	514.25	-	565.68	2,533.49	Koperindag	-	
		Jumlah klaster UKM	-	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Koperindag	-	
			Pertumbuhan UKM Keluarga Miskin	%	0		22	22		30		40		45		45		-	Disdag-KUKM	
Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM	Terbentuknya BLUD Pembiayaan	-	unit	392	20.31	-	181.89	-	180.00	-	198.00	-	217.80	-	239.58	1,037.58	Koperindag	-	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (outcome)		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab		
2016	2017-2021	2016	2017-2021		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2016	2017-2021	
					Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt			
		Jumlah KK miskin penerima bantuan usaha	-	KK	-		-		-		-		-		-		Koperindag	-	
			Operasional BLUD		-		-		-		-		-		1 unit		-	Disdag-KUKM	
		Jumlah UMKM yang difasilitasi permodalannya		UMKM	4		100		50		50		50		50		400	Disdag-KUKM	
Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil dan Menengah	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah binaan inkubasi per tahun		UKM	-	184.05	-	106.71	-	191.00	-	182.60	-	200.86	-	220.95	1,086.17	Koperindag	
		Persentase keberhasilan binaan inkubasi		%	-		25		50		50		50		50		50	Disdag-KUKM	
		Pertumbuhan Omzet UKM		%	-				6		6		6		6		24	Disdag-KUKM	
		Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi		%					8		8		8		8		32	Disdag-KUKM	
	Pengembangan Kemitraan Pemerintah Daerah dan UMKM						-		-								-		
-	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	-	Persentase Pengawasan Galian C, Penyaluran BBM dan Gas	%	-	-	25	7.06									7.06	Disdag-KUKM	
Penanaman Modal					-	135.81	-	2,394.98	-	2,934.50	-	2,194.98	-	2,650.00	-	3,000.00	13,310.26		
-	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	-		100	664.90	100	818.17	100	763.92	100	846.50	100	1,023.00	4,116.49	DPMPPTSP	
-	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	%	-		100	467.84	100	100.90	100	99.50	100	114.43	100	138.03	920.69	DPMPPTSP	
-	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	Persentase pelanggaran disiplin berpakaian	%	-		0	28.00	0	28.00	0	41.85	0	48.13	0	60.00	205.98	DPMPPTSP	
-	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	Cakupan pemenuhan kebutuhan peningkatan SDM aparatur	%	-		100	39.56	100	216.00	100	100.00	100	115.00	100	132.25	602.81	DPMPPTSP	
-	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	-	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	-		Baik	3.72	Baik	3.82	Baik	3.82	Amat baik	3.82	Amat baik	4.40	Amat baik	19.58	DPMPPTSP
			Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	-		B		BB		BB		A		A		A		
			Tingkat kematangan implementasi SPIP	Level	-		Level 2		Level 2		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		
			persentase penatausahaan keuangan yang sesuai regulasi	%	1		100		100		100		100		100		100		
			Persentase keselarasan dokumen perencanaan PD	%	0		90		90		90		90		90		90		
Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	Regulasi tentang penanaman modal		buah	7	135.81	-	399.32	-	428.05	-	335.00	-	343.63	-	368.33	2,010.13	Bag. PPM Setda	
		Kelembagaan PM		unit	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Pertumbuhan Penanaman Modal		%	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah Investor yang berinvestasi			-		3		3		3		3		3		3		
-	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	-	Perbandingan investasi swasta dengan total investasi	%	-	-	60		65	64.09	70	45.00	70	49.50	75	65.00	75	223.59	DPMPPTSP

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembanaunan		Indikator Kinerja Program (outcome)		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab			
2016	2017-2021	2016	2017-2021		Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	2016	2017-2021		
			Jumlah investasi swasta	Milyar	-		5		5		8		10		10					
			Waktu pemrosesan perijinan investasi	Hari	-		9		9		5		4		3					
-	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	-	Jumlah izin Investasi yang sesuai dengan aturan	izin	-	-	2	98.44	3	321.46	3	170.00	4	259.00	5	259.00	17	1,107.89	-	DPMPTSP
			Jumlah Pembinaan yang dilakukan kepada Investor	investor			1		2											
	Program Peningkatan Pelayanan Publik	-	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan	%		-	100	693.19	100	954.01	100	635.89	100	870.00	100	950.00	100	4,103.09	KPP	DPMPTSP
Kepemudaan dan Olahraga						8,190.29		20,842.98		5,368.11		15,000.00		17,000.00		6,000.00		72,401.38		
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	635.26	100	577.33	100	531.21	100	627.66	100	790.50	100	696.80	100	3,858.70	DISPORA	DISPORA
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	%	100	503.23	100	302.63	100	446.00	100	352.00	100	432.50	100	470.00	100	2,506.35	DISPORA	DISPORA
Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin berpakaian	Persentase pelanggaran disiplin berpakaian	%	0	21.60	0	20.05	0	21.85	0	22.50	0	25.00	0	25.00	0	136.00	DISPORA	DISPORA
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pemenuhan kebutuhan peningkatan SDM aparatur	Cakupan pemenuhan kebutuhan peningkatan SDM aparatur	%	100	22.90	100	40.00	100	30.00	100	35.00	100	45.00	100	50.00	100	222.90	DISPORA	DISPORA
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	-	%	100	1.66	-	2.50	-	1.50	-	1.90	-	2.00	-	2.50	-	12.06	DPOR KP	DPOR KP
		Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai	-			Baik		Baik		Baik		Amat Baik		Amat Baik		Amat Baik			
		Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	nilai	-			B		BB		BB		A		A		A			
		Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	level	-			Level 2		Level 2		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3			
		Persentase Penatausahaan Keuangan yang sesuai regulasi	%	-			100		100		100		100		100		100			
		Persentase Keselarasan dokumen Perencanaan PD	%	-			90		90		90		90		90		90			
Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda	Jumlah organisasi pemuda	organisasi	23	713.69	24	1,104.65	24	1,396.06	24	1,739.28	25	2,024.10	26	1,500.00	26	8,477.78	DISPORA	DISPORA
		Jumlah kegiatan kepemudaan	Jumlah kegiatan kepemudaan	kegiatan	3		4		4		5		5		5		5			
		Kegiatan Pembinaan terhadap pemuda dan organisasi kepemudaan	Kegiatan Pembinaan terhadap pemuda dan organisasi kepemudaan	kegiatan	2		2		3		3		3		4		4			
		Jumlah gelandang atau balai remaja (selain milik swasta)	Jumlah gelandang atau balai remaja (selain milik swasta)	unit	0		0		0		0		1		0		1			
		Jumlah pemuda yang mendapatkan pendidikan bela Negara	Jumlah pemuda yang mendapatkan pendidikan bela Negara	orang	70		140		140		140		140		140		140			
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Persentase wirausahawan muda	Persentase wirausahawan muda	%	0.15	27.60	0.16	85.51	0.17	85.81	0.18	100.00	0.19	110.00	0.2	120.00		528.91	DISPORA	DISPORA
		Jumlah pemuda yang telah mendapatkan pelatihan/keterampilan kewirausahaan	Jumlah pemuda yang telah mendapatkan pelatihan/keterampilan kewirausahaan	orang	50		35		40		40		45		45		255			

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembanguanan		Indikator Kinerja Program (outcome)		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab		
					2016		2017		2018		2019		2020						2021
					2016	2017-2021	2016	2017-2021	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target
Program Pembinaan Pemasayarakatan Olahraga	Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Jumlah kegiatan olahraga masal yg diselenggarakan	Jumlah kegiatan olahraga masal yg diselenggarakan	kegiatan	3	1,198.74		1,475.24		2,184.37		4,533.04		5,083.38		2,155.70	16,630.48	DISPORA	DISPORA
		Jumlah kejuaraan olahraga prestasi yang diselenggarakan	Jumlah kejuaraan olahraga prestasi yang diselenggarakan	kejuaraan	6		7		8		8		9		9		9		
		Persentase cabang olahraga yang diikuti dalam Porprov	Persentase cabang olahraga yang diikuti dalam Porprov	%	75		0		77		0		80		0				
		Jumlah sentra olahraga prestasi	Jumlah sentra olahraga prestasi	unit	8		0		0		0		0		0				
		Jumlah Atlet berprestasi	Jumlah Atlet berprestasi	orang	73		20		79		24		90		28				
		Jumlah organisasi olahraga	-	organisasi	26		-		-		-		-		-				
		Jumlah klub olahraga	-	klub	72		-		-		-		-		-				
		Jumlah pelatih berprestasi	-	orang	4		-		-		-		-		-				
		Jumlah tenaga keolahragaan berprestasi	-	orang	6		-		-		-		-		-				
		Jumlah olahraga rekreasi yang dikembangkan	-	cabang	1		-		-		-		-		-				
		Jumlah olahraga tradisional yang dibina	-	cabang	1		-		-		-		-		-				
		-	Jumlah olahraga rekreasi yang diselenggarakan :																
		- masal	cabang	-			4		4		5		5		5				
		- tradisional	cabang	-			2		2		2		2		2				
		- tantangan	cabang	-			2		2		2		2		2				
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah gedung olahraga	Jumlah gedung olahraga	unit	6	5,065.61	6	17,235.07	7	655.00	7	7,413.68	8	8,307.52	8	800.00	39,476.88	DISPORA	DISPORA
		Jumlah lapangan olahraga	Jumlah lapangan olahraga	unit	50		52		52		54		56		56		56		
		tersedianya stadion sepak bola	tersedianya stadion sepak bola	unit	0		0		0		0		1		0		1		
-	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	-	Persentase Pemuda yang mendapat pemahaman bahaya NAPZA	%	-		-		0.75	16.32	1.5	30.00	1.5	35.00	3	35.00	116.32	-	DISPORA
-	Program Pengembangan Keserasian kebijakan Pemuda	-	Persentase Pemuda yang aktif mengikuti organisasi keagamaan	%	-		-		-	4.52	145.00	5.42	145.00	6.02	145.00	6	435.00	-	DISPORA
Statistik						69.30		155.83		289.25		289.25		289.25		289.25	1,382.15		
Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah	Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Sektoral	Penerapan Perencanaan Berbasis Teknologi Informasi		%	-	69.30		155.83		289.25		289.25		289.25		289.25	1,382.15	Bappeda	Diskominfo
		Persentase Ketersediaan Data Statistik Pembangunan		%	91													Bappeda	-
		Persentase Akurasi Data		%	87													Bappeda	-
		Elemen database perencanaan pembangunan sesuai Aturan		data	1100													Bappeda	-
			Persentase kepuasan pengguna data statistik sektoral	%	-		65		75		80		85		90			-	Koninfo
		-	Tingkat Pencapaian target sasaran strategis RPJMD	%	70		80		83		87		90		90				
Persandian						-		53.18		110.79		110.79		110.79		110.79	496.33		
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Persandian	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Persandian	Ketersediaan perangkat sandi	SOP Persandian	%		-	20	53.18	20		40		40		60		53.18	Bappeda	Dinas Kominfo

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (outcome)		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab	
					2016		2017		2018		2019		2020		2021					
2016	2017-2021	2016	2017-2021		Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	2016	2017-2021
		Persentase peningkatan SDM aparatur bidang persandian	Petugas pengelola persandian	%			20		20		40		40		60		60		Bappeda	Dinas Kominfo
	Persandian untuk pengamanan informasi								110.79		110.79		110.79	1420	110.79		443.15			
Kebudayaan						1,794.04		2,199.96		1,960.20		2,000.00		3,400.00		2,520.00		13,874.20		
Program Peningkatan kapasitas dan Pemberdayaan Lembaga Adat, Seni, dan Budaya	Program Peningkatan kapasitas dan Pemberdayaan Lembaga Adat, Seni, dan Budaya	Jumlah keterlibatan pemangku adat dan lembaga adat pada event seni dan budaya		lembaga	3	-	-	748.72	-	735.20	-	770.00	-	770.00	-	770.00	-	3,793.92	DPOR KP	Dinas Pariwisata
		Jumlah pelaksanaan pendidikan adat dan budaya daerah yang difasilitasi lembaga adat		kali	27		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Jumlah lembaga adat yang terfasilitasi		lembaga	3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Jumlah pemangku adat yang ditingkatkan kompetensi		orang	288		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Jumlah fasilitasi adat	kali	-	-	22		22		22				22		110			
			Jumlah sosialisasi adat dan budaya	kali	-	-	22		22		22		22		22		110			
Program pengelolaan Kekayaan Budaya	Program pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah cagar budaya yang terdaftar dan ditetapkan		unit	3	264.57	-	461.43	-	375.00	-	380.00	-	480.00	-	600.00	-	2,561.00	DPOR KP	Dinas Pariwisata
		Jumlah karya seni dan budaya yang terdokumentasi		buah	2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Jumlah gedung kesenian		unit	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Jumlah kelompok seni budaya yang difasilitasi		kelompok	15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Jumlah situs / cagar budaya dalam keadaan baik		unit	8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Jumlah kelompok seni dan budaya yang difasilitasi	kelompok	-	-	38		45		45		45		50		50			
Program Pengembangan Nilai Budaya	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah pagelaran seni budaya dalam daerah		kali	10	1,183.69	-	597.90	-	500.00	-	500.00	-	750.00	-	750.00	-	4,281.59	DPOR KP	Dinas Pariwisata
		Jumlah pagelaran seni budaya luar daerah		kali	7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Jumlah atraksi seni dan budaya daerah	kali	-	-	12		12		12		12		12		60			
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya		kali	10	345.79	-	391.91	-	350.00	-	350.00	-	400.00	-	400.00	-	2,237.70	DPOR KP	Dinas Pariwisata
		Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya		kali	7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Jumlah budaya daerah yang difasilitasi	Jumlah event		-	-	2		2		2		2		2		2			
-	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Kebudayaan	-	Prasarana dan Sarana Kebudayaan	Jumlah Museum	-	-	NA		1		1		1		1,000.00	NA	1	1,000.00	-	Dinas Pariwisata

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (outcome)		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab	
2016	2017-2021	2016	2017-2021		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2016	2017-2021		
Perpustakaan					Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt		
					91.95		709.02		2,052.89		2,018.68		2,200.00		4,720.75		11,793.30			
-	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	-	-	-	-	100	631.16	100	926.00	100	1,107.32	100	3,200.00	100	5,864.48	KADP	DPK
-	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	%	-	-	-	-	100	358.97	100	319.58	100	319.58	100	610.78	100	1,608.92	KADP	DPK
-	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	Persentase pelanggaran disiplin berpakaian	%	-	-	-	-	0	27.25	0	30.00	0	30.00	0	34.00	0	121.25	KADP	DPK
-	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	Cakupan pemenuhan kebutuhan peningkatan SDM aparatur	%	-	-	-	-	100	78.00	100	65.00	100	65.00	100	75.00	100	283.00	KADP	DPK
-	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	-	-	Baik	-	Baik	2.25	Baik	2.50	Amat baik	2.50	Amat baik	3.00	Amat baik	10.25	KADP	DPK
			Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	-	-	B	-	BB	-	BB	-	A	-	A	-	-	-	-	-
			Tingkat kematangan implementasi SPIP	Level	-	-	Level 2	-	Level 2	-	Level 3	-	Level 3	-	Level 3	-	Level 3	-	-	-
			persentase penatausahaan keuangan yang sesuai regulasi	%	-	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	-	-
			Persentase keselarasan dokumen perencanaan PD	%	-	-	90	-	90	-	90	-	90	-	90	-	90	-	-	-
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah kunjungan Perpustakaan :	Jumlah kunjungan Perpustakaan :			91.95		474.02		827.66		500.60		500.60		572.97		2,967.80	KADP	DPK
		- Umum	- Umum			11,959		12,059		12,159		12,359		12,559		12,859				
		- Sekolah	- Sekolah			2580		6360		11700		19500		29640		29640				
		- Masyarakat	- Masyarakat			60		360		288		288		540		540				
		- Rumah Ibadah	- Rumah Ibadah			48		120		384		384		600		720				
		- Khusus	- Khusus			-		60		216		288		480		720				
		Jumlah anggota baru perpustakaan umum	Jumlah anggota baru perpustakaan umum			620		820		920		1000		1200		2000				
		Jumlah penambahan koleksi bahan perpustakaan umum	Jumlah penambahan koleksi bahan perpustakaan umum			16081		17081		18081		19381		20881		22381				
		Jumlah pos yang terlayani dalam sehari	Jumlah pos yang terlayani dalam sehari			29		36		36		48		48		50				
		Jumlah objek kunjungan yang terlayani dalam sebulan	Jumlah objek kunjungan yang terlayani dalam sebulan			4		8		8		16		16		16				
		Jumlah tenaga teknis perpustakaan yang memiliki kompetensi ilmu teknologi informasi	Jumlah tenaga teknis perpustakaan yang memiliki kompetensi ilmu teknologi informasi			1		1		2		2		2		2				
		Jumlah pustakawan	Jumlah pustakawan			3		4		5		6		6		6				
-	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi perpustakaan	-	Persentase perpustakaan yang menggunakan otomasi		-	-	0	235.00	50	127.60	75	175.00	100	175.00	100	225.00	100	937.60	KADP	DPK
																				DPK
Kearsipan						576.88		1,320.96		483.53		480.00		642.85		842.50		4,346.72		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	323.87	-	726.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,050.78	KADP	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	%	100	92.68	-	254.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	347.20	KADP	-
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin berpakaian	Persentase pelanggaran disiplin berpakaian	%	0	14.40	-	23.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.05	KADP	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pemenuhan kebutuhan peningkatan SDM aparatur	Cakupan pemenuhan kebutuhan peningkatan SDM aparatur	%	100	15.00	-	97.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.63	KADP	-

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan				Indikator Kinerja Program (outcome)				Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab							
2016		2017-2021		2016		2017-2021			2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target		Rp. Jt		2016		2017-2021	
									Target		Rp. Jt		Target		Rp. Jt		Target		Rp. Jt		Target		Rp. Jt					
Pariwisata											2,649.79		6,069.60		5,521.79		6,828.19		7,700.00		12,023.12		40,792.48					
-		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	-	-	100	484.33	100	632.55	100	664.18	100	697.39	100	732.26	100	3,210.70	-	Dinas Pariwisata							
-		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	%	-	-	100	317.15	100	538.30	100	565.22	100	593.48	100	623.15	100	2,637.29	-	Dinas Pariwisata							
-		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	Persentase pelanggaran disiplin berpakaian	%	-	-	0	25.45	0	34.00	0	35.70	0	37.49	0	39.36	0	171.99	-	Dinas Pariwisata							
-		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	Cakupan pemenuhan kebutuhan peningkatan SDM aparatur	%	-	-	100	26.00	100	50.00	100	52.50	100	55.13	100	57.88	100	241.51	-	Dinas Pariwisata							
-		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	-	-	Baik	2.14	Baik	3.00	Baik	3.15	Amat baik	3.31	Amat baik	3.47	Amat baik	15.07	-	Dinas Pariwisata							
				Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	-	-	B		BB		BB		A		A		A										
				Tingkat kematangan implementasi SPIP	Level	-	-	Level 2		Level 2		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3										
				persentase penatausahaan keuangan yang sesuai regulasi	%	-	-	100		100		100		100		100		100										
				Persentase keselarasan dokumen perencanaan PD	%	-	-	90		90		90		90		90		90										
Program Pengembangan Destinasi Wisata	Program Pengembangan Destinasi Wisata	Persentase penyediaan sarana dan prasarana wisata		%	60	1,537.53	-	3,557.45	-	2,575.00	-	3,207.45	-	3,733.22	-	7,500.00	-	22,110.65	DPORKP	-								
			Dokumen Pengembangan Kepariwisata Daerah	Jumlah dokumen	-	-	1		2		2		0		0		5		DPORKP	Dinas Pariwisata								
			Objek Wisata Yang Dikembangkan	Jumlah Objek	-	-	1		4		4		4		4		4											
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah event pariwisata yang digelar		kali	1	1,112.26	-	1,324.00	-	1,055.94	-	1,600.00	-	1,755.00	-	2,160.00	-	9,007.20	DPORKP	-								
			Publikasi pariwisata	Jumlah media publikasi	-	-	2		2		2		2		2		2		DPORKP	Dinas Pariwisata								
			Event pariwisata	Jumlah event	-	-	3		3		4		5		5		20											
-		Program Pengembangan ekonomi kreatif	-	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang produktif	kelompok	-	-	2	248.07	2	413.00	2	450.00	2	485.00	2	547.00	10	2,143.07	-	Dinas Pariwisata							
-		Program Pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif	-	Jumlah pelaku industri kreatif dan pariwisata yang menjadi anggota forum	kelompok	-	-	4	84.99	4	140.00	6	160.00	8	240.00	10	260.00	10	884.99	-	Dinas Pariwisata							
-		Program Pengembangan kemitraan	-	Jumlah kerjasama kepariwisataan	dokumen	-	-	2	-	2	80.00	2	90.00	2	100.00	2	100.00	8	370.00	-	Dinas Pariwisata							
Pertanian						9,513.94		14,234.27		8,984.29		7,500.00		8,500.00		10,574.81		59,307.32										
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	1,245.54	100	1,713.15	100	1,552.56	100	1,156.21	100	1,209.67	100	2,025.60	100	8,902.73	DPPDK	Dinas Pertanian								
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	%	100	914.87	100	2,635.47	100	452.97	100	114.71	100	726.18	100	1,348.79	100	6,192.98	DPPDK	Dinas Pertanian								
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin berpakaian	Persentase pelanggaran disiplin berpakaian	%	0	69.00	0	73.00	0	72.00	0	100.62	0	110.69	0	121.75	0	547.06	DPPDK	Dinas Pertanian								
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pemenuhan kebutuhan peningkatan SDM aparatur	Cakupan pemenuhan kebutuhan peningkatan SDM aparatur	%	100	88.60	100	132.55	100	95.60	100	105.16	100	115.68	100	127.24	100	664.83	DPPDK	Dinas Pertanian								

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (outcome)		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab			
2016	2017-2021	2016	2017-2021		Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	2016	2017-2021
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	-	%	100	3.72	-	3.31	-	3.90	-	100.00	-	4.29	-	4.72	-	119.94	DPPDK	Dinas Pertanian
		Indeks Kepuasan Masyarakat		Nilai	-	-	Baik		Baik		Baik		Amat baik		Amat baik		Amat baik			
		Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		Nilai	-	-	B		BB		BB		A		A		A			
		Tingkat kematangan implementasi SPIP		Level	-	-	Level 2		Level 2		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3			
		persentase penatausahaan keuangan yang sesuai regulasi		%	-	-	100		100		100		100		100		100			
		Persentase keselarasan dokumen perencanaan PD		%	-	-	90		90		90		90		90		90			
Program Penyebarluasan Pembangunan Pertanian	Program Penyebarluasan Pembangunan Pertanian	Terpublikasinya/ Tersebarluasnya Informasi pertanian	-	paket	0	-	-	145.64	-	333.20	-	278.19	-	374.38	-	396.84	-	1,528.26	DPPDK	Dinas Pertanian
		Persentase Penyebarluasan Pembangunan Pertanian		%	-	-	75		80		85		90		100		100			
Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase pemakaian benih unggul	-	%	50	551.18	-	67.86	-	155.70	-	407.67	-	485.13	-	514.23	-	2,181.76	DPPDK	Dinas Pertanian
		Persentase Petani yang tergabung ke dalam kelompok		%	-	-	75		80		85		90		95					
		Persentase Peningkatan Pendapatan Pelaku Agribisnis sub sektor pertanian		%	-	-	NA		3		5		7		9					
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	Persentase pemenuhan alsintan	-	%	52%	2,388.60	-	2,722.45	-	1,465.43	-	493.36	-	515.18	-	554.33	-	8,139.35	DPPDK	Dinas Pertanian
		Jumlah sarana sumber-sumber air	Jumlah sarana sumber-sumber air	unit	17		14		17		20		23		26		26		DPPDK	Dinas Pertanian
		Panjang jalan pertanian	Panjang jalan pertanian	Km	6		6	-	6.5	-	7	-	7.5	-	8	-	-		DPPDK	Dinas Pertanian
		-	Jumlah Alsintan yang tersedia	Unit	-		193		203		218		233		248		248		DPPDK	Dinas Pertanian
Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Tingkat produktivitas :	-			750.43	-	2,043.23	-	1,324.72	-	1,059.91	-	1,253.50	-	1,371.69	-	7,803.48	DPPDK	Dinas Pertanian
		- Padi		ton/Ha	6.93		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		- Coklat		ton/Ha	0.95		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		- Tanaman Atsiri		ton/Ha	17.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Luas Tanam Atsiri		Ha	22		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Jumlah KK Petani yang melakukan usaha tani terpadu		KK	5															
		Tingkat Produksi : Padi, Hortikultura dan perkebunan																		
		a. Padi (GKP)		Ton	-	-	16024		16629		17333		18118		19070		19070			
		b. Atsiri		Ton	-	-	540		647.5		798		955.5		1100		1100			
		c. Cabe		Ton	-	-	57.6		74.2		92.8		113.4		136		136			
		d. Kakao		Ton	-	-	240		266.75		294		321.75		354		354			
Pemberdayaan penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Pemberdayaan penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Peningkatan SDM Penyuluh		orang	3	725.08	-	263.44	-	94.91	-	140.61	-	186.64	-	143.04	-	1,553.73	DPPDK	Dinas Pertanian

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (outcome)		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab	
					2016		2017		2018		2019		2020		2021					
					Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt				
Peningkatan pengembangan pengelolaan pasar	Peningkatan pengembangan pengelolaan pasar	Cakupan pelayanan pasar	Cakupan pelayanan pasar	%	55	2,027.30	-	6,808.83	80	1,159.50	80	1,275.45	80	1,403.00	80	1,700.00	80	14,374.08	K Pengelolaan Pasar	Disdag -KUKM
Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Tersedianya lokasi PKL Kuliner		unit	1	701.74	-	548.14	-	500.00	-	550.00	-	605.00	-	866.38	-	3,771.26		Disdag KUKM
		Jumlah pelaku usaha perdagangan yang difasilitasi dan dibina		orang	40		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Persentase kepatuhan dan wawasan PKL terhadap peraturan/penataan lokasi berdagang	%	-	-			80		80		80		80		80			
			Penyediaan sarana yang lebih baik bagi pedagang	%	-	-	50		80		80		80		80		80			
Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah program edukasi/sosialisasi		program	2	375.73	-	521.87	-	824.90	-	907.39	-	998.13	-	1,097.94	-	4,725.95	Koperindag	Disdag KUKM
		Kasus peredaran barang kadaluarsa/kasus barang tidak aman		kasus	2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Persentase pelaku usaha yang menggunakan alat UTP yang sesuai standar	%	-	-			75		75		75		80		80			
			Persentase informasi tentang perlindungan konsumen	%	-	-			80		80		80		80		80			
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	-	Tersedianya data dan informasi harga bahan pokok dan barang penting (Bapokting)	dokumen	-	3,996.62		-	3	950.00	3	1,045.00	3	1,149.50	3	1,264.45	3	8,405.57		Disdag KUKM
			Tersedianya data dan informasi pupuk bersubsidi	dokumen	-	-			2		2		2		2		2			
			Persentase produk UMKM yang terjadi kontak bisnis	kali	-	-			1		1		1		1		1			
Perindustrian						626.15		939.22		1,888.68		2,077.55		2,100.00		2,513.83		10,145.43		
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase IKM yang difasilitasi dan dibina		%	60	513.67	-	668.20	-	1,600.00	-	1,760.00	-	1,750.70	-	2,129.60	-	8,422.16	Koperindag	Disdag-KUKM
		Jumlah Produk IKM unggulan yang masuk pasar regional		produk	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Persentase kepemilikan sertifikasi halal		%	18		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Jumlah UKM yang difasilitasi kepemilikan sertifikasi hak kekayaan intelektual		UKM	27		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Jumlah Produk IKM yang masuk pasar regional		%	-	-			15		20		25		30		30			
		Pertumbuhan Omzet IKM		%	-	-			5		10		15		20		20			
		Jumlah IKM yang difasilitasi permodalannya			-	-			10		20		30		40		40			

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembansuanan		Indikator Kinerja Program (outcome)		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab			
2016	2017-2021	2016	2017-2021		Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	2016	2017-2021
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah industri yang melakukan diversifikasi produk		industri	3	112.48	-	271.02	-	281.68	-	309.85	-	340.83	-	374.92	-	1,690.79	Koperindag	Disdag-KUKM
		Pertumbuhan Volume Penjualan		%	10		10		10		10		10		10					
-	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Persentase Pengawasan Galian C, Penyaluran BBM dan Gas		%	-	-	25	-	40	7.00	50	7.70	70	8.47	75	9.32		32.49	Koperindag	Disdag-KUKM
Transmigrasi						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan						80,950.48		92,996.61		87,487.78		88,609.11		95,610.30		107,426.18		553,080.47		
Administrasi Pemerintahan						-	-	-	-	54,407.29		54,806.61		60,000.00		65,000.00		234,213.90		
-	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		%					100		100		100		100		100			
										6,837.80		6,771.65		7,412.40		7,636.03		28,657.88		Setda (Bagian Umum)
										3,475.94		4,281.61		3,999.66		4,000.70		15,757.91		Sek. DPRD
										416.37		458.00		503.80		554.18		1,932.35		Kantor Kesbangpol
										1,558.17		1,586.44		1,607.94		1,689.97		6,442.52		Kec. Lb. Sikarah
										1,236.49		1,935.91		2,014.00		1,966.59		7,152.99		Kec. Tanjung Harapan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran		%					100		100		100		100		100			
										5,972.27		5,042.90		5,493.68		6,082.77		22,591.62		Setda (Bagian Umum)
										1,234.55		1,611.68		2,634.50		2,700.00		8,180.72		Sek. DPRD
										161.24		419.22		130.88		121.04		832.38		Kantor Kesbangpol
										526.04		362.19		401.41		444.55		1,734.20		Kec. Lb. Sikarah
										539.05		377.21		444.93		519.43		1,880.62		Kec. Tanjung Harapan
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin berakhlak		%				0	0			0		0		0				
										175.78		177.14		207.47		242.34		802.73		Setda (Bagian Umum)
										231.22	-	258.99	-	250.00	-	260.00		1,000.21		Sek. DPRD
										13.35		14.69		16.15		17.77		61.96		Kantor Kesbangpol
										75.30		78.85		87.24		96.46		337.85		Kec. Lb. Sikarah
										60.30		80.31		88.84		98.22		327.66		Kec. Tanjung Harapan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pemenuhan kebutuhan peningkatan SDM aparatur		%					100		100		100		100		100			
										482.75		350.94		390.98		433.49		1,658.15		Setda (Bagian Umum)
										203.00		100.00		165.75		170.00		638.75		Sek. DPRD
										94.78								94.78		Kec. Tanjung Harapan
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			%																
		Indeks Kepuasan Masyarakat		Nilai					Baik		Baik		Amat baik		Amat baik		Amat baik			
		Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		Nilai					BB		BB		A		A		A			
		Tingkat kematangan implementasi SPIP		Level					Level 2		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3			
		persentase penatausahaan keuangan yang sesuai regulasi		%					100		100		100		100		100			
		Persentase keselarasan dokumen perencanaan PD		%					90		90		90		90		90			
										63.28		88.00		108.00		108.00		367.28		Setda (Bagian Umum)
										2.59		2.70		3.20		3.25		11.74		Sek. DPRD
										0.91		1.00		1.10		1.21		4.23		Kantor Kesbangpol
										1.11		73.85		82.24		91.46		248.66		Kec. Lb. Sikarah
										4.29		4.95		5.45		5.99		20.68		Kec. Tanjung Harapan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembansuanaan		Indikator Kinerja Program (outcome)		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab		
2016	2017-2021	2016	2017-2021		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2016	2017-2021	
					Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt			
	Program Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Persentase penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah / LKJ	%					100	523.77	100	411.00	100	533.00	100	425.00	100	1,892.77	Setda (Bagian Organisasi)
			Persentase penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah / LPPD	%					100		100		100		100		100		Setda (Bagian Pemerintahan)
			Persentase pelaksanaan monitoring dan evaluasi SOP	%					0		0		0		0		0		Setda (Bagian Organisasi)
			Persentase penyusunan laporan SPM	%					100		100		100		100		100		Setda (Bagian Organisasi)
			Persentase kegiatan yang dimonitoring dan evaluasi	%					100		100		100		100		100		Setda (Bagian PAP)
			Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja SKPD	%					95		100		100		100		100		Setda (Bagian PAP)
			Persentase ketepatan waktu pengentrian RUP awal dan RUP Perubahan	%					100		100		100		100		100		Setda (Bagian PAP)
			Persentase ketepatan waktu pengentrian TEPR	%					100		100		100		100		100		Setda (Bagian PAP)
	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Ketersediaan regulasi Rumpun Jabatan Fungsional tertentu dan JFU	regulasi					0	1,614.40	2	0.58	0	0.59	2	0.59	2	1,616.17	
			Persentase OPD yang sesuai perundang-undangan	%					0		100		0		100		100		Setda (Bagian Organisasi)
			Persentase Evaluasi Analisa Jabatan	%					0		100		0		100		100		Setda (Bagian Organisasi)
			Persentase Evaluasi Analisa Beban Kerja	%					100		100		0		100		100		Setda (Bagian Organisasi)
			Persentase Evaluasi Tupoksi	%					100		0		100		100		100		Setda (Bagian Organisasi)
			Persentase Evaluasi Jabatan	%					0		100		0		0		0		Setda (Bagian Organisasi)
			Jumlah pembinaan terhadap aparatur kecamatan dan atau kelurahan	kali					2		2		2		2		2		
			Tingkat kepuasan masyarakat	SKPD					10		10		10		10		10		
			Persentase layanan ULP	%					100		100		375.00	100	375.00	100	375.00	100	1,125.00
			Persentase layanan LPSE	%					100		100		350.00	100	350.00	100	350.00	100	1,050.00
			Persentase Pembinaan Jasa Konstruksi	%					80		85		85		85		85		
			Penilaian Unit pelayanan publik dilingkungan Pemko Solok	OPD					25		25		45.00	25	45.00	25	45.00		135.00
	Program Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah		Terfasilitasinya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	%					100	3,625.83	100	3,465.76	100	3,974.74	100	4,544.76	100	15,611.09	
			Terfasilitasinya pelayanan kedinasan bagi kepala daerah/Wakil Kepala Daerah	%					100		100		100		100		100		
			Dialog audiensi dengan Tokoh Masyarakat, Pimpinan/anggota Organisasi sosial masyarakat	%					100		100		100		100		100		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (outcome)		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab			
2016	2017-2021	2016	2017-2021		2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp. Jt	2016	2017-2021
					Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt		
			Koordinasi dengan Pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	%					100		100		100		100		100			
			Persentas aparatur yang memahami keprotokoleran dan kehumasan	%					60		60		70		70		70			
			Jumlah Rapat Koordinasi Pemerintahan	kali					12		12		12		12		12			
	Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah									761.83								761.83		Setda
	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan		Persentase Penanganan konflik pertanahan	%					50.00	1,069.45	50.00	-	50.00	-	50.00	-	50.00	1,069.45		Setda (Bagian Pemerintahan)
	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan		Penyelenggaraan kegiatan hari besar nasional dan HUT Kota	1 Tahun					1 Tahun	308.61	1 Tahun	170.00	1 Tahun	170.00	1 Tahun	170.00	1 Tahun	818.61		Setda (Bagian Pemerintahan)
	Program Penataan Daerah Otonomi		Tertatanya batas wilayah administrasi pemerintahan						5	77.62	5	159.00	5	159.00	5	159.00	5	554.62		Setda (Bagian Pemerintahan)
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi daerah			ada/tidak ada					ada	858.45	ada	84.74	ada	94.02	ada	104.22	ada	1,141.44		Setda (Bagian Humas)
	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa		persentase penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui media massa	%					75	3,236.60	75	2,613.29	75	2,888.43	75	3,245.45	75	11,983.78		Setda (bagian Humas)
			persentase penyebarluasan informasi pembangunan daerah	%					100		100		100		100		100			
	Program Penataan peraturan dan perundang undangan		Tingkat produk hukum yang aspiratif	%					100	1,310.66	100	250.76	100	279.03	100	310.14	100	2,150.59		Setda (Bagian Hukum dan HAM)
			Persentase pembahasan dan penyempurnaan prduk hukum daerah	%					90		90		90		90		90			Setda (Bagian Hukum dan HAM)
			Persentase proses penyelesaian perkara yang dihadapi pemerintah daerah	%					100		100		100		100		100			Setda (Bagian Hukum dan HAM)
			Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti penyuluhan hukum	%					87		88		88		90		90			Setda (Bagian Hukum dan HAM)
			Jumlah usulan Ranperda yang masuk dalam prolegda	Ranperda					8		9		9		10		10			Setda (Bagian Hukum dan HAM)
	Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama		Terlaksananya koordinasi dan presentasi potensi dan terbentuknya Forum CSR dan operasional Forum	-					100		100	479.57	100	537.52	100	601.28	100	1,618.37		Setda (Bag. Perekonomian)
			Terlaksananya pembinaan dan penumbuhan BUMD	-					100		100		100		100		100			
			Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang usaha dan sarana perekonomian	-					100		100		100		100		100			
	Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat yang beriman dan bertakwa		Jumlah mubaligh/da'i/khatib/guru agama/penyuluh agama yang dilakderisasi	orang					40	-	0	5.53	0	3.80	0	5.59	80	14.92		Setda (Bag. Kesra)

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (outcome)		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab			
2016	2017-2021	2016	2017-2021		2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp. Jt	2016	2017-2021
					Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt				
			Jumlah pemberian reward bagi Toga/Toma/Lembaga/org anisasi keagamaan/pemerhati pembangunan	orang					6		6		6		6		30			
			- Jumlah guru MDA bersertifikasi :																	
			- Kategori A	orang					302		322		331		339		339			
			- Kategori B	orang					31		15		10		13		13			
			- Kategori C	orang					10		7		5		-		-			
			- Belum bersertifikasi	orang					13		10		10		10		10			
			- Persentase MDA yang terfasilitasi	%					100		100		100		100		100			
			- jumlah cabang MTQ yang diunggulkan	cabang					-		4		-		6		6			
			- Persentase qori/qorlah yang merah peringkat 3 besar	%					-		30		-		30		30			
			- Persentase keterlibatan pejabat dalam Mabid	%					75		80		85		90		90			
			- Persentase lembaga/ organisasi sosial keagamaan yang menerima bantuan	%					68		91		100		100		100			
			- Jumlah Masjid yang melaksanakan majelis taklim	Masjid					35		40		45		50		50			
			- Jumlah Masjid/ rumah ibadah yang melaksanakan didikan subuh	buah					100		110		120		130		130			
			- jumlah rumah ibadah yang memiliki MDA	buah					110		120		130		139		139			
			- Jumlah rumah ibadah yang melaksanakan shalat lima waktu	buah					82		92		102		112		112			
	Program peningkatan pelayanan kehidupan beragama		Jumlah rumah ibadah :								1.55		1.56		1.56		4.67		Setda (Bagian Kesra)	
			- Masjid	buah					52		52		52		52		52			
			- Mushalla	buah					74		74		74		74		74			
				%					2		3		4		5		48			
			-Jumlah masjid paripurna						2		3		4		5		5			
			Jumlah Muzaki	orang					4500		5000	0.28	5500	0.29	6000	0.29	6000	0.85	Setda (Bagian Kesra)	
			Jumlah lembaga sosial keagamaan pengelola dana keagamaan	buah					30		30		30		30		30			
				orang																
				Rp. Jt																
				kali																
			- Persentase kenaikan zakat yang dikelola Badan Amil zakat						35		37		38		39		39		Setda (Bagian Kesra)	
			-Jumlah Keg. Semarak 1 Muharram						1 pkt		1 pkt		1 pkt		1 pkt		1 pkt		Setda (Bagian Kesra)	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		SOP Keuangan Setda						1 paket		-		-		-		-		Setda (Bagian Kesra)	
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		-	Ranperda					-	12,981.27	-	18,935.95	-	21,000.00	-	23,875.00	-	76,792.22	Sek. DPRD	
			-	Ranperda					-		-		-		-		-		-	
			Jumlah Kegiatan Reses yang difasilitasi	kali					60		40		60		60		280		-	
			Jumlah Pembahasan Ranperda yang difasilitasi	dok					9		7		8		8		41		Sek. DPRD	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembansunan		Indikator Kinerja Program (outcome)		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab		
2016	2017-2021	2016	2017-2021		Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	2016	2017-2021	
			Jumlah Draft Ranperda Inisiatif yang difasilitasi	dok					2		2		2		2		10		Sek. DPRD
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pimpinan DPRD		Cakupan Pelayanan Kedinasan Pimpinan DPRD				100		100		100	288.00	100	288.00	100	300.00			
	Pengembangan Kemitraan Pemerintah Daerah dan UMKM			%						302.00		107.09		117.80		129.58		656.48	Setda (Bag. Perekonomian)
			Penarikan Tunggal Dana Bergulir, Inventarisasi dan Pencatatan pinjaman UMKM, Kemitraan UMKM di Bidang Jasa & Permodalan	-					80		100		100		100		100		Setda (Bag. Perekonomian)
	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan									80.00								80.00	Sekretariat Daerah Bag. Perekonomian
	Peningkatan Layanan Pengadaan Elektronik									1,120.00								1,120.00	Sekretariat Daerah Bag. PAP
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		SOP Keuangan Setda	%					1 paket										
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat																		
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/ Kelurahan		persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	%					-		-		-		-		-		-
			persentase pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	%					-		-		-		-		-		-
			Tingkat partisipasi gotong royong masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Kelurahan	%					-		-		-		-		-		-
	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan			%					100	263.64	100	201.96	100	224.16	100	248.57	100	938.33	Kec. Lb. Sikarah
				%					100	206.37	100	205.09	100	249.11	100	277.72	100	938.28	Kec. Tanjung Harapan
	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan			%					100	157.11	100	185.82	100	206.20	100	238.62	100	787.76	Kec. Lb. Sikarah
				%					100	214.01	100	158.12	100	200.15	100	225.36	100	797.64	Kec. Tanjung Harapan
			Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	%					78		79		79		79		79		Kec. Lb. Sikarah & Kec. Tj. Harapan
			Persentase Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%					76		76		76		76		76		Kec. Lb. Sikarah & Kec. Tj. Harapan
			Persentase Keikutsertaan masyarakat dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan	%					83		83		83		85		85		Kec. Lb. Sikarah & Kec. Tj. Harapan
			Persentase Kegiatan Pemerintah Terlaksana di wilayah Kecamatan	%					100		100		100		100		100		Kec. Lb. Sikarah & Kec. Tj. Harapan
	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal								1,116.16		513.45		564.80		621.28		2,815.69		
			Jumlah HTAG Ipoleksbud Agama yang dapat dideteksi	kali					2		4		4		2		2	-	Kantor Kesbangpol
			Persentase penyelesaian gangguan keamanan	%					100		100		100		100		100	-	Kantor Kesbangpol
	Program Pengembangan Wawasan kebangsaan								67.27		74.00		81.40		89.54		312.21		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (outcome)		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab	
2016	2017-2021	2016	2017-2021		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2016	2017-2021
					Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt		
			Persentase penanganan konflik umat beragama	%					100		100		100		100		-	Kantor Kesbangpol
			persentase pemahaman masyarakat dalam bela negara	%					80		80		85		85		-	Kantor Kesbangpol
	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan								12.12		13.33		14.67		16.13		56.26	Kantor Kesbangpol
			Persentase pemahaman Orsosnas dalam berorganisasi	-					100		100		100		100			Kantor Kesbangpol
	Program Peningkatan Koordinasi dan Pembinaan Pencegahan Bahaya Narkoba dan Miras		persentase pemahaman tentang bahaya narkoba dan miras						100	1,020.43	100	1,380.32	100	1,352.29	100	1,344.39	5,097.43	Kantor Kesbangpol
	Program Pendidikan Politik masyarakat		Persentase partisipasi masyarakat dalam Pilpres, Pileg dan Pilkada	%					113.11	72	253.17		239.83	75	52.46	75	658.58	Kantor Kesbangpol
			Persentase Parpol yang memahami tentang pelaksanaan bantuan keuangan	%					90		90		90		90		-	Kantor Kesbangpol
Pengawasan						-		-	3,173.57		2,977.35		3,310.30		3,552.37		13,013.59	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%					100	609.07	100	749.68	100	829.65	100	917.15	3,105.54	Inspektorat
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	%					100	231.75	100	231.96	100	257.15	100	284.87	1,005.72	Inspektorat
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase pelanggaran disiplin berpakaian	%					0	24.42	0	26.86	0	29.55	0	32.50	113.33	Inspektorat
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Cakupan pemenuhan kebutuhan peningkatan SDM aparatur	%					100	167.21	100	168.93	100	187.33	100	207.56	731.03	Inspektorat
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			%					5.50		5.05		5.66		6.32		22.53	Inspektorat
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai					Baik		Baik		Amat baik		Amat baik			
			Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai					BB		BB		A		A			
			Tingkat kematangan implementasi SPIP	Level					Level 2		Level 3		Level 3		Level 3			
			persentase penatausahaan keuangan yang sesuai regulasi	%					100		100		100		100			
			Persentase keselarasan dokumen perencanaan PD	%					90		90		90		90			
	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	%					85	1,207.10	85	1,207.81	85	1,340.59	87	1,486.65	5,242.15	Inspektorat
			Persentase Kerugian Daerah	%					0.19		0.19		0.18		0.18			
			-	%					0		0		0		0			
			Persentase pelaksanaan program kerja pengawasan	%					97		100		100		100			
			-	Nilai					0		0		0		0			

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (outcome)		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab	
2016	2017-2021	2016	2017-2021		2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp. Jt	2016	2017-2021
					Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt				
		Persentase Kesesuaian Program / Kegiatan Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Lingkup Sosial dan Budaya	Persentase kesesuaian program/kegiatan Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra lingkup bidang Sosbud	%	100		100		100		100		100		100			Bappeda	Bappeda	
		Jumlah Dokumen Pendukung Perencanaan Bidang Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen pendukung bidang Sosbud	dok	2		1		1		1		2		1			Bappeda	Bappeda	
		-	Persentase implementasi program penanggulangan kemiskinan	%	N.A		100		100		100		100		100					
Program Perencanaan Pembangunan prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam	Program Perencanaan Pembangunan prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase penyelesaian dokumen Renstra Perangkat Daerah Lingkup bidang prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam	-	%	100	411.19	100	428.66	-	478.37	-	574.58	-	627.25	-	648.87	-	3,168.92	Bappeda	Bappeda
		Persentase Dokumen Renstra PD Lingkup Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam yang Selaras dengan RPJMD	Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam Renstra Perangkat Daerah Lingkup bidang IPW	%	100		100		-		-		-		100		100			
		Persentase Dokumen Renja PD Lingkup Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam yang Selaras dengan RKPD	Persentase Penjabaran Program RKPD ke dalam Renja Perangkat Daerah Lingkup bidang IPW	%	100		100		100		100		100		100		100			
		Persentase pencapaian target sasaran strategis RPJMD Lingkup bidang prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam	-	%	100		-		-		-		-		-					
		Persentase Kesesuaian Program / Kegiatan Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Lingkup prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase kesesuaian program/kegiatan Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra lingkup bidang IPW	%	100		100		100		100		100		100		100	Bappeda	Bappeda	
		Jumlah Dokumen Pendukung Perencanaan Bidang prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen pendukung bidang IPW	dok	2		2		1		1		1		1					
	Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah								232.23		300.00		300.00		350.00		1,182.23			
Program perencanaan Tata Ruang	Program perencanaan Tata Ruang	Jumlah dokumen rencana tata ruang yang disusun	Jumlah dokumen rencana tata ruang yang disusun	dok	0	-	0	219.43	1	952.16	0	-	0	-	0	-	1	1,171.60	DKTR / BAPPEDA	Bappeda

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (outcome)		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab			
2016	2017-2021	2016	2017-2021		2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp. Jt	2016	2017-2021
					Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt		
		Persentase koordinasi dan penatausahaan penerimaan kas daerah sesuai aturan	-	%																
	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengendalian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																		DPPKA	BKD
Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset daerah	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pengadaan dan pemeliharaan aset daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pengadaan dan pemeliharaan aset daerah	%	100	-	100	1,601.75	100	1,655.40	100	1,712.40	100	1,889.80	100	2,179.24	100	9,038.60	DPPKA	BKD
		Persentase ketersediaan data base aset daerah yang telah divalidasi	Persentase ketersediaan data base aset daerah yang telah divalidasi	%	92		100		100		100		100		100		100		DPPKA	BKD
Program Peningkatan sarana dan prasarana pemerintah daerah	Program Peningkatan sarana dan prasarana pemerintah daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pemerintah daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pemerintah daerah	%	100	-	100	4,733.00	100	3,305.34	100	3,000.00	100	2,500.00	100	2,500.00	100	16,038.34	DPPKA	BKD
	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengendalian Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah							1,536.01		1,236.12		1,300.00		1,400.00		1,450.00		6,922.13		
Kepegawaian						4,867.92		5,785.03		2,039.79		2,267.12		2,600.00		3,748.54		21,308.40		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	715.27	100	656.15	100	588.63	100	708.81	100	715.10	100	947.35	100	4,331.31	BKD & Sekretariat Korpri	BKPSDM
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	%	100	261.76	100	180.43	100	232.84	100	197.00	100	259.61	100	285.50	100	1,417.14	BKD & Sekretariat Korpri	BKPSDM
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin berpakaian	Persentase pelanggaran disiplin berpakaian	%	0	42.00	0	30.70	0	30.00	0	36.00	0	36.00	0	36.00	0	210.70	BKD & Sekretariat Korpri	BKPSDM
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pemenuhan kebutuhan peningkatan SDM aparatur	Cakupan pemenuhan kebutuhan peningkatan SDM aparatur	%	100	52.35	100	99.05	100	67.35	100	69.68	100	76.65	100	80.00	100	445.07	BKD	BKPSDM
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	-		-	1.28		2.05		2.17		2.39		3.15		3.15		14.19	BKD	BKPSDM
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	-	-	-	Baik		Baik		Baik		Amat baik		Amat baik		Amat baik			BKPSDM
		Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	-	-	-	B		BB		BB		A		A		A			BKPSDM
		Tingkat kematangan implementasi SPIP	Level	-	-	-	Level 2		Level 2		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3			BKPSDM
		persentase penatausahaan keuangan yang sesuai regulasi	%	-	-	-	100		100		100		100		100		100			BKPSDM
		Persentase keselarasan dokumen perencanaan PD	%	-	-	-	90		90		90		90		90		90			BKPSDM
Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase Aparatur yang telah mengikuti Diklat Penjenjangan	Persentase Aparatur yang telah mengikuti Diklat Penjenjangan	%	61	632.33	62	1,602.71	0	-	0	-	0	-	0	-	0	2,235.04	BKD	BKPSDM
		Persentase aparatur yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional	Persentase aparatur yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional	%	18		22		-		-		-		-		0		BKD	BKPSDM
		Rasio Aparatur S1 / jumlah aparatur	Rasio Aparatur S1 / jumlah aparatur	%	-		-		-		-		-		-		0		BKD	BKPSDM

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (outcome)		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab			
					2016		2017		2018		2019		2020						2021	
					Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt					Target	Rp. Jt
		2016	2017-2021																	
		Rasio Aparatur S2 / jumlah aparatur	Rasio Aparatur S2 / jumlah aparatur	%	-		-		-		-		-		-		0		BKD	BKPSDM
Program pendidikan kedinasan	-	Cakupan sosialisasi regulasi tentang kepegawaian	Cakupan sosialisasi regulasi tentang kepegawaian	%	16,5	72.85	-										72.85			BKPSDM
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Jabatan Struktural sesuai kompetensi	Persentase Jabatan Struktural sesuai kompetensi	%	81	2,925.62	81	3,101.53	82	1,000	82	1,253.24	83	1,509.50	83	2,396.55	82.5	12,186.92	BKD & Sekretariat Korpri	BKPSDM
		Persentase jabatan fungsional sesuai kompetensi	Persentase jabatan fungsional sesuai kompetensi	%	97		95		95		96		96		97		97		BKD	BKPSDM
		Rasio Aparatur S1 / jumlah aparatur	Rasio Aparatur S1 / jumlah aparatur	%	61		63		-		-		-		-		-		BKD	BKPSDM
		Rasio Aparatur S2 / jumlah aparatur	Rasio Aparatur S2 / jumlah aparatur	%	10		11		-		-		-		-		-		BKD	BKPSDM
		Persentase pelanggaran disiplin pegawai	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	%	0.6		0.6		0.5		0.4		0.3		0.3		0.3		BKD	BKPSDM
		Persentase pegawai sesuai formasi di masing-masing SKPD	Persentase pegawai sesuai formasi di masing-masing SKPD	%	85		84		85		86		87		88		88		BKD	BKPSDM
		Ketersediaan aplikasi penilaian kinerja aparatur	-	ada/tidak ada	-		-		-		-		-		-		-		BKD	BKPSDM
		Persentase kelengkapan data aparatur melalui SIMPEG	Persentase kelengkapan data aparatur melalui SIMPEG	%	90		100		100		100		100		100		100		BKD	BKPSDM
		Jumlah regulasi penilaian kinerja aparatur	Jumlah regulasi penilaian kinerja aparatur	%	-		3		-		-		-		-		3		BKD	BKPSDM
		Jumlah aplikasi penilaian kinerja aparatur	Jumlah aplikasi penilaian kinerja aparatur	%	NA		NA		1										BKD	BKPSDM
		Indeks kepuasan masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat	%	Baik		Baik		Baik		Baik		Amat Baik		Amat Baik		Amat Baik		BKD	BKPSDM
Program peningkatan dan pengembangan pelayanan aparatur	Program peningkatan dan pengembangan pelayanan aparatur	Jumlah konsultasi dan fasilitasi hukum bagi aparatur	-	kali	3	164.46	-	112.41	-	118.31	-	-	-	-	-	-	395.17		Sekretariat Korpri	Sekretariat Korpri
		Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peringatan HUT KORPRI	-	kegiatan	2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Sekretariat Korpri	-
Pendidikan dan Pelatihan						-		-		2,458.28		2,458.28		2,700.00		4,167.15		11,783.72		
Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Program Peningkatan kapasitas ASN	Persentase Aparatur yang telah mengikuti Diklat Penjenjangan	Persentase Aparatur yang telah mengikuti Diklat Penjenjangan	%	61	-	62	-	63	2,458.28	64	2,458.28	65	2,700.00	66	4,167.15	66	11,783.72	BKD	BKPSDM
		Persentase aparatur yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional	Persentase aparatur yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional	%	18		22		27		32		36		41		41		BKD	BKPSDM
		Rasio Aparatur S1 / jumlah aparatur	Rasio Aparatur S1 / jumlah aparatur	%	-		-		65		67		68		69		69		BKD	BKPSDM
		Rasio Aparatur S2 / jumlah aparatur	Rasio Aparatur S2 / jumlah aparatur	%	-		-		11		11		12		12		11.8		BKD	BKPSDM

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (outcome)		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab	
2016	2017-2021	2016	2017-2021		2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp. Jt	2016	2017-2021
					Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt				
Penelitian dan Pengembangan						-		2,178.61		2,530.48		3,173.19		3,500.00		4,958.11		16,340.40		
-	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran	%	NA	-	100	534.29	100	530.17	100	738.61	100	648.26	100	1,154.08	100	3,605.41	-	BADAN LITBANG
-	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	%	NA	-	100	332.07	100	160.09	100	188.05	100	85.06	100	293.82	100	1,059.09	-	BADAN LITBANG
-	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	Persentase pelanggaran disiplin berpakaian	%	NA	-	100	12.70	100	15.88	100	19.63	100	24.53	100	30.66	100	103.40	-	BADAN LITBANG
-	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	Cakupan pemenuhan kebutuhan peningkatan SDM aparatur	%	NA	-	100	120.28	100	250.00	100	138.48	100	131.60	100	216.37	100	856.73	-	BADAN LITBANG
-	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	-	-	Baik	2.29	Baik	2.87	Baik	3.59	Amat baik	4.48	Amat baik	5.60	Amat baik	18.83	-	BADAN LITBANG
			Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	-	-	B		BB		BB		A		A		A			
			Tingkat kematangan implementasi SPIP	Level	-	-	Level 2		Level 2		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3			
			persentase penatausahaan keuangan yang sesuai regulasi	%	-	-	100		100		100		100		100		100			
			Persentase keselarasan dokumen perencanaan PD	%	-	-	90		90		90		90		90		90			
Program Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian Dan Pengembangan							1,176.98		956.25		1,234.94		1,543.67		1,929.59		6,841.42		
			Ketersediaan Dokumen Penelitian dan Pengembangan	dok	-														Bappeda	BADAN LITBANG
			Jumlah Inovasi yang dihasilkan masyarakat	buah	10														Bappeda	BADAN LITBANG
			Jumlah Hasil Kelitbang	dok	0	-	2	-	6		6		11		11		36			
-	Program Penguatan Inovasi Daerah								615.23		849.91		1,062.39		1,327.99		3,855.53			
-	-	-	Persentase Aplikasi Laboratorium Inovasi Pelayanan Publik	%	NA		10		8		5		4		3		30			BADAN LITBANG
			Jumlah inovator Masyarakat yang dihasilkan	Inovator	NA		5		5		5		5		5		5			BADAN LITBANG
Kesbangpol						452.79		1,151.38		-		-		-		-		1,604.16		
-	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	-		100	363.18									100.00	363.18		Kantor Kesbangpol
-	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	%	-		100	165.33									100.00	165.33		Kantor Kesbangpol
-	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	Persentase pelanggaran disiplin berpakaian	%	-		0	12.75									-	12.75		Kantor Kesbangpol
-	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	Indeks Kepuasan Masyarakat		-		Baik	0.91									Amat baik	0.91		Kantor Kesbangpol
		-	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		-		B										A			

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (outcome)		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab			
					2016		2017		2018		2019		2020						2021	
					Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt					Target	Rp. Jt
2016	2017-2021	2016	2017-2021														Target	Rp. Jt	2016	2017-2021
		-	Tingkat kematangan implementasi SPIP		-		Level 2										Level 3			
		-	persentase penatausahaan keuangan yang sesuai regulasi	%	-		100										100			
		-	Persentase keselarasan dokumen perencanaan PD	%	-		90										90			
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal					214.71		-										214.71		
		Persentase Penanganan Proses Kasus dan Sengketa dalam Masyarakat	-	%	100		-										-		Kantor Kesbangpol	Kantor Kesbangpol
		Jumlah demo	-	kali	2		-										-		Kantor Kesbangpol	Kantor Kesbangpol
		Jumlah rapat HTAG Kantibmas	-	kali	6		-										-		Kantor Kesbangpol	-
			Jumlah HTAG Ipoleksosbud Agama yang dapat dideteksi	kali	-		2										2		-	Kantor Kesbangpol
			Persentase penyelesaian gangguan keamanan	%	-		100										100		-	Kantor Kesbangpol
Program Pengembangan Wawasan kebangsaan	Program Pengembangan Wawasan kebangsaan					50.87		557.27										608.14		
		Intensitas komunikasi FKUB		kali	4														Kantor Kesbangpol	
		Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan		kali	2														Kantor Kesbangpol	
			Persentase penanganan konflik umat beragama	%	-		100										100		-	Kantor Kesbangpol
			persentase pemahaman masyarakat dalam bela negara	%	-		75										85		-	Kantor Kesbangpol
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan					8.51		9.60										18.10	Kantor Kesbangpol	Kantor Kesbangpol
						170.30		-										170.30	Setda 2017 Kantor Kesbangpol	Setda 2017
			Penyelenggaraan kegiatan hari besar nasional dan HUT Kota	kegiatan	2														Kantor Kesbangpol	
			Persentase pemahaman Orsosnas dalam berorganisasi	-	-		100										100		Kantor Kesbangpol	Kantor Kesbangpol
-	Program Peningkatan Koordinasi dan Pembinaan Pencegahan Bahaya Narkoba dan Miras	-	persentase pemahaman tentang bahaya narkoba dan miras	-	-		100												Kantor Kesbangpol	Kantor Kesbangpol
Program Pendidikan Politik masyarakat	Program Pendidikan Politik masyarakat	Persentase partisipasi politik masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pilpres, Pileg dan Pilkada	%	-	8.40		42.33									75	50.73	Kantor Kesbangpol	Kantor Kesbangpol
			Persentase Parpol yang memahami tentang pengelolaan bantuan keuangan	%	-		80										90		-	Kantor Kesbangpol
Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum						57,323.24		61,328.23		-		-		-		-		118,651.48		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100		100										100			
						5,860.04		7,283.65										13,143.68	Setda (Bagian Umum)	Setda (Bagian Umum)
						2,903.77		4,043.42										6,947.19	Sek. DPRD	Sek. DPRD
						668.05		534.30										1,202.34	Inspektorat	Inspektorat
						249.92												249.92	KPP	
						309.98		1,558.38										1,868.36	Kec. Lb. Sikarah	Kec. Lb. Sikarah

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (outcome)		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab			
2016	2017-2021	2016	2017-2021		Target	2016 Rp. Jt	Target	2017 Rp. Jt	Target	2018 Rp. Jt	Target	2019 Rp. Jt	Target	2020 Rp. Jt	Target	2021 Rp. Jt	Target	2016 Rp. Jt	2017-2021	
						185.00		240.44										425.44	Setda (Bagian Umum)	Setda (Bagian Umum)
						130.00		217.50										347.50	Sek. DPRD	Sek. DPRD
						152.01		194.02										306.03	Inspektorat	Inspektorat
					100	14.90	100									100		14.90	KPP	Kec. Tanjung Harapan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	-	%	100															
		Indeks Kepuasan Masyarakat		Nilai	-	-	Baik										Amat baik			
		Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		Nilai	-	-	B										A			
		Tingkat kematangan implementasi SPIP		Level	-	-	Level 2										Level 3			
		persentase penatausahaan keuangan yang sesuai regulasi		%	-	-	100										100			
		Persentase keselarasan dokumen perencanaan PD		%	-	-	90										90			
								151.12										151.12	-	Setda (Bagian Umum)
						3.09		2.59										5.67	Sek. DPRD	Sek. DPRD
						0.21												0.21	Inspektorat	Inspektorat
								1.11										1.11	Kec. Lb. Sikarah	Kec. Lb. Sikarah
								1.70										1.70	Kec. Tanjung Harapan	Kec. Tanjung Harapan
						0.47												0.47	Kel. Sinapa Pilang	
						0.30												0.30	Kel. IX Korong	
						0.39												0.39	Kel. Aro IV Korong	
						0.71												0.71	Kel. KTK	
						0.78												0.78	Kel. Koto Panjano	
						1.05												1.05	Kel. PPA	
						1.06												1.06	Kel. Tanjung Paku	
						0.77												0.77	Kel. Kampung Jawa	
						1.88												1.88	Kel. Nan Balimo	
						1.38												1.38	Kel. Lainq	
Program Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Program Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah / LKJ	Persentase penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah / LKJ	%	100(3)	395.97	100	724.68									100	1,120.64	Setda (Bagian Organisasi)	Setda (Bagian Organisasi)
		Persentase penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah / LPPD	Persentase penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah / LPPD	%	100(1)		100										100		Setda (Bagian Pemerintahan)	Setda (Bagian Pemerintahan)
		Persentase pelaksanaan monitoring dan evaluasi SOP	Persentase pelaksanaan monitoring dan evaluasi SOP	%	-		100										0		Setda (Bagian Organisasi)	Setda (Bagian Organisasi)
		Implementasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi (RADPPK);	-	nilai rencana aksi	H		-										-		Setda (Bagian Organisasi)	
		Persentase penyusunan laporan SPM	Persentase penyusunan laporan SPM	%	100		100										100		Setda (Bagian Organisasi)	Setda (Bagian Organisasi)
		Persentase Kegiatan yang dimonitoring dan evaluasi	Persentase kegiatan yang dimonitoring dan evaluasi	%	95		95										100		Setda (Bagian PAP)	Setda (Bagian PAP)
		Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja SKPD	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja SKPD	%	80		90										100		Setda (Bagian PAP)	Setda (Bagian PAP)
		Persentase ketepatan waktu pengentrian RUP awal dan RUP Perubahan	Persentase ketepatan waktu pengentrian RUP awal dan RUP Perubahan	%	80		95										100		Setda (Bagian PAP)	Setda (Bagian PAP)

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (outcome)		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab			
2016	2017-2021	2016	2017-2021		Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	2016	2017-2021
		Persentase ketepatan waktu pengentrian TEPR	Persentase ketepatan waktu pengentrian TEPR	%	80		95										100		Setda (Bagian PAP)	Setda (Bagian PAP)
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Ketersediaan regulasi Rumpun Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum	Ketersediaan regulasi Rumpun Jabatan Fungsional tertentu dan JFU	regulasi	1	1,312.09	1	2,581.96									2	3,894.05		
		Persentase OPD yang sesuai perundang-undangan	Persentase OPD yang sesuai perundang-undangan	%	100		100										100		Setda (Bagian Organisasi)	Setda (Bagian Organisasi)
		Persentase Evaluasi Analisa Jabatan	Persentase Evaluasi Analisa Jabatan	%	-		100										100		Setda (Bagian Organisasi)	Setda (Bagian Organisasi)
		Persentase Evaluasi Analisa Beban Kerja	Persentase Evaluasi Analisa Beban Kerja	%	-		100										100		Setda (Bagian Organisasi)	Setda (Bagian Organisasi)
		Persentase Evaluasi Tupoksi	Persentase Evaluasi Tupoksi	%	100		0										100		Setda (Bagian Organisasi)	Setda (Bagian Organisasi)
		Persentase Evaluasi Jabatan	Persentase Evaluasi Jabatan	%	-		0										0		Setda (Bagian Organisasi)	Setda (Bagian Organisasi)
		Jumlah pembinaan terhadap aparaturnya kecamatan dan atau kelurahan	Jumlah pembinaan terhadap aparaturnya kecamatan dan atau kelurahan	kali	2		2										2			
		Tingkat kepuasan masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat	SKPD	10		10										10		Setda (Bagian Pemerintahan)	
		Persentase layanan ULP	Persentase layanan ULP	%	100		100										100		Setda (Bagian Organisasi)	
		Persentase layanan LPSE	Persentase layanan LPSE	%	100		100										100		Setda (Bagian PAP)	
		Persentase Pembinaan Jasa Konstruksi	Persentase Pembinaan Jasa Konstruksi	%	70		80										85		Setda (Bagian PAP)	
		-	Penilaian Unit pelayanan publik dilingkungan Pemko Solok	OPD			25												Setda (Bagian PAP)	
Program Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Program Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Terfasilitasinya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Terfasilitasinya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	%	100	2,718.25	100	3,932.91									100	6,651.17	Setda (Bagian Umum)	
		Terfasilitasinya pelayanan kedinasan bagi kepala daerah/Wakil Kepala Daerah	Terfasilitasinya pelayanan kedinasan bagi kepala daerah/Wakil Kepala Daerah	%	100		100										100		Setda (Bagian Humas)	
		Dialog audiensi dengan Tokoh Masyarakat, Pimpinan/anggota Organisasi sosial masyarakat	Dialog audiensi dengan Tokoh Masyarakat, Pimpinan/anggota Organisasi sosial masyarakat	%	100		100										100		Setda (Bagian Humas)	
		Koordinasi dengan Pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Koordinasi dengan Pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	%	100		100										100		Setda (Bagian Humas)	
		Persentas aparaturnya yang memahami keprotokoleran dan kehumasan	Persentas aparaturnya yang memahami keprotokoleran dan kehumasan	%	50		50										70		Setda (Bagian Humas)	
		Jumlah Rapat Koordinasi Pemerintahan	Jumlah Rapat Koordinasi Pemerintahan	kali	12		12										12			
Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah	Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah					74.08		333.84										407.91	Setda	Setda
Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Persentase Penanganan konflik pertanahan	Persentase Penanganan konflik pertanahan	%	100	5,715.51	50.00	-									50.00	5,715.51	Setda (Bagian Pemerintahan)	Setda (Bagian Pemerintahan)
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Penyelenggaraan kegiatan hari besar nasional dan HUT Kota		kegiatan	2	-		268.36											Setda (Bagian Pemerintahan)	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (outcome)		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab	
2016	2017-2021	2016	2017-2021		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2016	2017-2021
					Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt		
			Penyelenggaraan kegiatan hari besar nasional dan HUT Kota	1 Tahun			1 Tahun								1 Tahun			Setda (Bagian Pemerintahan)
Program Penataan Daerah Otonomi	Program Penataan Daerah Otonomi	Tertatanya batas wilayah administrasi pemerintahan	Tertatanya batas wilayah administrasi pemerintahan		1	223.54	5	4.90							5	228.44	Setda (Bagian Pemerintahan)	Setda (Bagian Pemerintahan)
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Pemerintah daerah	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi daerah	Ketersediaan Website dan sistem Informasi Penda		ada/tidak ada	ada	264.53	ada	70.44							ada	334.97	Setda (Bagian Humas)	Setda (Bagian Humas)
Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	persentase penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui media massa	persentase penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui media massa	%	75	2,361.71	75	2,839.17							75	5,200.88	Setda (Bagian Humas)	Setda (bagian Humas)
		persentase penyebarluasan informasi pembangunan daerah	persentase penyebarluasan informasi pembangunan daerah	%	100		100								100			
Program Penataan peraturan dan perundang-undangan	Program Penataan peraturan dan perundang-undangan	Tingkat produk hukum yang aspiratif	Tingkat produk hukum yang aspiratif	%	100	1,112.72	100	1,125.78							100	2,238.51	Setda (Bagian Hukum dan HAM)	Setda (Bagian Hukum dan HAM)
		Persentase pembahasan dan penyempurnaan produk hukum daerah	Persentase pembahasan dan penyempurnaan produk hukum daerah	%	90		90								90		Setda (Bagian Hukum dan HAM)	Setda (Bagian Hukum dan HAM)
		Persentase proses penyelesaian perkara yang dihadapi pemerintah daerah	Persentase proses penyelesaian perkara yang dihadapi pemerintah daerah	%	100		100								100		Setda (Bagian Hukum dan HAM)	Setda (Bagian Hukum dan HAM)
		Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti penyuluhan hukum	Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti penyuluhan hukum	%	85		87								90		Setda (Bagian Hukum dan HAM)	Setda (Bagian Hukum dan HAM)
		Jumlah usulan Ranperda yang masuk dalam prolegda	Jumlah usulan Ranperda yang masuk dalam prolegda	Ranperda	0:00		8								10		Setda (Bagian Hukum dan HAM)	Setda (Bagian Hukum dan HAM)
-	Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama	-	Terlaksananya koordinasi dan presentasi potensi dan terbentuknya Forum CSR dan operasional Forum	-	-		100		-						100			Setda (Bag. Perekonomian)
-		-	Terlaksananya pembinaan dan penumbuhan BUMD	-	-		100		-						100			
			Terlaksananya koordinasi dan fasilitas bidang usaha dan sarana perekonomian	-	-		100		-						100			
	Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat yang beriman dan bertakwa		Jumlah mubaligh/da'ikhatib/guru agama/penyuluh agama yang dikaderisasi	orang											80		Setda (Bag. Kesra)	Setda (Bag. Kesra)
			Jumlah pemberian reward bagi Toga/Toma/Lembaga/org anisasi keagamaan/pemerhati pembangunan	orang											30			
			- Jumlah guru MDA bersertifikasi :															
			- Kategori A	orang											339			
			- Kategori B	orang											13			
			- Kategori C	orang											-			
			- Belum bersertifikasi	orang											10			
			- Persentase MDA yang terfasilitasi	%											100			

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (outcome)		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab	
2016	2017-2021	2016	2017-2021		Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	2016	2017-2021
			- Jumlah cabang MTQ yang diunggulkan	cabang											6			
			- Persentase qori/qorlah yang merah peringkat 3 besar	%											30			
			- Persentase keterlibatan pejabat dalam Mabot	%											90			
			- Persentase lembaga/ organisasi sosial keagamaan yang menerima bantuan	%											100			
			- Jumlah Masjid yang melaksanakan majelis taklim	Masjid											50			
			- Jumlah Masjid/ rumah ibadah yang melaksanakan didikan subuh	buah											130			
			- Jumlah rumah ibadah yang memiliki MDA	buah											139			
			- Jumlah rumah ibadah yang melaksanakan shalat lima waktu	buah											112			
	Program peningkatan pelayanan kehidupan beragama		Jumlah rumah ibadah :														Setda (Bagian Kesra)	Setda (Bagian Kesra)
			- Masjid	buah											52			
			- Mushalla	buah											74			
			%												48			
			-Jumlah masjid paripurna												5			
			Jumlah Muzaki	orang											6000		Setda (Bagian Kesra)	Setda (Bagian Kesra)
			Jumlah lembaga sosial keagamaan pengelola dana keagamaan	buah											30			
			- Persentase kenaikan zakat yang dikelola Badan Amil zakat												39			Setda (Bagian Kesra)
			-Jumlah Keg. Semarak 1 Muharram												1 pkt			Setda (Bagian Kesra)
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		SOP Keuangan Setda															Setda (Bagian Kesra)
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah Rancangan Perda yang ditetapkan	-	Ranperda	12	11,932.64	-	19,235.51							-	31,168.15	Sek. DPRD	Sek. DPRD
		Jumlah Rancangan Perda Inisiatif yang ditetapkan dalam Prolegda	-	Ranperda	10		-								-		Sek. DPRD	-
		-	Jumlah Kegiatan Reses yang difasilitasi	kali	-		60								280		Sek. DPRD	-
		-	Jumlah Pembahasan Ranperda yang difasilitasi	dok	-	-	9								41		-	Sek. DPRD
		-	Jumlah Draft Ranperda Inisiatif yang difasilitasi	dok	-	-	2								10		-	Sek. DPRD
	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pimpinan DPRD							90.76										Sek. DPRD
Pengembangan Kemitraan Pemerintah Daerah dan UMKM	Pengembangan Kemitraan Pemerintah Daerah dan UMKM	Persentase penguatan modal usaha UKM		%	10	168.86		126.94								295.80	Setda (Bag. Perekonomian)	Setda (Bag. Perekonomian)

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (outcome)		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab		
2016	2017-2021	2016	2017-2021		2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp. Jt	2016
			Penarikan Tunggal Dana Bergulir, Inventarisasi dan Pencatatan pinjaman UMKM, Kemitraan UMKM di Bidang Jasa & Permodalan	-	-		80									100			Setda (Bag. Perekonomian)
-	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan																		Sekretariat Daerah Bag. Perekonomian
-	Peningkatan Layanan Pengadaan Elektronik																		Sekretariat Daerah Bag. PAP
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan yang ada	SOP Keuangan Setda	%	76														
Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	%	85	987.07	85	1,577.13								87	2,564.20	Inspektorat	Inspektorat
		Persentase Kerugian Daerah	Persentase Kerugian Daerah	%	0.2		0.19									0.18		Inspektorat	
		Persentase TLHP sebelum 60 hari	-	%	34		0									0		Inspektorat	
		Persentase pelaksanaan program kerja pengawasan	Persentase pelaksanaan program kerja pengawasan	%	97		97									100		Inspektorat	
		Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);	-	Nilai	CC		0									0			
		Kapabilitas APSP	-	Nilai	2		0									0		Inspektorat	
	Program Pengendalian Intern dan Peningkatan Etika Pemerintah Daerah	-	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Mengimplementasikan SPIP Pada Level 3	%	0	-	0	-								100			Inspektorat
-	Program Reformasi Birokrasi	-	Indeks Reformasi Birokrasi	nilai	0	-	CC	-								8		Inspektorat	Inspektorat
Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Dokumen sidur pengawasan	Dokumen sidur pengawasan	dok	-	-	1	-								1		Inspektorat	Inspektorat
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas	Rasio Tenaga Pengawas yang bersertifikasi Auditor		%	60	85.05	0	370.16									455.21	Inspektorat	Inspektorat
		Kapabilitas APSP	Nilai	-			level 2									level 3		Inspektorat	
-	Peningkatan Zona integritas dan penanganan Gratifikasi		Jumlah laporan gratifikasi yang telah ditindaklanjuti	Laporan	-	-	5	-								15			
			Jumlah Unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Solok yang mendapatkan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani	Unit	-	-	-									5			
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/Kelurahan		Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)		kelompok	5	-	0									0		BKBPMP	
		LPM Berprestasi		kelompok	1		0									0		BKBPMP	
		Persentase Posyandu Aktif		%	100		0									0		BKBPMP	
-	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat																		
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/ Kelurahan	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/ Kelurahan	persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	%	35	-	-									-		BKBPMP	-

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (outcome)		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab		
					2016		2017		2018		2019		2020						2021
					2016	2017-2021	2016	2017-2021	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target	Rp. Jt	Target
		persentase pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	persentase pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	%	68.47		-									-		BKBPMP	-
		Tingkat partisipasi gotong royong masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Kelurahan	Tingkat partisipasi gotong royong masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Kelurahan	%	40.8		-									-		BKBPMP	-
Program Peningkatan Pelayanan Publik						388.38											388.38	KPP	
						40.61											40.61	Kec. Lb. Sikarah	
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan			%	100	227.62	100	189.13							100		416.75	Kec. Lb. Sikarah	Kec. Lb. Sikarah
				%	100	244.38	100	122.10							100		366.47	Kec. Tanjung Harapan	Kec. Tanjung Harapan
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan			%	100	-	100	169.31							100		169.31	Kelurahan se Kec. Lb. Sikarah	Kec. Lb. Sikarah
				%	100	-	100	145.92							100		145.92	Kelurahan se Kec. Tj. Harapan	Kec. Tanjung Harapan
						708.79											708.79	Kel. Tanah Garam	
						497.58											497.58	Kel. VI Suku	
						243.33											243.33	Kel. Sinapa Piliang	
						282.91											282.91	Kel. IX Korong	
						355.75											355.75	Kel. Aro IV Korong	
						324.69											324.69	Kel. KTK	
						506.04											506.04	Kel. Simpang Rumbio	
						406.14											406.14	Kel. Koto Panjang	
						437.51											437.51	Kel. PPA	
						398.34											398.34	Kel. Tanjung Paku	
						582.73											582.73	Kel. Kampung Jawa	
						672.12											672.12	Kel. Nan Balimo	
						272.69											272.69	Kel. Lainq	
		Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	%	77	-	78	-								79		Kec. Lb. Sikarah & Kec. Tj. Harapan	
		Persentase Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	75	-	75	-								76		Kec. Lb. Sikarah & Kec. Tj. Harapan	
		Persentase Keikutsertaan masyarakat dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan	Persentase Keikutsertaan masyarakat dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan	%	82	-	82	-								85		Kec. Lb. Sikarah & Kec. Tj. Harapan	
		Persentase Kegiatan Pemerintah Terlaksana di wilayah Kecamatan	Persentase Kegiatan Pemerintah Terlaksana di wilayah Kecamatan	%	100	-	100	-								100		Kec. Lb. Sikarah & Kec. Tj. Harapan	
Total						348,055.41	454,726.00	420,463.73	426,785.23	453,234.20	477,800.00	2,581,064.56							

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

9.1. Indikator Kinerja Utama

Pengukuran keberhasilan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2016-2021 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama lima tahun ke depan menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi yang disajikan dalam Tabel 9.1 berikut:

Tabel 9.1.
Indikator Kinerja Utama Kota Solok Tahun 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Target					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Misi I : Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat Berlandaskan ABS-SBK "Syara' Mangato Adaik Mamakai"								
1	Pertumbuhan nilai zakat	%	30	35	40	50	55	60
2	Jumlah penduduk usia 25 th ke atas yang sudah haji	Orang	638	738	838	938	1038	1138
3	Jumlah penduduk yang hafizh Al-Qur'an (1 juz sampai 30 juz)	Orang	490	1090	1690	2290	2890	3500
4	Jumlah masjid yang mempunyai BMT, TPA/MDA, Perpustakaan, Majelis Ta'lim, Remaja Masjid	Masjid	2	12	22	32	42	52
5	Angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	Jumlah	15	14	13	12	11	10
6	Persentase peran lembaga adat	%	65	70	75	80	85	90
7	Jumlah kelompok penggiat seni budaya	Klp	10	15	15	17	17	20
8	Jumlah kelompok penggiat adat dan budaya yang aktif	Klp	45	43	48	52	57	62
Misi II. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Reformasi Birokrasi								
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	NA	Baik	Baik	Baik	Baik	Amat Baik
2	Persentase Pengaduan Masyarakat tentang Pelayanan Publik yang Ditindaklanjuti (Lapor Sistem Pelaporan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional)	%	-	-	100	100	100	100
3	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Nilai	CC	CC	B	BB	BB	A
4	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Nilai	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
5	Opini BPK	Opini	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6	Tingkat kematangan implementasi SPIP	Level	Level 1	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3
7	Indeks <i>e-government</i>	Nilai	-	-	1,5	3	3,4	3,5
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	n.a	Baik	Baik	Baik	Baik	Amat Baik
Misi III. Mewujudkan Pendidikan dan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang Berkualitas Untuk Menghasilkan Sumberdaya manusia dan generasi muda								
1	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,78	10,79	10,81	10,82	10,84	10,85
2	Persentase sekolah dengan rata-rata hasil UN							
	- SD ($\geq 7,7$)	%	46,67	53,33	60,00	66,67	73,33	80,00
	- SMP ($\geq 6,0$)	%	14,29	28,57	42,86	57,14	71,43	85,71



No	Indikator	Satuan	Target					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- SMA/SMK ($\geq 5,9$)**	%	36,36	45,45	-	-	-	-
3	Index Pembangunan Gender (IPG)	%	95,9	96,4	96,8	97,2	97,6	98
4	Index Pemberdayaan Gender (IDG)	%	64,77	65,42	66,25	67,09	67,94	68,81
5	Predikat evaluasi kota layak anak	predikat	n.a	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Nindya
6	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	72,83	72,92	73,01	73,10	73,19	73,28
7	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1000 KH	12,5	9	9	9	8	8
8	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	166	75	75	75	75	75
9	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	organisasi	23	24	24	25	25	26
10	Jumlah atlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional	orang	73	20	79	24	90	28
Misi IV. Menjadikan Kota Solok Sebagai Pusat Perdagangan Hasil-Hasil Pertanian, Perkebunan dan Ekonomi Kerakyatan yang Tangguh Berbasis Potensi Unggulan Daerah Melalui Perdagangan, Pariwisata dan Jasa lainnya Serta Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif								
1	Pertumbuhan sektor industri dalam PDRB Kota Solok	%	3,04	3,43	3,63	3,72	3,77	3,80
2	Pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB Kota Solok	%	6,30	6,30	6,63	6,79	6,87	6,91
3	Pertumbuhan sektor pertanian dalam PDRB Kota Solok	%	2,43	2,51	2,55	2,57	2,58	2,58
4	Peningkatan produksi komoditi padi	%	1,06	3,31	3,78	4,24	4,53	5,26
5	Volume Perdagangan	Rp. (Juta)	615,382.17	654,157.70	697,511.68	744,877.29	796,067.16	851,099.72
6	Jumlah wisatawan	Orang	125.000	150.000	175.000	250.000	275.000	300.000
7	Ketersediaan pangan	ton	10.194	10.204	10.214	10.224	10.234	10.244
8	Skor pola pangan harapan	Nilai	81	82	83	84	85	86
9	Total nilai Investasi	Rp.	319.415	338.580	358.895	380.429	403.254	427.450
10	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,51	4,30	4,09	3,88	3,67	3,46
Misi V. Menekan Angka Kemiskinan dan Mengurangi Permasalahan Sosial lainnya								
1	Angka Kemiskinan	%	4,01	3,74	3,48	3,22	2,95	2,69
2	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	4,927	4,681	4,447	4,224	4,013	3,812
3	Jumlah kasus PEKAT	%	31	27	23	19	16	14
Misi VI. Mewujudkan Pembangunan Prasarana dan Sarana yang Berwawasan Lingkungan								
1	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	91	92	93	94	95	96
2	Persentase Penduduk Berakses sanitasi	%	81	82	83	84	85	86
3	Persentase Penduduk Berakses Air bersih/air minum	%	83	85	87	90	92	95
4	Persentase Luasan Permukiman Kumuh	%	2,92	2,57	2,22	1,87	1,53	1,18
5	persentase areal sawah yang terairi dengan baik	%	85	85	85,75	86,5	87	87,5
6	% pengurangan luasan genangan akibat banjir	%	6,93	5,93	4,93	3,93	2,93	1,93
7	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	%	75,94	77	79	81	83	85
8	Indeks kualitas lingkungan hidup	%	n.a	48	50	55	58	61
9	Persentase luasan RTH publik	%	17,16	17,20	17,20	17,25	17,25	17,30



9.2. Indikator Kinerja Daerah

Sebagai sebuah daerah otonom, Kota Solok diwajibkan menetapkan target capaian dari indikator-indikator yang disepakati bersama antara pemerintah kota dengan para pemangku kepentingan di Kota Solok. Target pencapaian ini adalah sebuah kunci kinerja yang pada akhirnya menjadi ukuran efektivitas dan efisiensi sebuah tata kelola pemerintahan secara umum yang sasaran utamanya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan pelayanan publik.

Target capaian indikator kinerja daerah yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 9.2.
Indikator Kinerja Daerah Kota Solok

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kondisi Kinerja awal (2015)	TAHUN					Kondisi Kinerja akhir (2021)
				2016	2017	2018	2019	2020	
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi									
1.1.	Pertumbuhan PDRB (Th.dasar 2010)	%	5,97	5,95	6,10	6,20	6,30	6,40	6,50
1.2.	PDRB per kapita (Th dasar 2010)	Rp. Juta	44,84	48,11	52,85	58,11	53,91	70,32	77,39
1.3.	Indeks Gini	%	0,303	0,293	0,290	0,280	0,275	0,270	0,265
1.4.	Tingkat kemiskinan	%	4,12	4,01	3,74	3,48	3,22	2,95	2,69
1.5.	Jumlah Penduduk	jiwa	65.157	65.495	66.795	68.095	69.395	70.695	71.995
1.6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,72	4,51	4,30	4,09	3,88	3,67	3,46
1.7.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	76,83	77,07	77,51	77,95	78,39	78,83	79,27
1.8.	Index pembangunan Gender (IPG)	indeks	95,45	95,9	96,4	96,8	97,2	97,6	98
1.9.	Index pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	64,07	64,77	65,42	66,25	67,09	67,94	68,81
Kesejahteraan Sosial									
1.	Pendidikan								
1.1.	Angka melek huruf	%	99,20	99,20	99,20	99,20	99,20	99,20	99,20
1.2.	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	10,77	10,78	10,79	10,81	10,82	10,84	10,85
1.3.	Angka Harapan Lama Sekolah	tahun	14,27	14,28	14,29	14,30	14,31	14,32	14,33
1.4.	Angka partisipasi kasar								
	- SD/MI/SDLB/Paket A/SDLB	%	121,60	121,65	110,03	110,03	110,03	110,03	110,03
	- SMP/MTs/SMPLB/Paket B	%	141,98	142,06	99,84	99,84	99,84	99,84	99,84
	- SMA/SMK/MA/SMALB/ Paket C	%	216,85	200					
1.5.	Angka Partisipasi Murni								
	- Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A/SDLB	%	102,79	100	92,30	92,30	92,30	92,30	92,30
	- Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	85,78	90	79,15	79,15	79,15	79,15	79,15
	- Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%	148,84	100					
2.	Kesehatan								
2.1.	Angka usia harapan hidup	tahun	72,74	72,84	72,92	73,01	73,10	73,19	73,28
2.2.	Angka kematian Ibu	Per 100.000 KH	75	166	75	75	75	75	75



NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kondisi Kinerja awal (2015)	TAHUN					Kondisi Kinerja akhir (2021)
				2016	2017	2018	2019	2020	
2.3.	Angka kematian bayi	Per 1000 KH	7	12,5	9	9	9	8	87
2.4	Prevalensi balita gizi kurang	%	4,75	4,75	4,75	4,65	4,6	4,55	4,5
3.	Ketenagakerjaan								
3.1.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	63,89	63,89	66,39	68,89	71,39	73,89	76,39
4.	Kebudayaan								
4.1	Jumlah grup kesenian per satuan penduduk	per 10000	2,61	3	3	3	3	3	3
4.2	Jumlah gedung per satuan penduduk	per 10000	0,15	0,15	0,15	0,15	0,3	0,3	0,3
5.	Pemuda dan Olahraga								
5.1.	Jumlah klub olahraga per satuan penduduk	per 10000	10,90	11	11	11	11	11	11
5.2.	Jumlah gedung olahraga per satuan penduduk	per 10000	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar									
1.	Pendidikan								
1.1	Angka partisipasi sekolah								
	- Usia 7-12 Tahun	%	102,79	100	100	100	100	100	100
	- Usia 13-15 Tahun	%	85,78	90	90	95	95	100	100
	- Usia 16-18 Tahun	%	148,84	100	100	100	100	100	100
1.2.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah								
	- SD/MI	Unit/jiwa	1 : 158	1 : 156	1 : 155	1 : 154	1 : 153	1 : 152	1 : 150
	- SLTP/MTs	Unit/jiwa	1 : 434	1 : 430	1 : 430	1 : 430	1 : 430	1 : 430	1 : 430
	- SLTA/MA	Unit/jiwa	1 : 303	1 : 303	-	-	-	-	-
1.3	Persentase Jumlah Sekolah dengan Rasio Murid per ruang Kelas sesuai standar	%	n.a	93	96	96	100	100	100
1.4	Rasio guru/murid								
	- SD/MI	Guru/murid	1 : 16	1 : 15	1 : 22	1 : 22	1 : 20	1 : 20	1 : 20
	- SLTP/MTs	Guru/murid	1 : 15	1 : 15	1 : 20	1 : 20	1 : 20	1 : 20	1 : 20
	- SLTA/MA	Guru/murid	1 : 11	1 : 11	-	-	-	-	-
1.5	Persentase sekolah yang memenuhi rasio ketersediaan guru sesuai standar	%	n.a	n.a	92	94	96	97	100
1.6	Angka Partisipasi PAUD	%	79,71	80	80	85	85	90	90
1.7	Angka Putus Sekolah:								
	- Angka Putus Sekolah (APTS) SD/MI	%	0,05	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	- Angka Putus Sekolah (APTS) SMP/MTs	%	0,07	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	- Angka Putus Sekolah (APTS) SMA/SMK/MA	%	1,24	< 1	-	-	-	-	-
1.8.	Angka Kelulusan:								
	- Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100	100	100	100	100
	- Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	95	98	99	100	100	100
	- Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	%	99,95	100	-	-	-	-	-
1.9.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV								
	- SD	%	90,04	90,04	99,8	99,8	99,9	99,9	99,9
	- SLTP	%	91,29	99,9	99,9	99,9	100	100	100



NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kondisi Kinerja awal (2015)	TAHUN					Kondisi Kinerja akhir (2021)
				2016	2017	2018	2019	2020	
	- SMA/SMK/MA	%	98,35	100	-	-	-	-	-
1.10.	Persentase Tenaga Kependidikan yang memenuhi kualifikasi Akademis S1	%	n.a	n.a	87`	90	93	96	100
1.11.	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik								
	- SD	%	65,02	70	86	89	92	95	95
	- SLTP	%	77,17	80	89	91	93	95	95
	- SLTA	%	59,32	70	-	-	-	-	-
1.12	Pendirian <i>boarding school</i> bernuansa islami	Unit	0	0	0	0	1	0	1
1.13	Persentase lulusan siswa menengah yang melanjutkan ke perguruan tinggi	%	41,6	45	45	50	50	55	55
1.14	Persentase lulusan siswa menengah kejuruan yang memasuki pasar kerja	%	21,8	30	-	-	-	-	-
1.15	Peringkat MTQ tingkat Provinsi	Ranking	5	-	5	-	4	-	4
1.16	Jumlah Muzakki	orang	2000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
2.	Kesehatan								
2.1	Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	%	n.a	n.a	100	100	100	100	100
2.2	Nilai evaluasi LAKIP Dinas Kesehatan Kota Solok	nilai	n.a	n.a	CC	B	B	B	BB
2.3	Persentase kelurahan siaga aktif	%	23	23	30	38	46	53	61
2.4	Persentase rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat	%	57,42	58	60	62	63	65	66
2.5	Persentase masyarakat miskin yang mempunyai jaminan kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100
2.6	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	%	n.a	n.a	100	100	100	100	100
2.7	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	n.a	n.a	100	100	100	100	100
2.8	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	n.a	n.a	100	100	100	100	100
2.9	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	n.a	n.a	100	100	100	100	100
2.10	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	n.a	n.a	100	100	100	100	100
2.11	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	n.a	n.a	100	100	100	100	100
2.12	Persentase warga negara usia 60 tahun Keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	n.a	n.a	100	100	100	100	100
2.13	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	n.a	n.a	100	100	100	100	100
2.14	Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	n.a	n.a	100	100	100	100	100
2.15	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	n.a	n.a	100	100	100	100	100



NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kondisi Kinerja awal (2015)	TAHUN					Kondisi Kinerja akhir (2021)
				2016	2017	2018	2019	2020	
2.16	Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	%	n.a	n.a	100	100	100	100	100
2.17	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	%	n.a	n.a	100	100	100	100	100
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
3.1	Persentase Kondisi Jalan Baik dan Sedang	%	87,99	91	92	93	94	95	96
3.2	Persentase Jembatan dengan kondisi baik	%	60	62	64	66	68	70	72
3.3	Cakupan Layanan Pelayanan Lampu Jalan	%	64,82	68,81	74,8	79,78	84,77	89,76	94,74
3.4	Persentase Jaringan Irigasi dengan Kondisi Baik	%	64	68	73	78	83	88	93
3.5	Persentase Sungai yang dinormalisasi	%	25,72	30	40	45	50	55	60
3.6	Persentase panjang tebing sungai rawan longsor yang tertangani	%	25,72	30	40	45	50	55	60
3.7	Jumlah dokumen rencana tata ruang yang di susun	Dokumen	-	0	0	1	1	-	-
3.8	Persentase bangunan yang memiliki IMB	%	55,68	60	63	66	69	72	75
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								
4.1	Jumlah prasarana dan sarana publik yang dibangun	unit	n.a	n.a	12	5	5	5	5
4.2	Persentase Rumah Layak Huni yang tersedia	%	n.a	n.a	89	90	91	92	93
4.3	Persentase luasan kawasan kumuh	%	n.a	2,92	2,57	2,22	1,87	1,53	1,18
4.4	Persentase penduduk yang berakses sanitasi	%	79,85	81	82	83	84	85	86
4.5	Persentase penduduk yang terlayani sistem air bersih yang memadai	%	82,26	83	85	87	90	92	95
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat								
5.1.	Persentase penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	%	65	75	75	75	75	75	75
5.2	Jumlah kasus Pekat	kali	40	38	36	34	32	30	28
5.3	Cakupan penegakan Perda dan Perkada	%	100	100	100	100	100	100	100
5.4	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per-10.000 penduduk	Per-10.000 penduduk	10,86	12,55	14,76	16,98	16,98	17,72	18,45
5.5	Rasio petugas Linmas	Per-RT	0,97	0,97	1	1,43	1,43	1,43	1,43
5.6	Persentase kasus kebakaran yang tertangani dalam waktu tanggap	%	100	100	100	100	100	100	100
5.7	Cakupan pelayanan bahaya kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100
5.8	Persentase kelurahan tangguh bencana	%	0	0	15,38	30,77	46,15	61,54	76,92
5.9	Persentase implementasi dokumen mitigasi bencana	%	0	0	25	50	75	100	100
5.10	Persentase relawan TRC yang bersertifikat	%	65	65	70	75	80	85	90
5.11	Persentase masyarakat terdampak bencana yang mendapat bantuan logistik dan obat-obatan	%	100	100	100	100	100	100	100



NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kondisi Kinerja awal (2015)	TAHUN					Kondisi Kinerja akhir (2021)
				2016	2017	2018	2019	2020	
6.	Sosial								
6.1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	unit	5	5	5	5	6	6	6
6.2	Jumlah PMKS	orang	4.863	4.927	4.681	4.447	4.224	4.013	3.812
6.3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	69,42	71,86	74,3	76,74	79,18	81,62	84,06
Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar									
1.	Tenaga Kerja								
1.1	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	63,89	63,89	66,39	68,89	71,39	73,89	76,39
1.2	Pencari kerja yang ditempatkan	%	15,62	20,50	25,50	30,50	35,50	41,9	44,88
1.3	Tingkat Keselamatan dan perlindungan	%	92,7	92,7	93,2	93,7	94,2	94,7	95,2
1.4	Persentase penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial	%	100	100	100	100	100	100	100
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
2.1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	28,77	30,52	32,85	34,25	36,78	38,87	40,63
2.2.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	71,23	68,12	66,65	64,23	62,56	60,78	58,78
2.3.	Rasio KDRT	%	0,03	0,09	0,08	0,07	0,06	0,05	0,05
2.4.	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	0,28	0,28	0,27	0,26	0,25	0,24	0,23
2.5.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	95,66	95,69	95,70	95,73	95,76	95,79	96
2.6.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	100	100	100	100	100	100	100
2.7	Index pembangunan Gender	%	95,45	95,9	96,4	96,8	97,2	97,6	98
2.8	Index pemberdayaan Gender	%	64,07	64,77	65,42	66,25	67,09	67,94	64,77
2.9	Terwujudnya kota layak anak	predikat	0	0	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Nindya
3.	Pangan								
3.1.	Regulasi ketahanan pangan	Ada/ Tidak	-	-	-	-	Ada	Ada	Ada
3.2	Ketersediaan Pangan Utama	ton	10.184	10.194	10.204	10.214	10.224	10.234	10.244
3.3	Tingkat ketersediaan pangan untuk dikonsumsi	Kkal/kap	3644	3648	3672	3696	3720	3745	3768
3.4	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Poin	80	81	82	83	84	85	86
3.5	Jumlah cadangan pangan pemerintah daerah yang tersedia	%	57.735	57.735	57.735	67.735	77.735	87.735	100
3.6	Cakupan bina lumbung pangan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100
3.7	Cakupan bahan pangan segar yang aman dikonsumsi	%	NA	85	86	87	88	89	90
4.	Pertanahan								
4.1	Penguasaan dan Pengamanan tanah fasos	%	15,27	17	19	21	23	25	27
5.	Lingkungan Hidup								
5.1	IKA (Indeks Kualitas Air)	%	n.a	23	24	29	45	50	60
5.2	IKU (Indeks Kualitas Udara)	%	81,92	83	84	85	90	90	90



NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kondisi Kinerja awal (2015)	TAHUN					Kondisi Kinerja akhir (2021)
				2016	2017	2018	2019	2020	
5.3	Persentase Luas Daerah Konservasi	%	10	14	15	16	17	18	19
5.4	Rasio sampah terkelola	%	n.a	10,67	12	13	14	15	17
5.5	Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan	%	69,8	80	82	84	86	88	90
6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
6.1.	Rasio Penduduk yang memiliki KTP	%	94	95	96	96,5	97	97,5	98
6.2.	Rasio Penduduk memiliki akte kelahiran	%	37	39	48	50	52	54	55
6.3	Rasio Penerbitan Kartu Keluarga (KK)	%	n.a	33,33	36	39	41	44	46
6.4	Rasio Penduduk meninggal dunia mengurus Akte Kematian	%	8	12	53	54	55	56	57
6.5	ratio anak < umur 17 tahun memiliki Kartu Identitas Anak	%	0	30	40	55	65	70	85
7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
7.1	Persentase PKK aktif	%	71,01	100	100	100	100	100	100
7.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	kelompok	56,52	13,25	13,38	13,38	13,5	13,5	13,5
7.3	Jumlah LSM	kelompok	1	1	1	1	1	1	1
7.4	LPM Berprestasi	kelompok	0	1	1	1	1	1	1
7.6	Posyandu aktif	%	83	100	100	100	100	100	100
7.7	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	33,79	35	36	38,5	39	40	42
7.8	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	%	60,93	68,47	78,70	84,18	86,34	87,98	88,64
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
8.1	Laju pertumbuhan penduduk	%	2,08	2,05	2,01	1,98	1,94	1,91	1,88
8.2	Persentase pemakaian kontrasepsi (<i>contraceptive prevalence rate</i>)	%	71,59	71,9	72,1	72,4	72,6	72,8	73
8.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	%	11,74	10,5	10,2	10	9,8	9,6	9,4
8.4	Persentase meningkatnya penggunaan MKJP	%	42,03	42,05	42,5	43	43,5	43,70	44
8.5	Persentase kelahiran pada usia remaja (15-19) (ASFR)	%	n/a	n/a	1,72	1,72	1,70	1,68	1,66
8.6	Jumlah KK Miskin yang terfasilitasi Program UPPKS	%	n/a	n/a	72	82	92	112	112
9.	Perhubungan								
9.1	Persentase ketersediaan Angkutan Umum	%	NA	72	77	81	85	92	98
9.2	Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan	%	NA	35	40	50	65	75	85
9.3	Persentase ketersediaan prasarana dan sarana perhubungan	%	NA	25	60	75	85	90	95
9.4	Jumlah pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas	kali	95	85	75	65	55	45	35
10.	Komunikasi dan Informatika								
10.1	Indeks keterbukaan informasi publik	%	-	-	65	75	85	95	55



NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kondisi Kinerja awal (2015)	TAHUN					Kondisi Kinerja akhir (2021)
				2016	2017	2018	2019	2020	
10.2	Persentase penyelesaian pengaduan pelayanan publik	%	-	-	100	100	100	100	100
10.3	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat	%	-	50	55	60	65	70	75
10.4	Rataan kunjungan ke website info publik solok per hari	Kunjungan	-	250	275	300	325	400	425
10.5	Jumlah sistem informasi manajemen yang digunakan Pemda	Sistem	-	3	3	6	9	12	15
10.6	Jumlah sistem yang diintegrasikan	Sistem	-	0	0	1	2	3	4
10.7	Persentase ketersediaan infrastruktur TIK	%	-	33	50	66	75	85	95
11.	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah								
11.1	Persentase koperasi aktif	%	85,95	90	90	95	95	95	95
11.2	Jumlah Koperasi yang melakukan diversifikasi Usaha	unit	8	8	10	12	14	16	18
11.3	Jumlah UMKM	unit	1.551	1.665	1.777	1.889	2.002	2.114	2.226
11.4	Jumlah BPR/LKM	unit	6	11	11	11	11	11	11
11.5	Pertumbuhan omzet UMKM	%	9	10	10	10	10	10	10
11.6	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	99,8	99,8	99,7	99,7	99,7	99,6	99,6
11.7	Persentase modal sendiri koperasi	%	8	8	10	12	12	15	15
15.	Penanaman Modal								
15.1	Pertumbuhan penanaman modal	%	5,89	7	9	11	13	15	15
15.2	Nilai Investasi	Rp. Juta	284.435	319.415	338.580	358.895	380.429	403.254	427.450
15.3	Regulasi tentang penanaman modal	buah	0	1	1	1	1	1	1
16.	Kepemudaan dan Olahraga								
16.1	Jumlah organisasi pemuda	organisasi	23	23	23	23	23	23	23
16.2	Jumlah organisasi olahraga	organisasi	26	26	26	26	27	27	27
16.3	Peringkat PORPROV	ranking	16	10		8		5	
16.4	Jumlah Atlet berprestasi	orang	59	59	60	60	62	62	65
16.5	Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana Olahraga	%	20	25	30	40	45	50	55
17.	Statistik								
17.1.	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	%	-	-	75	80	85	90	95
18.	Kebudayaan								
18.1	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yg dilestarikan	%	44,44	44,44	55,56	66,67	88,89	100,00	100,00
18.2	Jumlah pemangku adat yang ditingkatkan kompetensi	%	100	100	100	100	100	100	100
18.3	Persentase fasilitasi penyelesaian adat	unit	7	8	10	12	13	14	15
18.4	Peningkatan jumlah penggiat seni dan budaya	%	80	80	80	80	80	80	80
19.	Perpustakaan								
19.1	Persentase kunjungan perpustakaan melalui website	%	-	-	-	35,45	46,22	60,78	71,55



NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kondisi Kinerja awal (2015)	TAHUN					Kondisi Kinerja akhir (2021)
				2016	2017	2018	2019	2020	
19.2	Persentase kepuasan masyarakat terhadap layanan perpustakaan	%	-	-	-	100	100	100	100
19.3	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Ribu orang	11.459	14.647	18.959	24.747	32.819	43.819	44.479
19.4	Jumlah penambahan koleksi bahan perpustakaan umum	Buku	15.471	16.081	17.081	18.081	19.381	20.881	22.381
20.	Kearsipan								
20.1	Persentase jumlah OPD yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku	%	n.a	16	20	24	28	33	38
20.2	Persentase jumlah ormas yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku	%	-	-	-	20	40	60	80
20.3	Jumlah SDM pengelola kearsipan	Orang	-	4	4	5	6	7	8
20.4	Persentase jumlah arsip statis yang terselamatkan	%	-	-	-	100	100	100	100
21.	Persandian								
21.1	Jumlah kejadian kebocoran informasi yang dikecualikan.	%	n.a	n.a	0	0	0	0	0
21.2	Persentase ketersediaan sarana pengamanan sistem informasi	%	n.a	n.a	25	50	75	85	90
21.3	Persentase peretasan sistem informasi/statistik website Pemko yang dapat ditanggulangi	%	n.a	n.a	60	80	85	90	90
Fokus Layanan Urusan Pilihan									
1.	Kelautan dan Perikanan								
1.1	Produksi Ikan	Ton	130,60	133,21	135,88	138,59	141,37	144,19	144,19
2.	Pariwisata								
2.1.	Kunjungan wisata	orang	112.358	125.000	150.000	175.000	250.000	275.000	300.000
2.2	Meningkatnya pendapatan pelaku industri kreatif pariwisata	%	-	-	-	10	20	20	20
2.3	Objek Wisata Yang Dikembangkan	objek	1	1	1	4	4	4	4
3.	Pertanian								
3.1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	6,15	6,15	6,15	6,15	6,4	6,4	6,4
3.2	Peningkatan Produksi komoditi Padi	%	1,06	1,06	3,31	3,78	4,24	4,53	5,26
3.3	Indeks Pertanaman	Indeks	2,61	2,61	2,64	2,67	2,70	2,72	2,75
3.4	Produktivitas Pertanian/Perkebunan - Padi - Tanaman Atsiri - Cabe - Kakao	Ton/Ha Ton/Ha Ton/Ha Ton/Ha	6,60 15 4,1 0,9	6,60 17,5 4,4 0,95	6,62 18 4,8 0,96	6,67 18,5 5,3 0,97	6,75 19 5,8 0,98	6,85 19,5 6,3 0,99	7,00 20 6,8 1
3.5	Klasifikasi kelompok tani : - Utama - Madya	orang orang	0 9	0 9	0 10	0 11	0 12	0 13	1 14
3.6	Pelaku Usaha Agribisnis	Kelompok	70	72	75	79	83	87	91
3.7	Pertumbuhan omset agribisnis	%	NA	NA	NA	5	7,5	10	12,5
3.8	Tingkat Populasi ternak - Sapi - kambing - Unggas	Ekor Ekor Ekor	2.086 2.041 205.719	2.128 2.061 209.833	2.171 2.082 214.030	2.214 2.103 218.311	2.258 2.124 222.677	2.303 2.145 227.130	2.349 2.166 227.130



NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kondisi Kinerja awal (2015)	TAHUN					Kondisi Kinerja akhir (2021)
				2016	2017	2018	2019	2020	
3.9	Pencegahan dan pengobatan penyakit hewan	Ekor/Tahun	798	1205	1325	1400	1500	1600	1650
4.	Energi dan Sumber Daya Mineral								
4.1	Persentase pengawasan galian C, penyaluran BBM dan gas	%	25	40	-	-	-	-	-
5.	Perdagangan								
5.1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	25,25	25,56	25,65	25,73	25,8	25,87	25,93
5.2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	90	100	100	100	100	100	100
5.3	Pembangunan pasar pagi	unit	0	0	0	1	1	1	1
5.4	Revitalisasi Pasar Raya	unit	2	2	1	2	1	1	0
6.	Perindustrian								
6.1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	5,99	6,19	6,29	6,38	6,45	6,51	6,65
6.2	Jumlah Produk IKM unggulan yang masuk pasar lokal dan regional	produk	0	0	1	15	15	15	15
6.3	Jumlah UKM yang difasilitasi kepemilikan sertifikasi hak kekayaan intelektual	Unit	24	27	30	35	40	45	50
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah									
1.	Administrasi Pemerintahan								
1.1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	23,08	38,46	53,85	69,23	84,62	100	100
1.2	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Ada/ Tidak	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.3	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	-	-	75	75	75	80	80
1.4	Hasil Evaluasi LKj	Nilai	CC	CC	B	BB	BB	A	A
1.5	Hasil Evaluasi LPPD	Nilai	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
1.6	Persentase penanganan konflik sosial	%	100	100	100	100	100	100	100
1.7	Persentase organisasi kemasyarakatan yang terverifikasi	%	53	55,56	57	58,06	58,40	58,73	59,06
1.8	Persentase partisipasi politik masyarakat	%	70,41	-	-	-	72	-	75
1.9	Persentase Parpol yang memahami tentang pengelolaan bantuan keuangan	%	60	70	80	90	100	100	100
2.	Pengawasan								
2.1	Persentase kerugian daerah	%	0,20	0,20	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18
2.2	Unit kerja Pemko yang mendapatkan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBMM)	n.a	n.a	n.a	3	3	4	5	5
2.3	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	CC	CC	CC	B	B	B	B
3.	Keuangan								
3.1	Opini BPK	Opini	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	Perencanaan								
4.1	Persentase usulan masyarakat yang diakomodasi dalam RKPD	%	65,32	67	70	72	73	75	75



NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kondisi Kinerja awal (2015)	TAHUN					Kondisi Kinerja akhir (2021)
				2016	2017	2018	2019	2020	
4.2	Persentase partisipasi komponen masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan tahunan	%	66,67	68	69	70	72	75	75
4.3	Persentase dokumen Renstra SKPD yang selaras dengan RPJMD	%	na	95	95	-	-	-	100
4.4	Persentase dokumen Renja SKPD yang selaras dengan RKPD	%	na	95	95	95	95	95	95
4.5	Persentase dokumen RKPD yang selaras dengan RPJMD	%	na	100	100	100	100	100	100
4.6	Tingkat pencapaian target sasaran strategis RPJMD	%	59,09	70	80	83	87	90	90
5.	Kepegawaian								
5.1	Indeks profesionalitas pegawai	Nilai	n.a	n.a	82	84	85	87	88
5.2	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	%	0,67	0,6	0,6	0,5	0,4	0,3	0,3
5.3	Indeks kepuasan masyarakat	nilai	n.a	Baik	Baik	Baik	Baik	Amat Baik	Amat Baik
5.4	Persentase kelengkapan data aparatur melalui SIMPEG	%	90	90	100	100	100	100	100
5.6	Jumlah regulasi penilaian kinerja aparatur	Regulasi	n.a	n.a	n.a	3	-	-	3
5.6	Jumlah sistem informasi penilaian kinerja	Sistem	n.a	n.a	n.a	1	1	-	1
6.	Pendidikan dan Pelatihan								
6.1	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi								
	- Kompetensi Manajerial	%	60,58	61	62	63	64	65	66
	- Kompetensi teknis	%	13,5	18	22	27	32	36	41
7.	Penelitian Pengembangan								
7.1	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	%	n.a	n.a	20	40	50	60	75
7.2	Persentase inovasi public yang dilaksanakan	%	n.a	n.a	10	8	5	4	3
7.3	Inovasi masyarakat yang lolos seleksi provinsi	inovator	n.a	n.a	5	5	5	5	5
7.4	Persentase pelaksanaan sistem inovasi daerah	%	n.a	n.a	20	30	6	85	100



BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan daerah Kota Solok untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini berisi penjabaran Visi, Misi, dan Program Walikota/Wakil Walikota periode 2016-2021, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kota Solok Tahun 2005-2025 dan RTRW Kota Solok Tahun 2012-2031, serta memperhatikan RPJMD Provinsi Sumatera Barat, dan RPJM Nasional.

Selain itu, Perubahan RPJMD Kota Solok Tahun 2016-2021 memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Perubahan RPJMD Kota Solok Tahun 2016-2021 harus memuat kaidah pelaksanaan. Di samping itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Perubahan RPJMD Kota Solok Tahun 2016-2021 harus mencakup pedoman transisi.

10.1 Pedoman Transisi

Pada saat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok Tahun 2022-2026 belum tersusun dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD 2016 - 2021 berakhir, maka Perubahan RPJMD 2016 - 2021 menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) periode berikutnya dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Solok Tahun 2005-2025 dan RPJMN Tahun 2020-2025.

10.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau patokan dalam pelaksanaan Perubahan RPJMD Kota Solok Tahun 2016-2021. Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan adalah supaya tercipta koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektifitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan. Lebih jauh lagi supaya tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kaidah pelaksanaan RPJMD Kota Solok Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Walikota Solok berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Solok Tahun 2016-2021 kepada masyarakat.
2. Seluruh Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan RPJMD Kota Solok tahun 2016-2021;
3. Seluruh Perangkat Daerah agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam RPJMD Kota Solok Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya;
4. Seluruh Perangkat Daerah agar segera menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD Kota Solok Tahun 2016-2021 setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Solok Tahun 2016-2021 ini;
5. Penetapan target indikator kinerja daerah dalam RPJMD 2016-2021 ini dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah daerah dengan DPRD;
6. RPJMD Kota Solok Tahun 2016-2021 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun mulai Tahun 2016-2021;
7. Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, RKPD Kota Solok merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya, yang sebelumnya dirumuskan kedalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
8. Program-Program yang dituangkan dalam RPJMD Kota Solok Tahun 2016-2021 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Solok;
9. Program-program dalam RPJMD adalah program yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.



10.3 Pengendalian dan Evaluasi

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021, dipandang perlu melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021. Walikota melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD dan indikator kinerja program pada setiap tahunnya dan lima tahunan atau akhir periode RPJMD.

Apabila dalam periode pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021 dihadapkan pada hal-hal di luar kendali Pemerintah Kota Solok, maka konsepsi strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada DPRD Kota Solok untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

Solok, 15 Desember 2017

WALIKOTA SOLOK



ZUL ELFIAN